



BAGIAN
#1

METADATA INDIKATOR STATISTIK SEKTORAL

KABUPATEN PURBALINGGA



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PURBALINGGA
2023



METADATA INDIKATOR STATISTIK SEKTORAL KABUPATEN PURBALINGGA BAGIAN 1

Pengarah:

Dra. Jiah Palupi Twihantarti, M.M

Penanggung jawab:

Sapto Suhardiyo, S.STP, S.T

Penyusun:

Dra. Jeni Preandini, M.Si

Fian Setyaningsih, S.Si

Tris Dianasari, S.Si

Wely Andika, S.Kom

Annas Dian Wibowo, S.Kom

Sugiono, S.T

Penata Layout:

Hanifah Khairunisa Shofiati, S.T

Copy Right: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Purbalingga
Diterbitkan Oleh : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Purbalingga
Jln. Letkol Isdiman No 17 A, Purbalingga

Metadata Indikator Statistik Sektoral Kabupaten Purbalingga

Bagian #1 : 776 halaman

Ukuran Buku : 210 mm x 148,5 mm

ISBN : *** _ *** _ **** _ ** _ *



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pemurah dan Maha Pemberi, sehingga buku meta data sektoral Kabupaten Purbalingga bisa terselesaikan dengan baik, tanpa adanya halangan yang berarti. Kami juga ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya buku meta data sektoral, semoga buku ini mendapatkan kebermanfaatannya dimasa depan.

Metadata indikator menurut Pembina Data Statistik (BPS) adalah sekumpulan atribut informasi yang memberikan gambaran/dokumentasi dasar terbentuknya suatu indikator, interpretasi terhadap suatu indikator, variabel pembentuk indikator, rumus yang digunakan dalam metode penghitungan indikator, dan informasi lain yang perlu untuk diketahui dalam upaya memberikan pemahaman yang tepat dalam menggunakan nilai indikator yang dihasilkan.

Data statistik sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan. Manfaat yang akan diperoleh antara lain adalah untuk mengetahui kecenderungan (trend) yang akan terjadi pada masa datang, menentukan prioritas, sebagai acuan dalam evaluasi dan pengendalian kegiatan, serta untuk memperkirakanantisipasi terhadap resiko dan hambatan yang akan dihadapi dalam pelaksanaan.

Meta data statistik sektoral Kabupaten Purbalingga nantinya bisa menjadi rujukan bagi organisasi pemerintah daerah (OPD) dalam pengisian data sektoral agar data benar-benar valid dan kontinu, walaupun terjadi pergeseran staf, mutasi dan promosi. Dengan menjaga validitas dan kontinuitas data, pemerintah dan masyarakat bisa



menggunakan data tersebut sesuai dengan kepentingannya. Meta data menjadi langkah penting dalam penyusunan data yang berkualitas.

Ibarat kata pepatah tak ada gading yang tak retak, begitu pula dengan buku metadata ini, tentunya jauh dari kesempurnaan, untuk itu saran, kritik dan masukan senantiasa kami harapkan bagi semua pihak yang membaca buku ini. Agar kedepan bisa kami review guna perbaikan dimasa yang akan datang.

Akhirul Kalam, Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Purbalingga, Agustus 2023
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Dra. Jiah Palupi Twihantarti, M.M



DAFTAR ISI

| | |
|------------------------|-----|
| KATA PENGANTAR | 3 |
| DAFTAR ISI..... | 5 |
| PENDAHULUAN..... | 6 |
| SEKRETARIAT DPRD | 10 |
| INSPEKTORAT..... | 25 |
| BAPPELITBANGDA | 45 |
| BAKEUDA | 82 |
| BKPSDM..... | 202 |
| KESBANGPOL..... | 286 |
| BPBD | 335 |
| DINDIKBUD | 404 |
| DINKES..... | 519 |
| DPUPR..... | 684 |



PENDAHULUAN

Latar Belakang:

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang statistik. Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia juga mengamanatkan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai walidata tingkat daerah dalam kerangka penyelenggaraan Satu Data Indonesia untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data dan Menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.

Metadata Indikator Statistik menurut PERBAN BPS Nomor 5 Tahun 2020:

Indikator variabel kendali yang dapat digunakan untuk mengukur perubahan pada sebuah kejadian atau kegiatan. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan bahwa indikator merupakan sesuatu yang dapat memberikan petunjuk atau keterangan. Indikator juga bisa diartikan sebagai setiap ciri, karakteristik, atau ukuran yang bisa menunjukkan perubahan yang terjadi pada sebuah bidang tertentu. Metadata indikator adalah sekumpulan atribut informasi yang memberikan gambaran/dokumentasi dasar terbentuknya suatu indikator, interpretasi terhadap suatu indikator, variabel pembentuk indikator, rumus yang digunakan dalam metode penghitungan indikator, dan informasi lain yang perlu untuk diketahui dalam upaya memberikan pemahaman yang tepat dalam menggunakan nilai indikator yang dihasilkan.



| No | Nama Atribut | Penjelasan |
|----|----------------------------------|--|
| 1 | Nama Indikator | Nama atau istilah yang digunakan untuk menyebut suatu nilai hasil dari penghitungan variabel |
| 2 | Konsep | Rancangan, ide, atau pengertian tentang sesuatu |
| 3 | Definisi | Penjelasan tentang data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan data tertentu dengan data yang lain |
| 4 | Interpretasi | Interpretasi diartikan sebagai tafsiran, penjelasan, makna, arti, kesan, pendapat, atau pandangan teoritis terhadap suatu objek yang dihasilkan dari pemikiran mendalam dan sangat dipengaruhi oleh latar belakang orang yang melakukan interpretasi |
| 5 | Metode/Rumus Perhitungan | Metode atau rumus penghitungan indikator merupakan prosedur atau cara yang ditempuh untuk menghitung suatu indikator yang dihasilkan dalam kegiatan statistik |
| 6 | Ukuran | Ukuran adalah unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan |
| 7 | Satuan | Satuan yang dimaksud merupakan besaran tertentu dalam data yang digunakan untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan |
| 8 | Klasifikasi | Klasifikasi merupakan penggolongan data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina data atau dibakukan secara luas |
| 9 | Publikasi Ketersediaan Indikator | Judul publikasi utama yang memuat indikator dimaksud sebagai konten publikas |



| | Pembangun | |
|----|--|--|
| 10 | Nama Indikator Pembangun | Indikator pembangun merupakan suatu indikator yang menjadi subkomponen dalam penghitungan indikator komposit |
| 11 | Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Kode kegiatan statistik yang menghasilkan indikator yang dilaporkan |
| 12 | Nama Variabel Pembangun | Nama-nama variabel yang digunakan untuk menghasilkan suatu nilai indikator |
| 13 | Level Estimasi | Level terendah dari penyajian indikator yang dihasilkan dari kegiatan statistik terkait |
| 14 | Apakah Indikator Dapat diakses Umum | Confidential status merupakan status akses terhadap indikator terkait, apakah dapat dipublikasikan untuk umum atau tidak |

Ruang Lingkup dan Batasan:

Ruang Lingkup publikasi ringkasan metadata indikator statistik sektoral ini dibatasi pada konten dan tahun. Pembatasan tersebut dilakukan mengingat banyaknya indikator statistik sektoral dari tahun ke tahun maupun isian dari metadata indikator statistik sektoral. Pembatasan tahun dilakukan pada pengumpulan tahun 2022, sedangkan pembatasan pada konten metadata indikator statistik sektoral ditujukan pada tiga kelompok informasi yaitu identitas Indikator, data, dan metodologi. Walaupun demikian, dari tiga kelompok informasi tersebut ada 14 informasi yang disajikan yaitu:

1. Identitas Indikator
 - a. Konsep dan Definisi
 - b. Unit Penyelenggara
 - c. Kelompok Indikator
 - d. Tujuan dan Kegunaan
 - e. Interpretasi



2. Data

- a. Data yang dikumpulkan
- b. Periodisasi

3. Metodologi

- a. Unit Observasi
- b. Tingkat Penyajian
- c. Rumus



METADATA INDIKATOR STATISTIK SEKTORAL

SEKRETARIAT DPRD



Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan sekretariat DPRD

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan sekretariat DPRD adalah indikator yang digunakan untuk mengetahui pengukuran kinerja pelayanan kesekretariatan kepada pimpinan dan anggota DPRD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Unit Penyelenggara

Sekretariat DPRD

Kelompok Indikator

Aspek Unsur Pendukung Pemerintahan Semakin tinggi nilai indeks kepuasan pimpinan dan anggota DPRD menunjukkan tingkat kepuasan anggota DPRD atas layanan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD termasuk dalam kategori baik, yang berarti standar kinerja layanan Sekretariat DPRD sesuai harapan dan dapat diterima oleh anggota DPRD.

Interpretasi

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Data Hasil Survei Atas Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Kuisisioner

Ukuran

Indeks

Satuan

Tanpa satuan

Apakah Indikator Dapat Diakses

Tidak

Umum



Cakupan Pelayanan Penyelenggaraan Kesekretariatan DPRD

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Cakupan Pelayanan Penyelenggaraan Kesekretariatan DPRD adalah persentase capaian kinerja pelayanan penyelenggaraan kesekretariatan DPRD yang merupakan rata-rata dari cakupan fasilitasi pelayanan persidangan dan perundang-undangan dan cakupan fasilitasi pelayanan penganggaran dan pengawasan |
| Unit Penyelenggara | Sekretariat DPRD |
| Kelompok Indikator | Aspek Unsur Pendukung Pemerintahan |
| Interpretasi | Semakin tinggi persentase capaian menunjukkan peningkatan capaian standar kualitas pelayanan penyelenggaraan kesekretariatan DPRD sesuai tugas pokok dan fungsinya. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Data Hasil Survei Atas Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|---------------------------|---------------------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | $\frac{Cakupan1 + Cakupan2}{2}$ |
|---------------------------|---------------------------------|

Keterangan:

Cakupan1 = Cakupan fasilitasi pelayanan persidangan dan



perundang-undangan

Cakupan2 = Cakupan fasilitasi
pelayanan penganggaran dan
pengawasan

Persentase

%

Ukuran

Satuan

Apakah Indikator

Dapat

Tidak

Diakses Umum



Cakupan fasilitasi pelayanan persidangan dan perundang-undangan

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Cakupan fasilitasi pelayanan persidangan dan perundang-undangan adalah persentase capaian kinerja sub kegiatan yang terkait dengan non penganggaran dan pengawasan |
| Unit Penyelenggara | Sekretariat DPRD |
| Kelompok Indikator | Aspek Unsur Pendukung Pemerintahan |
| Interpretasi | Semakin tinggi persentase capaian menunjukkan peningkatan kualitas pelayanan penyelenggaraan kesekretariatan DPRD di sub kegiatan non penganggaran dan pengawasan, antara lain fasilitasi Bapemperda (Badan Pembentukan Peraturan Daerah), Badan Musyawarah, Badan Kehormatan dan Panitia Khusus. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Data Hasil Survei Atas Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|---------------------------|---|
| Metode/Rumus Penghitungan | $\frac{\text{Capaian kinerja}}{\text{target}} \times 100\%$ |
|---------------------------|---|

Keterangan:



Capaian kinerja = Capaian kinerja
sub kegiatan non penganggaran
dan pengawasan

Ukuran
Satuan
Apakah Indikator Dapat Diakses
Umum

Persentase
%
Tidak



Cakupan fasilitasi pelayanan penganggaran dan pengawasan

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Cakupan fasilitasi pelayanan penganggaran dan pengawasan adalah persentase capaian kinerja sub kegiatan yang terkait dengan penganggaran dan pengawasan

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Sekretariat DPRD
Aspek Unsur Pendukung Pemerintahan

Interpretasi

Semakin tinggi persentase capaian menunjukkan peningkatan kualitas pelayanan penyelenggaraan kesekretariatan DPRD di bidang sub kegiatan penganggaran dan pengawasan antara lain Badan Anggaran dan Komisi-Komisi DPRD.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Data Hasil Survei Atas Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{\text{Capaian kinerja}}{\text{target}} \times 100\%$$

Keterangan:

Capaian kinerja = Capaian kinerja sub kegiatan penganggaran dan pengawasan

Ukuran

Persentase

Satuan

%



Apakah Indikator Dapat Diakses Tidak
Umum



Jumlah Anggota DPRD Laki-laki

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Anggota DPRD Laki-laki adalah anggota DPRD Purbalingga yang berjenis kelamin Laki-laki |
| Unit Penyelenggara | Sekretariat DPRD |
| Kelompok Indikator | Aspek Unsur Pendukung Pemerintahan |
| Interpretasi | Menunjukkan jumlah anggota DPRD Purbalingga yang berjenis kelamin Laki-laki |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Pengumpulan Data |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | orang |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Jumlah Anggota DPRD Perempuan

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Anggota DPRD Perempuan adalah anggota DPRD Purbalingga yang berjenis kelamin Perempuan |
| Unit Penyelenggara | Sekretariat DPRD |
| Kelompok Indikator | Aspek Unsur Pendukung Pemerintahan |
| Interpretasi | Menunjukkan jumlah anggota DPRD Purbalingga yang berjenis kelamin Perempuan |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga |
| Periodisasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Pengumpulan Data |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | orang |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Jumlah Fraksi

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Fraksi adalah pengelompokan anggota DPRD yang terdiri atas kekuatan sosial politik sebagai bentuk representatif masyarakat |
| Unit Penyelenggara Kelompok Indikator | Sekretariat DPRD Aspek Unsur Pendukung Pemerintahan |
| Interpretasi | Jumlah fraksi menunjukkan jumlah pengelompokan anggota DPRD Kabupaten Purbalingga berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum dengan minimal jumlah anggota tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga |
| Periodisasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Tata Tertib DPRD |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | fraksi |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Jumlah Peraturan Daerah

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. |
| Unit Penyelenggara | Sekretariat DPRD |
| Kelompok Indikator | Aspek Unsur Pendukung Pemerintahan |
| Interpretasi | Jumlah peraturan daerah menunjukkan jumlah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Semakin banyak jumlah peraturan daerah, semakin kompleks pula aturan dan regulasi yang berlaku di tingkat daerah. Hal ini dapat menimbulkan tantangan dalam implementasi dan penegakan hukum . |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Jumlah Produk yang Dihasilkan DPRD Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Pengumpulan Data |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | buah |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Jumlah Keputusan DPRD

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Keputusan DPRD adalah pengambilan keputusan dalam rapat DPRD pada dasarnya diusahakan sejauh mungkin dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat, apabila tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak |
| Unit Penyelenggara | Sekretariat DPRD |
| Kelompok Indikator | Aspek Unsur Pendukung Pemerintahan |
| Interpretasi | Jumlah Keputusan DPRD menunjukkan jumlah Keputusan DPRD yang ditetapkan berdasarkan hasil Rapat Paripurna DPRD Purbalingga. Semakin banyak jumlah Keputusan DPRD dapat mencerminkan tingkat kompleksitas kebijakan dan regulasi yang dihadapi oleh daerah. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Jumlah Produk yang Dihasilkan DPRD Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Pengumpulan Data |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | buah |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Jumlah Keputusan Pimpinan

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Keputusan Pimpinan adalah pengambilan keputusan dalam rapat Pimpinan DPRD pada dasarnya diusahakan sejauh mungkin dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. |
| Unit Penyelenggara | Sekretariat DPRD |
| Kelompok Indikator | Aspek Unsur Pendukung Pemerintahan |
| Interpretasi | Menunjukkan jumlah Keputusan Pimpinan DPRD yang ditetapkan berdasarkan hasil Musyawarah Pimpinan DPRD. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Jumlah Produk yang Dihasilkan DPRD Kabupaten Purbalingga |
| Periodisasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Pengumpulan Data |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | buah |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Tidak |



Jumlah Persetujuan Bersama (Nota Kesepakatan)

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Persetujuan Bersama (Nota Kesepakatan) adalah kesepakatan di antara pihak untuk berunding dalam rangka membuat perjanjian di kemudian hari, apabila hal-hal yang belum pasti telah dapat dipastikan |
| Unit Penyelenggara | Sekretariat DPRD |
| Kelompok Indikator | Aspek Unsur Pendukung Pemerintahan |
| Interpretasi | Jumlah Persetujuan Bersama (Nota Kesepakatan) menunjukkan jumlah persetujuan bersama hasil pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan antara DPRD Purbalingga dengan pihak terkait lainnya. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Jumlah Produk yang Dihasilkan DPRD Kabupaten Purbalingga |
| Periodisasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Pengumpulan Data |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | buah |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Tidak |



METADATA INDIKATOR STATISTIK SEKTORAL

INSPEKTORAT



Jumlah Obyek Pemeriksaan yang diperiksa

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Obyek Pemeriksaan adalah Obyek Pemeriksaan Objek pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat Daerah dan dituangkan dalam SK Bupati Purbalingga tentang PKPT (program kerja pengawasan tahunan) (lingkup: opd, kecamatan, desa)

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Inspektorat
Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan
Banyaknya objek pengawasan diusahakan berdasar dari PKPT (program kerja pengawasan tahunan) (lingkup: opd, kecamatan, desa yang paling beresiko). Dengan jumlah kegiatan penugasan yang akan dilaksanakan dituangkan dalam PKPT satu tahun.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Data Bidang Pengawasan Kabupaten Purbalingga

Periode/sasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Data Tahunan sesuai jumlah opd yang tercantum pada SK terbit setiap awal tahun

Ukuran

Jumlah

Satuan

nilai

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum

Tidak



Jumlah Temuan Hasil Pemeriksaan

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Jumlah Temuan Hasil Pemeriksaan adalah Jumlah temuan hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah(APIP) |
| Unit Penyelenggara | Inspektorat |
| Kelompok Indikator | Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | Temuan Pemeriksaan APIP diharapkan menjadi peningkatan sistem pengawasan dalam lingkup Pemerintah Daerah.Semakin sedikit jumlah temuan tersebut bisa disebabkan fungsi pengawasan Inspektorat semakin baik dan optimal.Sebaliknya semakin banyak jumlah temuan menggambarkan fungsi pengawasan Inspektorat semakin kurang baik atau buruk dan kurang optimal. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Data Bidang Pengawasan Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|---|
| Metode/Rumus Penghitungan | Jumlah Temuan dari hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Laporan |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Tidak |



Jumlah Aduan yang masuk ke Inspektorat

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Jumlah Aduan adalah Jumlah pengaduan masyarakat yang masuk yang ditujukan ke inspektorat terkait tata kelola pemerintahan di Pemkab Purbalingga |
| Unit Penyelenggara | Inspektorat |
| Kelompok Indikator | Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | Semakin banyaknya jumlah aduan yang masuk menunjukkan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan good governance, clean government, dan pelayanan publik yang baik |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Data Bidang Pengawasan Kabupaten Purbalingga |
| Periodisasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|---|
| Metode/Rumus Penghitungan | Data jumlah aduan yang masuk ke Inspektorat |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | laporan |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Tidak |



Jumlah Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|--|--|
| Konsep dan Definisi | Jumlah Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP ditambah Jumlah Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK adalah Jumlah Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP dan BPK meliputi audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan |
| Unit Penyelenggara Kelompok Indikator | Inspektorat Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | Hasil rekomendasi dari pemeriksaan APIP dan BPK menunjukkan berjalannya pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Data Bidang Pengawasan Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|---------------------------|--|
| Metode/Rumus Penghitungan | Jumlah Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP + Jumlah Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK |
| Ukuran | Jumlah |



| | | | |
|--------------|-----------|-------|-------------|
| Satuan | | | rekomendasi |
| Apakah | Indikator | Dapat | Tidak |
| Diakses Umum | | | |



Jumlah Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Jumlah Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP adalah Jumlah rekomendasi Hasil pemeriksaan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) |
| Unit Penyelenggara Kelompok Indikator | Inspektorat Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | Hasil rekomendasi dari pemeriksaan APIP menunjukkan berjalannya pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Data Bidang Pengawasan Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--|
| Metode/Rumus Penghitungan | Data jumlah rekomendasi Hasil pemeriksaan APIP |
| Ukuran Satuan | Jumlah rekomendasi |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Tidak |



Jumlah Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jumlah Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK adalah Jumlah rekomendasi Hasil pemeriksaan Badan Pengawas Keuangan (BPK)

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Inspektorat
Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan

Interpretasi

Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK diharapkan mampu membuat OPD/obrik yang diperiksa lebih disiplin dalam pengelolaan sistem pemerintahan, baik administrasi maupun keuangan

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Data Bidang Pengawasan Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Data jumlah rekomendasi Hasil pemeriksaan BPK

Ukuran

Jumlah

Satuan

rekomendasi

Apakah Indikator Dapat
Diakses Umum

Tidak



Jumlah Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang Selesai Ditindaklanjuti

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Jumlah Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP yang ditindaklanjuti ditambah Jumlah Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti adalah Jumlah Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP dan BPK yang ditindaklanjuti |
| Unit Penyelenggara | Inspektorat |
| Kelompok Indikator | Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | Semakin banyak rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti, maka akan mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean government). |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Data Bidang Pengawasan Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--|
| Metode/Rumus Penghitungan | Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan APIP yang selesai ditindaklanjuti + Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang selesai ditindaklanjuti |
| Ukuran Satuan | Jumlah rekomendasi |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Tidak |



Jumlah Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP yang ditindaklanjuti

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Jumlah Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP yang ditindaklanjuti adalah Jumlah rekomendasi Hasil pemeriksaan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang ditindaklanjuti |
| Unit Penyelenggara Kelompok Indikator | Inspektorat Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | Rekomendasi APIP diharapkan dapat memperbaiki pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada entitas yang bersangkutan |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Data Bidang Pengawasan Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|---|
| Metode/Rumus Penghitungan | Data jumlah rekomendasi Hasil pemeriksaan APIP yang ditindaklanjuti |
| Ukuran Satuan | Jumlah rekomendasi |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Tidak |



Jumlah Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Jumlah Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti adalah Jumlah rekomendasi Hasil pemeriksaan Badan Pengawas Keuangan (BPK) yang ditindaklanjuti |
| Unit Penyelenggara | Inspektorat |
| Kelompok Indikator | Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | Rekomendasi BPK diharapkan dapat memperbaiki pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada entitas yang bersangkutan |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Data Bidang Pengawasan Kabupaten Purbalingga |
| Periodisasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--|
| Metode/Rumus Penghitungan | Data jumlah rekomendasi Hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | rekomendasi |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Tidak |



Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang Selesai Ditindaklanjuti

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang Selesai Ditindaklanjuti adalah Presentasi rekomendasi hasil pemeriksaan APIP dan BPK yang selesai ditindaklanjuti baik yang bersifat administrasi maupun keuangan |
| Unit Penyelenggara | Inspektorat |
| Kelompok Indikator | Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | Semakin tinggi Persentase menunjukkan semakin banyak hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti.Semakin banyak Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan APIP dan BPK yang selesai ditindaklanjuti diharapkan dapat memperbaiki pengelolaan dan tanggung jawab administrasi maupun keuangan |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Data Bidang Pengawasan Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | $\frac{JRHPT}{JRHP} \times 100\%$ |
|---------------------------|-----------------------------------|

Keterangan:



| | | | |
|--------------|-----------|-------|---|
| | | | JRHPT = Jumlah Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang Selesai Ditindaklanjuti |
| | | | JRHP = Jumlah Rekomendasi Hasil Pemeriksaan |
| Ukuran | | | Persentase |
| Satuan | | | % |
| Apakah | Indikator | Dapat | Tidak |
| Diakses Umum | | | |



Nilai Maturitas SPIP

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Nilai Maturitas SPIP adalah Tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. |
| Unit Penyelenggara | Inspektorat |
| Kelompok Indikator | Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | Semakin tinggi nilai maturitas SPIP menunjukkan kualitas penyelenggaraan SPIP yang semakin baik dengan interval nilai : 0(belum ada), 1,0 s/d 2,0(rintisan), 2,0 s/d 3,0(berkembang), 3,0 s/d 4,0(terdefinisi), 4,0 s/d 4,5((terkelola dan terukur), 4,5 s/d 5,0(optimum) |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Data Bidang Pengawasan Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Rilis BPKP (Skor interval 0-5) |
| Ukuran | Nilai |
| Satuan | Tanpa satuan |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Tingkat Maturitas SPIP

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Tingkat Maturitas SPIP adalah Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP didefinisikan sebagai kerangka kerja yang memuat karakteristik dasar yang menunjukkan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Inspektorat
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Tingkat Maturitas SPIP bertujuan untuk pembinaan dan pengukuran atas kemajuan pelaksanaan SPIP pada seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.ada 5 Kategori yaitu: Belum Ada, Rintisan, Berkembang, Terdefinisi, Terkelola, Terukur, dan Optimum

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Data Bidang Pengawasan Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan
Ukuran
Satuan
Apakah Indikator Dapat
Diakses Umum

Rilis BPKP
Tingkat
Tanpa satuan
Ya



Level Kapabilitas APIP

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Level Kapabilitas APIP adalah Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif. |
| Unit Penyelenggara | Inspektorat |
| Kelompok Indikator | Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | Semakin tinggi level kapabilitas APIP menunjukkan efektivitas penyelenggaraan SPI semakin bagus dan mampu memberikan keyakinan yang memadai dalam mencapai tujuan.Level kapabilitas APIP dikelompokkan menjadi 5 tingkatan yaitu Level 1 (initial), Level 2 (infrastructure), Level 3 (integrated), Level 4 (managed), dan Level 5 (optimizing). |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Data Bidang Pengawasan Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |



■ METODOLOGI

| | | | |
|---------------------------|-----------|-------|--------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | | | Rilis BPKP |
| Ukuran | | | Level |
| Satuan | | | Tanpa satuan |
| Apakah | Indikator | Dapat | Ya |
| Diakses Umum | | | |



Nilai MRI (Manajemen Risiko Indeks)

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | <p>Nilai MRI (Manajemen Risiko Indeks) adalah Indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko.</p> |
| Unit Penyelenggara | Inspektorat |
| Kelompok Indikator | Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | <p>Semakin tinggi nilai manajemen risiko menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mengidentifikasi, menganalisa, mengendalikan ,dan meminimalkan risiko yang mungkin terjadi dalam pencapaian tujuan organisasi. Dengan level MRI: initial (level 1), repeatable (level 2), defined (level 3), managed (level 4), optimized (level 5)</p> |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Data Bidang Pengawasan Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Rilis BPKP |
| Ukuran | Nilai |
| Satuan | Tanpa satuan |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Nilai Monitoring Capaian Kinerja Program Koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi (MCP Korsupgah)

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Nilai Monitoring Capaian Kinerja Program Koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi (MCP Korsupgah) adalah Monitoring capaian kinerja program koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi, yang dilaksanakan oleh KPK RI pada pemerintah daerah, yang meliputi delapan area intervensi sebagai bagian Reformasi Birokrasi secara Nasional. |
| Unit Penyelenggara | Inspektorat |
| Kelompok Indikator | Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | Nilai MCP menunjukkan komitmen pemerintah dalam upaya pencegahan korupsi melalui langkah dan perbaikan tata kelola pemerintahan sesuai dengan 8 area intervensi. Dengan interval nilai: 0-67,9(sangat rentan), 68-73,6 (rentan), 73,7-77,4 (waspada), 77,5-100 (terjaga). |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Data Bidang Pengawasan Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|---------------------------|-----------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Rilis KPK |
|---------------------------|-----------|



Ukuran

Satuan

Apakah Indikator

Diakses Umum

Dapat

Nilai

Tanpa satuan

Ya



METADATA INDIKATOR STATISTIK SEKTORAL

**BADAN PERENCANAAN,
PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH**



Skor Perencanaan

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Perencanaan adalah proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan |
| Unit Penyelenggara | Bappelitbangda |
| Kelompok Indikator | Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | Digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai komponen perencanaan pada penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dilakukan oleh Kemenpan RB. Berdasarkan Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021 evaluasi SAKIP meliputi: <ul style="list-style-type: none">● AA (Nilai >90-100) Sangat Memuaskan● A (Niali>80-90) Memuaskan● BB (Nilai>70-80) Sangat Baik● B (Nilai >60-70) Baik● CC (Nilai>50-60) Cukup (Memadai)● C (Nilai>30-50) Kurang● D (Nilai >0-30) Sangat Kurang |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Skor Perencanaan di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |



■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--|
| Metode/Rumus Penghitungan | Penilaian sesuai Permenpan Nomor 88 Tahun 2021, bobot nilainya 30% |
| Ukuran | Skor |
| Satuan | angka |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Jumlah Program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Program dalam RPJMD adalah program yang tercantum dan digunakan dalam RPJMD |
| Unit Penyelenggara | Bappelitbangda |
| Kelompok Indikator | Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | Program perangkat daerah memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam dokumen RPJMD beserta indikator kinerja program (<i>outcome</i>), target kinerja dan pagu indikatifnya. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Skor Perencanaan di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Jumlah Program dalam RPJMD |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Program |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Jumlah Program dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD)

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Program dalam RKPD adalah program yang tercantum dan digunakan dalam RKPD |
| Unit Penyelenggara | Bappelitbangda |
| Kelompok Indikator | Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | Program perangkat daerah memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam dokumen RKPD beserta indikator kinerja program (<i>outcome</i>), target kinerja dan pagu indikatifnya. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Skor Perencanaan di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Jumlah Program dalam RKPD |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Program |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Tingkat Keselarasan Program RKPD dengan RPJMD

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Tingkat keselarasan program RKPD dengan RPJMD adalah perbandingan jumlah program dalam RKPD dengan jumlah program dalam RPJMD |
| Unit Penyelenggara | Bappelitbangda |
| Kelompok Indikator | Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | Apabila program yang terdapat di dokumen RPJMD digunakan semua di dalam dokumen RKPD maka tingkat keselarasannya 100% (selaras) |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Skor Perencanaan di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|---------------------------|--|
| Metode/Rumus Penghitungan | Rumus untuk RPJMD 2016-2021 $\frac{\text{Jumlah Program dalam RKPD}}{\text{Jumlah Program dalam RPJMD}} \times 100\%$ |
|---------------------------|--|

Rumus untuk RPJMD 2021-2026

$$\left(\frac{P1+P2+P3}{3} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

$$P1 = \frac{\text{Jumlah Program dalam RKPD}}{\text{Jumlah Program dalam RPJMD}}$$



$$P2 = \frac{\text{Jumlah Indikator dalam RKPD}}{\text{Jumlah Indikator dalam RPJMD}}$$

$$P3 = \frac{\text{Jumlah Target dalam RKPD}}{\text{Jumlah Target dalam RPJMD}}$$

Ukuran

Persentase

Satuan

%

Apakah Indikator Dapat Ya

Diakses Umum



Jumlah Program Rencana strategis (Renstra) dengan RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Jumlah Program Renstra dengan RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia adalah banyaknya program Renstra dengan RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia |
| Unit Penyelenggara | Bappelitbangda |
| Kelompok Indikator | Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | Apabila jumlah program pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dalam dokumen Renstra mengambil semua jumlah program pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dalam dokumen RPJMD maka dokumen tersebut selaras |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Skor Perencanaan di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|---|
| Metode/Rumus Penghitungan | Jumlah Program Renstra dengan RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Program |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Jumlah Program Rencana kerja (renja) dengan RKPD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Jumlah Program Renja dengan RKPD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia adalah banyaknya program Renja dengan RKPD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia |
| Unit Penyelenggara | Bappelitbangda |
| Kelompok Indikator | Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | Apabila jumlah program pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dalam dokumen Renja mengambil semua jumlah program pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dalam dokumen RKPD maka dokumen tersebut selaras |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Skor Perencanaan di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--|
| Metode/Rumus Penghitungan | Jumlah Program Renja dengan RKPD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Program |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Persentase keselarasan program Renstra dengan RPJMD dan program Renja dengan RKPD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Persentase keselarasan program Renstra dengan RPJMD dan program Renja dengan RKPD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia adalah persentase rata-rata program Renstra dengan RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Program Renja dengan RKPD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia |
| Unit Penyelenggara | Bappelitbangda |
| Kelompok Indikator | Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | Apabila program pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dalam dokumen Renstra mengambil semua program pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dalam dokumen RPJMD maka tingkat keselarasanya 100% (selaras) |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Skor Perencanaan di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | $\frac{J1+J2}{2} \times 100\%$ |
|---------------------------|--------------------------------|



Keterangan:

J1 = Jumlah Program Renstra dengan RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

J2 = Jumlah Program Renja dengan RKPD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Persentase

%

Ukuran

Satuan

Apakah Indikator

Dapat Ya

Diakses Umum



Jumlah Program Renstra dengan RPJMD bidang Ekonomi

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Jumlah Program Renstra dengan RPJMD bidang Ekonomi adalah banyaknya program Renstra dengan RPJM bidang Ekonomi |
| Unit Penyelenggara | Bappelitbangda |
| Kelompok Indikator | Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | Apabila jumlah program pada bidang ekonomi dalam dokumen Renstra mengambil semua jumlah program pada bidang ekonomi dalam dokumen RPJMD maka dokumen tersebut selaras |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Skor Perencanaan di Kabupaten Purbalingga |
| Periodisasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--|
| Metode/Rumus Penghitungan | Jumlah Program Renstra dengan RPJMD bidang Ekonomi |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Program |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Jumlah Program Renja dengan RKPD bidang Ekonomi

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Jumlah Program Renja dengan RKPD bidang Ekonomi adalah banyaknya program Renja dengan RKPD Bidang Ekonomi |
| Unit Penyelenggara | Bappelitbangda |
| Kelompok Indikator | Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | Apabila jumlah program pada bidang ekonomi dalam dokumen Renja mengambil semua jumlah program pada bidang ekonomi dalam dokumen RKPD maka dokumen tersebut selaras |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Skor Perencanaan di Kabupaten Purbalingga |
| Periodisasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|---|
| Metode/Rumus Penghitungan | Jumlah Program Renja dengan RKPD bidang Ekonomi |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Program |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Persentase keselarasan program Renstra dengan RPJMD dan program Renja dengan RKPD bidang Ekonomi

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Persentase keselarasan program Renstra dengan RPJMD dan program Renja dengan RKPD bidang Ekonomi adalah persentase rata-rata dengan RPJMD bidang Ekonomi, Program Renja dengan RKPD bidang Ekonomi |
| Unit Penyelenggara | Bappelitbangda |
| Kelompok Indikator | Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | Apabila program pada bidang ekonomi dalam dokumen Renstra mengambil semua program pada bidang ekonomi dalam dokumen RPJMD maka tingkat keselarasannya 100% (selaras) |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Skor Perencanaan di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | $\frac{J1+J2}{2} \times 100\%$ |
|---------------------------|--------------------------------|

Keterangan:

J1 = Jumlah Program Renstra dengan RPJMD bidang Ekonomi

J2 = Jumlah Program Renja dengan RKPD bidang Ekonomi

Persentase

Ukuran



| | |
|-------------------------------------|----|
| Satuan | % |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Jumlah Program Renstra dengan RPJMD bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Jumlah Program Renstra dengan RPJMD bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah adalah banyaknya program Renstra dengan RPJMD bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah |
| Unit Penyelenggara | Bappelitbangda |
| Kelompok Indikator | Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | Apabila jumlah program pada bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dalam dokumen Renstra mengambil semua jumlah program pada bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dalam dokumen RPJMD maka dokumen tersebut selaras |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Skor Perencanaan di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|---|
| Metode/Rumus Penghitungan | Jumlah Program Renstra dengan RPJMD bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Program |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Jumlah Program Renja dengan RKPD bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Jumlah Program Renja dengan RKPD bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah adalah banyaknya program Renja dengan RKPD bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah |
| Unit Penyelenggara | Bappelitbangda |
| Kelompok Indikator | Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | Apabila jumlah program pada bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dalam dokumen Renja mengambil semua jumlah program pada bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dalam dokumen RKPD maka dokumen tersebut selaras |

DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Skor Perencanaan di Kabupaten Purbalingga |
| Periododesasi | Tahunan |

METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--|
| Metode/Rumus Penghitungan | Jumlah Program Renja dengan RKPD bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Program |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Persentase keselarasan program Rencana strategis (Renstra) dengan RPJMD dan program Rencana Kerja (Renja) dengan RKPD bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Persentase keselarasan program Renstra dengan RPJMD dan program Renja dengan RKPD bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah adalah persentase rata-rata program Renstra dengan RPJMD bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Program Renja dengan RKPD bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah |
| Unit Penyelenggara | Bappelitbangda |
| Kelompok Indikator | Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | Apabila program pada bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dalam dokumen Renstra mengambil semua program pada bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dalam dokumen RPJMD maka tingkat keselarasannya 100% (selaras) |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Skor Perencanaan di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |



■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan $\frac{J1+J2}{2} \times 100\%$

Keterangan:

J1 = Jumlah Program Renstra dengan RPJMD bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

J2 = Jumlah Program Renja dengan RKPD bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Ukuran Persentase

Satuan %

Apakah Indikator Dapat Diakses Ya

Umum



Jumlah Dokumen Penelitian

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Jumlah dokumen penelitian adalah jumlah dokumen tentang kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis serta penyajian data secara sistematis dan objektif, untuk memecahkan masalah atau menguji hipotesis dilakukan secara swakelola maupun kerjasama/mitra dengan pihak ke-3 |
| Unit Penyelenggara | Bappelitbangda |
| Kelompok Indikator | Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | Dokumen penelitian ini didapatkan dari semua pihak yang pernah mengajukan izin penelitian di Bappelitbangda, karena dalam hal ini setiap orang/kelompok yang melakukan penelitian di kabupaten purbalingga harus memberikan hasil penelitian ke bappelitbangda. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Penelitian dan Kelitbangsan di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Jumlah Dokumen Penelitian |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | dokumen |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Jumlah Rekomendasi Penelitian yang diterbitkan

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Jumlah rekomendasi penelitian yang diterbitkan adalah rekomendasi penelitian adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi keterangan, catatan, persetujuan terhadap usulan penelitian. |
| Unit Penyelenggara | Bappelitbangda |
| Kelompok Indikator | Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | Surat yang dikeluarkan untuk memberikan izin kepada peneliti, baik itu perorangan atau kelompok untuk melakukan penelitian atau pengambilan data dalam suatu wilayah kerja Pemerintahan Kabupaten Purbalingga. Setiap orang yang akan melakukan penelitian di Kabupaten Purbalingga harus memiliki rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bappelitbangda sesuai Standar Operasional Pelayanan (SOP). |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Penelitian dan Kelitbangsan di Kabupaten Purbalingga |
| Periododesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--|
| Metode/Rumus Penghitungan | Jumlah Rekomendasi Penelitian yang diterbitkan |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | dokumen |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Jumlah/Frekuensi Diseminasi Hasil penelitian dan pengembangan (Litbang)

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Jumlah/frekuensi diseminasi hasil litbang adalah banyaknya diseminasi hasil litbang |
| Unit Penyelenggara | Bappelitbangda |
| Kelompok Indikator | Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | Banyaknya hasil dari penelitian dan pengembangan (litbang) yang sudah dinyatakan layak maka akan di diseminasikan/ disosialisasikan sehingga bisa ditiru ataupun dimanfaatkan oleh masyarakat/ perangkat daerah. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Penelitian dan Kelitbangan di Kabupaten Purbalingga |
| Periododesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|---|
| Metode/Rumus Penghitungan | Jumlah/Frekuensi Diseminasi Hasil Litbang |
| Ukuran | Frekuensi |
| Satuan | kali |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Jumlah Inovasi dan Invensi

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------------------------|---|
| Konsep dan Definisi | <p>Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produksi.</p> <p>Invensi adalah suatu ciptaan atau perancangan baru yang belum ada sebelumnya yang memperkaya khazanah serta dapat dipergunakan untuk menyempurnakan atau memperbarui ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada.</p> |
| Unit Penyelenggara Kelompok Indikator | <p>Bappelitbangda</p> <p>Aspek Unsur Penunjang</p> <p>Pemerintahan</p> |
| Interpretasi | <p>Seluruh hasil penelitian, pengembangan atau penciptaan hal baru yang dibuat oleh perangkat daerah/masyarakat untuk meningkatkan kinerja secara individu maupun kelompok.</p> |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Penelitian dan Kelitbangan di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |



■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Jumlah Inovasi dan Invensi |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | inovasi |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Jumlah Inovasi dan Inovensi yang diterapkan

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Inovasi dan inovensi yang diterapkan adalah inovasi dan inovensi yang telah dinyatakan sebagai bentuk perubahan/pembaruan dan digunakan dengan efektif untuk memecahkan masalah atau meningkatkan kinerja. |
| Unit Penyelenggara | Bappelitbangda |
| Kelompok Indikator | Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | seluruh inovasi dan inovensi yang telah dibuat baik dari Perangkat Daerah/masyarakat dan diterapkan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kinerja pelayanan perangkat daerah maupun memecahkan masalah/meningkatkan usaha bagi masyarakat. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Penelitian dan Kelitbangsan di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|---|
| Metode/Rumus Penghitungan | Jumlah Inovasi dan Inovensi yang diterapkan |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | inovasi |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Jumlah Inovasi dan Invensi yang didiseminasikan

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Inovasi dan invensi yang didiseminasikan adalah diseminasi adalah suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Bappelitbangda
Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan kegiatan menginformasikan seluruh hasil inovasi maupun invensi baik yang dihasilkan dari penilaian krenova tingkat kabupaten/provinsi/nasional, inovasi dari kerjasama dengan perguruan tinggi/lembaga tertentu yang disosialisasikan untuk bisa dimanfaatkan oleh masyarakat/perangkat daerah.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Penelitian dan Kelitbangan di
Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah Inovasi dan Invensi yang
didesiminasikan

Ukuran

Jumlah

Satuan

inovasi

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Pemanfaatan hasil kelitbangan adalah manfaat penelitian adalah kontribusi penelitian terhadap bidang keilmuan yang dipelajari, setelah didesiminasikan dan dimanfaatkan untuk budaya atau masyarakat. |
| Unit Penyelenggara | Bappelitbangda |
| Kelompok Indikator | Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | Apabila inovasi dan invensi yang sudah di buat oleh OPD ataupun perorangan dan kelompok semuanya dimanfaatkan maka persentasenya 100% (dimanfaatkan semua) |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Penelitian dan Kelitbangan di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|---|
| Metode/Rumus Penghitungan | $\frac{J1}{J2} \times 100\%$ |
| | Keterangan: J1 = Jumlah inovasi dan invensi yang diterapkan J2 = Jumlah inovasi dan invensi yang didesiminasikan) |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | % |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Persentase Penerapan Inovasi Teknologi

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Penerapan inovasi teknologi adalah penerapan adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan perekonomian, inovasi, serta difusi teknologi. |
| Unit Penyelenggara | Bappelitbangda |
| Kelompok Indikator | Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | Apabila inovasi teknologi yang sudah dibuat dan semuanya digunakan dan dimanfaatkan maka persentasenya 100% (diterapkan semua) |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Penelitian dan Kelitbangan di Kabupaten Purbalingga |
| Periodisasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|---|
| Metode/Rumus Penghitungan | $\frac{J_1}{J_2} \times 100\%$ |
| | Keterangan: J1 = Jumlah Inovasi dan Invensi yang diterapkan J2 = Jumlah Inovasi dan Invensi |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | % |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Skor IID (Indeks Inovasi Daerah)

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Indeks Inovasi Daerah adalah seperangkat variabel dan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inovasi daerah berdasarkan periode tertentu.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Bappelitbangda
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Badan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas:
 - a. melakukan penilaian terhadap laporan penerapan Inovasi Daerah; dan
 - b. mengusulkan calon penerima penghargaan Inovasi Daerah kepada Menteri.
- (2) Penilaian terhadap laporan penerapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan mekanisme pengisian data Indeks Inovasi Daerah.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan tahapan:
 - a. penjarangan;



- b. pengukuran indeks;
- c. presentasi; dan
- d. validasi lapangan.

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Penelitian dan Kelitbangan di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Release Kemendagri |
| Ukuran | Indeks |
| Satuan | angka |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Skor IDSD (Indeks Daya Saing Daerah)

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/ kota yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Unit Penyelenggara

Bappelitbangda

Kelompok Indikator

Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Pengukuran IDSD menggunakan konsep dan metode pengukuran yang baru, yaitu dengan mengadopsi kerangka pengukuran Global Competitiveness Index (GCI) 2019 dari World Economic Forum (WEF), yang disesuaikan dengan konteks daerah di Indonesia. Kerangka pengukuran IDSD terdiri dari empat komponen yang dielaborasi dalam 12 pilar dan memiliki 62 indikator di tingkat Provinsi serta 48 indikator di tingkat Kabupaten/Kota. Keseluruhan indikator diukur dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh kementerian, dan lembaga terkait.

Tujuan dari pengukuran IDSD adalah untuk memperoleh sebuah ukuran daya saing daerah yang komprehensif yang dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah.



■ DATA

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Data yang Dikumpulkan | Penelitian dan Kelitbangan di |
| Periodesasi | Kabupaten Purbalingga |
| | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Release BRIN |
| Ukuran | Indeks |
| Satuan | angka |
| Apakah Indikator Dapat Diakses | Ya |
| Umum | |



Skor IPKD (Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah)

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel

Unit Penyelenggara

Bappelitbangda

Kelompok Indikator

Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah, Pasal 6 IPKD diukur melalui 6 (enam) dimensi meliputi :

- Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran
- Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD
- Transparansi pengelolaan keuangan daerah
- penyerapan anggaran
- kondisi keuangan daerah
- opini badan pemeriksa keuangan atas LKPD.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Penelitian dan Kelitbangan di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan



■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Release Kemendagri |
| Ukuran | Indeks |
| Satuan | angka |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Jumlah jaringan kemitraan pemerintah daerah dengan lembaga/swasta

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Jumlah jaringan kemitraan pemerintah daerah dengan lembaga/swasta adalah jumlah MoU yang masuk di Bagian Tata Pemerintahan, jumlah kerjasama dengan mahasiswa KKN Perguruan Tinggi |
| Unit Penyelenggara | Bappelitbangda |
| Kelompok Indikator | Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | Kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten, baik dengan pemerintah pusat, provinsi, kab/kota, perguruan tinggi, dan swasta yang ditandai dengan adanya MoU secara resmi |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Penelitian dan Kelitbangan di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|---|
| Metode/Rumus Penghitungan | Jumlah jaringan kemitraan pemerintah daerah dengan lembaga/swasta |
| Ukuran Satuan | Jumlah lembaga |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Persentase anggaran litbang (penelitian dan pengembangan) terhadap total APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis dan penarikan kesimpulan ilmiah.

Pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya dukung ilmu pengetahuan dan yang telah terbukti kebenarannya dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Bappelitbangda

Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Diperoleh dengan cara membagi jumlah anggaran untuk penelitian dan pengembangan riset pemerintah, perguruan tinggi, badan usaha (industri manufaktur, pertambangan, dan energi) dan swasta non profit dengan APBD dikalikan dengan 100 persen.



Untuk mengetahui seberapa besar dana yang dialokasikan untuk penelitian dan pengembangan dalam rangka meningkatkan kapabilitas ilmu pengetahuan daerah dan penciptaan inovasi yang berdampak pada rencana keuangan daerah.

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Penelitian dan Kelitbangan di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|---|
| Metode/Rumus Penghitungan | $\frac{\text{Jumlah anggaran litbang}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$ |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | % |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



METADATA INDIKATOR STATISTIK SEKTORAL

**BADAN KEUANGAN
DAERAH**



Jumlah Bidang Tanah Milik Pemda

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Bidang Tanah Milik Pemda adalah jumlah bidang tanah yang dikelola oleh pemerintah daerah.

(Kartu Inventaris Barang 'A' Milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga)
Bakeuda

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Aspek Pertanahan

Peningkatan jumlah bidang tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dapat menunjukkan semakin tertibnya administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah. Selain adanya inventarisasi, penambahan bidang hasil serah terima dari developer (untuk tanah prasarana, sarana dan utilitas perumahan), penambahan jumlah bidang tanah sebagian disebabkan penerbitan sertifikat, sehingga pencatatan asetnya menyesuaikan. Penambahan bidang tanah dapat mendukung Pembangunan Infrastruktur, Pengembangan Ekonomi, Pariwisata dan Pertanian.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Tanah Milik Pemda di Kabupaten Purbalingga

Periododesasi

Tahunan



■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Perhitungan Manual |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | bidang |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Luas Bidang Tanah Milik Pemda

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Bidang Tanah Milik Pemda adalah luas tanah yang dikelola oleh pemerintah daerah. (Kartu Inventaris Barang 'A' Milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga) |
| Unit Penyelenggara | Bakeuda |
| Kelompok Indikator | Aspek Pertanahan |
| Interpretasi | Semakin Luas Bidang Tanah Milik Pemda menunjukkan semakin tertibnya administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah. Selain adanya inventarisasi (pencatatan tanah yang belum tercatat), penambahan luas tanah milik Pemda dapat berupa hasil serah terima dari developer (untuk tanah prasarana, sarana dan utilitas perumahan). Penambahan luas tanah milik Pemda dapat mendukung pembangunan infrastruktur, pengembangan ekonomi, pariwisata dan pertanian dan pengembangan ruang terbuka hijau. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Tanah Milik Pemda di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Perhitungan Manual |
| Ukuran | Luas |
| Satuan | m ² |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Jumlah Bidang Tanah Milik Pemda Bersertifikat

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Bidang Tanah Milik Pemda adalah tanah yang dikelola oleh pemerintah daerah.

(Laporan Tribunalan MCP Koorsupgah KPK area Pengelolaan BMD)

Unit Penyelenggara

Bakeuda

Kelompok Indikator

Aspek Pertanahan

Interpretasi

Semakin banyak jumlah bidang tanah milik Pemda yang bersertifikat menunjukkan semakin tertibnya pengelolaan Barang Milik Daerah (tertib administrasi, tertib fisik dan tertib hukum), penyertifikatan tanah juga mendukung penilaian MCP Koorsupgah KPK.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Tanah Milik Pemda di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

bidang

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Luas Bidang Tanah Milik Pemda Bersertifikat

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Bidang Tanah Milik Pemda adalah tanah yang dikelola oleh pemerintah daerah.

(Laporan Tribunalan MCP Koorsupgah KPK area Pengelolaan BMD)

Unit Penyelenggara

Bakeuda

Kelompok Indikator

Aspek Pertanahan

Interpretasi

Semakin luas jumlah bidang tanah milik Pemda yang bersertifikat menunjukkan semakin tertibnya pengelolaan Barang Milik Daerah (tertib administrasi, tertib fisik dan tertib hukum), penyertifikatan tanah juga mendukung penilaian MCP Koorsupgah KPK.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Tanah Milik Pemda di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Luas

Satuan

m²

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Persentase Bidang Tanah Milik Pemda Bersertifikat

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Persentase bidang tanah milik Pemda bersertifikat adalah perbandingan jumlah bidang tanah Pemda bersertifikat dengan luas bidang tanah milik Pemda. (Laporan Tribulanan MCP Koorsupgah KPK area Pengelolaan BMD) |
| Unit Penyelenggara | Bakeuda |
| Kelompok Indikator | Aspek Pertanahan |
| Interpretasi | Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin banyak bidang tanah milik Pemda yang bersertifikat. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Tanah Milik Pemda di Kabupaten Purbalingga |
| Periododesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--|
| Metode/Rumus Penghitungan | $\frac{JB}{LP} \times 100\%$ |
| | Keterangan: |
| | JB = Jumlah Bidang Tanah Pemda Bersertifikat |
| | LP = Luas Bidang Tanah Milik Pemda |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | % |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Pendapatan Asli Daerah (PAD)

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. |
| Unit Penyelenggara | Bakeuda |
| Kelompok Indikator | Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | (Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah) Semakin banyak PAD menunjukkan kemandirian keuangan, potensi pembangunan, pengembangan potensi lokal, kualitas pelayanan publik. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Kondisi Keuangan Daerah di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|---|
| Metode/Rumus Penghitungan | Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan + Lain Lain PAD |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Rp |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Pajak Daerah

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Bakeuda
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

(Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)

Semakin banyak pendapatan pajak daerah menunjukkan kemandirian keuangan, potensi pembangunan, responsibilitas warga dan efisiensi administrasi pajak.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Keuangan Daerah di
Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Output SIMPATDA

Ukuran

Jumlah

Satuan

Rp

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Retribusi Daerah

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. |
| Unit Penyelenggara | Bakeuda |
| Kelompok Indikator | Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | (Pasal 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009) Semakin tinggi pendapatan retribusi daerah menunjukkan kemandirian keuangan, efisiensi dan kualitas pelayanan, penggunaan sumber daya secara optimal dan potensi ekonomi daerah. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Kondisi Keuangan Daerah di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Output SIMPATDA |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Rp |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah Penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah. |
| Unit Penyelenggara | Bakeuda |
| Kelompok Indikator | Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | (STS Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan) Semakin banyak hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menunjukkan hal yang mungkin dapat diinterpretasikan efisiensi pengelolaan, kemandirian keuangan, pengembangan infrastruktur dan pelayanan publik serta pengembangan ekonomi. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Kondisi Keuangan Daerah di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Output SIMPATDA |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Rp |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Lain-lain PAD

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Lain-lain PAD adalah seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
| Unit Penyelenggara | Bakeuda |
| Kelompok Indikator | Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | (UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah) Semakin besar lain-lain PAD (Bagian dari Pendapatan Asli Daerah) maka semakin baik kemandirian fiskal suatu daerah. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Kondisi Keuangan Daerah di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Output SIMPATDA |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Rp |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Dana Perimbangan

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Bakeuda

Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan (Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah)

Semakin banyak Dana Perimbangan yang diterima oleh Pemerintah Daerah dapat menunjukkan:

- ketergantungan yang lebih besar pada pendanaan dari pemerintah pusat.
- Semakin besar peluang pemda untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah
- Mengurangi Kesenjangan Pembangunan
- rendahnya efisiensi pengelolaan keuangan daerah

■ DATA



Data yang Dikumpulkan

Kondisi Keuangan Daerah di
Kabupaten Purbalingga
Tahunan

Periodesasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

APBD Tahun Anggaran Berjalan

Ukuran

Jumlah

Satuan

Rp

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Dana bagi hasil pajak/ bagi hasil bukan pajak adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Unit Penyelenggara

Bakeuda

Kelompok Indikator

Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

(Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah)

Semakin banyak Dana bagi hasil pajak atau dana bagi hasil bukan pajak yang diterima oleh pemerintah daerah menunjukkan peningkatan dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemda mungkin telah melakukan upaya untuk memperkuat administrasi perpajakan, meningkatkan pengawasan dan penagihan pajak, atau memperbaiki sistem pengelolaan pendapatan daerah secara keseluruhan. Hal ini mencerminkan komitmen untuk meningkatkan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.



■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Keuangan Daerah di
Kabupaten Purbalingga
Tahunan

Periodesasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

APBD Tahun Anggaran Berjalan

Ukuran

Jumlah

Satuan

Rp

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Dana Alokasi Umum

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. |
| Unit Penyelenggara | Bakeuda |
| Kelompok Indikator | Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | (Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah) Semakin banyak Dana Alokasi Umum yang diterima oleh Pemerintah Daerah menunjukkan peningkatan kesejahteraan daerah, pemerataan pembangunan, keterbatasan pendapatan lokal, dan tingginya dukungan pemerintah pusat. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Kondisi Keuangan Daerah di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | APBD Tahun Anggaran Berjalan |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Rp |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Dana Alokasi Khusus

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. |
| Unit Penyelenggara | Bakeuda |
| Kelompok Indikator | Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | (Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah) Semakin banyak alokasi khusus yang diberikan Pemerintah Daerah dapat menunjukkan beberapa hal yang mungkin dapat diinterpretasikan Perhatian khusus dari pemerintah pusat, masalah dan kebutuhan mendesak, alokasi khusus sering kali ditujukan untuk memperkuat sektor ekonomi lokal, meningkatkan infrastruktur, memberikan pelayanan publik yang lebih baik, atau mempromosikan pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Kondisi Keuangan Daerah di Kabupaten Purbalingga |
| Periododesasi | Tahunan |



■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | APBD Tahun Anggaran Berjalan |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Rp |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah adalah seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
| Unit Penyelenggara | Bakeuda |
| Kelompok Indikator | Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | (Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah) Semakin besar lain-lain pendapatan daerah yang sah maka semakin besar pendapatan suatu daerah dan menunjukkan kondisi kemampuan keuangan daerah semakin baik |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Kondisi Keuangan Daerah di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Output SIMPATDA |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Rp |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Hibah

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Hibah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian |
| Unit Penyelenggara | Bakeuda |
| Kelompok Indikator | Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah) Semakin banyak pendapatan hibah yang diterima oleh pemerintah daerah dapat menunjukkan beberapa hal yang mungkin dapat diinterpretasikan ketergantungan pada Pendapatan Asli Daerah dapat berkurang. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Kondisi Keuangan Daerah di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | APBD Tahun Anggaran Berjalan |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Rp |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Dana Darurat

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Dana Darurat adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah yang mengalami bencana nasional dan/atau peristiwa luar biasa. |
| Unit Penyelenggara | Bakeuda |
| Kelompok Indikator | Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81/Pmk.07/2013 Tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Darurat) Ketersediaan dana darurat yang cukup menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk merespons krisis dengan cepat dan efektif. Dana darurat ini dapat digunakan untuk mengatasi situasi darurat, seperti bencana alam, keadaan darurat kesehatan, atau kejadian tak terduga lainnya. Dengan adanya dana darurat yang memadai, pemerintah daerah dapat memberikan bantuan dan dukungan yang diperlukan kepada masyarakat yang terkena dampak. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Kondisi Keuangan Daerah di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |



■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | APBD Tahun Anggaran Berjalan |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Rp |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Dana Bagi Hasil Pajak

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Dana Bagi Hasil Pajak adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. |
| Unit Penyelenggara | Bakeuda |
| Kelompok Indikator | Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | Semakin besar dana bagi hasil pajak maka semakin baik kemampuan keuangan suatu daerah. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Kondisi Keuangan Daerah di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | APBD Tahun Anggaran Berjalan |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Rp |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Dana penyesuaian dan otonomi khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah dan membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan tertentu Pemerintah dan DPR sesuai peraturan perundangan. |
| Unit Penyelenggara | Bakeuda |
| Kelompok Indikator | Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | Semakin banyak dana penyesuaian dan otonomi khusus menunjukkan bahwa ada pengakuan akan kebutuhan keragaman dan kompleksitas dalam pengelolaan keuangan publik. Ini dapat meningkatkan responsivitas dan efisiensi penggunaan dana publik, serta memperkuat partisipasi dan pemberdayaan daerah atau pihak-pihak tertentu dalam pengambilan keputusan. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Kondisi Keuangan Daerah di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | APBD Tahun Anggaran Berjalan |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Rp |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Bantuan Keuangan

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Bantuan keuangan adalah bantuan dana dari pemerintah pusat yang diperuntukan penggunaannya ditetapkan oleh pemerintah pusat pemberi dalam rangka percepatan pembangunan dan pemberdayaan pemerintah Kabupaten Purbalingga. |
| Unit Penyelenggara | Bakeuda |
| Kelompok Indikator | Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | Peningkatan jumlah bantuan keuangan juga dapat mencerminkan upaya untuk memperkuat koordinasi dan kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Melalui bantuan keuangan, pemerintah pusat dapat mendukung pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kebijakan nasional, memperkuat infrastruktur, meningkatkan layanan publik, dan mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi antara daerah. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Kondisi Keuangan Daerah di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | APBD Tahun Anggaran Berjalan |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Rp |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Sumbangan Pihak ke-3

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Sumbangan pihak ke-3 adalah pemberian kepada pemerintah daerah secara sukarela, tidak mengikat dan yang perolehannya oleh pihak ketiga tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
| Unit Penyelenggara | Bakeuda |
| Kelompok Indikator | Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | Sumbangan pihak ketiga sering kali ditujukan untuk mendukung program dan proyek pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Peningkatan sumbangan ini dapat mencerminkan kepercayaan terhadap rencana dan kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, serta kesadaran akan pentingnya peran sektor swasta dan masyarakat dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Kondisi Keuangan Daerah di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | APBD Tahun Anggaran Berjalan |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Rp |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Belanja Tidak Langsung

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Belanja tidak langsung adalah pengeluaran yang tidak langsung berhubungan dengan penyediaan barang atau jasa publik kepada masyarakat. Jenis belanja ini lebih berkaitan dengan kegiatan administratif dan operasional pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Bakeuda

Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan
Peningkatan belanja tidak langsung dapat menunjukkan kompleksitas pemerintah daerah, upaya peningkatan efisiensi dan profesionalisme, pemenuhan persyaratan hukum dan peraturan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Keuangan Daerah di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Belanja Pegawai + Belanja Bunga + Belanja Subsidi + Belanja Hibah + Belanja Bansos + Belanja Bagi Hasil + Belanja Bantuan Keuangan + Belanja Tidak Terduga

Ukuran

Jumlah

Satuan

Rp

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Belanja Pegawai

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Belanja pegawai adalah kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai Pemerintah dalam dan luar negeri, baik kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah yang belum berstatus PNS dan/ atau non-PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas fungsi unit organisasi Pemerintah. |
| Unit Penyelenggara | Bakeuda |
| Kelompok Indikator | Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | Peningkatan belanja pegawai dapat menunjukkan pertumbuhan administrasi pemerintahan, peningkatan layanan publik, peningkatan efektifitas dan efisiensi serta penyediaan keahlian khusus. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Kondisi Keuangan Daerah di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | APBD Tahun Anggaran Berjalan |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Rp |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Belanja Bunga

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Belanja bunga adalah pengeluaran pemerintah untuk pembayaran bunga (interest) atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding) yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek atau jangka panjang. |
| Unit Penyelenggara | Bakeuda |
| Kelompok Indikator | Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | Peningkatan belanja bunga dapat menunjukkan ketergantungan terhadap utang, kebutuhan pembiayaan tambahan, pengelolaan utang yang buruk serta kondisi suku bunga yang tinggi. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Kondisi Keuangan Daerah di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | APBD Tahun Anggaran Berjalan |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Rp |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Belanja Subsidi

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Belanja subsidi adalah belanja yang dilakukan Pemerintah dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan daya beli masyarakat secara umum.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Bakeuda
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Pemerintah daerah dapat memberikan subsidi kepada sektor-sektor tertentu seperti pertanian, perikanan, industri kecil dan menengah, atau sektor lain yang dianggap strategis. Hal ini dapat membantu sektor-sektor tersebut berkembang, meningkatkan produktivitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Keuangan Daerah di
Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

APBD Tahun Anggaran Berjalan

Ukuran

Jumlah

Satuan

Rp

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Belanja Hibah

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Belanja hibah adalah setiap pengeluaran Pemerintah Daerah dalam bentuk uang, barang, jasa dan/atau surat berharga kepada Pemerintah Desa, pemerintah lainnya atau perusahaan daerah, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Bakeuda
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Peningkatan belanja hibah menunjukkan komitmen dan dukungan yang lebih besar terhadap kegiatan amal atau sosial atau mencerminkan kebutuhan yang lebih besar untuk dukungan eksternal.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Keuangan Daerah di
Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan
Ukuran

APBD Tahun Anggaran Berjalan
Jumlah

Satuan

Rp

Apakah Indikator Dapat Diakses
Umum

Ya



Belanja Bansos

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Belanja bansos adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Bakeuda

| | | |
|--------------|-------|-----------|
| Aspek | Unsur | Penunjang |
| Pemerintahan | | |

Interpretasi

| | | |
|---------------------|-------------------|----------------|
| (Peraturan Republik | Menteri Indonesia | Keuangan Nomor |
| 81/PMK.05/2012) | | |

Semakin banyak belanja bantuan sosial dapat menunjukkan hal tergantung pada konteksnya:

- Adanya peningkatan kebutuhan masyarakat dalam situasi tertentu
- Respons pemerintah terhadap ketimpangan sosial dan upaya untuk mengurangi kesenjangan antara kelompok masyarakat yang berkekurangan dengan kelompok yang lebih mampu.
- Meningkatnya belanja bansos juga dapat mencerminkan komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan sosial secara umum.



■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Keuangan Daerah di
Kabupaten Purbalingga
Tahunan

Periodesasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

APBD Tahun Anggaran Berjalan

Ukuran

Jumlah

Satuan

Rp

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Belanja Bagi Hasil

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Belanja bagi hasil adalah sumber yang berasal dari pendapatan APBN, yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Bakeuda

Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan
Semakin banyak belanja bagi hasil dapat menunjukkan beberapa hasil tergantung pada konteksnya:

- Jika belanja bagi hasil meningkat, ini bisa menunjukkan bahwa penerima pendapatan (misalnya, individu atau organisasi) mengalami peningkatan dalam jumlah pendapatan yang mereka terima
- Meningkatnya belanja bagi hasil juga dapat mencerminkan pertumbuhan ekonomi dan kinerja positif dalam suatu sektor.
- Peningkatan belanja bagi hasil dapat menunjukkan peningkatan dalam kerjasama, kemitraan, atau kesepakatan yang saling menguntungkan antara pihak-pihak yang terlibat



■ DATA

Data yang Dikumpulkan
Periodesasi

Kondisi Keuangan Daerah di
Kabupaten Purbalingga
Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan
Ukuran
Satuan
Apakah Indikator Dapat Diakses
Umum

APBD Tahun Anggaran Berjalan
Jumlah
Rp
Ya



Belanja Bantuan Keuangan

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Belanja bantuan keuangan adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Bakeuda
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Belanja bantuan keuangan dapat mencerminkan kepedulian pemerintah kepada lembaga-lembaga yang mendukung jalannya pemerintah daerah.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Keuangan Daerah di
Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

APBD Tahun Anggaran Berjalan

Ukuran

Jumlah

Satuan

Rp

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Belanja Tidak Terduga

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Bakeuda
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Belanja tidak terduga dapat mencerminkan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan mendesak atau perubahan dalam lingkungan yang memerlukan aksi cepat. Terkadang, pemerintah daerah dapat dihadapkan pada kebutuhan mendesak dalam sektor-sektor tertentu yang tidak terduga. Misalnya, pemeliharaan mendadak pada infrastruktur yang mengalami kerusakan serius, perluasan layanan kesehatan dalam menghadapi wabah penyakit, atau pemulihan ekonomi dalam situasi krisis.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Keuangan Daerah di
Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan



■ **METODOLOGI**

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | APBD Tahun Anggaran Berjalan |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Rp |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Belanja Langsung

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. |
| Unit Penyelenggara | Bakeuda |
| Kelompok Indikator | Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | Semakin besar belanja langsung menunjukkan semakin besar upaya pemerintah daerah untuk menyediakan infrastruktur pelayanan publik. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Kondisi Keuangan Daerah di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Belanja Jasa + Belanja Modal |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Rp |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Belanja Pegawai

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Belanja pegawai adalah kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai Pemerintah dalam dan luar negeri, baik kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah yang belum berstatus PNS dan/ atau non-PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas fungsi unit organisasi Pemerintah.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Bakeuda
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Sesuai UU HKPD Proporsi Belanja Pegawai dijaga proporsinya maksimum 30% dari APBD.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Keuangan Daerah di
Kabupaten Purbalingga

Periodisasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

APBD Tahun Anggaran Berjalan

Ukuran

Jumlah

Satuan

Rp

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Belanja Barang dan Jasa

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan/ atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/ atau Jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat/ Pemerintah Daerah (Pemda) dan belanja perjalanan.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Bakeuda
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Belanja barang jasa dimaksudkan sebagai pemenuhan barang persediaan untuk operasional kantor sehari-sehari.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Keuangan Daerah di
Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

APBD Tahun Anggaran Berjalan

Ukuran

Jumlah

Satuan

Rp

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Belanja Modal

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Bakeuda
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Belanja modal dimaksudkan sebagai upaya pemenuhan infrastruktur untuk pelayanan masyarakat, semakin besar proporsinya diharapkan kualitas infrastruktur semakin baik.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Keuangan Daerah di
Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

APBD Tahun Anggaran Berjalan

Ukuran

Jumlah

Satuan

Rp

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Penerimaan Pembiayaan

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Jumlah penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya. |
| Unit Penyelenggara | Bakeuda |
| Kelompok Indikator | Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | Penerimaan pembiayaan dimaksudkan sebagai pemenuhan rencana belanja yang belum sepenuhnya dapat dipenuhi dari pendapatan daerah lainnya |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Kondisi Keuangan Daerah di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | APBD Tahun Anggaran Berjalan |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Rp |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | | | |
|---------------------|--|-------|-----------|
| Konsep dan Definisi | Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah adalah sumber pembiayaan yang didapat dari diterimanya kembali sejumlah pinjaman yang telah diberikan kepada pemerintah pusat atau pemda lainnya. | | |
| Unit Penyelenggara | Bakeuda | | |
| Kelompok Indikator | Aspek | Unsur | Penunjang |
| Interpretasi | Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah merupakan pengembalian dari pemberian pinjaman daerah. | | |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Kondisi Keuangan Daerah di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | APBD Tahun Anggaran Berjalan |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Rp |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Penerimaan Kembali Tuntutan Ganti Rugi

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Penerimaan kembali tuntutan ganti rugi adalah penerimaan kembali tuntutan ganti rugi. |
| Unit Penyelenggara | Bakeuda |
| Kelompok Indikator | Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | Penerimaan kembali tuntutan ganti rugi mencerminkan kepatuhan para pihak yang mendapat tuntutan untuk memenuhi kewajibannya. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Kondisi Keuangan Daerah di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | APBD Tahun Anggaran Berjalan |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Rp |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Penerimaan Kembali Pinjaman Dana Bergulir

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Penerimaan kembali pinjaman dana bergulir adalah penerimaan kembali pinjaman dana bergulir. |
| Unit Penyelenggara | Bakeuda |
| Kelompok Indikator | Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | Penerimaan kembali pinjaman dana bergulir mencerminkan kepatuhan para pihak yang mendapat pinjaman dana bergulir untuk memenuhi kewajibannya. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Kondisi Keuangan Daerah di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | APBD Tahun Anggaran Berjalan |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Rp |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Penggunaan Silpa Tahun Anggaran Sebelumnya

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Penggunaan Silpa tahun anggaran sebelumnya adalah sumber penerimaan pembiayaan yang berasal dari sisa anggaran tahun lalu yang mencakup penghematan belanja, kewajiban pada pihak ketiga yang sampai pada akhir tahun belum terselesaikan, sisa dana kegiatan lanjutan, dan semua pelampauan atas penerimaan daerah seperti penerimaan asli daerah, penerimaan dana perimbangan, penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, dan penerimaan pembiayaan.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Bakeuda
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Semakin banyak SiLPA maka semakin efisien pengelolaan APBD sebelumnya.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Keuangan Daerah di
Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan
Ukuran

APBD Tahun Anggaran Berjalan
Jumlah

Satuan

Rp

Apakah Indikator Dapat Diakses
Umum

Ya



Pencairan Dana Cadangan

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Pencairan dana cadangan adalah penerimaan pembiayaan yang berasal dari penggunaan dana cadangan untuk membiayai belanja. |
| Unit Penyelenggara | Bakeuda |
| Kelompok Indikator | Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | Pencairan dana cadangan dimaksudkan untuk membiayai kegiatan yang direncanakan dengan pembentukan dana cadangan. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Kondisi Keuangan Daerah di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | APBD Tahun Anggaran Berjalan |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Rp |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Jumlah Pengeluaran Pembiayaan

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Jumlah pengeluaran pembiayaan adalah jumlah pengeluaran pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah serta tuntutan ganti rugi dan tuntutan pembendaharan. |
| Unit Penyelenggara | Bakeuda |
| Kelompok Indikator | Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | Semakin banyak pengeluaran pembiayaan diharapkan semakin besar imbal hasil yang diterima pemerintah daerah. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Kondisi Keuangan Daerah di Kabupaten Purbalingga |
| Periododesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--|
| Metode/Rumus Penghitungan | Pengeluaran Pembentukan Dana Cadangan + Penyertaan Modal Pemerintah Daerah + Pembayaran Pokok Utang + Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah + Tuntutan ganti rugi dan tuntutan pembendaharan |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Rp |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Pembentukan Dana Cadangan

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Pembentukan dana cadangan adalah pengeluaran pembiayaan dalam rangka mengisi dana cadangan. |
| Unit Penyelenggara | Bakeuda |
| Kelompok Indikator | Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | Pembentukan dana cadangan dimaksudkan sebagai upaya menysihkan dana untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Kondisi Keuangan Daerah di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|---|
| Metode/Rumus | $\frac{\text{Jumlah dana cadangan}}{\text{Jumlah tahun penyisihan anggaran}}$ |
| Penghitungan | |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Rp |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Penyertaan modal pemerintah daerah adalah usaha penyertaan modal daerah pada suatu usaha bersama antar daerah dan/atau dengan badan usaha swasta/badan lain dan/atau pemanfaatan modal daerah oleh badan usaha/badan lain dengan suatu maksud, tujuan dan imbalan tertentu.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Bakeuda
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Semakin besar penyertaan modal diharapkan bagi hasil yang diterima pemerintah daerah semakin besar.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Keuangan Daerah di
Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

APBD Tahun Anggaran Berjalan

Ukuran

Jumlah

Satuan

Rp

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Pembayaran Pokok Utang

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Pembayaran pokok utang adalah pembiayaan pemerintah daerah yang digunakan untuk membayar kewajiban atas penggunaan pokok utang. |
| Unit Penyelenggara | Bakeuda |
| Kelompok Indikator | Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | Pembayaran pokok utang dimaksudkan untuk mengurangi beban utang. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Kondisi Keuangan Daerah di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | APBD Tahun Anggaran Berjalan |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Rp |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah adalah pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah. |
| Unit Penyelenggara | Bakeuda |
| Kelompok Indikator | Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | Semakin besar pemberian pinjaman diharapkan semakin besar imbal hasil yang diterima pemerintah daerah. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Kondisi Keuangan Daerah di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | APBD Tahun Anggaran Berjalan |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Rp |
| Apakah Indikator Dapat Diakses | Ya |
| Umum | |



Tuntutan Ganti Rugi Dan Tuntutan Pembendaraan

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Tuntutan ganti rugi dan tuntutan pembendaraan adalah tuntutan ganti rugi dan tuntutan pembendaraan. |
| Unit Penyelenggara | Bakeuda |
| Kelompok Indikator | Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | Tuntutan ganti rugi dimaksudkan sebagai tuntutan kerugian daerah yang dibebankan kepada pegawai non bendahara, sedangkan tuntutan perbendaharaan dimaksudkan sebagai tuntutan kerugian daerah yang dibebankan kepada bendahara. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Kondisi Keuangan Daerah di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Output SIPD |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Rp |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Pembiayaan Netto

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Pembiayaan netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. |
| Unit Penyelenggara | Bakeuda |
| Kelompok Indikator | Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | Semakin dekat besaran pembiayaan netto dengan jumlah pendapatan maka APBD semakin baik. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Kondisi Keuangan Daerah di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | APBD Tahun Anggaran Berjalan |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Rp |
| Apakah Indikator Dapat Diakses | Ya |
| Umum | |



Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | | | |
|---------------------|--|-------|-----------|
| Konsep dan Definisi | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode pelaporan. | | |
| Unit Penyelenggara | Bakeuda | | |
| Kelompok Indikator | Aspek | Unsur | Penunjang |
| Interpretasi | Pemerintahan Semakin besar SILPA mengindikasikan belanja makin efisien. | | |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Kondisi Keuangan Daerah di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | APBD Tahun Anggaran Berjalan |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Rp |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Aset Lancar

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Aset lancar adalah aset yang berusia kurang dari satu tahun. Sehingga, dapat dikatakan kepemilikan aset berjangka waktu singkat. |
| Unit Penyelenggara | Bakeuda |
| Kelompok Indikator | Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | Peningkatan aset lancar mencerminkan pertumbuhan ekonomi di wilayah pemerintah kabupaten Purbalingga. Jika Pendapatan Daerah meningkat, hal ini berdampak positif pada posisi keuangan pemerintah daerah. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Neraca Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Lampiran APBD Perubahan |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Rp |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Kas dan Setara Kas

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Purbalingga atau investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Bakeuda
Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan

Interpretasi

Semakin banyak jumlah kas dan setara kas menunjukkan semakin banyak aset lancar yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Neraca Keuangan Daerah
Kabupaten Purbalingga
Tahunan

Periodesasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Output SIPD

Ukuran

Jumlah

Satuan

Rp

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Investasi Jangka Pendek

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|--|--|
| Konsep dan Definisi | Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. |
| Unit Penyelenggara Kelompok Indikator | Bakeuda Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | semakin banyak jumlah investasi jangka pendek menunjukkan semakin banyak aset lancar yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Neraca Keuangan Daerah |
| Periodesasi | Kabupaten Purbalingga Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|--|------------------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | APBD Tahun Anggaran Berjalan |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Rp |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Piutang Pendapatan

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Piutang pendapatan adalah pendapatan yang belum diterima oleh pemerintah daerah meskipun dari sisi waktu sudah menjadi hak milik pemerintah daerah.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Bakeuda
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Semakin banyak jumlah piutang pendapatan Pemerintah Daerah menunjukkan semakin banyak aset lancar yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Neraca Keuangan Daerah
Kabupaten Purbalingga
Tahunan

Periodesasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

APBD Tahun Anggaran Berjalan

Ukuran

Jumlah

Satuan

Rp

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Piutang Lainnya

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Piutang lainnya adalah piutang yang timbul selain dari kegiatan utama pemerintah daerah. |
| Unit Penyelenggara | Bakeuda |
| Kelompok Indikator | Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | Semakin banyak jumlah piutang lainnya Pemerintah Daerah menunjukkan semakin banyak aset lancar yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Neraca Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | APBD Tahun Anggaran Berjalan |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Rp |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Penyisihan Piutang

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Penyisihan piutang adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. |
| Unit Penyelenggara | Bakeuda |
| Kelompok Indikator | Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | Semakin banyak jumlah penyisihan uang Pemerintah Daerah menunjukkan semakin banyak aset lancar yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Data yang Dikumpulkan | Neraca Keuangan Daerah |
| Periodesasi | Kabupaten Purbalingga Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | APBD Tahun Anggaran Berjalan |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Rp |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Beban Dibayar Dimuka

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Beban dibayar dimuka adalah biaya yang belum menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk membayar pada periode saat ini, namun pemerintah daerah sudah membayar terlebih dahulu.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Bakeuda
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Semakin banyak beban dibayar dimuka Pemerintah Daerah menunjukkan semakin banyak aset lancar yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Neraca Keuangan Daerah
Kabupaten Purbalingga
Tahunan

Periodesasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

APBD Tahun Anggaran Berjalan

Ukuran

Jumlah

Satuan

Rp

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Persediaan

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Persediaan adalah bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. |
| Unit Penyelenggara | Bakeuda |
| Kelompok Indikator | Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | Semakin banyak persediaan Pemerintah Daerah menunjukkan semakin banyak aset lancar yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Neraca Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga |
| Periododesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Output SIMASET (Persediaan) |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Rp |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Aset Untuk Dikonsolidasikan

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | | | |
|---------------------|--|-------|------------------------|
| Konsep dan Definisi | Aset untuk dikonsolidasikan adalah aset yang dicatat karena adanya hubungan timbal balik antara entitas akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan entitas akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). | | |
| Unit Penyelenggara | Bakeuda | | |
| Kelompok Indikator | Aspek | Unsur | Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | Semakin banyak jumlah aset yang dikonsolidasikan Pemerintah Daerah menunjukkan semakin banyak Aset Lancar yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. | | |

■ DATA

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Data yang Dikumpulkan | Neraca Keuangan Daerah |
| Periododesasi | Kabupaten Purbalingga Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Output SIMASET (Aset Tetap) |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Rp |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Investasi Jangka Panjang

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | | | |
|---------------------|--|-------|-----------|
| Konsep dan Definisi | Investasi jangka panjang adalah investasi dimana daya yang digunakan akan dijalankan terus menerus dan baru bisa dicairkan apabila jangka waktu tersebut telah jatuh tempo (minimal satu tahun). | | |
| Unit Penyelenggara | Bakeuda | | |
| Kelompok Indikator | Aspek | Unsur | Penunjang |
| Interpretasi | Pemerintahan (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2011 Tentang Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah) Semakin besar investasi jangka panjang mengindikasikan terdapat surplus anggaran yang dapat digunakan untuk investasi jangka panjang yang diharapkan dapat memberikan balikan berupa pendapatan jangka panjang. | | |

■ DATA

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Data yang Dikumpulkan | Neraca Keuangan Daerah |
| Periodesasi | Kabupaten Purbalingga Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | APBD Tahun Anggaran Berjalan |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Rp |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Investasi Jangka Panjang Non Permanen

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Investasi jangka panjang non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. |
| Unit Penyelenggara | Bakeuda |
| Kelompok Indikator | Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | Investasi jangka panjang non permanen dimaksudkan sebagai upaya penempatan surplus anggaran untuk investasi pada BUMN, BUMD, dan lain-lain. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Neraca Keuangan Daerah |
| Periododesasi | Kabupaten Purbalingga Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | APBD Tahun Anggaran Berjalan |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Rp |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Investasi Jangka Panjang Permanen

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Investasi jangka panjang permanen adalah jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. |
| Unit Penyelenggara | Bakeuda |
| Kelompok Indikator | Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | Investasi jangka panjang non permanen dimaksudkan sebagai upaya penempatan surplus anggaran untuk penyertaan modal pada BUMN, BUMD, dan lain-lain. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Neraca Keuangan Daerah |
| Periodesasi | Kabupaten Purbalingga Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|------------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Perda Penyertaan Modal |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Rp |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Aset Tetap

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | | | |
|---------------------|---|-------|------------------------|
| Konsep dan Definisi | Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. | | |
| Unit Penyelenggara | Bakeuda | | |
| Kelompok Indikator | Aspek | Unsur | Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | Semakin banyak aset tetap semakin banyak kekayaan daerah dimaksud. | | |

■ DATA

| | | | |
|-----------------------|-------------------------------|----------|--------|
| Data yang Dikumpulkan | Neraca | Keuangan | Daerah |
| Periodesasi | Kabupaten Purbalingga Tahunan | | |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Output SIMASET (Aset Tetap) |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Rp |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Tanah

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | | | |
|---------------------|---|-------|-----------|
| Konsep dan Definisi | Tanah adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. | | |
| Unit Penyelenggara | Bakeuda | | |
| Kelompok Indikator | Aspek | Unsur | Penunjang |
| Interpretasi | Semakin banyak aset tanah semakin leluasa pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur. | | |

■ DATA

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Data yang Dikumpulkan | Neraca Keuangan Daerah |
| Periodesasi | Kabupaten Purbalingga Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Output SIMASET KIB A |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Rp |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Peralatan dan Mesin

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Peralatan dan mesin adalah mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai. |
| Unit Penyelenggara | Bakeuda |
| Kelompok Indikator | Aspek Unsur Penunjang |
| Interpretasi | Pemerintahan |
| | Semakin banyak aset peralatan dan mesin, semakin leluasa pemerintah daerah melakukan pelayanan kepada masyarakat. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Neraca Keuangan Daerah |
| Periododesasi | Kabupaten Purbalingga |
| | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Output SIMASET KIB B |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Rp |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Gedung dan Bangunan

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Gedung dan bangunan adalah mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. |
| Unit Penyelenggara | Bakeuda |
| Kelompok Indikator | Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | Semakin banyak aset peralatan dan mesin, semakin leluasa pemerintah daerah melakukan penyediaan infrastruktur layanan kepada masyarakat. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Neraca Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Output SIMASET KIB C |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Rp |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Jalan, Irigasi, Dan Jaringan

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Jalan, irigasi, dan jaringan adalah mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. |
| Unit Penyelenggara | Bakeuda |
| Kelompok Indikator | Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | Semakin banyak aset jalan, semakin baik infrastruktur transportasi, semakin banyak irigasi semakin baik infrastruktur pertanian, semakin banyak jaringan semakin baik infrastruktur kelistrikan, telpon, dan internet suatu daerah. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Neraca Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Output SIMASET KIB D |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Rp |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Aset Tetap Lainnya

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. |
| Unit Penyelenggara | Bakeuda |
| Kelompok Indikator | Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | Semakin banyak aset tetap lainnya (buku dan barang bercorak kebudayaan) semakin baik infrastruktur pendidikan suatu daerah. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Neraca Keuangan Daerah |
| Periodesasi | Kabupaten Purbalingga Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Output SIMASET KIB E |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Rp |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Konstruksi Dalam Pengerjaan

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Konstruksi dalam pengerjaan adalah mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Unit Penyelenggara

Bakeuda

Kelompok Indikator

Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Semakin sedikit konstruksi dalam pengerjaan semakin efisien kegiatan pembangunan. Semakin banyak kegiatan yang terselesaikan pada tahun berjalan.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Neraca Keuangan Daerah

Periodesasi

Kabupaten Purbalingga
Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Output SIMASET KIB F

Ukuran

Jumlah

Satuan

Rp

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Akumulasi Penyusutan

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | | | |
|---------------------|---|-------|-----------|
| Konsep dan Definisi | Akumulasi penyusutan adalah akumulasi alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. | | |
| Unit Penyelenggara | Bakeuda | | |
| Kelompok Indikator | Aspek | Unsur | Penunjang |
| Interpretasi | Pemerintahan semakin besar akumulasi penyusutan, semakin banyak aset yang fungsinya menurun | | |

■ DATA

| | | | |
|-----------------------|-------------------------------|----------|--------|
| Data yang Dikumpulkan | Neraca | Keuangan | Daerah |
| Periodesasi | Kabupaten Purbalingga Tahunan | | |

■ METODOLOGI

| | | | |
|-------------------------------------|---------------------------|--|--|
| Metode/Rumus Penghitungan | Output SIMASET Penyusutan | | |
| Ukuran | Jumlah | | |
| Satuan | Rp | | |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya | | |



Dana Cadangan

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. |
| Unit Penyelenggara | Bakeuda |
| Kelompok Indikator | Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | Semakin besar dana cadangan semakin banyak yang harus disisihkan olehkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi kegiatan yang direncanakan dengan dana cadangan tersebut |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Neraca Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | APBD Tahun Anggaran Berjalan |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Rp |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Aset Lainnya

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Aset lainnya adalah aset yang tidak memiliki wujud fisik namun nilainya berbentuk kepercayaan dengan pihak lain Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya terdapat dalam Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat pada BAB VIII |
| Unit Penyelenggara | Bakeuda |
| Kelompok Indikator | Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | Aset lainnya biasanya berupa <i>software</i> , program, atau aplikasi. Semakin banyak aset lainnya menunjukkan semakin baik digitalisasi suatu daerah. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Neraca Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga |
| Periododesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Output SIMASET Aset Lainnya |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Rp |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Tagihan Jangka Panjang

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Tagihan jangka panjang adalah tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Bakeuda
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Semakin banyak tagihan jangka panjang semakin banyak kebutuhan yang dapat dipenuhi dengan tagihan jangka panjang.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Neraca Keuangan Daerah
Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

APBD Tahun Anggaran Berjalan

Ukuran

Jumlah

Satuan

Rp

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Kemitraan dengan pihak ketiga adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, pemerintah daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Bakeuda
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Semakin banyak kemitraan dengan pihak ketiga diharapkan dapat memberi manfaat berupa peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil kemitraan dengan pihak ketiga.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Neraca Keuangan Daerah
Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Kerjasama Pemanfaat BMD

Ukuran

Jumlah

Satuan

Rp

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Aset Tidak Berwujud

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Aset tidak berwujud adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. |
| Unit Penyelenggara | Bakeuda |
| Kelompok Indikator | Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | Aset tidak berwujud biasanya berupa <i>software</i> , program, atau aplikasi. Semakin banyak aset lainnya menunjukkan semakin baik digitalisasi suatu daerah. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Neraca Keuangan Daerah |
| Periodesasi | Kabupaten Purbalingga Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|---|
| Metode/Rumus Penghitungan | Output SIMASET Aset Tak Berwujud |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Rp |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Aset Lain-Lain

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Aset lain-lain adalah aset yang tidak termasuk kategori tagihan jangka panjang, kemitraan dengan pihak ketiga, dan aset tidak berwujud. |
| Unit Penyelenggara | Bakeuda |
| Kelompok Indikator | Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | Aset lain-lain umumnya berupa aset rusak berat. Semakin kecil aset lain-lain menunjukkan semakin sedikit aset yang sudah tidak bisa dioperasikan. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Neraca Keuangan Daerah |
| Periodesasi | Kabupaten Purbalingga Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Output SIMASET Aset Lain- Lain |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Rp |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Kewajiban Jangka Pendek

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Unit Penyelenggara

Bakeuda

Kelompok Indikator

Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Semakin sedikit kewajiban jangka pendek semakin leluasa pemerintah daerah membiayai pembangunan.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kewajiban dan Ekuitas Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Lampiran APBD/ APBD Perubahan

Ukuran

Jumlah

Satuan

Rp

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Utang Perhitungan Pihak Ketiga (Pfk)

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (Pfk) adalah utang pemerintah daerah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah daerah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Iuran Askes, Taspen dan Taperum.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Bakeuda
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Semakin kecil utang pihak ketiga semakin leluasa pemerintah daerah membiayai pembangunan.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kewajiban dan Ekuitas Keuangan
Daerah Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Rincian SP2D

Ukuran

Jumlah

Satuan

Rp

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Utang Bunga

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Utang bunga adalah biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar yang harus diakui dan dicatat pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan. |
| Unit Penyelenggara | Bakeuda |
| Kelompok Indikator | Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | Semakin kecil utang bunga semakin leluasa pemerintah daerah membiayai pembangunan. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Kewajiban dan Ekuitas Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahunan |
| Periodesasi | |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Metode/Rumus Penghitungan | LKPD |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Rp |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | | | |
|---------------------|---|-------|-----------|
| Konsep dan Definisi | Bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan harus dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. | | |
| Unit Penyelenggara | Bakeuda | | |
| Kelompok Indikator | Aspek | Unsur | Penunjang |
| Interpretasi | Pemerintahan Semakin kecil bagian lancar utang jangka panjang semakin luasa pemerintah daerah membiayai pembangunan. | | |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Data yang Dikumpulkan | Kewajiban dan Ekuitas Keuangan |
| Periodesasi | Daerah Kabupaten Purbalingga Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Metode/Rumus Penghitungan | LKPD |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Rp |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Pendapatan Diterima Dimuka

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Pendapatan diterima dimuka adalah pendapatan yang sudah diterima di kas daerah tetapi belum menjadi hak pemerintah karena masih terdapat kewajiban pemerintah untuk memberikan barang/jasa di kemudian hari sebagai konsekuensi penerimaan pendapatan di Kas Daerah tersebut.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Bakeuda
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Semakin besar pendapatan diterima dimuka semakin leluasa pemerintah daerah membiayai pembangunan.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kewajiban dan Ekuitas Keuangan
Daerah Kabupaten Purbalingga

Periodisasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

LKPD

Ukuran

Jumlah

Satuan

Rp

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Utang Belanja

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Utang belanja adalah pengeluaran pemerintah untuk pembayaran bunga yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*), baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek atau jangka panjang.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Bakeuda
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Semakin besar utang belanja semakin leluasa pemerintah daerah membiayai pembangunan.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kewajiban dan Ekuitas Keuangan
Daerah Kabupaten Purbalingga

Periodisasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

LKPD

Ukuran

Jumlah

Satuan

Rp

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Utang Jangka Pendek Lainnya

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Utang jangka pendek lainnya adalah pengukuran kewajiban lancar lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut seperti utang transfer, utang kepada pegawai, dll. |
| Unit Penyelenggara | Bakeuda |
| Kelompok Indikator | Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | Semakin kecil utang jangka pendek lainnya semakin leluasa pemerintah daerah membiayai pembangunan. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Kewajiban dan Ekuitas Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga |
| Periodisasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Metode/Rumus Penghitungan | LKPD |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Rp |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Kewajiban Jangka Panjang

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang periode pelunasannya lebih dari 12 bulan. |
| Unit Penyelenggara | Bakeuda |
| Kelompok Indikator | Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | Semakin kecil kewajiban jangka panjang semakin leluasa pemerintah daerah membiayai pembangunan. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Kewajiban dan Ekuitas Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Metode/Rumus Penghitungan | LKPD |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Rp |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Utang Dalam Negeri

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Utang dalam negeri adalah utang yang dikeluarkan atau dijamin oleh pihak pemerintah pada suatu negara. Bentuk utang negara adalah surat utang yang dikeluarkan oleh pemerintahan nasional. Hal tersebut tentunya berbeda dengan municipal debt yang mana utang tersebut dikeluarkan oleh pemerintah daerah

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Bakeuda
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Semakin kecil utang dalam negeri semakin leluasa pemerintah daerah membiayai pembangunan

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kewajiban dan Ekuitas Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga

Periodisasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

LKPD

Ukuran

Jumlah

Satuan

Rp

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Utang Jangka Panjang Lainnya

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Utang jangka panjang lainnya adalah utang hipotek |
| Unit Penyelenggara | Bakeuda |
| Kelompok Indikator | Aspek Unsur Penunjang |
| Interpretasi | Pemerintahan |
| | Semakin kecil utang jangka panjang lainnya semakin leluasa pemerintah daerah membiayai pembangunan |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Kewajiban dan Ekuitas Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Metode/Rumus Penghitungan | LKPD |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Rp |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Ekuitas

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Ekuitas adalah kepemilikan modal atau kekayaan entitas pemilik terhadap aset pemerintah daerah dihitung dengan jumlah aset dikurangi liabilitas (kewajiban) |
| Unit Penyelenggara | Bakeuda |
| Kelompok Indikator | Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | Semakin besar ekuitas semakin leluasa pemerintah daerah membiayai pembangunan |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Kewajiban dan Ekuitas Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Metode/Rumus Penghitungan | LKPD |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Rp |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Ekuitas Saldo Anggaran Lebih (SAL)

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | | | |
|---------------------|---|-------|-----------|
| Konsep dan Definisi | Ekuitas Saldo Anggaran Lebih (SAL) adalah akumulasi SiLPA/SiKPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutup, ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan. | | |
| Unit Penyelenggara | Bakeuda | | |
| Kelompok Indikator | Aspek | Unsur | Penunjang |
| Interpretasi | Semakin besar ekuitas Saldo Anggaran Lebih semakin leluasa pemerintah daerah membiayai pembangunan. | | |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Kewajiban dan Ekuitas Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga |
| Periodisasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Metode/Rumus Penghitungan | LKPD |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Rp |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Ekuitas untuk dikonsolidasikan adalah nilai ekuitas yang dicatat karena adanya hubungan timbal balik antara entitas akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan entitas akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Aset ini akan dieliminasi saat dilakukan konsolidasi antara SKPD dengan PPKD

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Bakeuda
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Semakin besar ekuitas untuk dikonsolidasikan semakin leluasa pemerintah daerah menutup pengeluaran pemerintah daerah dalam tahun anggaran dimaksud

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kewajiban dan Ekuitas Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

LKPD

Ukuran

Jumlah

Satuan

Rp

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Rasio Lancar

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|--|--|
| Konsep dan Definisi | Rasio lancar adalah rasio yang mencerminkan kemampuan aset lancar perusahaan untuk menutupi kewajiban-kewajiban lancar atau utang jangka pendek. |
| Unit Penyelenggara Kelompok Indikator | Bakeuda Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | Semakin besar rasio lancar semakin baik kemampuan daerah menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Kewajiban dan Ekuitas Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahunan |
| Periodisasi | |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--|
| Metode/Rumus Penghitungan | $\frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Hutang Lancar}} \times 100\%$ |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | % |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Rasio Quick

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Rasio <i>quick</i> adalah rasio yang mencerminkan kemampuan pemerintah daerah untuk melunasi kewajiban-kewajiban lancar atau utang jangka pendek menggunakan aset-aset pemerintah daerah yang paling likuid. |
| Unit Penyelenggara | Bakeuda |
| Kelompok Indikator | Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | Semakin besar rasio <i>quick</i> semakin baik kemampuan pemerintah daerah memenuhi kewajiban lancar. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Kewajiban dan Ekuitas Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|---|
| Metode/Rumus Penghitungan | $\frac{\text{Aktiva Lancar} - \text{Persediaan}}{\text{Utang Lancar}} \times 100\%$ |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | % |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Rasio total hutang terhadap total aset adalah rasio nilai hutang terhadap total aset. Semakin tinggi persentase maka kegiatan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang pemerintah daerah akan berpengaruh terhadap pengelolaan aset. |
| Unit Penyelenggara | Bakeuda |
| Kelompok Indikator | Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | Semakin tinggi rasio utang terhadap total aset, semakin banyak kegiatan yang dapat dilaksanakan, namun juga semakin perlu kehati-hatian dalam pengelolaan utang. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Kewajiban dan Ekuitas Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga |
| Periodisasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--|
| Metode/Rumus Penghitungan | $\frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$ |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | % |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Rasio Hutang Terhadap Modal

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Rasio hutang terhadap modal adalah rasio nilai hutang terhadap modal dimana akan menghitung posisi keuangan suatu pemerintah daerah semakin tinggi persentase maka semakin banyak jumlah utang atau kewajiban pemerintah daerah untuk melunasi hutang yang harus dibayar baik dalam jangka pendek. |
| Unit Penyelenggara | Bakeuda |
| Kelompok Indikator | Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | Semakin tinggi rasio utang terhadap modal, semakin banyak kegiatan yang dapat dilaksanakan, namun juga semakin perlu kehati-hatian dalam pengelolaan utang. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Kewajiban dan Ekuitas Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|---|
| Metode/Rumus Penghitungan | $\frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100\%$ |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | % |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Pendapatan Asli Daerah (PAD)

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. |
| Unit Penyelenggara | Bakeuda |
| Kelompok Indikator | Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 285 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 21 ayat (1) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 26 ayat (1). |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Proporsi Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Output SIMPATDA |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | % |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Dana Perimbangan

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Dana perimbangan adalah alokasi dana yang berasal dari pemasukan APBN, dana perimbangan ini nantinya akan dialirkan pada wilayah otonom. |
| Unit Penyelenggara | Bakeuda |
| Kelompok Indikator | Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Proporsi Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | APBD Tahun Anggaran Berjalan |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | % |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Lain-Lain pendapatan daerah yang sah adalah penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Unit Penyelenggara

Bakeuda

Kelompok Indikator

Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.



■ DATA

| | | | |
|-----------------------|-----------------------|------------|--------|
| Data yang Dikumpulkan | Proporsi | Pendapatan | Daerah |
| Periodesasi | Kabupaten Purbalingga | | |
| | Tahunan | | |

■ METODOLOGI

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Output SIMPATDA |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | % |
| Apakah Indikator Dapat Diakses | Ya |
| Umum | |



Jumlah Pendapatan Daerah

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Jumlah pendapatan daerah adalah penjumlahan PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. |
| Unit Penyelenggara Kelompok Indikator | Bakeuda |
| Interpretasi | Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan Mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Proporsi Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|---|
| Metode/Rumus Penghitungan | Hasil Penjumlahan PAD + Dana Perimbangan + Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | % |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Target

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Target adalah target yang menjadi potensi pendapatan daerah |
| Unit Penyelenggara | Bakeuda |
| Kelompok Indikator | Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | Semakin tinggi target pendapatan daerah semakin besar potensi penerimaan pendapatan daerah |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Pendapatan Asli Daerah (PAD) Atas Aset yang Menjadi Pendapatan di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Lampiran APBD Perubahan |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Rp |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Realisasi

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|--|--|
| Konsep dan Definisi | Realisasi adalah ketercapaian pemerintah daerah dalam memperoleh Pendapatan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. |
| Unit Penyelenggara Kelompok Indikator | Bakeuda Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | Seberapa banyak pendapatan yang telah berhasil dikumpulkan oleh pemerintah daerah. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Pendapatan Asli Daerah (PAD) Atas Aset yang Menjadi Pendapatan di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Output SIMPATDA |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Rp |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Realisasi PAD

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Realisasi PAD adalah ketercapaian pemerintah daerah untuk memperoleh pendapatan di lingkup daerah berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. |
| Unit Penyelenggara | Bakeuda |
| Kelompok Indikator | Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | Jika realisasi PAD meningkat, hal ini dapat mengindikasikan potensi ekonomi yang baik di daerah tersebut. Peningkatan PAD menunjukkan bahwa pendapatan yang dihasilkan oleh aktifitas ekonomi di daerah tersebut meningkat. Ini bisa disebabkan oleh pertumbuhan sektor usaha, investasi yang kuat, peningkatan pendapatan masyarakat, atau peningkatan aktivitas perdagangan. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Pendapatan Asli Daerah (PAD) Atas Aset yang Menjadi Pendapatan di Kabupaten Purbalingga |
| Periododesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Output SIMPATDA |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Rp |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Target PAD

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Target PAD adalah target pendapatan yang diperoleh daerah, yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. |
| Unit Penyelenggara Kelompok Indikator | Bakeuda |
| | Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | Target PAD mencerminkan pendapatan yang diharapkan dari sumber-sumber pendapatan tertentu, seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil dari pengelolaan aset daerah, dan sumber-sumber lainnya. Interpretasi target PAD dapat melibatkan analisis rinci mengenai potensi pendapatan dari masing-masing sumber dan upaya untuk meningkatkan atau memaksimalkan pendapatan dari sumber-sumber tersebut. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Pendapatan Asli Daerah (PAD) Atas Aset yang Menjadi Pendapatan di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--|
| Metode/Rumus Penghitungan | Akumulasi Target Pendapatan dari OPD terkait |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Rp |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Persentase Kenaikan PAD

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Persentase kenaikan PAD adalah perbandingan antara nilai PAD tahun sekarang dengan PAD tahun lalu. |
| Unit Penyelenggara | Bakeuda |
| Kelompok Indikator | Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | Semakin tinggi persentase kenaikan PAD, semakin baik tata kelola PAD, semakin baik indeks kemandirian fiskal daerah. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Pendapatan Asli Daerah (PAD) Atas Aset yang Menjadi Pendapatan di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--|
| Metode/Rumus Penghitungan | $\frac{R_N - R_{N-1}}{R_{N-1}} \times 100\%$ |
| | Keterangan: |
| | R_N = Realisasi PAD Tahun n |
| | R_{N-1} = Realisasi PAD Tahun n-1 |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | % |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Status Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Status opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. dengan tujuan untuk memberikan opini/pendapat atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 |
| Unit Penyelenggara | Bakeuda |
| Kelompok Indikator | Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | Semakin banyak Capaian Opini WTP dari BPK RI, semakin tertib pengelolaan keuangan Daerah. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Status Opini BPK dan Ketepatan Waktu Dokumen Anggaran di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--|
| Metode/Rumus Penghitungan Ukuran | Opini BPK WTP (Paling Baik), WDP, Tidak Wajar, Tidak Memberikan Pendapat (Paling Jelek) |
| Satuan | level |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Jumlah Total Dokumen Penganggaran dan Dokumen Pertanggungjawaban Anggaran

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jumlah total dokumen penganggaran dan dokumen pertanggungjawaban anggaran adalah

dokumen penganggaran yang terdiri dari:

- Perda APBD dan Penjabarannya,
- Perda APBD Perubahan dan Penjabarannya

Dokumen pertanggungjawaban anggaran yang terdiri dari:

- Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Bakeuda

Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan
Jumlah Perda APBD, Perda APBD-P, Perda Pertanggungjawaban APBD, Perbup Penjawaban APBD, serta Perbup Penjabaran APBD-P yang ditetapkan

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Status Opini BPK dan Ketepatan Waktu Dokumen Anggaran di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan
Ukuran

Dokumen APBD dan LKPD
Jumlah

Satuan

dokumen

Apakah Indikator Dapat Diakses
Umum

Ya



Jumlah Dokumen Penganggaran dan Dokumen Pertanggungjawaban Anggaran yang Ditetapkan Tepat Waktu

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | | | |
|---------------------|---|-------|------------------------|
| Konsep dan Definisi | <p>Jumlah dokumen penganggaran dan dokumen pertanggungjawaban anggaran yang ditetapkan tepat waktu adalah indikatornya di PP 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>Pasal 106: Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun,</p> <p>Pasal 179: Pengambilan keputusan mengenai rancangan Perda tentang perubahan APBD dilakukan oleh DPRD bersama Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir.</p> <p>LKPD disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekda paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir</p> | | |
| Unit Penyelenggara | Bakeuda | | |
| Kelompok Indikator | Aspek | Unsur | Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | Semakin banyak jumlah dokumen penganggaran dan dokumen pertanggungjawaban anggaran yang ditetapkan tepat waktu, semakin tertib pengelolaan keuangan daerah | | |



■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Status Opini BPK dan Ketepatan Waktu Dokumen Anggaran di Kabupaten Purbalingga Tahunan

Periodesasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Dokumen APBD dan LKPD

Ukuran

Jumlah

Satuan

dokumen

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Persentase Dokumen Penganggaran dan Dokumen Pertanggungjawaban Anggaran yang Ditetapkan Tepat Waktu

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Persentase dokumen penganggaran dan dokumen pertanggungjawaban anggaran yang ditetapkan tepat waktu adalah persentase jumlah dokumen yang diberikan secara tepat waktu dibanding dengan dokumen penganggaran yang diminta semakin tinggi persentase maka tepat waktu dalam pelaksanaan kegiatan. |
| Unit Penyelenggara Kelompok Indikator | Bakeuda |
| | Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | Semakin tinggi persentase dokumen penganggaran dan dokumen pertanggungjawaban anggaran yang ditetapkan tepat waktu, semakin tertib pengelolaan keuangan Daerah. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Status Opini BPK dan Ketepatan Waktu Dokumen Anggaran di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|---------------------------|---|
| Metode/Rumus Penghitungan | $\frac{JTW}{JT} \times 100\%$ |
| | Keterangan: |
| | JTW = Jumlah Dokumen |
| | Penganggaran dan Dokumen |



| | | | |
|--------------|-----------|-----------------------------|--|
| | | | Pertanggungjawaban Anggaran yang Ditetapkan Tepat Waktu |
| | | JT = Jumlah Total Dokumen | |
| | | Penganggaran dan Dokumen | |
| | | Pertanggungjawaban Anggaran | |
| Ukuran | | Persentase | |
| Satuan | | % | |
| Apakah | Indikator | Dapat | Ya |
| Diakses Umum | | | |



Jumlah Wajib Pajak

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Jumlah wajib pajak adalah orang pribadi atau suatu badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. |
| Unit Penyelenggara | Bakeuda |
| Kelompok Indikator | Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | Jumlah wajib pajak yang lebih banyak menunjukkan adanya peningkatan aktivitas ekonomi, peningkatan jumlah pekerjaan, dan pertumbuhan sektor usaha. Ini bisa menjadi indikator positif karena lebih banyak orang pribadi atau badan usaha yang memiliki kegiatan yang menimbulkan kewajiban perpajakan. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Persentase PBB yang terbayar oleh Wajib Pajak di Kabupaten Purbalingga |
| Periododesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | WP PBB - P2 |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | WP |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Jumlah Pajak Bumi Bangunan

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Jumlah PBB adalah potensi nilai PBB apabila wajib pajak memenuhi pembayaran PBB. |
| Unit Penyelenggara | Bakeuda |
| Kelompok Indikator | Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | Jika jumlah PBB meningkat, hal ini dapat menunjukkan pertumbuhan sektor properti di Kabupaten Purbalingga. Jumlah PBB yang lebih tinggi dapat mengindikasikan peningkatan nilai dan jumlah bangunan yang ada. Hal ini dapat mencerminkan pertumbuhan ekonomi, investasi dalam sektor properti, atau peningkatan pembangunan perumahan dan komersial. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Persentase PBB yang terbayar oleh Wajib Pajak di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|---|
| Metode/Rumus Penghitungan | Nilai Pokok Ketetapan PBB yang ditetapkan |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Rp |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Jumlah PBB yang terbayar

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Jumlah PBB yang terbayar adalah realisasi nilai PBB yang telah dibayar oleh wajib pajak |
| Unit Penyelenggara | Bakeuda |
| Kelompok Indikator | Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | Semakin banyak jumlah PBB yang dibayar, ini dapat menunjukkan pertumbuhan sektor properti di suatu wilayah. Semakin banyak jumlah PBB yang dibayar dapat mengindikasikan peningkatan nilai jual objek pajak serta jumlah bangunan yang ada. Hal ini dapat mencerminkan pertumbuhan ekonomi, investasi dalam sektor properti, atau peningkatan pembangunan perumahan dan komersial. Juga menunjukkan meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Persentase PBB yang terbayar oleh Wajib Pajak di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Nilai rupiah PBB yang telah disetor |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Rp |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Persentase PBB yang terbayar oleh Wajib Pajak

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Persentase PBB yang terbayar oleh wajib pajak adalah perbandingan jumlah PBB terbayar dengan jumlah PBB. |
| Unit Penyelenggara | Bakeuda |
| Kelompok Indikator | Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | Semakin tinggi Persentase PBB yang terbayar oleh wajib pajak mengindikasikan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap kewajiban perpajakan. Tingkat kepatuhan yang tinggi mencerminkan efektifitas sistem perpajakan dan komitmen wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Persentase PBB yang terbayar oleh Wajib Pajak di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--|
| Metode/Rumus | $\frac{\text{Jumlah PBB yang terbayar}}{\text{Jumlah ketetapan PBB}} \times 100\%$ |
| Penghitungan | |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | % |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



METADATA INDIKATOR STATISTIK SEKTORAL

**BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**



Kualifikasi

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Kualifikasi adalah data pendidikan formal terakhir PNS Kabupaten Purbalingga

Unit Penyelenggara

BKPSDM

Kelompok Indikator

Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai kualifikasi pendidikan formal PNS dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah. Dimensi

Kualifikasi diperhitungkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari keseluruhan Pengukuran.

Indikator yang digunakan adalah jenjang pendidikan formal terakhir yang dicapai oleh PNS dengan nilai

1. mendapat nilai 1% jika pendidikan Dibawah SLTA
2. mendapat nilai 5 % jika pendidikan D-I, D-II, SLTA, atau sederajat
3. mendapat nilai 10 % jika pendidikan D-III
4. mendapat nilai 15 % jika pendidikan S1
5. mendapat nilai 20 % jika pendidikan S2
6. mendapat nilai 25 % jika pendidikan S3



■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Indeks Profesionalitas ASN Per Dimensi dan Indeks Penerapan Sistem Merit ASN di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--|
| Metode/Rumus Penghitungan | Dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian BKN (SAPK BKN) |
| Ukuran | nilai |
| Satuan | angka |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | tidak |



Kompetensi

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Kompetensi adalah data pengembangan kompetensi PNS Kabupaten Purbalingga |
| Unit Penyelenggara | BKPSDM |
| Kelompok Indikator | Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | Digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan dengan kategori <ol style="list-style-type: none"> 1. Diklat kepemimpinan 2. Diklat Fungsional 3. Diklat teknis 4. Seminar/ Workshop/ Magang/ Kursus/ sejenisnya |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Indeks Profesionalitas ASN Per Dimensi dan Indeks Penerapan Sistem Merit ASN di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--|
| Metode/Rumus Penghitungan | Dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian BKN (SAPK BKN) |
| Ukuran | nilai |
| Satuan | angka |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | tidak |



Kinerja

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|--|--|
| Konsep dan Definisi | Kinerja adalah data hasil penilaian kinerja PNS Kabupaten Purbalingga BKPSDM |
| Unit Penyelenggara Kelompok Indikator | Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | Digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. mencakup hal: 1. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 2. Perilaku Kerja Pegawai (PKP). |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Indeks Profesionalitas ASN Per Dimensi dan Indeks Penerapan Sistem Merit ASN di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|--|--|
| Metode/Rumus Penghitungan | Dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian BKN (SAPK BKN) |
| Ukuran Satuan | nilai angka |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | tidak |



Disiplin

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Disiplin adalah data hukuman disiplin PNS Kabupaten Purbalingga BKPSDM |
| Unit Penyelenggara | Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Kelompok Indikator | Digunakan untuk mengukur data/informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman yang pernah diterima PNS dengan nilai diantaranya |
| Interpretasi | <ol style="list-style-type: none"> 1. nilai 5 jika tidak terkena hukuman disiplin 2. nilai 3 jika terkena hukuman disiplin ringan 3. nilai 2 jika terkena hukuman sedang 4. nilai 1 jika terkena hukuman berat |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Indeks Profesionalitas ASN Per Dimensi dan Indeks Penerapan Sistem Merit ASN di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--|
| Metode/Rumus Penghitungan | Dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian BKN (SAPK BKN) |
| Ukuran | nilai |
| Satuan | angka |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | tidak |



Indeks Profesionalitas ASN

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Indeks Profesionalitas ASN adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN.

Unit Penyelenggara

BKPSDM

Kelompok Indikator

Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan

Interpretasi

Kategori masuk dalam penilaian Indeks Profesionalitas ASN dengan

1. 91 - 100 masuk kategori Sangat Tinggi
2. 81 - 90 masuk kategori Tinggi
3. 71 - 80 masuk kategori Sedang
4. 61 - 70 masuk kategori Rendah
5. dibawah 60 masuk kategori Sangat Rendah

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Indeks Profesionalitas ASN Per Dimensi dan Indeks Penerapan Sistem Merit ASN di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian BKN



| | | | |
|---------|-----------|-------|------------|
| | | | (SAPK BKN) |
| Ukuran | | | Indeks |
| Satuan | | | angka |
| Apakah | Indikator | Dapat | tidak |
| Diakses | Umum | | |



Predikat Indeks Profesionalitas ASN

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Predikat Indeks Profesionalitas ASN adalah predikat/ sebutan dalam penilaian Indeks Profesionalitas ASN BKPSDM |
| Unit Penyelenggara Kelompok Indikator | Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | Kategori masuk dalam penilaian Indeks Profesionalitas ASN dengan <ol style="list-style-type: none">1. 91 - 100 masuk kategori Sangat Tinggi2. 81 - 90 masuk kategori Tinggi3. 71 - 80 masuk kategori Sedang4. 61 - 70 masuk kategori Rendah5. dibawah 60 masuk kategori Sangat Rendah |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Indeks Profesionalitas ASN Per Dimensi dan Indeks Penerapan Sistem Merit ASN di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|---------------------------|--|
| Metode/Rumus Penghitungan | Dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian BKN (SAPK BKN) |
| Ukuran | Predikat |



Satuan

Apakah Indikator

Diakses Umum

Dapat

Tanpa satuan

tidak



Indeks Penerapan Sistem Merit ASN

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Sistem Merit ASN adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi |
| Unit Penyelenggara | BKPSDM |
| Kelompok Indikator | Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | Sistem merit dalam manajemen ASN dengan tanpa diskriminasi artinya bahwa tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau kondisi kecacatan |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Indeks Profesionalitas ASN Per Dimensi dan Indeks Penerapan Sistem Merit ASN di Kabupaten Purbalingga |
| Periodisasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|---|
| Metode/Rumus Penghitungan | Release dari KASN melalui Aplikasi SIPINTER (Sistem Informasi Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit) |
| Ukuran | Indeks |
| Satuan | angka |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | tidak |



Predikat Indeks Penerapan Sistem Merit ASN

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | | | |
|---------------------|---|-------|-----------|
| Konsep dan Definisi | Predikat indeks penerapan sistem merit ASN adalah predikat/sebutan dalam penilaian Indeks Penerapan Sistem Merit ASN | | |
| Unit Penyelenggara | BKPSDM | | |
| Kelompok Indikator | Aspek | Unsur | Penunjang |
| Interpretasi | 1. kategori I nilai 100-174 indeks 0,20-0,4 sebutan buruk 2. kategori II nilai 175-249 indeks 0,41-0,6 sebutan kurang 3. kategori III nilai 250-324 indeks 0,61-0,8 sebutan baik 4. kategori IV nilai 325-400 indeks 0,81-1,0 kategori sangat baik | | |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Indeks Profesionalitas ASN Per Dimensi dan Indeks Penerapan Sistem Merit ASN di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|---|
| Metode/Rumus Penghitungan | Release dari KASN melalui Aplikasi SIPINTER (Sistem Informasi Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit) |
| Ukuran | Predikat |
| Satuan | Tanpa satuan |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | tidak |



Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS)

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional di Wilayah Pemerintah Kabupaten Purbalingga |
| Unit Penyelenggara Kelompok Indikator | BKPSDM Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) menunjukkan jumlah seluruh ASN di wilayah pemerintah Kabupaten Purbalingga |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | berdasarkan e-kepegawaian |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | orang |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | ya |



Jumlah Pegawai Kontrak (PTT)

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Pegawai Kontrak (PTT) adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas Pemerintahan dan Pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian. Pegawai PTT diangkat |
| Unit Penyelenggara | BKPSDM |
| Kelompok Indikator | Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | Jumlah PTT menunjukkan jumlah pegawai kontrak yang diangkat berdasarkan SK Bupati pada setiap OPD di wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Purbalingga |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Purbalingga |
| Periodisasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Berdasarkan SK Bupati |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | orang |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | ya |



Jumlah Tenaga Harian Lepas (THL)

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Tenaga Harian Lepas (THL) adalah pegawai yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan diangkat oleh Kepala Perangkat Daerah/Bagian di wilayah pemerintah Kabupaten Purbalingga yang honorinya dibayar dengan APBD Tingkat Kabupaten/Kota pada masing-masing OPD/Bagian |
| Unit Penyelenggara | BKPSDM |
| Kelompok Indikator | Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | Jumlah THL menunjukkan jumlah pegawai yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten/ Kota dan diangkat oleh Kepala Perangkat Daerah/Bagian yang honorinya dibayar dengan APBD Tingkat Kabupaten/Kota pada masing-masing OPD/Bagian |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Purbalingga |
| Periododesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | data tahunan |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | orang |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | ya |



Jumlah Guru Tidak Tetap (GTT) SK Bupati

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Guru Tidak Tetap (GTT) SK Bupati adalah seseorang yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi guru yang diangkat dan/atau ditugaskan sebagai guru oleh pejabat pembina kepegawaian untuk melaksanakan tugas sebagai guru pengganti pada sekolah negeri di Wilayah Pemerintah Kabupaten Purbalingga BKPSDM |
| Unit Penyelenggara | Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Kelompok Indikator | |
| Interpretasi | GTT SK Bupati merupakan seseorang yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi guru yang diangkat dan/atau ditugaskan sebagai guru oleh pejabat pembina kepegawaian untuk melaksanakan tugas sebagai guru pengganti pada sekolah negeri yang ditetapkan dengan SK bupati |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | data tahunan |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | orang |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | ya |



Jumlah Guru Tidak Tetap (GTT) Belum SK Bupati

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Guru Tidak Tetap (GTT) belum SK Bupati adalah seseorang yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi guru yang diangkat dan/atau ditugaskan sebagai guru oleh Kepala Sekolah untuk melaksanakan tugas sebagai guru pengganti pada sekolah Negeri di wilayah Pemerintah Kabupaten Purbalingga |
| Unit Penyelenggara | BKPSDM |
| Kelompok Indikator | Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | GTT belum SK Bupati merupakan seseorang yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi guru yang diangkat dan/atau ditugaskan sebagai guru oleh Kepala Sekolah untuk melaksanakan tugas sebagai guru pengganti pada sekolah negeri yang ditetapkan dengan SK selain SK Bupati |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Purbalingga |
| Periododesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | data tahunan |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | orang |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | ya |



Jumlah PTO (Petugas Teknis Operasional)

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | PTO (Petugas Teknis Operasional) adalah aparat pada Satpol PP Kabupaten Purbalingga yang dibentuk untuk menegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat terdiri atas THL dan PTT |
| Unit Penyelenggara | BKPSDM |
| Kelompok Indikator | Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | Pengadaan PTO merupakan respon keterbatasan tenaga Satpol PP yang berstatus PNS, penugasan utamanya pelaksanaan kegiatan penegakkan perda, PAM obyek vital (rumah dinas) maupun penugasan lainnya |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | data tahunan |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | orang |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | ya |



Jumlah P3K

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------------------------|---|
| Konsep dan Definisi | P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) adalah pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang yang berada di wilayah Pemerintah Kabupaten Purbalingga BKPSDM |
| Unit Penyelenggara Kelompok Indikator | Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | P3K merupakan Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | data tahunan |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | orang |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | ya |



Jumlah PNS Berdasarkan Jenis Kelamin

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Jumlah PNS berdasarkan jenis kelamin adalah jumlah PNS Kabupaten Purbalingga yang terdaftar di kabupaten dibagi dengan jenis kelamin |
| Unit Penyelenggara | BKPSDM |
| Kelompok Indikator | Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | Jumlah PNS yang diklasifikasikan sesuai dengan jenis kelamin |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | berdasarkan e-kepegawaian |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | orang |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | ya |



Jumlah PNS Laki-Laki

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Jumlah pns laki-laki adalah jumlah PNS laki-laki yang terdaftar di Kabupaten Purbalingga |
| Unit Penyelenggara | BKPSDM |
| Kelompok Indikator | Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | Seluruh PNS di Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang berjenis kelamin laki-laki |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | berdasarkan e-kepegawaian |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | orang |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | ya |



Jumlah PNS Perempuan

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Jumlah PNS perempuan adalah jumlah PNS perempuan yang terdaftar di Kabupaten Purbalingga BKPSDM |
| Unit Penyelenggara | Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Kelompok Indikator | Seluruh PNS di Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang berjenis kelamin perempuan |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Purbalingga |
| Periodisasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | berdasarkan e-kepegawaian |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | orang |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | ya |



Jumlah PNS Berdasarkan Pendidikan

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Jumlah PNS berdasarkan pendidikan adalah jumlah PNS di Kabupaten Purbalingga yang dibagi berdasarkan pendidikan terakhir |
| Unit Penyelenggara | BKPSDM |
| Kelompok Indikator | Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | Jumlah PNS yang diklasifikasikan sesuai dengan tingkat pendidikan terakhir. Jumlah ini menunjukkan distribusi atau perbandingan jumlah PNS yang memiliki berbagai tingkat pendidikan. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Purbalingga |
| Periodisasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | berdasarkan e-kepegawaian |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | orang |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | ya |



Jumlah PNS Tamat SD

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | PNS tamat SD adalah PNS Kabupaten Purbalingga dengan pendidikan terakhir SD |
| Unit Penyelenggara | BKPSDM |
| Kelompok Indikator | Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | <p>Jumlah PNS di Kabupaten Purbalingga dengan pendidikan terakhir SD.</p> <p>Perlu diingat bahwa memiliki PNS dengan tingkat pendidikan rendah bukanlah hal yang negatif jika mereka mengisi peran dan tanggung jawab mereka dengan baik dan mampu memberikan pelayanan yang memadai. Namun, untuk beberapa posisi tertentu, kualifikasi pendidikan yang lebih tinggi mungkin penting untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Oleh karena itu, penting untuk memahami konteks, kebijakan, dan alasan di balik distribusi PNS berdasarkan tingkat pendidikan.</p> |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Purbalingga |
| Periododesasi | Tahunan |



■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | berdasarkan e-kepegawaian |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | orang |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | ya |



Jumlah PNS Tamat SMP

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | PNS tamat SMP adalah PNS Kabupaten Purbalingga dengan pendidikan terakhir SMP |
| Unit Penyelenggara | BKPSDM |
| Kelompok Indikator | Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | <p>Jumlah PNS di Kabupaten Purbalingga dengan pendidikan terakhir SMP.</p> <p>Peningkatan PNS dengan latar belakang pendidikan SMP dapat mengindikasikan adanya penyesuaian kualifikasi pekerjaan atau perubahan tugas tertentu yang tidak memerlukan tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Beberapa peran administratif atau dukungan teknis mungkin dapat diisi oleh PNS dengan pendidikan SMP, sementara pekerjaan yang lebih teknis atau kualifikasi khusus membutuhkan latar belakang pendidikan yang lebih tinggi.</p> |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Purbalingga |
| Periododesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | berdasarkan e-kepegawaian |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | orang |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | ya |



Jumlah PNS Tamat SMA/SMK

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | PNS tamat SMA/SMK adalah PNS Kabupaten Purbalingga dengan pendidikan terakhir SMA/SMK |
| Unit Penyelenggara | BKPSDM |
| Kelompok Indikator | Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | Jumlah PNS di Kabupaten Purbalingga dengan pendidikan terakhir SMA/SMK. Kenaikan jumlah PNS dengan pendidikan terakhir SMA/SMK juga bisa mencerminkan tingkat persaingan yang lebih rendah untuk posisi tertentu dalam pelayanan publik dibandingkan dengan posisi yang memerlukan latar belakang pendidikan lebih tinggi |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Purbalingga |
| Periodisasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | berdasarkan e-kepegawaian |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | orang |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | ya |



Jumlah PNS Tamat D1

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | PNS tamat D1 adalah PNS Kabupaten Purbalingga dengan pendidikan terakhir D1 |
| Unit Penyelenggara | BKPSDM |
| Kelompok Indikator | Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | Jumlah PNS di Kabupaten Purbalingga dengan pendidikan terakhir D1 Peningkatan jumlah PNS dengan pendidikan D1 juga bisa mencerminkan kebutuhan akan tenaga kerja dengan keterampilan teknis tertentu yang dapat diperoleh melalui program diploma. Kabupaten mungkin memiliki permintaan khusus untuk lulusan D1 dalam bidang-bidang tertentu yang relevan dengan pekerjaan di sektor publik. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Purbalingga |
| Periodisasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | berdasarkan e-kepegawaian |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | orang |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | ya |



Jumlah PNS Tamat D2

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | PNS tamat D2 adalah PNS Kabupaten Purbalingga dengan pendidikan terakhir D2 |
| Unit Penyelenggara | BKPSDM |
| Kelompok Indikator | Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | Jumlah PNS di Kabupaten Purbalingga dengan pendidikan terakhir D2 PNS dengan pendidikan terakhir D2 biasanya memiliki keterampilan teknis dan pengetahuan yang lebih khusus dibandingkan dengan lulusan SMA/SMK. Jika jumlah PNS dengan pendidikan D2 meningkat, ini dapat menunjukkan upaya pemerintah kabupaten untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor pelayanan publik dengan merekrut individu yang memiliki kompetensi lebih tinggi. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Purbalingga |
| Periododesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | berdasarkan e-kepegawaian |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | orang |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | ya |



Jumlah PNS Tamat D3

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | PNS tamat D3 adalah PNS Kabupaten Purbalingga dengan pendidikan terakhir D3 |
| Unit Penyelenggara | BKPSDM |
| Kelompok Indikator | Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | Jumlah PNS di Kabupaten Purbalingga dengan pendidikan terakhir D3 Beberapa posisi di pemerintah daerah mungkin memerlukan latar belakang pendidikan D3 sebagai syarat kualifikasi pekerjaan. Jika ada peningkatan jumlah PNS dengan D3, hal ini bisa mencerminkan kebutuhan akan keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan tugas dan tanggung jawab pekerjaan tersebut. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | berdasarkan e-kepegawaian |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | orang |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | ya |



Jumlah PNS Tamat D4

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | PNS tamat D4 adalah PNS Kabupaten Purbalingga dengan pendidikan terakhir D4 |
| Unit Penyelenggara | BKPSDM |
| Kelompok Indikator | Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | Jumlah PNS di Kabupaten Purbalingga dengan pendidikan terakhir D4 Jumlah PNS dengan D4 juga dapat meningkat jika ada permintaan khusus untuk jabatan-jabatan tertentu yang memerlukan latar belakang pendidikan D4 sebagai persyaratannya. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Purbalingga |
| Periodisasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | berdasarkan e-kepegawaian |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | orang |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | ya |



Jumlah PNS Tamat S1

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | PNS tamat S1 adalah PNS Kabupaten Purbalingga dengan pendidikan terakhir S1 |
| Unit Penyelenggara | BKPSDM |
| Kelompok Indikator | Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | Jumlah PNS di Kabupaten Purbalingga dengan pendidikan terakhir S1 Jika banyak posisi PNS di kabupaten tersebut membutuhkan pengetahuan dan keterampilan khusus yang hanya dapat diperoleh dari lulusan sarjana, maka peningkatan jumlah PNS berpendidikan S1 dapat dianggap sebagai upaya untuk memenuhi tuntutan pekerjaan yang semakin kompleks. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | berdasarkan e-kepegawaian |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | orang |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | ya |



Jumlah PNS Tamat S2

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | PNS tamat S2 adalah PNS Kabupaten Purbalingga dengan pendidikan terakhir S2 |
| Unit Penyelenggara | BKPSDM |
| Kelompok Indikator | Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | Jumlah PNS di Kabupaten Purbalingga dengan pendidikan terakhir S2 Tingkat pendidikan S2 seringkali berhubungan dengan bidang spesialisasi dan keahlian tertentu. Jika banyak PNS dengan S2, ini bisa menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten memberikan perhatian khusus pada perekrutan tenaga yang memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus dalam bidang tertentu, seperti manajemen publik, kebijakan, atau bidang teknis lainnya. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Purbalingga |
| Periododesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | berdasarkan e-kepegawaian |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | orang |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | ya |



Jumlah PNS Tamat S3

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | PNS tamat S3 adalah PNS Kabupaten Purbalingga dengan pendidikan terakhir S3 |
| Unit Penyelenggara | BKPSDM |
| Kelompok Indikator | Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | <p>Jumlah PNS di Kabupaten Purbalingga dengan pendidikan terakhir S3.</p> <p>Semakin banyak PNS dengan latar belakang pendidikan S3 bisa menunjukkan fokus yang lebih besar pada penelitian, inovasi, dan pembangunan berbasis ilmu pengetahuan di kabupaten tersebut.</p> |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Purbalingga |
| Periodisasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | berdasarkan e-kepegawaian |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | orang |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | ya |



Jumlah PNS Berdasarkan Golongan

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jumlah PNS Berdasarkan Golongan adalah Jumlah ASN Kabupaten Purbalingga yang dibagi berdasarkan tingkat atau kedudukan seorang PNS berdasarkan jabatan dalam rangkaian sistem kepegawaian sebagai dasar untuk penggajian. Kenaikan pangkat seorang PNS merupakan sebuah penghargaan atas prestasi kerja dan pengabdianya kepada negara. Kenaikan pangkat ada dua jenis, yaitu reguler dan kenaikan pangkat pilihan.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

BKPSDM
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Jumlah ASN yang dibagi berdasarkan tingkat atau kedudukan seorang PNS berdasarkan jabatan dalam rangkaian sistem kepegawaian sebagai dasar untuk penggajian. Kenaikan pangkat seorang PNS merupakan sebuah penghargaan atas prestasi kerja dan pengabdianya kepada negara. Kenaikan pangkat ada dua jenis, yaitu reguler dan kenaikan pangkat pilihan



■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN)
di Kabupaten Purbalingga
Tahunan

Periododesasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

berdasarkan e-kepegawaian

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

ya

Umum



Jumlah Pegawai Golongan I

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | PNS gol I adalah Golongan I atau disebut sebagai pangkat 'Juru' merupakan golongan terendah, yang terdiri dari PNS golongan Ia, Ib, Ic, dan Id. |
| Unit Penyelenggara | BKPSDM |
| Kelompok Indikator | Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | Banyaknya ASN golongan I di Pemerintah Kabupaten Purbalingga Penting untuk diingat bahwa interpretasi yang lebih akurat memerlukan data yang lebih lengkap dan pemahaman konteks yang lebih baik tentang kebijakan, kondisi ekonomi, dan strategi perekrutan tenaga kerja di pemerintah daerah tersebut. Selain itu, penting juga untuk mempertimbangkan kualitas dan efisiensi dalam penerimaan PNS serta dampaknya terhadap kualitas layanan publik. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Purbalingga |
| Periodisasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | berdasarkan e-kepegawaian |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | orang |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | ya |



Jumlah Pegawai Golongan II

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------------------------|--|
| Konsep dan Definisi | PNS gol II adalah Golongan II atau pangkat 'Pengatur' terdiri dari golongan IIa, IIb, IIc, dan IId BKPSDM |
| Unit Penyelenggara Kelompok Indikator | Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | Banyaknya ASN golongan II di Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Penting untuk dicatat bahwa peningkatan jumlah PNS di golongan II bukanlah sesuatu yang negatif, namun interpretasi yang akurat memerlukan pemahaman tentang kebijakan pemerintah daerah, kebutuhan layanan publik, perubahan struktur organisasi, dan keadaan tenaga kerja di wilayah tersebut. Pemerintah daerah harus terus memastikan bahwa rekrutmen dan pengelolaan pegawai berlangsung secara transparan, efisien, dan berfokus pada meningkatkan kualitas layanan publik. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Purbalingga |
| Periododesasi | Tahunan |



■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | berdasarkan e-kepegawaian |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | orang |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | ya |



Jumlah Pegawai Golongan III

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | PNS gol III adalah Golongan III atau pangkat 'Penata' terdiri dari golongan IIIa, IIIb, IIIc, dan IIId BKPSDM |
| Unit Penyelenggara | Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Kelompok Indikator | |
| Interpretasi | Banyaknya ASN golongan III di Pemerintah Kabupaten Purbalingga Penting untuk diingat bahwa interpretasi data tentang jumlah PNS golongan III perlu dilihat dalam konteks yang lebih luas dan melibatkan informasi tambahan seperti kebijakan pemerintah daerah, situasi ekonomi, dan strategi pengelolaan sumber daya manusia. Jumlah PNS golongan III yang meningkat dapat memberikan petunjuk tentang dinamika pemerintah daerah, tetapi analisis yang lebih mendalam diperlukan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Purbalingga |
| Periododesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | berdasarkan e-kepegawaian |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | orang |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | ya |



Jumlah Pegawai Golongan IV

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | PNS gol IV adalah Golongan IV atau disebut juga dengan pangkat 'Pembina' terdiri dari IVa, IVb, IVc, IVd, dan IVe. |
| Unit Penyelenggara | BKPSDM |
| Kelompok Indikator | Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | Banyaknya ASN golongan IV di Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Interpretasi yang akurat memerlukan analisis lebih lanjut tentang konteks dan kebijakan yang ada di kabupaten tersebut. Dalam menginterpretasikan data, perlu diingat bahwa distribusi golongan PNS harus dilihat bersama-sama dengan kebutuhan, tujuan, dan strategi pengelolaan sumber daya manusia di kabupaten tersebut. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | berdasarkan e-kepegawaian |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | orang |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | ya |



Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Jumlah PNS berdasarkan jabatan adalah jumlah PNS berdasarkan jabatan sesuai dengan SK Bupati Purbalingga |
| Unit Penyelenggara | BKPSDM |
| Kelompok Indikator | Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | Jumlah PNS berdasarkan jabatan sesuai dengan SK Bupati |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | berdasarkan e-kepegawaian |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | orang |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | ya |



Jumlah Fungsional Tertentu

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Fungsional tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri sipil dalam suatu organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan atas keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri yang kenaikan pangkatnya dida

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

BKPSDM
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Jumlah PNS di Kabupaten Purbalingga dengan jabatan fungsional tertentu.

Jumlah PNS yang meningkat dalam fungsional tertentu dapat mencerminkan fokus pemerintah atau instansi terkait pada pengembangan keahlian khusus dalam bidang tersebut. Ini bisa disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan atau permintaan untuk layanan atau keterampilan tertentu dalam sektor atau wilayah tertentu.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan



■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | berdasarkan e-kepegawaian |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | orang |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | ya |



Jumlah Fungsional Umum

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Fungsional umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang CPNS dan PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keterampilan tertentu dan untuk kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit |
| Unit Penyelenggara | BKPSDM |
| Kelompok Indikator | Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | Jumlah PNS di Kabupaten Purbalingga dengan jabatan fungsional umum |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Purbalingga |
| Periodisasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | berdasarkan e-kepegawaian |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | orang |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | ya |



Jumlah Eselon V

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Eselon V adalah jabatan struktural atau eselon tingkat kelima atau terendah. Golongan pangkat eselon V terbagi menjadi golongan tertinggi III/b dan golongan terendah III/a. |
| Unit Penyelenggara | BKPSDM |
| Kelompok Indikator | Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | PNS dengan jabatan Eselon V tidak ada di Pemkab Purbalingga |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Purbalingga |
| Periodisasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | berdasarkan e-kepegawaian |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | orang |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | ya |



Jumlah Eselon IV

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Eselon IV adalah jabatan struktural atau eselon tingkat keempat. Jenjang pangkat eselon III ada 2 yaitu eselon IVA dan eselon IVB, dengan golongan tertinggi III/d dan golongan terendah III/b. |
| Unit Penyelenggara | BKPSDM |
| Kelompok Indikator | Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | Jumlah PNS di Kabupaten Purbalingga dengan jabatan eselon IV Peningkatan jumlah pejabat Eselon IV juga bisa terkait dengan penyesuaian struktur organisasi untuk menghadapi perubahan tuntutan atau prioritas pemerintah. Peningkatan jumlah pejabat di tingkat manajerial ini dapat mencerminkan adanya peningkatan tugas dan tanggung jawab dalam organisasi pemerintahan. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Purbalingga |
| Periodisasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | berdasarkan e-kepegawaian |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | orang |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | ya |



Jumlah Eselon III

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Eselon III adalah jabatan struktural atau eselon tingkat ketiga. Jenjang pangkat eselon III ada 2 yaitu eselon IIIA dan eselon IIIB, dengan golongan tertinggi IV/b dan golongan terendah III/d. |
| Unit Penyelenggara | BKPSDM |
| Kelompok Indikator | Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | Jumlah PNS di Kabupaten Purbalingga dengan jabatan eselon III Penting untuk dicatat bahwa interpretasi yang akurat memerlukan analisis lebih lanjut tentang konteks, kebijakan pemerintah, dan tujuan di balik peningkatan jumlah pejabat Eselon III. Pemerintah perlu memastikan bahwa peningkatan jumlah pejabat Eselon III mendukung efisiensi, efektivitas, dan pelayanan publik yang berkualitas. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Purbalingga |
| Periodisasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | berdasarkan e-kepegawaian |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | orang |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | ya |



Jumlah Eselon II

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Eselon II adalah jabatan struktural atau eselon tingkat kedua. Jenjang pangkat eselon II ada 2 yaitu eselon IIA dan eselon IIB, dengan golongan tertinggi IV/d dan golongan terendah IV/b. |
| Unit Penyelenggara | BKPSDM |
| Kelompok Indikator | Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | Jumlah PNS di Kabupaten Purbalingga dengan jabatan eselon II . Penting untuk dicatat bahwa interpretasi yang akurat memerlukan analisis lebih lanjut tentang konteks, kebijakan pemerintah, dan tujuan di balik peningkatan jumlah pejabat Eselon II. Pemerintah perlu memastikan bahwa peningkatan jumlah pejabat Eselon II mendukung efisiensi, efektivitas, dan pelayanan publik yang berkualitas. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | berdasarkan e-kepegawaian |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | orang |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | ya |



Jumlah Eselon I

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Eselon I adalah jabatan struktural atau eselon tingkat tertinggi. Jenjang pangkat Eselon 1 ada 2 yaitu eselon IA dan eselon IB, dengan yang golongan tertinggi IV/e dan golongan terendah IV/d. |
| Unit Penyelenggara | BKPSDM |
| Kelompok Indikator | Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | Jumlah PNS di Kabupaten Purbalingga dengan jabatan eselon I Jumlah pejabat Eselon I yang meningkat juga bisa disebabkan oleh kebutuhan khusus di berbagai sektor atau bidang pemerintahan. Beberapa posisi di tingkat Eselon I mungkin membutuhkan keahlian khusus atau pengetahuan mendalam dalam bidang tertentu. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Purbalingga |
| Periodisasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | berdasarkan e-kepegawaian |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | orang |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | ya |



Jumlah PNS Pensiun

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Jumlah PNS pensiun adalah jumlah PNS Kabupaten Purbalingga yang telah mengajukan pengunduran diri dari ASN yang sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil |
| Unit Penyelenggara | BKPSDM |
| Kelompok Indikator | Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | Dengan mengetahui jumlah PNS yang akan pensiun dalam periode tertentu, pemerintah atau organisasi dapat merencanakan penggantian pegawai yang pensiun dengan merekrut atau melatih pegawai baru. Interpretasi jumlah PNS pensiun dapat memberikan informasi tentang kebutuhan dan tantangan dalam pengelolaan tenaga kerja dan suksesi kepemimpinan di sektor publik. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Pengadaan CPNS di Kabupaten Purbalingga |
| Periododesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | berdasarkan e-kepegawaian |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | orang |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | ya |



Usulan Kebutuhan CPNS

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Jumlah usulan kebutuhan adalah jumlah dan jenis jabatan ASN yang dibutuhkan pada masing-masing instansi |
| Unit Penyelenggara | BKPSDM |
| Kelompok Indikator | Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | Jumlah dan jenis jabatan ASN yang diperlukan untuk melaksanakan tugas instansi secara efektif dan efisien untuk jangka waktu tertentu |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Pengadaan CPNS di Kabupaten Purbalingga |
| Periodisasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | penghitungan manual |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | orang |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | ya |



Jumlah CPNS yang Mendaftar

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Jumlah CPNS yang mendaftar adalah angka atau data yang menunjukkan total jumlah calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang mendaftar untuk mengikuti seleksi atau penerimaan sebagai PNS |
| Unit Penyelenggara | BKPSDM |
| Kelompok Indikator | Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | <p>Jumlah orang yang memenuhi persyaratan dalam pendaftaran CPNS.</p> <p>Perlu diingat bahwa interpretasi yang akurat memerlukan analisis lebih lanjut tentang kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi, dan dinamika tenaga kerja di wilayah atau negara tertentu. Jumlah pendaftar CPNS juga perlu dibandingkan dengan kuota yang ditetapkan oleh pemerintah, serta kualitas dan kualifikasi para pendaftar untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang situasi.</p> |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Pengadaan CPNS di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |



■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | dari SSC ASN |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | orang |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | ya |



Jumlah CPNS Lulus

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Jumlah CPNS lulus adalah jumlah calon CPNS yang telah memenuhi kriteria berdasarkan ujian yang diadakan oleh BKN |
| Unit Penyelenggara | BKPSDM |
| Kelompok Indikator | Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | Jumlah CPNS yang telah memenuhi kriteria baik persyaratan administrasi maupun berdasarkan ujian yang diadakan oleh BKN |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Pengadaan CPNS di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | dari SSC ASN |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | orang |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | ya |



Persentase Formasi Jabatan yang Terisi

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Persentase formasi jabatan yang terisi adalah perbandingan jumlah CPNS yang lulus dengan jumlah usulan kebutuhan CPNS |
| Unit Penyelenggara | BKPSDM |
| Kelompok Indikator | Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | Persentase tinggi menandakan bahwa terpenuhinya kebutuhan CPNS di tingkat Kabupaten |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Pengadaan CPNS di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|------------------------|---|
| Metode/Rumus | $\frac{\text{Jumlah CPNS Lulus}}{\text{Jumlah usulan kebutuhan CPNS}} \times 100\%$ |
| Penghitungan | |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | % |
| Apakah Indikator Dapat | ya |
| Diakses Umum | |



Jumlah PNS yang Melaksanakan Pendidikan Dokter Spesialis

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | PNS yang melaksanakan pendidikan dokter spesialis adalah PNS yang melaksanakan tugas belajar untuk program gelar profesi dokter spesialis |
| Unit Penyelenggara | BKPSDM |
| Kelompok Indikator | Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | Tugas belajar diberikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen kepada PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan yang lebih tinggi atau setara pada suatu lembaga pendidikan atau lembaga lain di dalam atau di luar negeri sesuai dengan kompetensi keilmuan yang diperlukan untuk peningkatan kinerja pemerintah daerah dan sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar perangkat daerah dipersyaratkan bagi usia paling tinggi 43 tahun bagi tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan dan usia paling tinggi 48 tahun bagi tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan atau persyaratan usia yang ditentukan oleh lembaga pendidikan/PT, pendidikan paling rendah profesi masa kerja paling singkat 1 tahun sejak diangkat sebagai pegawai |



■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Jumlah PNS yang Melaksanakan Tugas Belajar (TB) dan Izin Belajar (IB) di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|---|
| Metode/Rumus Penghitungan | Pendataan dilakukan saat pengajuan permohonan TB/IB |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | orang |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | ya |



Jumlah PNS yang Melaksanakan Pendidikan Profesi TB

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | PNS yang melaksanakan pendidikan profesi TB adalah PNS yang melaksanakan tugas belajar untuk program gelar profesi dokter/profesi dokter gigi/profesi apoteker/profesi lainnya |
| Unit Penyelenggara | BKPSDM |
| Kelompok Indikator | Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | Tugas belajar pendidikan profesi usia paling tinggi 49 tahun bagi TB yang diberhentikan dari jabatan dan usia paling tinggi 52 tahun bagi TB yang tidak diberhentikan dari jabatan, atau persyaratan usia yang ditentukan oleh lembaga pendidikan, pendidikan paling rendah DIV /S1 dengan pangkat dan golongan ruang paling rendah III b |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Jumlah PNS yang Melaksanakan Tugas Belajar (TB) dan Izin Belajar (IB) di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|---|
| Metode/Rumus Penghitungan | Pendataan dilakukan saat pengajuan permohonan TB/IB |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | orang |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | ya |



Jumlah PNS yang Melaksanakan S3 TB

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | PNS yang Melaksanakan S3 TB adalah PNS yang melaksanakan tugas belajar untuk program gelar doktor (s-3/strata 3) |
| Unit Penyelenggara | BKPSDM |
| Kelompok Indikator | Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | Tugas belajar program gelar S-3 usia paling tinggi 43 tahun bagi TB yang diberhentikan dari jabatan dan usia paling tinggi 48 tahun bagi TB yang tidak diberhentikan dari jabatan, atau persyaratan usia yang ditentukan oleh lembaga pendidikan, pendidikan paling rendah magister/S2 dengan pangkat dan golongan ruang paling rendah penata/III c |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Jumlah PNS yang Melaksanakan Tugas Belajar (TB) dan Izin Belajar (IB) di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|---|
| Metode/Rumus Penghitungan | Pendataan dilakukan saat pengajuan permohonan TB/IB |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | orang |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | ya |



Jumlah PNS yang Melaksanakan S2 TB

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | PNS yang melaksanakan S2 TB adalah PNS yang melaksanakan tugas belajar untuk program gelar magister (s-2/strata 2) |
| Unit Penyelenggara | BKPSDM |
| Kelompok Indikator | Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | Tugas belajar program gelar S2 usia paling tinggi 49 tahun bagi TB yang diberhentikan dari jabatan dan usia paling tinggi 52 tahun bagi TB yang tidak diberhentikan dari jabatan, atau persyaratan usia yang ditentukan oleh lembaga pendidikan, pendidikan paling rendah D-IV/S1 dengan pangkat dan golongan ruang paling rendah penata Muda Tk. I/III b |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Jumlah PNS yang Melaksanakan Tugas Belajar (TB) dan Izin Belajar (IB) di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|---|
| Metode/Rumus Penghitungan | Pendataan dilakukan saat pengajuan permohonan TB/IB |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | orang |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | ya |



Jumlah PNS yang Melaksanakan S1 TB

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | PNS yang melaksanakan S1 TB adalah PNS yang melaksanakan tugas belajar untuk program gelar S-1 |
| Unit Penyelenggara | BKPSDM |
| Kelompok Indikator | Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | Tugas belajar program gelar S1 usia paling tinggi 43 tahun bagi TB yang diberhentikan dari jabatan dan usia paling tinggi 48 tahun bagi TB yang tidak diberhentikan dari jabatan, atau persyaratan usia yang ditentukan oleh lembaga pendidikan, pendidikan paling rendah D-IV/S1 dengan pangkat dan golongan ruang paling rendah pengatur Tk. I/II d |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Jumlah PNS yang Melaksanakan Tugas Belajar (TB) dan Izin Belajar (IB) di Kabupaten Purbalingga |
| Periododesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|---|
| Metode/Rumus Penghitungan | Pendataan dilakukan saat pengajuan permohonan TB/IB |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | orang |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | ya |



Jumlah PNS yang Melaksanakan Pendidikan Profesi IB

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | PNS yang melaksanakan pendidikan profesi IB adalah PNS yang akan mengikuti pendidikan profesi dengan biaya sendiri tanpa meninggalkan pekerjaan kantor dan harus memperoleh izin belajar dari Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah terlebih dahulu. |
| Unit Penyelenggara | BKPSDM |
| Kelompok Indikator | Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | Izin belajar adalah izin yang diberikan oleh Bupati kepada PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan pada suatu lembaga pendidikan formal. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Jumlah PNS yang Melaksanakan Tugas Belajar (TB) dan Izin Belajar (IB) di Kabupaten Purbalingga |
| Periodisasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|---|
| Metode/Rumus Penghitungan | Pendataan dilakukan saat pengajuan permohonan TB/IB |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | orang |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | ya |



Jumlah PNS yang Melaksanakan S3 IB

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | PNS yang melaksanakan S3 IB adalah PNS yang akan mengikuti pendidikan S3 dengan biaya sendiri tanpa meninggalkan pekerjaan kantor dan harus memperoleh izin belajar dari Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah terlebih dahulu. |
| Unit Penyelenggara | BKPSDM |
| Kelompok Indikator | Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | Izin belajar adalah izin yang diberikan oleh Bupati kepada PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan pada suatu lembaga pendidikan formal. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Jumlah PNS yang Melaksanakan Tugas Belajar (TB) dan Izin Belajar (IB) di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|---|
| Metode/Rumus Penghitungan | Pendataan dilakukan saat pengajuan permohonan TB/IB |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | orang |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | ya |



Jumlah PNS yang Melaksanakan S2 IB

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | PNS yang melaksanakan S2 IB adalah PNS yang akan mengikuti pendidikan S2 dengan biaya sendiri tanpa meninggalkan pekerjaan kantor dan harus memperoleh izin belajar dari Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah terlebih dahulu. |
| Unit Penyelenggara | BKPSDM |
| Kelompok Indikator | Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | Izin belajar adalah izin yang diberikan oleh Bupati kepada PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan pada suatu lembaga pendidikan formal. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Jumlah PNS yang Melaksanakan Tugas Belajar (TB) dan Izin Belajar (IB) di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|---|
| Metode/Rumus Penghitungan | Pendataan dilakukan saat pengajuan permohonan TB/IB |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | orang |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | ya |



Jumlah PNS yang Melaksanakan S1 IB

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | PNS yang melaksanakan S1 IB adalah PNS yang akan mengikuti pendidikan S1 dengan biaya sendiri tanpa meninggalkan pekerjaan kantor dan harus memperoleh izin belajar dari Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah terlebih dahulu. |
| Unit Penyelenggara | BKPSDM |
| Kelompok Indikator | Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | Izin belajar adalah izin yang diberikan oleh Bupati kepada PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan pada suatu lembaga pendidikan formal. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Jumlah PNS yang Melaksanakan Tugas Belajar (TB) dan Izin Belajar (IB) di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|---|
| Metode/Rumus Penghitungan | Pendataan dilakukan saat pengajuan permohonan TB/IB |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | orang |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | ya |



Jumlah PNS yang Melaksanakan D3 IB

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | PNS yang melaksanakan D3 IB adalah PNS yang akan mengikuti pendidikan D3 dengan biaya sendiri tanpa meninggalkan pekerjaan kantor dan harus memperoleh izin belajar dari Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah terlebih dahulu. |
| Unit Penyelenggara | BKPSDM |
| Kelompok Indikator | Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | Izin belajar adalah izin yang diberikan oleh Bupati kepada PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan pada suatu lembaga pendidikan formal. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Jumlah PNS yang Melaksanakan Tugas Belajar (TB) dan Izin Belajar (IB) di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|---|
| Metode/Rumus Penghitungan | Pendataan dilakukan saat pengajuan permohonan TB/IB |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | orang |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | ya |



Jumlah PNS yang Melaksanakan Perpanjangan Pendidikan Dokter Spesialis

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | PNS yang melaksanakan perpanjangan Pendidikan Dokter Spesialis adalah PNS yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan dokter spesialis sesuai dengan jangka waktu tertentu karena alasan tertentu yang sah melakukan perpanjangan jangka waktu pendidikan dokter spesialis |
| Unit Penyelenggara | BKPSDM |
| Kelompok Indikator | Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | Perpanjangan diberikan paling banyak 2 semester atau 1 tahun |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Jumlah PNS yang Melaksanakan Tugas Belajar (TB) dan Izin Belajar (IB) di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|---|
| Metode/Rumus Penghitungan | Pendataan dilakukan saat pengajuan permohonan |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | orang |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | ya |



Jumlah PNS yang Melaksanakan Perpanjangan Pendidikan Profesi TB

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------------------------|--|
| Konsep dan Definisi | PNS yang melaksanakan perpanjangan Pendidikan Profesi TB adalah PNS yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan profesi sesuai dengan jangka waktu tertentu karena alasan tertentu yang sah melakukan perpanjangan jangka waktu pendidikan profesi |
| Unit Penyelenggara Kelompok Indikator | BKPSDM |
| Interpretasi | Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan Perpanjangan diberikan paling banyak 2 semester atau 1 tahun |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Jumlah PNS yang Melaksanakan Tugas Belajar (TB) dan Izin Belajar (IB) di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|---|
| Metode/Rumus Penghitungan | Pendataan dilakukan saat pengajuan permohonan |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | orang |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | ya |



Jumlah PNS yang Melaksanakan Perpanjangan S3 TB

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | PNS yang melaksanakan perpanjangan S3 TB adalah PNS yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan S3 sesuai dengan jangka waktu tertentu karena alasan tertentu yang sah melakukan perpanjangan jangka waktu pendidikan S3 |
| Unit Penyelenggara | BKPSDM |
| Kelompok Indikator | Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | Perpanjangan diberikan paling banyak 2 semester atau 1 tahun |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Jumlah PNS yang Melaksanakan Tugas Belajar (TB) dan Izin Belajar (IB) di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|---|
| Metode/Rumus Penghitungan | Pendataan dilakukan saat pengajuan permohonan |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | orang |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | ya |



Jumlah PNS yang Melaksanakan Perpanjangan S2 TB

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | PNS yang melaksanakan perpanjangan S2 TB adalah PNS yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan S2 sesuai dengan jangka waktu tertentu karena alasan tertentu yang sah melakukan perpanjangan jangka waktu pendidikan S2 |
| Unit Penyelenggara | BKPSDM |
| Kelompok Indikator | Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | Perpanjangan diberikan paling banyak 2 semester atau 1 tahun |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Jumlah PNS yang Melaksanakan Tugas Belajar (TB) dan Izin Belajar (IB) di Kabupaten Purbalingga |
| Periodisasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|---|
| Metode/Rumus Penghitungan | Pendataan dilakukan saat pengajuan permohonan |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | orang |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | ya |



Jumlah PNS yang Melaksanakan Perpanjangan S1 TB

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | PNS yang melaksanakan perpanjangan S1 TB adalah PNS yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan S1 sesuai dengan jangka waktu tertentu karena alasan tertentu yang sah melakukan perpanjangan jangka waktu pendidikan S1 |
| Unit Penyelenggara | BKPSDM |
| Kelompok Indikator | Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | Perpanjangan diberikan paling banyak 2 semester atau 1 tahun |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Jumlah PNS yang Melaksanakan Tugas Belajar (TB) dan Izin Belajar (IB) di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|---|
| Metode/Rumus Penghitungan | Pendataan dilakukan saat pengajuan permohonan |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | orang |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | ya |



Jumlah Peralihan TB ke IB Pendidikan Dokter Spesialis

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Apabila setelah diberikan perpanjangan 1 tahun tetapi belum bisa menyelesaikan, maka diberikan perpanjangan kembali paling lama 1 (satu) tahun dengan status menjadi Izin Belajar |
| Unit Penyelenggara | BKPSDM |
| Kelompok Indikator | Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | Dalam melaksanakan izin belajar sebagaimana dimaksud, PNS tetap dapat meninggalkan tugasnya sebagaimana berlaku bagi tugas belajar. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Jumlah PNS yang Melaksanakan Tugas Belajar (TB) dan Izin Belajar (IB) di Kabupaten Purbalingga |
| Periodisasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|---|
| Metode/Rumus Penghitungan | Pendataan dilakukan saat pengajuan permohonan |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | orang |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | ya |



Jumlah Peralihan TB ke IB Pendidikan Profesi

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Apabila setelah diberikan perpanjangan 1 tahun tetapi belum bisa menyelesaikan, maka diberikan perpanjangan kembali paling lama 1 (satu) tahun dengan status menjadi Izin Belajar |
| Unit Penyelenggara | BKPSDM |
| Kelompok Indikator | Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | Dalam melaksanakan izin belajar sebagaimana dimaksud, PNS tetap dapat meninggalkan tugasnya sebagaimana berlaku bagi tugas belajar. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Jumlah PNS yang Melaksanakan Tugas Belajar (TB) dan Izin Belajar (IB) di Kabupaten Purbalingga |
| Periodisasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|---|
| Metode/Rumus Penghitungan | Pendataan dilakukan saat pengajuan permohonan |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | orang |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | ya |



Jumlah Peralihan TB ke IB S3

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Apabila setelah diberikan perpanjangan 1 tahun tetapi belum bisa menyelesaikan, maka diberikan perpanjangan kembali paling lama 1 (satu) tahun dengan status menjadi Izin Belajar |
| Unit Penyelenggara | BKPSDM |
| Kelompok Indikator | Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | Dalam melaksanakan izin belajar sebagaimana dimaksud, PNS tetap dapat meninggalkan tugasnya sebagaimana berlaku bagi tugas belajar. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Jumlah PNS yang Melaksanakan Tugas Belajar (TB) dan Izin Belajar (IB) di Kabupaten Purbalingga |
| Periodisasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|---|
| Metode/Rumus Penghitungan | Pendataan dilakukan saat pengajuan permohonan |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | orang |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | ya |



Jumlah Peralihan TB ke IB S2

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Apabila setelah diberikan perpanjangan 1 tahun tetapi belum bisa menyelesaikan, maka diberikan perpanjangan kembali paling lama 1 (satu) tahun dengan status menjadi Izin Belajar |
| Unit Penyelenggara | BKPSDM |
| Kelompok Indikator | Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | Dalam melaksanakan izin belajar sebagaimana dimaksud, PNS tetap dapat meninggalkan tugasnya sebagaimana berlaku bagi tugas belajar. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Jumlah PNS yang Melaksanakan Tugas Belajar (TB) dan Izin Belajar (IB) di Kabupaten Purbalingga |
| Periodisasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|---|
| Metode/Rumus Penghitungan | Pendataan dilakukan saat pengajuan permohonan |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | orang |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | ya |



Jumlah Peralihan TB ke IB S1

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Apabila setelah diberikan perpanjangan 1 tahun tetapi belum bisa menyelesaikan, maka diberikan perpanjangan kembali paling lama 1 (satu) tahun dengan status menjadi Izin Belajar |
| Unit Penyelenggara | BKPSDM |
| Kelompok Indikator | Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | Dalam melaksanakan izin belajar sebagaimana dimaksud, PNS tetap dapat meninggalkan tugasnya sebagaimana berlaku bagi tugas belajar. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Jumlah PNS yang Melaksanakan Tugas Belajar (TB) dan Izin Belajar (IB) di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|---|
| Metode/Rumus Penghitungan | Pendataan dilakukan saat pengajuan permohonan |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | orang |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | ya |



Jumlah PNS yang Mengikuti Diklat Teknis

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Diklat teknis adalah penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan PNS, dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas PNS, dilaksanakan secara berjenjang dan ditetapkan oleh instansi teknis yang bersangkutan |
| Unit Penyelenggara | BKPSDM |
| Kelompok Indikator | Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | Penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan PNS, dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas PNS, dilaksanakan secara berjenjang dan ditetapkan oleh instansi teknis yang bersangkutan. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Jumlah PNS yang Mengikuti Diklat di Kabupaten Purbalingga |
| Periododesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Data tahunan |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | orang |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | ya |



Jumlah PNS yang Mengikuti Diklat Fungsional

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Diklat fungsional adalah diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang Jabatan Fungsional masing-masing, ditetapkan oleh instansi Pembina Jabatan Fungsional yang bersangkutan. |
| Unit Penyelenggara | BKPSDM |
| Kelompok Indikator | Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | Bentuk diklat yang dilakukan untuk memberikan bekal pengetahuan atau keterampilan bagi para PNS yang sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang diperlukan dalam jabatan fungsional |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Jumlah PNS yang Mengikuti Diklat di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Data tahunan |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | orang |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | ya |



Jumlah PNS yang Mengikuti Diklat Kepemimpinan

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Diklat kepemimpinan adalah diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural.

Unit Penyelenggara

BKPSDM

Kelompok Indikator

Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

terdiri dari Diklatpim untuk jabatan struktural eselon I-IV

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah PNS yang Mengikuti Diklat di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Data tahunan

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

ya

Umum



Jumlah PNS yang Mengikuti Diklat Pelatihan Dasar

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Diklat Pelatihan Dasar adalah pendidikan dan pelatihan dalam masa prajabatan yang dilakukan secara terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab dan memperkuat profesi |
| Unit Penyelenggara | BKPSDM |
| Kelompok Indikator | Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | Jumlah CPNS yang telah mengikuti diklat pelatihan dasar yang dibuktikan dengan Surat kelulusan |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Jumlah PNS yang Mengikuti Diklat di Kabupaten Purbalingga |
| Periodisasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Data tahunan |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | orang |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | ya |



Jumlah Mutasi Masuk

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Mutasi masuk adalah perpindahan PNS yang masuk ke instansi Pemerintah Daerah Kab. Purbalingga |
| Unit Penyelenggara | BKPSDM |
| Kelompok Indikator | Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | <p>Perpindahan PNS yang masuk ke instansi Pemerintah Daerah Kab. Purbalingga.</p> <p>Penambahan jumlah mutasi masuk ke suatu pemerintah daerah dapat memiliki beberapa kemungkinan interpretasi, tetapi perlu diperhatikan bahwa interpretasi ini harus dilihat dalam konteks yang lebih luas dan spesifik untuk masing-masing pemerintah daerah antara lain: Rotasi Personil, Penguatan Kompetensi, Penyesuaian Struktur Organisasi, Respon terhadap Kekurangan Tenaga, Kebijakan Pemerintah Pusat, Peningkatan Mobilitas Pegawai</p> |

■ DATA

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Data yang Dikumpulkan | Mutasi PNS di Kabupaten Purbalingga |
| Periododesasi | Tahunan |



■ **METODOLOGI**

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Data tahunan |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | orang |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | ya |



Jumlah Mutasi Keluar

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Mutasi keluar adalah perpindahan PNS yang keluar dari instansi Pemerintah Daerah Kab. Purbalingga BKPSDM |
| Unit Penyelenggara | Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Kelompok Indikator | Perpindahan PNS yang keluar dari instansi Pemerintah Daerah Kab. Purbalingga. |
| Interpretasi | Semakin banyak jumlah mutasi keluar dari suatu pemerintah daerah (mutasi keluar) bisa menunjukkan beberapa kemungkinan interpretasi, namun perlu diingat bahwa interpretasi ini perlu dipertimbangkan dengan konteks dan informasi lebih lanjut untuk mendapatkan pemahaman yang tepat antara lain: Mobilitas Karir, Rotasi Kepemimpinan atau Kebijakan Pemerintah, Ketersediaan Kesempatan Kerja di Daerah Lain, Kebutuhan Khusus di Pemerintah Daerah Lain serat Faktor Pribadi |

■ DATA

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Data yang Dikumpulkan | Mutasi PNS di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Data tahunan |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | orang |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | ya |



METADATA INDIKATOR STATISTIK SEKTORAL

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



Unjuk Rasa Kelompok Masa Guru

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Unjuk rasa kelompok masa guru adalah penyampaian aspirasi yang dilakukan oleh tenaga pendidik terkait kebijakan-kebijakan pemerintah yang menyangkut sistem pendidikan maupun pengelolaan tenaga kependidikan. |
| Unit Penyelenggara Kelompok Indikator | Kesatuan Bangsa dan Politik Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat |
| Interpretasi | Jika jumlah unjuk rasa kelompok masa guru meningkat, maka dapat mengindikasikan tingkat ketidakpuasan atau keprihatinan yang lebih besar di kalangan guru-guru terhadap isu-isu yang mereka hadapi. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Jumlah Unjuk Rasa Berdasarkan Kelompok Massa di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Perhitungan Manual |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Kali |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | ya |



Unjuk Rasa Kelompok Masa Mahasiswa

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Unjuk rasa kelompok masa mahasiswa adalah penyampaian aspirasi yang dilakukan oleh mahasiswa terkait kebijakan-kebijakan pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, permasalahan sosial, politik, dan ekonomi. |
| Unit Penyelenggara Kelompok Indikator | Kesatuan Bangsa dan Politik Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat |
| Interpretasi | Jumlah unjuk rasa yang tinggi dapat mengindikasikan tingkat ketidakpuasan atau keprihatinan yang tinggi di kalangan mahasiswa terhadap situasi atau kebijakan tertentu. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Jumlah Unjuk Rasa Berdasarkan Kelompok Massa di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Perhitungan Manual |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Kali |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | ya |



Unjuk Rasa Kelompok Masa Buruh

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|--|---|
| Konsep dan Definisi | Unjuk Rasa Kelompok Masa Buruh adalah Penyampaian aspirasi yang dilakukan oleh buruh/serikat buruh terkait kebijakan-kebijakan pemerintah yang menyangkut sistem ketenagakerjaan |
| Unit Penyelenggara Kelompok Indikator | Kesatuan Bangsa dan Politik Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat |
| Interpretasi | Jika jumlah unjuk rasa kelompok masa buruh meningkat, maka dapat mengindikasikan tingkat ketidakpuasan atau ketidakpuasan yang tinggi di kalangan buruh terhadap kondisi kerja, gaji, hak pekerja, kebijakan ketenagakerjaan, atau isu-isu lain yang mempengaruhi kehidupan dan kesejahteraan mereka. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Jumlah Unjuk Rasa Berdasarkan Kelompok Massa di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Perhitungan Manual |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Kali |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | ya |



Unjuk Rasa Kelompok Masa Masyarakat

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Unjuk rasa kelompok masa masyarakat adalah penyampaian aspirasi yang dilakukan oleh kelompok masyarakat dan atau organisasi kemasyarakatan terkait permasalahan ekonomi, sosial, budaya, penyimpangan perilaku warga masyarakat, perangkat pemerintahan, maupun kebijakan-kebijakan pemerintah. |
| Unit Penyelenggara Kelompok Indikator | Kesatuan Bangsa dan Politik Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat |
| Interpretasi | Jika jumlah unjuk rasa kelompok masa masyarakat meningkat, maka dapat mencerminkan tingkat ketidakpuasan atau keprihatinan yang tinggi di kalangan masyarakat terhadap isu-isu tertentu. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Jumlah Unjuk Rasa Berdasarkan Kelompok Massa di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Perhitungan Manual |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Kali |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | ya |



Unjuk Rasa Kelompok Masa Warga Desa

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|--|--|
| Konsep dan Definisi | Unjuk rasa kelompok masa warga desa adalah penyampaian aspirasi yang dilakukan oleh kelompok warga masyarakat desa terkait permasalahan ekonomi, sosial, budaya, penyimpangan perilaku warga masyarakat, perangkat pemerintahan, maupun kebijakan-kebijakan pemerintah desa. |
| Unit Penyelenggara Kelompok Indikator | Kesatuan Bangsa dan Politik Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat |
| Interpretasi | Jika jumlah unjuk rasa kelompok masa warga desa meningkat, maka dapat mencerminkan tingkat ketidakpuasan atau keprihatinan yang tinggi di kalangan warga desa terhadap isu-isu yang mereka hadapi. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Jumlah Unjuk Rasa Berdasarkan Kelompok Massa di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Perhitungan Manual |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Kali |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | ya |



Unjuk Rasa Kelompok Masa Ormas (Organisasi Masyarakat)/ Parpol (Partai Politik)

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|--|--|
| Konsep dan Definisi | Unjuk rasa kelompok masa Ormas (Organisasi Masyarakat)/ Parpol (Partai Politik) adalah penyampaian aspirasi yang dilakukan oleh ormas/ parpol terkait kebijakan-kebijakan pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, permasalahan sosial, politik, dan ekonomi. |
| Unit Penyelenggara Kelompok Indikator | Kesatuan Bangsa dan Politik Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat |
| Interpretasi | Jumlah unjuk rasa yang tinggi dari masa ormas atau parpol dapat menunjukkan eskalasi konflik atau ketegangan dalam konteks politik atau sosial tertentu. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Jumlah Unjuk Rasa Berdasarkan Kelompok Massa di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Perhitungan Manual |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Kali |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | ya |



Jumlah Unjuk Rasa

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Unjuk rasa adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang, kelompok, atau organisasi untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum. Jumlah unjuk rasa merujuk pada unjuk rasa yang dilakukan oleh Guru, Mahasiswa, Buruh, Masyarakat, Warga Desa, Ormas/Parpol.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Kesatuan Bangsa dan Politik
Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Interpretasi

Jika jumlah unjuk rasa meningkat, maka dapat menunjukkan bahwa ada ketidakpuasan atau tuntutan yang dianggap penting oleh sebagian besar masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, tindakan sosial, atau isu tertentu yang mempengaruhi kehidupan mereka.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah Unjuk Rasa Berdasarkan Kelompok Massa di Kabupaten Purbalingga

Periododesasi

Tahunan



■ **METODOLOGI**

| | |
|-------------------------------------|--|
| Metode/Rumus Penghitungan | Jumlahan unjuk rasa yang dilakukan oleh Guru, Mahasiswa, Buruh, Masyarakat, Warga Desa, Ormas/Parpol |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Kali |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | ya |



Unjuk Rasa Berdasarkan Tuntutan Ideologi

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|--|--|
| Konsep dan Definisi | Unjuk rasa berdasarkan tuntutan ideologi adalah penyampaian aspirasi yang dilakukan oleh kelompok warga masyarakat, organisasi kemasyarakatan, parpol, dan elemen masyarakat lainnya dengan materi tuntutan berkaitan dengan ideologi Pancasila. |
| Unit Penyelenggara Kelompok Indikator | Kesatuan Bangsa dan Politik Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat |
| Interpretasi | Tingginya jumlah unjuk rasa berdasarkan tuntutan ideologi dapat mencerminkan ketegangan politik di masyarakat. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Jumlah Unjuk Rasa Berdasarkan Tuntutan di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Perhitungan Manual |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Kali |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | ya |



Unjuk Rasa Berdasarkan Tuntutan Politik

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Unjuk rasa berdasarkan tuntutan politik adalah penyampaian aspirasi yang dilakukan oleh kelompok warga masyarakat, organisasi kemasyarakatan, parpol, dan elemen masyarakat lainnya dengan materi tuntutan dalam bidang politik dalam negeri. |
| Unit Penyelenggara | Kesatuan Bangsa dan Politik |
| Kelompok Indikator | Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat |
| Interpretasi | Tingginya jumlah unjuk rasa berdasarkan tuntutan politik dapat mencerminkan ketegangan politik di masyarakat. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Jumlah Unjuk Rasa Berdasarkan Tuntutan di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Perhitungan Manual |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Kali |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | ya |



Unjuk Rasa Berdasarkan Tuntutan Ekonomi

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Unjuk rasa berdasarkan tuntutan ekonomi adalah penyampaian aspirasi yang dilakukan oleh kelompok warga masyarakat, organisasi kemasyarakatan, parpol, dan elemen masyarakat lainnya dengan materi tuntutan dalam bidang perekonomian, seperti kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM, kelangkaan minyak goreng, dsb.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Kesatuan Bangsa dan Politik
Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Interpretasi

Jika terdapat banyak unjuk rasa dengan tuntutan ekonomi, maka dapat menunjukkan adanya masalah atau ketidakadilan dalam sistem ekonomi yang dialami oleh masyarakat.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah Unjuk Rasa Berdasarkan Tuntutan di Kabupaten Purbalingga Tahunan

Periodesasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan
Ukuran
Satuan
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum

Perhitungan Manual
Jumlah
Kali
ya



Unjuk Rasa Berdasarkan Tuntutan Sosial Budaya

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Unjuk rasa berdasarkan tuntutan sosial budaya adalah penyampaian aspirasi yang dilakukan oleh kelompok warga masyarakat, organisasi kemasyarakatan, penggiat seni, dan elemen masyarakat lainnya dengan materi tuntutan dalam bidang sosial budaya. |
| Unit Penyelenggara Kelompok Indikator | Kesatuan Bangsa dan Politik Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat |
| Interpretasi | Tingginya jumlah unjuk rasa berdasarkan tuntutan sosial budaya dapat mencerminkan ketidakpuasan masyarakat terhadap ketidakadilan sosial dan budaya yang ada. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Jumlah Unjuk Rasa Berdasarkan Tuntutan di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Perhitungan Manual |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Kali |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | ya |



Unjuk Rasa Berdasarkan Tuntutan Hukum dan Hak Asasi Manusia

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|--|--|
| Konsep dan Definisi | Unjuk rasa berdasarkan tuntutan hukum dan Hak Asasi Manusia adalah penyampaian aspirasi yang dilakukan oleh kelompok warga masyarakat, organisasi kemasyarakatan, buruh/ serikat buruh, dan elemen masyarakat lainnya dengan materi tuntutan dalam bidang hukum dan HAM. |
| Unit Penyelenggara Kelompok Indikator | Kesatuan Bangsa dan Politik Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat |
| Interpretasi | Tingginya jumlah unjuk rasa berdasarkan tuntutan hukum dan hak asasi manusia dapat mencerminkan ketidakpuasan masyarakat terhadap pelanggaran hukum dan hak-hak asasi manusia yang terjadi dalam masyarakat atau oleh pihak berwenang. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Jumlah Unjuk Rasa Berdasarkan Tuntutan di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Perhitungan Manual |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Kali |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | ya |



Unjuk Rasa Berdasarkan Tuntutan Pendidikan

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Unjuk rasa berdasarkan tuntutan pendidikan adalah penyampaian aspirasi yang dilakukan oleh kelompok warga masyarakat, organisasi kemasyarakatan, tenaga pendidik dan kependidikan, dan elemen masyarakat lainnya dengan materi tuntutan dalam bidang pendidikan. |
| Unit Penyelenggara Kelompok Indikator | Kesatuan Bangsa dan Politik Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat |
| Interpretasi | Tingginya jumlah unjuk rasa berdasarkan tuntutan pendidikan dapat mencerminkan ketidakpuasan masyarakat terhadap kondisi pendidikan yang ada, termasuk masalah akses, mutu, dan kesenjangan dalam pendidikan. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Jumlah Unjuk Rasa Berdasarkan Tuntutan di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Perhitungan Manual |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Kali |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | ya |



Unjuk Rasa Berdasarkan Tuntutan Kesehatan

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|--|--|
| Konsep dan Definisi | Unjuk rasa berdasarkan tuntutan kesehatan adalah penyampaian aspirasi yang dilakukan oleh kelompok warga masyarakat, organisasi kemasyarakatan, tenaga kesehatan, dan elemen masyarakat lainnya dengan materi tuntutan dalam bidang kesehatan. |
| Unit Penyelenggara Kelompok Indikator | Kesatuan Bangsa dan Politik Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat |
| Interpretasi | Tingginya jumlah unjuk rasa berdasarkan tuntutan kesehatan dapat mencerminkan ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas dan aksesibilitas layanan kesehatan yang ada. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Jumlah Unjuk Rasa Berdasarkan Tuntutan di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Perhitungan Manual |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Kali |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | ya |



Potensi Konflik yang Dilaporkan

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|--|---|
| Konsep dan Definisi | Potensi konflik yang dilaporkan adalah potensi konflik yang dilaporkan dari masyarakat ke Kesbangpol atau APH (Aparat Penegak Hukum). |
| Unit Penyelenggara Kelompok Indikator | Kesatuan Bangsa dan Politik Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat |
| Interpretasi | Tingginya jumlah potensi konflik yang dilaporkan dapat mengindikasikan adanya ketegangan atau ketidakstabilan dalam wilayah tersebut. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Potensi Konflik di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Data tahunan |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | potensi |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | ya |



Potensi Konflik yang diredam tidak menjadi konflik

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|--|--|
| Konsep dan Definisi | Potensi konflik yang diredam tidak menjadi konflik adalah potensi konflik yang berhasil diselesaikan melalui musyawarah mufakat, mediasi oleh pemerintah desa, pemerintah daerah, maupun APH, dan audensi dengan pihak-pihak terkait, sehingga tidak berkembang menjadi konflik. |
| Unit Penyelenggara Kelompok Indikator | Kesatuan Bangsa dan Politik Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat |
| Interpretasi | Tingginya jumlah potensi konflik yang diredam mencerminkan efektivitas dari upaya pencegahan dan penanganan dini untuk mengatasi potensi konflik sebelum berkembang menjadi situasi yang lebih kompleks. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Potensi Konflik di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Data tahunan |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | laporan |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | ya |



Persentase Potensi Konflik yang diredam tidak menjadi konflik

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|--|--|
| Konsep dan Definisi | Persentase potensi konflik yang diredam tidak menjadi konflik adalah perbandingan antara jumlah potensi konflik yang dilaporkan dengan Jumlah potensi konflik. |
| Unit Penyelenggara Kelompok Indikator | Kesatuan Bangsa dan Politik Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat |
| Interpretasi | Tingginya persentase potensi konflik yang diredam mencerminkan efektivitas dari upaya pencegahan dan tindakan penanganan dini dalam mencegah eskalasi konflik. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Potensi Konflik di Kabupaten Purbalingga |
| Periodisasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|---------------------------|---------------------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | $\frac{JPKD}{JPK} \times 100\%$ |
|---------------------------|---------------------------------|

Keterangan:

JPKD = Jumlah Potensi Konflik yang diredam tidak menjadi konflik

JPK = Jumlah Potensi Konflik



Ukuran

Satuan

Apakah Indikator Dapat Diakses

Umum

Persentase

%

ya



Jumlah Konflik Sosial

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Konflik sosial adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional. |
| Unit Penyelenggara Kelompok Indikator | Kesatuan Bangsa dan Politik Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat |
| Interpretasi | Jumlah konflik sosial dapat memberikan gambaran tentang kondisi sosial dalam suatu wilayah. Jika jumlah konflik sosial meningkat, maka dapat mengindikasikan adanya tingkat ketegangan sosial yang lebih tinggi. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Potensi Konflik di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Data tahunan |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | konflik |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | ya |



Angka Konflik Sosial

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|--|---|
| Konsep dan Definisi | Angka konflik sosial adalah angka konflik ipoleksosbud (Jumlah kejadian konflik sosial yang dilaporkan) per 10.000 penduduk Kabupaten Purbalingga. |
| Unit Penyelenggara Kelompok Indikator | Kesatuan Bangsa dan Politik Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat |
| Interpretasi | Angka konflik sosial mencerminkan tingkat ketegangan dan konflik yang ada dalam masyarakat. Semakin tinggi angka konflik sosial, semakin tinggi tingkat ketegangan dan potensi terjadinya konflik lebih lanjut. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Potensi Konflik di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | $\frac{JKS}{JP} \times 10.000$ |
|---------------------------|--------------------------------|

| | |
|--|---|
| Ukuran Satuan Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | <p>Keterangan:</p> <p>JKS = Jumlah konflik sosial</p> <p>JP = Jumlah Penduduk</p> <p>Angka per 10.000 penduduk ya</p> |
|--|---|



Jumlah Penduduk yang Mempunyai Hak Pilih dalam Pemilu (Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kota)

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Penduduk yang mempunyai hak pilih dalam Pemilu (Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kota) adalah Warga negara yang memenuhi syarat untuk memberikan suara dalam pemilihan umum (Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kota) |
| Unit Penyelenggara Kelompok Indikator | Kesatuan Bangsa dan Politik Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat |
| Interpretasi | Jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih mencerminkan potensi partisipasi politik dalam proses demokrasi. Semakin besar jumlah penduduk yang memenuhi syarat untuk memberikan suara, semakin besar pula potensi partisipasi dalam pemilihan umum. |

■ DATA

| | |
|------------------------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan Periode/sasi | Pemilu di Kabupaten Purbalingga Tahunan |
|------------------------------------|---|



■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--|
| Metode/Rumus Penghitungan | Data DPT (Daftar Pemilih Tetap) yang dikeluarkan oleh penyelenggara pemilu (KPU/Komisi Pemilihan Umum) |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Orang |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | ya |



Jumlah Pemilih yang Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilu

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|--|---|
| Konsep dan Definisi | Pemilih yang menggunakan hak pilih dalam Pemilu adalah Warga negara yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan berlaku, dan secara aktif menggunakan hak suara mereka untuk memberikan suara dalam proses pemilihan umum. |
| Unit Penyelenggara Kelompok Indikator | Kesatuan Bangsa dan Politik Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat |
| Interpretasi | Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum. Semakin tinggi jumlah pemilih yang aktif, semakin tinggi tingkat partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses politik. |

■ DATA

| | |
|--------------------------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan Periodesasi | Pemilu di Kabupaten Purbalingga Tahunan |
|--------------------------------------|---|

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|---|
| Metode/Rumus Penghitungan | Data kehadiran pemilih ke Tempat Pemungutan Suara pada pemilu |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Orang |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | ya |



Persentase Pemilih yang Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilu (Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kota)

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Persentase pemilih yang menggunakan hak pilih dalam Pemilu (Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kota) adalah perbandingan antara jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam pemilu dengan Jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dalam pemilu. |
| Unit Penyelenggara Kelompok Indikator | Kesatuan Bangsa dan Politik Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat |
| Interpretasi | Persentase pemilih yang menggunakan hak pilih dapat mencerminkan tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses politik. Semakin tinggi persentase tersebut, semakin tinggi tingkat partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap pemilihan umum. |

■ DATA

| | |
|------------------------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan Periode/sasi | Pemilu di Kabupaten Purbalingga Tahunan |
|------------------------------------|---|

■ METODOLOGI

| | |
|---------------------------|---|
| Metode/Rumus Penghitungan | $\frac{DKPT}{DPT} \times 100\%$ |
| | Keterangan: DKPT = Data kehadiran pemilih ke Tempat Pemungutan Suara pada pemilu |



DPT = Data Pemilih Tetap (DPT)

Pemilu

Persentase

%

Ukuran

Satuan

Apakah Indikator Dapat Diakses

ya

Umum



Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah Organisasi Kemasyarakatan yang memiliki SK Kemenkumham dan Surat Tanda Keberadaan Ormas dari Pemerintah Kabupaten Purbalingga serta terverifikasi aktif di Kabupaten Purbalingga. |
| Unit Penyelenggara Kelompok Indikator | Kesatuan Bangsa dan Politik Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat |
| Interpretasi | Tingginya jumlah LSM mencerminkan tingkat aktivitas dan keterlibatan masyarakat dalam berbagai isu sosial dan lingkungan. Semakin banyak LSM, semakin banyak upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk membantu dan memperjuangkan hak-hak mereka. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Lembaga/organisasi Kemasyarakatan di kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Perhitungan Manual |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | LSM |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | ya |



Jumlah LSM Lokal Terdaftar

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|--|--|
| Konsep dan Definisi | LSM Lokal Terdaftar adalah LSM yang memiliki kepengurusan lingkup kabupaten/kota dan memiliki struktur organisasi dan kepengurusan paling sedikit dalam 1 (satu) kecamatan dan telah melaporkan keberadaannya kepada Pemerintah Kabupaten Purbalingga melalui Badan Kesbangpol, sehingga memiliki Surat Tanda Bukti Keberadaan Ormas |
| Unit Penyelenggara Kelompok Indikator | Kesatuan Bangsa dan Politik Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat |
| Interpretasi | Jumlah LSM lokal terdaftar dapat mencerminkan kualitas pengelolaan dan pengorganisasian LSM. Semakin banyak jumlah LSM terdaftar menunjukkan adanya upaya dari LSM dalam memenuhi persyaratan pendaftaran dan beroperasi secara resmi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Lembaga/organisasi Kemasyarakatan di kabupaten Purbalingga |
| Periododesasi | Tahunan |



■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Perhitungan Manual |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | LSM |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | ya |



Jumlah LSM Lokal Tidak Aktif

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | LSM Lokal Tidak Aktif adalah LSM yang memiliki kepengurusan lingkup kabupaten/kota dan memiliki struktur organisasi dan kepengurusan paling sedikit dalam 1 (satu) kecamatan, telah melaporkan keberadaannya kepada Pemerintah Kabupaten Purbalingga melalui Badan Kesbangpol, namun kemudian tidak melaporkan adanya kepengurusan dan aktivitas di wilayah Kabupaten Purbalingga. |
| Unit Penyelenggara | Kesatuan Bangsa dan Politik |
| Kelompok Indikator | Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat |
| Interpretasi | Jika banyak LSM lokal yang tidak aktif, maka dapat menjadi indikator bahwa banyak LSM menghadapi tantangan dalam beroperasi dan berkelanjutan. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Lembaga/organisasi Kemasyarakatan di kabupaten Purbalingga |
| Periododesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Perhitungan Manual |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | LSM |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | ya |



Jumlah LSM Nasional Terdaftar

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------------------------|--|
| Konsep dan Definisi | LSM Nasional Terdaftar adalah LSM yang memiliki memiliki struktur organisasi dan kepengurusan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah provinsi di seluruh Indonesia, berbadan hukum, dan telah melaporkan keberadaannya kepada Pemerintah Kabupaten Purbalingga melalui Badan Kesbangpol, sehingga memiliki Surat Tanda Bukti Keberadaan Ormas. |
| Unit Penyelenggara Kelompok Indikator | Kesatuan Bangsa dan Politik Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat |
| Interpretasi | Jumlah LSM nasional terdaftar dapat mencerminkan kualitas pengelolaan dan pengorganisasian LSM. Semakin banyak jumlah LSM terdaftar menunjukkan adanya upaya dari LSM dalam memenuhi persyaratan pendaftaran dan beroperasi secara resmi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Lembaga/organisasi Kemasyarakatan di kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |



■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Perhitungan Manual |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | LSM |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | ya |



Jumlah LSM Nasional Tidak Aktif

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|--|---|
| Konsep dan Definisi | LSM Nasional Tidak Aktif adalah LSM nasional yang tidak melaporkan kegiatan ke Kesbangpol |
| Unit Penyelenggara Kelompok Indikator | Kesatuan Bangsa dan Politik Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat |
| Interpretasi | Jika banyak LSM nasional yang tidak aktif, maka dapat menjadi indikator bahwa banyak LSM menghadapi tantangan dalam beroperasi dan berkelanjutan. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Lembaga/organisasi Kemasyarakatan di kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Perhitungan Manual |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | LSM |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | ya |



Jumlah LSM Asing / Internasional Terdaftar

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|--|---|
| Konsep dan Definisi | LSM Asing / Internasional Terdaftar adalah LSM asing/internasional yang terdaftar oleh Kesbangpol. LSM asing/internasional adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang cakupannya internasional atau mendunia, yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. |
| Unit Penyelenggara Kelompok Indikator | Kesatuan Bangsa dan Politik Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat |
| Interpretasi | Jumlah LSM asing/internasional terdaftar dapat mencerminkan kualitas pengelolaan dan pengorganisasian LSM. Semakin banyak jumlah LSM terdaftar menunjukkan adanya upaya dari LSM dalam memenuhi persyaratan pendaftaran dan beroperasi secara resmi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Lembaga/organisasi Kemasyarakatan di kabupaten Purbalingga |
| Periododesasi | Tahunan |



■ METODOLOGI

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Perhitungan Manual |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | LSM |
| Apakah Indikator Dapat Diakses | ya |
| Umum | |



Jumlah LSM Asing / Internasional Tidak Aktif

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|--|--|
| Konsep dan Definisi | LSM Asing / Internasional Tidak Aktif adalah LSM asing/internasional yang tidak melaporkan kegiatan ke Kesbangpol |
| Unit Penyelenggara Kelompok Indikator | Kesatuan Bangsa dan Politik Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat |
| Interpretasi | Jika banyak LSM asing/internasional yang tidak aktif, maka dapat menjadi indikator bahwa banyak LSM menghadapi tantangan dalam beroperasi dan berkelanjutan. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Lembaga/organisasi Kemasyarakatan di kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Perhitungan Manual |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | LSM |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | ya |



Jumlah Organisasi Masyarakat

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|--|--|
| Konsep dan Definisi | Organisasi Masyarakat adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat atau kelompok masyarakat baik yang telah berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, melaporkan keberadaannya kepada Kesbangpol maupun tidak/belum melaporkan keberadaannya. |
| Unit Penyelenggara Kelompok Indikator | Kesatuan Bangsa dan Politik Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat |
| Interpretasi | Jumlah Organisasi Masyarakat yang banyak dapat mencerminkan tingkat aktivitas dan partisipasi masyarakat dalam berorganisasi untuk mencapai berbagai tujuan dan kepentingan sosial. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Lembaga/organisasi Kemasyarakatan di kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Perhitungan Manual |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Ormas |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | ya |



Jumlah Ormas Berlandaskan Agama

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|--|--|
| Konsep dan Definisi | Ormas Berlandaskan Agama adalah Organisasi masyarakat (ormas) yang terbentuk berdasarkan afiliasi agama tertentu dalam suatu daerah. |
| Unit Penyelenggara Kelompok Indikator | Kesatuan Bangsa dan Politik Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat |
| Interpretasi | Jumlah Ormas berlandaskan agama mencerminkan representasi dan keberagaman agama yang ada dalam masyarakat. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Lembaga/organisasi Kemasyarakatan di kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Perhitungan Manual |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Ormas |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | ya |



Jumlah Ormas Berlandaskan Budaya / Adat

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Ormas Berlandaskan Budaya / Adat adalah Organisasi masyarakat yang didirikan dengan fokus pada pelestarian, promosi, dan perlindungan warisan budaya dan adat istiadat suatu komunitas atau kelompok tertentu |
| Unit Penyelenggara | Kesatuan Bangsa dan Politik |
| Kelompok Indikator | Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat |
| Interpretasi | Banyaknya Ormas berlandaskan budaya/adat menunjukkan keanekaragaman budaya dan adat istiadat yang ada dalam masyarakat. Semakin banyak ormas berbasis budaya/adat menandakan adanya beragam tradisi, bahasa, kepercayaan, dan nilai-nilai budaya yang dipelihara dan dilestarikan oleh kelompok masyarakat tertentu. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Lembaga/organisasi Kemasyarakatan di kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Perhitungan Manual |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Ormas |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | ya |



Jumlah Ormas Berlandaskan Nasionalitas

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|--|--|
| Konsep dan Definisi | Ormas Berlandaskan Nasionalitas adalah Organisasi atau lembaga masyarakat yang dibentuk berdasarkan kesamaan nasionalitas atau kewarganegaraan dari anggotanya. |
| Unit Penyelenggara Kelompok Indikator | Kesatuan Bangsa dan Politik Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat |
| Interpretasi | Banyaknya Ormas berlandaskan nasionalitas menunjukkan adanya keanekaragaman etnis atau kelompok masyarakat dengan latar belakang nasionalitas yang berbeda-beda dalam suatu wilayah. Semakin banyak ormas ini mencerminkan keberagaman budaya dan identitas etnis di dalam masyarakat. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Lembaga/organisasi Kemasyarakatan di kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|--|--------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Perhitungan Manual |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Ormas |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | ya |



Jumlah Yayasan

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|--|--|
| Konsep dan Definisi | Yayasan adalah Badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. |
| Unit Penyelenggara Kelompok Indikator | Kesatuan Bangsa dan Politik Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat |
| Interpretasi | Dengan banyaknya yayasan, aktivitas sosial dan program-program bantuan dapat menjangkau lebih banyak kelompok masyarakat yang membutuhkan, sehingga dampak positifnya dapat dirasakan oleh lebih banyak orang. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Lembaga/organisasi Kemasyarakatan di kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Perhitungan Manual |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Yayasan |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | ya |



Jumlah Yayasan Sosial

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|--|---|
| Konsep dan Definisi | Yayasan Sosial adalah Panti sosial yang diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial |
| Unit Penyelenggara Kelompok Indikator | Kesatuan Bangsa dan Politik Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat |
| Interpretasi | Semakin banyak jumlah yayasan sosial, semakin besar potensi untuk memberikan dampak positif terhadap masyarakat dan memberikan solusi bagi masalah sosial yang ada. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Lembaga/organisasi Kemasyarakatan di kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Perhitungan Manual |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Yayasan |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | ya |



Jumlah Yayasan Pendidikan

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|--|---|
| Konsep dan Definisi | Yayasan Pendidikan adalah Yayasan yang menyelenggarakan pendidikan baik formal maupun nonformal. |
| Unit Penyelenggara Kelompok Indikator | Kesatuan Bangsa dan Politik Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat |
| Interpretasi | Semakin banyak yayasan pendidikan, maka semakin besar potensi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Lembaga/organisasi Kemasyarakatan di kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Perhitungan Manual |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Yayasan |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | ya |



Jumlah Yayasan Lainnya

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Yayasan Lainnya adalah Yayasan selain dari yayasan yang bergerak di bidang sosial dan pendidikan |
| Unit Penyelenggara | Kesatuan Bangsa dan Politik |
| Kelompok Indikator | Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat |
| Interpretasi | Jumlah yayasan lainnya menunjukkan tingginya aktivitas dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan nirlaba yang beragam dan mencakup berbagai aspek kehidupan sosial. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Lembaga/organisasi Kemasyarakatan di kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Perhitungan Manual |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Yayasan |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | ya |



Indeks Toleransi

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Indeks toleransi adalah salah satu tolak ukur kehidupan bermasyarakat yang tentram, tertib dan aman. Untuk mengukur indeks toleransi, dihitung dari rata – rata potensi konflik baik agama, gangguan dari kelompok radikal maupun sosial yang tertangani.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Kesatuan Bangsa dan Politik
Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Interpretasi

Indeks toleransi menggambarkan keadaan sosial dalam masyarakat terkait dengan pengelolaan konflik dan penerimaan terhadap perbedaan. Indeks ini dapat membantu memahami sejauh mana masyarakat mampu menjaga keamanan, ketertiban, dan kedamaian dalam menghadapi perbedaan yang ada.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Indeks Toleransi di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan



■ **METODOLOGI**

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{KA + GK + KS}{3}$$

Keterangan:

KA = Konflik agama

GA = gangguan keamanan dari kelompok radikal

KS = konflik sosial lainnya)

Ukuran

Indeks

Satuan

Tanpa satuan

Apakah Indikator Dapat Diakses

ya

Umum



Jumlah Anggota Belanegara

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Anggota Belanegara adalah Anggota masyarakat yang telah disiapkan dan dibekali pengetahuan dan keterampilan untuk melakukan kegiatan kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Kesatuan Bangsa dan Politik
Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Interpretasi

Menunjukkan jumlah kader belanegara yang telah dibentuk dan mendapatkan pendidikan dan pelatihan bela negara. Dengan meningkatnya jumlah individu atau kader belanegara yang terlatih, kapasitas nasional dalam menghadapi berbagai tantangan dan ancaman keamanan dapat ditingkatkan.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah Aparat Keamanan dan Ketertiban di Kabupaten Purbalingga

Periododesasi

Tahunan



■ METODOLOGI

| | |
|--------------------------------|--|
| Metode/Rumus Penghitungan | Perhitungan manual berdasarkan data peserta diklat bela negara |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Orang |
| Apakah Indikator Dapat Diakses | ya |
| Umum | |



METADATA INDIKATOR STATISTIK SEKTORAL

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



Indeks Risiko Bencana (IRB)

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Indeks Risiko Bencana (IRB) adalah suatu perangkat analisis kebencanaan yang menunjukkan riwayat nyata kebencanaan yang telah terjadi dan menimbulkan kerugian |
| Unit Penyelenggara | BPBD |
| Kelompok Indikator | Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat |
| Interpretasi | IRB dapat memberikan gambaran capaian upaya penanggulangan bencana di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Nilai yang tertera dapat menjadi panduan bagi para pengambil kebijakan di tingkat nasional dan daerah untuk menentukan prioritas upaya penanggulangan bencana di daerah guna menurunkan indeks risiko bencana sebagai upaya meningkatkan ketangguhan masyarakat. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Indeks Risiko Bencana dan Indeks Ketahanan Daerah di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |



■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Release BNPB |
| Ukuran | Indeks |
| Satuan | Tanpa satuan |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Indeks Ketahanan Daerah (IKD)

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|--|--|
| Konsep dan Definisi | Indeks Ketahanan Daerah (IKD) adalah instrumen untuk mengukur kapasitas suatu daerah dengan asumsi bahwa bahaya atau ancaman bencana serta kerentanan di suatu daerah tersebut kondisinya tetap BPBD |
| Unit Penyelenggara Kelompok Indikator | Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat |
| Interpretasi | <p>Metode untuk mengukur kemampuan daerah atau wilayah untuk bertahan dan menghadapi tantangan yang akan timbul akibat bencana alam. Faktor yang mempengaruhi tingkat ketahanan suatu daerah antara lain adalah kebijakan penanggulangan bencana, infrastruktur, sistem peringatan dini, kapasitas masyarakat, ketersediaan sumber daya alam, akses terhadap layanan dasar. Nilai indikator IKD dibagi dalam tiga kelas yaitu</p> <ul style="list-style-type: none">• Rendah ($IKD < 55$)• Sedang ($55 \leq IKD \leq 85$) dan• Tinggi ($IKD > 85$). |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Indeks Risiko Bencana dan Indeks Ketahanan Daerah di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |



■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--|
| Metode/Rumus Penghitungan | 7 prioritas, 71 indikator dan 284 pertanyaan |
| Ukuran | Indeks |
| Satuan | Tanpa satuan |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Persentase Peningkatan IKD

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Persentase Peningkatan IKD adalah besaran angka dalam persen yang menunjukkan nilai indeks ketahanan suatu daerah atau wilayah yang dihitung dari satu periode ke periode berikutnya. |
| Unit Penyelenggara | BPBD |
| Kelompok Indikator | Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat |
| Interpretasi | Persentase peningkatan yang menunjukkan perbaikan dalam kapasitas dan kemampuan suatu daerah untuk menghadapi, merespon dan memulihkan diri dari berbagai resiko yang dihadapi |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Indeks Risiko Bencana dan Indeks Ketahanan Daerah di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|---|
| Metode/Rumus Penghitungan | $\frac{IKD \text{ tahun } t - IKD \text{ tahun } (t - 1)}{IKD \text{ tahun } (t - 1)} \times 100\%$ |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | % |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Jumlah Kejadian Angin topan

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Angin topan adalah pusaran angin kencang dengan kecepatan angin 120 km/jam atau lebih yang sering terjadi di wilayah tropis diantara garis balik utara dan selatan, kecuali di daerah-daerah yang sangat berdekatan dengan khatulistiwa. |
| Unit Penyelenggara | BPBD |
| Kelompok Indikator | Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat |
| Interpretasi | Jumlah kejadian angin topan menggambarkan frekuensi atau jumlah angin topan yang terjadi dalam suatu wilayah atau periode waktu tertentu, semakin banyak jumlah kejadian angin topan menunjukkan bahwa suatu daerah tersebut frekuensinya semakin sering |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Kejadian Bencana Alam di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | perhitungan manual |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | kejadian |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Jumlah Kejadian Banjir

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Banjir adalah peristiwa atau keadaan dimana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat. |
| Unit Penyelenggara | BPBD |
| Kelompok Indikator | Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat |
| Interpretasi | Jumlah kejadian banjir menggambarkan frekuensi atau jumlah banjir yang terjadi dalam suatu wilayah atau periode waktu tertentu, semakin banyak jumlah kejadian banjir menunjukan bahwa suatu daerah tersebut frekuensinya semakin sering |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Kejadian Bencana Alam di Kabupaten Purbalingga |
| Periododesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | perhitungan manual |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | kejadian |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Jumlah Kejadian Gas Beracun

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Gas beracun adalah suatu gas yang bereaksi dengan darah dan dapat menyebabkan kematian jika terhirup atau terpapar dalam konsentrasi yang cukup tinggi |
| Unit Penyelenggara | BPBD |
| Kelompok Indikator | Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat |
| Interpretasi | Jumlah kejadian gas beracun menggambarkan frekuensi atau jumlah kejadian gas beracun yang terjadi dalam suatu wilayah atau periode waktu tertentu, semakin banyak jumlah kejadian gas beracun menunjukkan bahwa suatu daerah tersebut frekuensinya semakin sering |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Kejadian Bencana Alam di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | perhitungan manual |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | kejadian |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Jumlah Kejadian Kebakaran Hutan

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Kebakaran hutan adalah situasi dimana hutan / lahan dilanda api yang menimbulkan korban dan/atau kerugian. |
| Unit Penyelenggara | BPBD |
| Kelompok Indikator | Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat |
| Interpretasi | Jumlah kejadian kebakaran menggambarkan frekuensi atau jumlah kebakaran yang terjadi dalam suatu wilayah atau periode waktu tertentu, semakin banyak jumlah kejadian kebakaran hutan menunjukkan bahwa suatu daerah tersebut frekuensinya semakin sering terjadi kebakaran hutan |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Kejadian Bencana Alam di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | perhitungan manual |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | kejadian |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Jumlah Kejadian Gempa Bumi

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Gempa bumi adalah peristiwa berguncangnya bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, aktivitas sesar (patahan) gunung api, dan runtuhannya batuan |
| Unit Penyelenggara | BPBD |
| Kelompok Indikator | Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat |
| Interpretasi | Jumlah kejadian gempa bumi menggambarkan frekuensi atau jumlah gempa bumi yang terjadi dalam suatu wilayah atau periode waktu tertentu, semakin banyak jumlah kejadian gempa bumi menunjukkan bahwa suatu daerah tersebut rawan gempa bumi |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Kejadian Bencana Alam di Kabupaten Purbalingga |
| Periodisasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | perhitungan manual |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | kejadian |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Jumlah Kejadian Kekeringan

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi dan lingkungan |
| Unit Penyelenggara | BPBD |
| Kelompok Indikator | Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat |
| Interpretasi | Jumlah kejadian kekeringan menggambarkan frekuensi atau jumlah kekeringan yang terjadi dalam suatu wilayah atau periode waktu tertentu, semakin banyak jumlah kejadian kekeringan menunjukkan bahwa daerah tersebut merupakan daerah rawan kekeringan |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Kejadian Bencana Alam di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | perhitungan manual |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | kejadian |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Jumlah Kejadian Letusan Gunung Api

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Letusan gunung api adalah proses pelepasan material dari gunung berapi berupa lava, gas, abu dan lain-lain ke atmosfer bumi |
| Unit Penyelenggara | BPBD |
| Kelompok Indikator | Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat |
| Interpretasi | Jumlah kejadian letusan gunung api menggambarkan frekuensi atau jumlah kejadian letusan gunung api yang terjadi dalam suatu wilayah atau periode waktu tertentu, semakin banyak jumlah kejadian letusan gunung api menunjukkan bahwa suatu daerah tersebut rawan terhadap dampak letusan gunung api |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Kejadian Bencana Alam di Kabupaten Purbalingga |
| Periodisasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | perhitungan manual |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | kejadian |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Jumlah Kejadian Gerakan Tanah/Longsor

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Gerakan tanah/longsor adalah gerakan tanah adalah suatu gerakan menuruni lereng oleh massa tanah dan atau batuan, akibat dari terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng/longsor merupakan gerakan massa batuan, tanah, atau bahan rombakan material penyusun lereng (campura BPBD

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Interpretasi

Jumlah kejadian gerakan tanah/longsor menggambarkan frekuensi atau jumlah gerakan tanah/longsor yang terjadi dalam suatu wilayah atau periode waktu tertentu, semakin banyak jumlah kejadian gerakan tanah/longsor menunjukkan bahwa suatu daerah tersebut frekuensinya semakin sering (rawan gerakan tanah/longsor)

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kejadian Bencana Alam di Kabupaten Purbalingga Tahunan

Periododesasi



■ **METODOLOGI**

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | perhitungan manual |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | kejadian |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Jumlah korban bencana

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana. |
| Unit Penyelenggara | BPBD |
| Kelompok Indikator | Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat |
| Interpretasi | Data jumlah korban bencana dapat digunakan untuk merencanakan dan menyediakan bantuan darurat, pemulihan, dan rekonstruksi pasca-bencana. Semakin banyak Jumlah Korban Bencana maka semakin tinggi kebutuhan untuk menyediakan bantuan, mitigasi bencana, dan pemulihan pasca bencana |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Pelayanan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | perhitungan manual |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Jiwa |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Jumlah pelayanan korban bencana

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Pelayanan korban bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dan menyelamatkan korban bencana. |
| Unit Penyelenggara | BPBD |
| Kelompok Indikator | Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat |
| Interpretasi | Jumlah korban yang tertangani dalam kejadian bencana, jika jumlah pelayanan korban bencana semakin banyak/ tinggi menunjukkan semakin tinggi respon dalam penanganan bencana |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Pelayanan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Purbalingga |
| Periodisasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | perhitungan manual |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Jiwa |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Cakupan pelayanan korban bencana

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Cakupan pelayanan korban bencana adalah perbandingan jumlah korban bencana yang berhasil dicari, ditolong, dievakuasi dengan perkiraan jumlah seluruh korban bencana |
| Unit Penyelenggara | BPBD |
| Kelompok Indikator | Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat |
| Interpretasi | Persentase dari jumlah korban yang tertangani akibat bencana. Semakin tinggi persentase penanganan menunjukkan tingginya layanan kepada korban bencana |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Pelayanan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Purbalingga |
| Periodisasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | $\frac{J1}{J2} \times 100\%$ |
|---------------------------|------------------------------|

Keterangan:
J1 = Jumlah korban bencana yang berhasil dicari, ditolong, dievakuasi
J2 = jumlah perkiraan seluruh korban bencana

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | % |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Jumlah Desa Tangguh Bencana

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Desa tangguh bencana adalah desa yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan (Berdasarkan Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012) |
| Unit Penyelenggara | BPBD |
| Kelompok Indikator | Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat |
| Interpretasi | Jumlah desa yang sudah dibentuk DESTANA, semakin tinggi/banyak jumlah desa tangguh bencana semakin tinggi kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam penanganan bencana |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Pelayanan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | perhitungan manual |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | desa |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Jumlah Masyarakat Tangguh Bencana

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Masyarakat tangguh bencana adalah masyarakat/individu yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana |
| Unit Penyelenggara | BPBD |
| Kelompok Indikator | Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat |
| Interpretasi | Jumlah masyarakat yang memiliki kemampuan melaksanakan penanggulangan bencana, semakin tinggi jumlah masyarakat tangguh bencana semakin cepat dalam penanganan dampak bencana |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Pelayanan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | perhitungan manual |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | orang |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Jumlah Sosialisasi Mitigasi Bencana

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Sosialisasi mitigasi bencana adalah serangkaian upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana |
| Unit Penyelenggara | BPBD |
| Kelompok Indikator | Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat |
| Interpretasi | Jumlah kegiatan mitigasi yang sudah dilakukan kepada masyarakat, semakin tinggi jumlah kegiatan mitigasi bencana maka menunjukkan semakin rendah/kecil risiko yang timbul akibat bencana |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Pelayanan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | perhitungan manual |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | kali |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Target lokasi sosialisasi kesiapsiagaan bencana

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Target lokasi sosialisasi kesiapsiagaan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. |
| Unit Penyelenggara | BPBD |
| Kelompok Indikator | Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat |
| Interpretasi | Jumlah masyarakat yang sudah mendapatkan sosialisasi, semakin tinggi target lokasi sosialisasi kesiapsiagaan bencana menunjukkan semakin banyak masyarakat yang nantinya mendapatkan pelatihan |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Pelayanan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | perhitungan manual |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | lokasi |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Cakupan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Cakupan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana adalah perbandingan jumlah sosialisasi kesiapsiagaan bencana dengan target pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana |
| Unit Penyelenggara | BPBD |
| Kelompok Indikator | Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat |
| Interpretasi | Persentase jumlah masyarakat yang sudah mendapatkan pemahaman terhadap kesiapsiagaan bencana. semakin tinggi persentase menunjukkan semakin tinggi kemampuan/kapasitas masyarakat dalam penanganan bencana |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Pelayanan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | $\frac{J1}{J2} \times 100\%$ |
|---------------------------|------------------------------|

Keterangan:

J1 = Jumlah sosialisasi kesiapsiagaan bencana



J2 = Target lokasi sosialisasi
kesiapsiagaan bencana

Ukuran
Satuan
Apakah Indikator Dapat Diakses
Umum

Persentase
%
Ya



Jumlah Dokumen KRB (Kajian Risiko Bencana)

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Dokumen KRB (Kajian Risiko Bencana) adalah Dokumen yang berisi tentang mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana suatu daerah dengan menganalisis tingkat ancaman, tingkat kerugian dan kapasitas daerah |
| Unit Penyelenggara | BPBD |
| Kelompok Indikator | Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat |
| Interpretasi | Jumlah dokumen yang tersedia tentang gambaran resiko bencana di suatu wilayah, semakin banyak kajian risiko yang ada dalam dokumen KRB yang tersedia menunjukkan semakin mudah pemahaman masyarakat terhadap peta risiko bencana |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Pelayanan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | perhitungan manual |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | dokumen |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Jumlah Sistem Peringatan Dini Banjir

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Sistem Peringatan Dini Banjir adalah sebuah sistem yang berisi serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya banjir pada suatu wilayah oleh lembaga yang berwenang |
| Unit Penyelenggara | BPBD |
| Kelompok Indikator | Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat |
| Interpretasi | Jumlah sistem/alat peringatan dini banjir yang tersedia/terpasang, semakin banyak sistem/alat peringatan dini yang tersedia/dipasang menunjukkan semakin tinggi/banyak masyarakat dapat menyelamatkan diri dari ancaman/risiko banjir |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Kondisi Kebencanaan di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | perhitungan manual |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Unit |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Jumlah Sistem Peringatan Dini Gunung Meletus

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Sistem Peringatan Dini Gunung Meletus adalah sebuah sistem yang berisi serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya gunung meletus/erupsi pada suatu wilayah oleh lembaga yang berwenang |
| Unit Penyelenggara | BPBD |
| Kelompok Indikator | Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat |
| Interpretasi | Jumlah sistem/alat peringatan dini gunung meletus yang tersedia/terpasang, semakin banyak sistem/alat peringatan dini yang tersedia/dipasang menunjukkan semakin tinggi/banyak masyarakat dapat menyelamatkan diri dari ancaman/risiko gunung meletus |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Kondisi Kebencanaan di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | perhitungan manual |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Unit |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Jumlah Sistem Peringatan Dini Longsor

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Sistem peringatan Dini Longsor adalah Sebuah sistem yang berisi serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya gerakan tanah/longsor pada suatu wilayah oleh lembaga yang berwenang |
| Unit Penyelenggara | BPBD |
| Kelompok Indikator | Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat |
| Interpretasi | Jumlah sistem/alat peringatan dini gerakan tanah/longsor yang tersedia/terpasang, semakin banyak sistem/alat peringatan dini yang tersedia/dipasang menunjukkan semakin tinggi/banyak masyarakat dapat menyelamatkan diri dari ancaman/risiko gerakan tanah/longsor |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Kondisi Kebencanaan di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | perhitungan manual |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Unit |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Jumlah Sistem Peringatan Dini Gempa

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Sistem Peringatan Dini Gempa adalah sebuah sistem yang berisi serangkaian kegiatan pemberian informasi setelah terjadi gempa pada suatu wilayah oleh lembaga yang berwenang |
| Unit Penyelenggara | BPBD |
| Kelompok Indikator | Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat |
| Interpretasi | Jumlah sistem/alat peringatan dini gempa yang tersedia/terpasang, semakin banyak sistem/alat peringatan dini yang tersedia/dipasang menunjukkan semakin tinggi/banyak masyarakat dapat menyelamatkan diri dari ancaman/risiko gempa |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Kondisi Kebencanaan di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | perhitungan manual |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Unit |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Jumlah Sistem Peringatan Dini Tsunami

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Sistem Peringatan Dini Tsunami adalah sebuah sistem yang berisi serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya tsunami pada suatu wilayah oleh lembaga yang berwenang |
| Unit Penyelenggara | BPBD |
| Kelompok Indikator | Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat |
| Interpretasi | Jumlah sistem/alat peringatan dini tsunami yang tersedia/terpasang, semakin banyak sistem/alat peringatan dini yang tersedia/dipasang menunjukkan semakin tinggi/banyak masyarakat dapat menyelamatkan diri dari ancaman/risiko tsunami |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Kondisi Kebencanaan di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | perhitungan manual |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Unit |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Jumlah Sistem Peringatan Dini Lainnya

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Sistem Peringatan Dini Lainnya adalah sistem peringatan dini selain banjir, gunung meletus, longsor, gempa bumi, dan tsunami. |
| Unit Penyelenggara | BPBD |
| Kelompok Indikator | Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat |
| Interpretasi | Jumlah sistem peringatan dini lainnya yang ada menunjukkan tingkat kesiapan dan upaya yang dilakukan dalam menghadapi berbagai ancaman atau bahaya potensial yang berbeda. semakin banyak jumlah sistem/alat peringatan dini menunjukan semakin banyak kesiapan masyarakat untuk menyelamatkan diri dari ancaman/risiko bencana |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Kondisi Kebencanaan di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | perhitungan manual |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Unit |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Jumlah Kawasan Bencana Banjir

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|--|--|
| Konsep dan Definisi | Kawasan Bencana Banjir adalah suatu wilayah yang terjadi perendaman air yang berlebihan pada daratan yang biasanya tidak terendam air dan dapat mengganggu aktivitas masyarakat BPBD |
| Unit Penyelenggara Kelompok Indikator | Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat |
| Interpretasi | Jumlah desa yang terdampak banjir, semakin banyak jumlah kawasan bencana banjir menunjukkan semakin banyak desa yang terdampak banjir |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Kondisi Kebencanaan di Kabupaten Purbalingga |
| Periodisasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | perhitungan manual |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Kawasan |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Jumlah Kawasan Bencana Gunung Meletus

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Kawasan bencana gunung meletus adalah wilayah yang ditetapkan sebagai Kawasan Rawan Bencana (KRB) erupsi gunung api, oleh pejabat yang berwenang |
| Unit Penyelenggara | BPBD |
| Kelompok Indikator | Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat |
| Interpretasi | Semakin banyak jumlah kawasan terdampak bencana gunung meletus menunjukkan semakin banyak desa yang terdampak gunung meletus |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Kondisi Kebencanaan di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | perhitungan manual |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Kawasan |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Jumlah Kawasan Bencana Longsor

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Kawasan bencana longsor adalah wilayah yang mempunyai kerentanan gerakan tanah dengan kriteria sedang-tinggi. |
| Unit Penyelenggara | BPBD |
| Kelompok Indikator | Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat |
| Interpretasi | Semakin banyak jumlah kawasan terdampak bencana tanah longsor menunjukkan semakin banyak desa yang terdampak tanah longsor |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Kondisi Kebencanaan di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | perhitungan manual |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Kawasan |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Jumlah Kawasan Bencana Gempa Bumi

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Kawasan bencana gempa bumi adalah daerah yang memiliki potensi terhadap ancaman bahaya gempa bumi. |
| Unit Penyelenggara | BPBD |
| Kelompok Indikator | Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat |
| Interpretasi | Semakin banyak jumlah kawasan terdampak bencana gempa bumi menunjukkan semakin banyak desa yang terdampak gempa bumi |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Kondisi Kebencanaan di Kabupaten Purbalingga |
| Periodisasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | perhitungan manual |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Kawasan |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Jumlah Kawasan Bencana Tsunami

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Kawasan bencana tsunami adalah daerah yang memiliki potensi terhadap ancaman bahaya tsunami. |
| Unit Penyelenggara | BPBD |
| Kelompok Indikator | Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat |
| Interpretasi | Semakin banyak jumlah kawasan terdampak bencana tsunami menunjukkan semakin banyak desa yang terdampak tsunami |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Kondisi Kebencanaan di Kabupaten Purbalingga |
| Periodisasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | perhitungan manual |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Kawasan |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Jumlah Kawasan Bencana Kebakaran Hutan

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Kawasan Bencana Kebakaran hutan/lahan adalah Daerah yang memiliki potensi terhadap ancaman bahaya kebakaran hutan/lahan |
| Unit Penyelenggara | BPBD |
| Kelompok Indikator | Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat |
| Interpretasi | Semakin banyak kawasan bencana kebakaran hutan/ lahan menunjukan semakin banyak desa terdampak kebakaran hutan/lahan |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Kondisi Kebencanaan di Kabupaten Purbalingga |
| Periodisasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | perhitungan manual |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Kawasan |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Jumlah Kawasan Bencana Gerakan Tanah

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Kawasan bencana gerakan tanah adalah wilayah yang mempunyai kerentanan gerakan tanah dengan kriteria sedang-tinggi. |
| Unit Penyelenggara | BPBD |
| Kelompok Indikator | Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat |
| Interpretasi | Semakin banyak jumlah kawasan terdampak bencana gerakan tanah menunjukkan semakin banyak desa yang terdampak gerakan tanah |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Kondisi Kebencanaan di Kabupaten Purbalingga |
| Periodisasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | perhitungan manual |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Kawasan |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Jumlah Kawasan Bencana Angin Kencang

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Kawasan bencana angin adalah daerah yang sering atau memiliki potensi tinggi mengalami bencana angin kencang |
| Unit Penyelenggara | BPBD |
| Kelompok Indikator | Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat |
| Interpretasi | Semakin banyak jumlah kawasan terdampak bencana angin kencang menunjukkan semakin banyak desa yang terdampak angin kencang |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Kondisi Kebencanaan di Kabupaten Purbalingga |
| Periodisasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | perhitungan manual |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Kawasan |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Jumlah Korban Akibat Bencana Banjir

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Korban bencana banjir adalah seseorang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal akibat bencana banjir |
| Unit Penyelenggara | BPBD |
| Kelompok Indikator | Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat |
| Interpretasi | Semakin banyak korban banjir menunjukkan semakin banyak dibutuhkan kegiatan pencegahan dan mitigasi bencana serta penanganan pasca bencana banjir |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Kondisi Kebencanaan di Kabupaten Purbalingga |
| Periodisasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | perhitungan manual |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Orang |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Jumlah Korban Akibat Bencana Gunung Meletus

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Korban bencana gunung meletus adalah seseorang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal akibat bencana gunung meletus |
| Unit Penyelenggara | BPBD |
| Kelompok Indikator | Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat |
| Interpretasi | Semakin banyak korban menunjukkan semakin banyak dibutuhkan kegiatan pencegahan dan mitigasi bencana serta penanganan pasca bencana gunung meletus |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Kondisi Kebencanaan di Kabupaten Purbalingga |
| Periodisasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | perhitungan manual |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Orang |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Jumlah Korban Akibat Bencana Longsor

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Korban bencana longsor adalah seseorang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal akibat bencana longsor

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

BPBD
Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Interpretasi

Semakin banyak korban menunjukkan semakin banyak dibutuhkan kegiatan pencegahan dan mitigasi bencana serta penanganan pasca bencana tanah longsor

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Kebencanaan di Kabupaten Purbalingga

Periodisasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

perhitungan manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

Orang

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum

Ya



Jumlah Korban Akibat Bencana Gempa Bumi

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Korban bencana gempa bumi adalah seseorang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal akibat bencana gempa bumi |
| Unit Penyelenggara | BPBD |
| Kelompok Indikator | Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat |
| Interpretasi | Semakin banyak korban menunjukkan semakin banyak dibutuhkan kegiatan pencegahan dan mitigasi bencana serta penanganan pasca bencana gempa bumi |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Kondisi Kebencanaan di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | perhitungan manual |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Orang |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Jumlah Korban Akibat Bencana Tsunami

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Korban bencana tsunami adalah seseorang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal akibat bencana tsunami |
| Unit Penyelenggara | BPBD |
| Kelompok Indikator | Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat |
| Interpretasi | Semakin banyak korban menunjukkan semakin banyak dibutuhkan kegiatan pencegahan dan mitigasi bencana serta penanganan pasca bencana tsunami |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Kondisi Kebencanaan di Kabupaten Purbalingga |
| Periodisasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | perhitungan manual |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Orang |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Jumlah Korban Akibat Bencana Kebakaran Hutan/Lahan

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Korban kejadian bencana kebakaran hutan/lahan adalah seseorang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal akibat bencana kebakaran hutan/lahan |
| Unit Penyelenggara | BPBD |
| Kelompok Indikator | Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat |
| Interpretasi | Semakin banyak korban menunjukkan semakin banyak dibutuhkan kegiatan pencegahan dan mitigasi bencana serta penanganan pasca bencana hutan/lahan |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Kondisi Kebencanaan di Kabupaten Purbalingga |
| Periodisasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | perhitungan manual |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Orang |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Jumlah Korban Akibat Bencana Angin

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Korban bencana angin adalah seseorang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal akibat bencana angin |
| Unit Penyelenggara | BPBD |
| Kelompok Indikator | Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat |
| Interpretasi | Semakin banyak korban menunjukkan semakin banyak dibutuhkan kegiatan pencegahan dan mitigasi bencana serta penanganan pasca bencana angin kencang |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Kondisi Kebencanaan di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | perhitungan manual |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Orang |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Jumlah Pengungsi Akibat Bencana Banjir

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Pengungsi akibat bencana banjir adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana banjir |
| Unit Penyelenggara | BPBD |
| Kelompok Indikator | Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat |
| Interpretasi | Semakin banyak jumlah pengungsi akibat bencana banjir maka semakin banyak korban terdampak bencana di suatu wilayah yang mengungsi. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Kondisi Kebencanaan di Kabupaten Purbalingga |
| Periodisasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | perhitungan manual |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Orang |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Jumlah Pengungsi Akibat Bencana Gunung Meletus

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Pengungsi akibat bencana gunung meletus adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana gunung meletus/erupsi |
| Unit Penyelenggara | BPBD |
| Kelompok Indikator | Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat |
| Interpretasi | Semakin banyak jumlah pengungsi menunjukkan semakin banyak korban terdampak bencana di suatu wilayah yang mengungsi |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Kondisi Kebencanaan di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | perhitungan manual |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Orang |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Jumlah Pengungsi Akibat Bencana Longsor

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Pengungsi akibat bencana longsor adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana gerakan tanah/longsor |
| Unit Penyelenggara | BPBD |
| Kelompok Indikator | Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat |
| Interpretasi | Semakin banyak jumlah pengungsi menunjukkan semakin banyak korban terdampak bencana di suatu wilayah. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Kondisi Kebencanaan di Kabupaten Purbalingga |
| Periodisasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | perhitungan manual |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Orang |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Jumlah Pengungsi Akibat Bencana Gempa Bumi

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Pengungsi akibat bencana gempa bumi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana gempabumi |
| Unit Penyelenggara Kelompok Indikator | BPBD Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat |
| Interpretasi | Semakin banyak jumlah pengungsi menunjukkan semakin banyak korban terdampak bencana di suatu wilayah. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Kondisi Kebencanaan di Kabupaten Purbalingga |
| Periodisasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | perhitungan manual |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Orang |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Jumlah Pengungsi Akibat Bencana Tsunami

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|--|--|
| Konsep dan Definisi | Pengungsi akibat bencana tsunami adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana tsunami |
| Unit Penyelenggara Kelompok Indikator | BPBD Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat |
| Interpretasi | Semakin banyak jumlah pengungsi menunjukkan semakin banyak korban terdampak bencana di suatu wilayah. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Kondisi Kebencanaan di Kabupaten Purbalingga |
| Periodisasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | perhitungan manual |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Orang |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Jumlah Pengungsi Akibat Bencana Kebakaran Hutan/lahan

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Pengungsi akibat kejadian kebakaran/lahan adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana kebakaran hutan/lahan |
| Unit Penyelenggara | BPBD |
| Kelompok Indikator | Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat |
| Interpretasi | Semakin banyak jumlah pengungsi menunjukkan semakin banyak korban terdampak kebakaran hutan/lahan |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Kondisi Kebencanaan di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | perhitungan manual |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Orang |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Jumlah Kerugian Akibat Bencana Banjir

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Kerugian akibat bencana banjir adalah meningkatnya biaya kesempatan atau hilangnya kesempatan untuk memperoleh keuntungan ekonomi karena kerusakan aset sebagai akibat tidak langsung dari bencana banjir |
| Unit Penyelenggara | BPBD |
| Kelompok Indikator | Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat |
| Interpretasi | Menunjukkan jumlah biaya untuk memperbaiki kembali seperti semula akibat bencana. Semakin banyak jumlah kerugian akibat bencana banjir menunjukkan semakin tinggi biaya untuk memperbaiki kembali seperti semula akibat bencana banjir. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Kondisi Kebencanaan di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|---|
| Metode/Rumus Penghitungan | JOR x PHO |
| | Keterangan: JOR = Jumlah Obyek yang Rusak PHO = Perkiraan Harga Obyek |
| Ukuran Satuan | Jumlah Rupiah |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Jumlah Kerugian Akibat Bencana Gunung Meletus

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Kerugian akibat bencana gunung meletus adalah meningkatnya biaya kesempatan atau hilangnya kesempatan untuk memperoleh keuntungan ekonomi karena kerusakan aset sebagai akibat tidak langsung dari bencana gunung meletus/erupsi gunungapi |
| Unit Penyelenggara | BPBD |
| Kelompok Indikator | Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat |
| Interpretasi | Menunjukkan jumlah biaya untuk memperbaiki kembali seperti semula akibat bencana. Semakin banyak jumlah kerugian akibat bencana gunung meletus/erupsi gunungapi menunjukkan semakin tinggi biaya untuk memperbaiki kembali seperti semula akibat bencana gunung meletus/erupsi gunung api. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Kondisi Kebencanaan di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|---------------------------|-----------|
| Metode/Rumus Penghitungan | JOR x PHO |
|---------------------------|-----------|

Keterangan:

JOR = Jumlah Obyek yang Rusak

PHO = Perkiraan Harga Obyek



| | | | |
|---------|-----------|-------|--------|
| Ukuran | | | Jumlah |
| Satuan | | | Rupiah |
| Apakah | Indikator | Dapat | Ya |
| Diakses | Umum | | |



Jumlah Kerugian Akibat Bencana Gerakan tanah/Longsor

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Kerugian akibat bencana gerakan tanah/longsor adalah meningkatnya biaya kesempatan atau hilangnya kesempatan untuk memperoleh keuntungan ekonomi karena kerusakan aset sebagai akibat tidak langsung dari bencana gerakan tanah/longsor

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

BPBD
Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Interpretasi

Menunjukkan jumlah biaya untuk memperbaiki kembali seperti semula akibat bencana. Semakin banyak jumlah kerugian akibat bencana gerakan tanah/longsor menunjukkan semakin tinggi biaya untuk memperbaiki kembali seperti semula akibat bencana gerakan tanah/longsor

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Kebencanaan di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$JOR \times PHO$

Keterangan:

JOR = Jumlah Obyek yang Rusak

PHO = Perkiraan Harga Obyek



Ukuran

Satuan

Apakah Indikator

Diakses Umum

Jumlah

Rupiah

Dapat Ya



Jumlah Kerugian Akibat Bencana Gempa Bumi

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Kerugian akibat bencana gempa bumi adalah meningkatnya biaya kesempatan atau hilangnya kesempatan untuk memperoleh keuntungan ekonomi karena kerusakan aset sebagai akibat tidak langsung dari bencana gempabumi |
| Unit Penyelenggara | BPBD |
| Kelompok Indikator | Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat |
| Interpretasi | Menunjukkan jumlah biaya untuk memperbaiki kembali seperti semula akibat bencana, semakin banyak jumlah kerugian akibat bencana gempabumi menunjukan semakin tinggi biaya untuk memperbaiki kembali seperti semula akibat bencana gempa bumi. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Kondisi Kebencanaan di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|---------------------------|-----------|
| Metode/Rumus Penghitungan | JOR x PHO |
|---------------------------|-----------|

Keterangan:

JOR = Jumlah Obyek yang Rusak

PHO = Perkiraan Harga Obyek

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Rupiah |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Jumlah Kerugian Akibat Bencana Tsunami

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Kerugian akibat bencana tsunami adalah meningkatnya biaya kesempatan atau hilangnya kesempatan untuk memperoleh keuntungan ekonomi karena kerusakan aset sebagai akibat tidak langsung dari bencana tsunami |
| Unit Penyelenggara | BPBD |
| Kelompok Indikator | Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat |
| Interpretasi | Menunjukkan jumlah biaya untuk memperbaiki kembali seperti semula akibat bencana. Semakin banyak jumlah kerugian akibat bencana tsunami menunjukan semakin tinggi biaya untuk memperbaiki kembali seperti semula akibat bencana tsunami. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Kondisi Kebencanaan di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|---------------------------|-----------|
| Metode/Rumus Penghitungan | JOR x PHO |
|---------------------------|-----------|

Keterangan:

JOR = Jumlah Obyek yang Rusak

PHO = Perkiraan Harga Obyek

Jumlah

Rupiah

Ukuran

Satuan

Apakah Indikator

Dapat Ya

Diakses Umum



Jumlah Kerugian Akibat Bencana Kebakaran Hutan/lahan

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Kerugian akibat kejadian kebakaran hutan/lahan adalah meningkatnya biaya kesempatan atau hilangnya kesempatan untuk memperoleh keuntungan ekonomi karena kerusakan aset sebagai akibat tidak langsung dari bencana kebakaran hutan/lahan |
| Unit Penyelenggara | BPBD |
| Kelompok Indikator | Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat |
| Interpretasi | Menunjukkan jumlah biaya untuk memperbaiki kembali seperti semula akibat bencana. Semakin banyak jumlah kerugian akibat bencana kebakaran hutan/lahan menunjukan semakin tinggi biaya untuk memperbaiki kembali seperti semula akibat dampak bencana kebakaran hutan/lahan |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Kondisi Kebencanaan di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|---|
| Metode/Rumus Penghitungan | JOR x PHO |
| | Keterangan: JOR = Jumlah Obyek yang Rusak PHO = Perkiraan Harga Obyek |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Rupiah |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Jumlah Kerugian Akibat Bencana Kekeringan

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Kerugian akibat bencana kekeringan adalah meningkatnya biaya kesempatan atau hilangnya kesempatan untuk memperoleh keuntungan ekonomi karena kerusakan aset sebagai akibat tidak langsung dari bencana kekeringan |
| Unit Penyelenggara | BPBD |
| Kelompok Indikator | Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat |
| Interpretasi | Menunjukkan jumlah biaya yang dipakai untuk penanganan kekeringan. Semakin tinggi kerugian menunjuk semakin banyak daerah yang mengalami kekeringan. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Kondisi Kebencanaan di Kabupaten Purbalingga |
| Periododesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | perhitungan manual |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Rupiah |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Prasarana dan Sarana Tanggap Bencana

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Prasarana dan sarana tanggap bencana adalah peralatan dan logistik yang digunakan untuk penanganan tanggap darurat bencana |
| Unit Penyelenggara | BPBD |
| Kelompok Indikator | Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat |
| Interpretasi | Menunjukkan jumlah peralatan dan logistik yang siap untuk penanganan tanggap darurat bencana. Semakin banyak peralatan dan logistik tanggap bencana menunjukkan semakin cepat dalam penanganan darurat bencana yang terjadi. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Kondisi Kebencanaan di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | perhitungan manual |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Unit |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Jumlah Desa/Kelurahan Rawan Kekeringan

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Desa/Kelurahan rawan kekeringan adalah kondisi suatu wilayah, lahan, maupun masyarakat mengalami kekurangan air sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya |
| Unit Penyelenggara | BPBD |
| Kelompok Indikator | Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat |
| Interpretasi | Menunjukkan jumlah desa yang mengalami kekurangan air di musim kemarau. Semakin tinggi jumlah desa rawan kekeringan menunjukkan semakin tinggi kebutuhan air yang harus disediakan untuk penanggulangan kekeringan. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Jumlah Desa/Kelurahan yang Rawan Kekeringan di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | perhitungan manual |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | desa/kelurahan |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana adalah pelayanan informasi tentang bagian wilayah kabupaten/kota rawan bencana, kepada Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

BPBD
Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Interpretasi

Menunjukkan persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana. Semakin tinggi persentase maka semakin tinggi masyarakat yang memperoleh pelayanan informasi rawan bencana.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Cakupan Pelayanan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (SPM) di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan



■ **METODOLOGI**

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{J1}{J2} \times 100\%$$

Keterangan:

J1 = Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana

J2 = Jumlah seluruh penduduk di kawasan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana

Ukuran

Persentase

Satuan

%

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana adalah serangkaian kegiatan pra bencana melalui pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan Warga Negara dalam menghadapi bencana |
| Unit Penyelenggara Kelompok Indikator | BPBD Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat |
| Interpretasi | Semakin tinggi persentase maka semakin banyak warga negara yang memperoleh pelatihan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Cakupan Pelayanan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (SPM) di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |



■ **METODOLOGI**

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{J1}{J2} \times 100\%$$

Keterangan:

J1 = Jumlah warga negara yang memperoleh pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan

J2 = Jumlah seluruh penduduk di kawasan rawan bencana

Ukuran

Persentase

Satuan

%

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dan menyelamatkan korban bencana |
| Unit Penyelenggara | BPBD |
| Kelompok Indikator | Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat |
| Interpretasi | Semakin tinggi persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi maka semakin banyak jumlah warga terdampak bencana yang mendapat penanganan bencana |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Cakupan Pelayanan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (SPM) di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |



■ **METODOLOGI**

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{J1}{J2} \times 100\%$$

Keterangan:

J1 = Jumlah korban yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi

J2 = Perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana

Ukuran

Persentase

Satuan

%

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



METADATA INDIKATOR STATISTIK SEKTORAL

**DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN**



Persentase jumlah warga negara usia 5 – 6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Warga negara usia 5 – 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD adalah Anak usia 5- 6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Aspek Pendidikan

Persentase yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar anak usia 5-6 tahun memiliki akses dan kesempatan untuk mengikuti pendidikan PAUD. Hal ini mencerminkan adanya upaya yang kuat dalam menyediakan fasilitas pendidikan yang terjangkau dan mudah diakses bagi anak-anak usia dini.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Cakupan Pelayanan Bidang
Pendidikan (SPM) di Kabupaten
Purbalingga
Tahunan

Periodesasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{J1}{J2} \times 100\%$$

Keterangan:

J1 = Jumlah anak usia 5- 6 tahun



yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini

J2 = Jumlah penduduk kelompok usia 5- 6 tahun

Persentase

%

Ukuran

Satuan

Apakah Indikator Dapat Diakses ya

Umum



Persentase anak usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI)

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Anak usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI) adalah Anak usia 7- 12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Aspek Pendidikan

Persentase yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar anak usia 7-12 tahun memiliki akses dan kesempatan untuk mengikuti pendidikan dasar (SD/MI). Hal ini mencerminkan adanya upaya yang kuat dalam menyediakan fasilitas pendidikan dasar yang terjangkau dan mudah diakses bagi anak-anak.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Cakupan Pelayanan Bidang
Pendidikan (SPM) di Kabupaten
Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{J1}{J2} \times 100\%$$

Keterangan:

J1 = Jumlah anak usia 7- 12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar



J2 = Jumlah penduduk kelompok
usia 7- 12 tahun

Persentase

%

Ukuran

Satuan

Apakah Indikator Dapat Diakses

ya

Umum



Persentase anak usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SMP/MTs)

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Anak usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SMP/MTs) adalah Anak usia 13- 15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Aspek Pendidikan

Persentase yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar anak usia 13-15 tahun memiliki akses dan kesempatan untuk mengikuti pendidikan menengah pertama. Hal ini mencerminkan adanya upaya yang kuat dalam menyediakan fasilitas pendidikan menengah pertama yang terjangkau dan mudah diakses bagi anak-anak.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Cakupan Pelayanan Bidang
Pendidikan (SPM) di Kabupaten
Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{J1}{J2} \times 100\%$$

Keterangan:

J1 = Jumlah anak usia 13- 15 tahun



yang sudah tamat atau sedang
belajar di sekolah dasar
J2 = Jumlah penduduk kelompok
usia 13- 15 tahun

Ukuran

Persentase

Satuan

%

Apakah Indikator Dapat Diakses

ya

Umum



Persentase jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan adalah anak usia 7 - 18 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Aspek Pendidikan

Adanya persentase yang signifikan dari warga negara dalam kelompok usia ini yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan menunjukkan pentingnya program pendidikan kesetaraan sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan pendidikan mereka.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Cakupan Pelayanan Bidang
Pendidikan (SPM) di Kabupaten
Purbalingga
Tahunan

Periodesasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{J1}{J2} \times 100\%$$

Keterangan:

J1 = Jumlah anak usia 7 - 18 tahun



yang sudah tamat atau sedang
belajar di pendidikan kesetaraan
J2 = Jumlah anak usia 7 - 18 tahun

Ukuran
Satuan
Apakah Indikator Dapat Diakses
Umum

Persentase
%
ya



Jumlah Siswa PAUD

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|--|---|
| Konsep dan Definisi | Siswa PAUD adalah anak usia dini yang bersekolah atau terdaftar di satuan pendidikan tingkat PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini). |
| Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aspek Pendidikan Jumlah siswa PAUD yang tinggi dapat mengindikasikan adanya kesadaran dan akses yang baik terhadap pendidikan anak usia dini di suatu daerah. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD di Kabupaten Purbalingga |
| Periododesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--|
| Metode/Rumus Penghitungan | $J1 + J2 + J3 + J4 + J5 + J6$ <p>Keterangan: J1 = Jumlah Siswa PAUD J2 = Jumlah Siswa TK J3 = Jumlah Siswa KB J4 = Jumlah Siswa TPA J5 = Jumlah Siswa SPS (Satuan PAUD Sejenis) J6 = Jumlah Siswa RA/BA/TA</p> |
| Ukuran Satuan | Jumlah orang |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | ya |



Jumlah Siswa TK

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Siswa TK adalah anak usia pra-sekolah yang terdaftar dan bersekolah di tingkat Taman Kanak-kanak (TK).

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Aspek Pendidikan
Jumlah siswa TK yang tinggi dapat mencerminkan tingkat partisipasi anak-anak dalam pendidikan pra-sekolah di suatu daerah.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD di Kabupaten Purbalingga Tahunan

Periodesasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses
Umum

ya



Jumlah Siswa KB

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Siswa KB (Kelompok Bermain) adalah anak usia dini yang bersekolah atau terdaftar di satuan pendidikan tingkat KB (Kelompok Bermain).

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Aspek Pendidikan

Jumlah siswa KB yang tinggi menunjukkan tingkat partisipasi anak-anak dalam program pendidikan pra-sekolah yang diselenggarakan oleh kelompok bermain.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD
di Kabupaten Purbalingga

Periodisasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

ya

Umum



Jumlah Siswa TPA

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Siswa TPA adalah anak-anak yang menjadi peserta atau pengguna layanan dari tempat penitipan anak (TPA)

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Aspek Pendidikan
Jumlah siswa TPA yang tinggi menunjukkan tingginya partisipasi dan aksesibilitas layanan pendidikan dan perawatan anak usia dini di tempat penitipan anak (TPA) dalam suatu wilayah atau daerah

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD di Kabupaten Purbalingga Tahunan

Periodesasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses
Umum

ya



Jumlah Siswa SPS (Satuan PAUD Sejenis)

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Siswa SPS adalah siswa yang belajar di satuan pendidikan tingkat PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) dengan karakteristik serupa.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Aspek Pendidikan
Jumlah Siswa SPS yang tinggi menunjukkan tingginya minat dan partisipasi masyarakat dalam memberikan pendidikan awal bagi anak-anak sebelum mereka memasuki pendidikan formal di tingkat lebih tinggi.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD di Kabupaten Purbalingga Tahunan

Periodesasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

ya

Umum



APK PAUD

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

APK (Angka Partisipasi Kasar) PAUD adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan Pendidikan Anak Usia dini (PAUD) (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang Pendidikan Anak Usia dini (PAUD) (umur 3-6 tahun).

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Aspek Pendidikan

APK PAUD yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Jika nilai APK PAUD mendekati 100 persen menunjukkan bahwa ada banyak anak bersekolah di jenjang pendidikan PAUD yang belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD di Kabupaten Purbalingga Tahunan

Periodesasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{J1}{J2} \times 100\%$$

Keterangan:

J1 = Jumlah murid yang mengikuti PAUD



Ukuran

Satuan

Apakah Indikator Dapat Diakses

Umum

J2 = jumlah anak umur 3-6 tahun

Persentase

%

ya



Jumlah Sekolah PAUD

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|--|--|
| Konsep dan Definisi | Sekolah PAUD adalah Suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. |
| Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aspek Pendidikan Semakin banyak sekolah PAUD, semakin besar peluang bagi anak-anak untuk mengakses pendidikan pra-sekolah. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|---|
| Metode/Rumus Penghitungan | $J1 + J2 + J3 + J4 + J5 + J6$ |
| | Keterangan: J1 = Jumlah TK Negeri J2 = Jumlah TK Swasta J3 = Jumlah KB + Jumlah TPA J4 = Jumlah SPS (Satuan PAUD Sejenis) J5 = Jumlah RA/BA/TA |
| Ukuran Satuan | Jumlah unit |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | ya |



Jumlah TK Negeri

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

TK Negeri adalah Jenjang pendidikan anak usia dini (usia 6 tahun atau dibawahnya) dalam bentuk pendidikan formal yang dikelola oleh pemerintah.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Aspek Pendidikan

Dengan adanya cukup banyak TK Negeri, anak-anak memiliki akses yang lebih baik untuk mendapatkan pendidikan awal yang berkualitas tanpa harus membayar biaya yang terlalu tinggi.

Peningkatan jumlah TK Negeri juga dapat diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di tingkat pra-sekolah.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Periodesasi

Penyelenggaraan PAUD di
Kabupaten Purbalingga
Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan
Ukuran
Satuan
Apakah Indikator Dapat Diakses
Umum

Perhitungan Manual
Jumlah
unit
Ya



Jumlah TK Swasta

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | TK Swasta adalah Jenjang pendidikan anak usia dini (usia 6 tahun atau di bawahnya) dalam bentuk pendidikan formal yang dikelola oleh Perorangan atau Yayasan. |
| Unit Penyelenggara | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Kelompok Indikator | Aspek Pendidikan |
| Interpretasi | Jumlah TK Swasta yang memadai dapat memberikan variasi pilihan bagi orang tua dalam memberikan pendidikan awal yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Perlu diingat bahwa peningkatan jumlah TK swasta bukan selalu mengindikasikan bahwa sekolah swasta lebih baik daripada sekolah negeri. Kualitas pendidikan dapat bervariasi di antara institusi pendidikan, baik swasta maupun negeri. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Purbalingga |
| Periodisasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Perhitungan Manual |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | unit |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Jumlah KB

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

KB adalah salah satu bentuk satuan PAUD yang menyelenggarakan pengasuhan dan pendidikan bagi anak usia dua sampai dengan empat tahun.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Aspek Pendidikan
Jumlah KB yang cukup banyak menunjukkan perhatian dan komitmen dalam memberikan pendidikan awal bagi anak-anak, serta memungkinkan partisipasi yang lebih luas dari masyarakat dalam menyediakan layanan pendidikan.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Periododesasi

Penyelenggaraan PAUD di
Kabupaten Purbalingga
Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan
Ukuran
Satuan
Apakah Indikator Dapat Diakses
Umum

Perhitungan Manual
Jumlah
unit
Ya



Jumlah TPA

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

TPA adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas sejak lahir sampai dengan usia 4 (empat) tahun.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Aspek Pendidikan
Semakin banyak jumlah TPA, semakin besar kesempatan bagi orang tua atau wali untuk bekerja atau menjalankan aktivitas lainnya tanpa harus khawatir tentang pengasuhan anak.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Periododesasi

Penyelenggaraan PAUD di
Kabupaten Purbalingga
Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan
Ukuran
Satuan
Apakah Indikator Dapat Diakses
Umum

Perhitungan Manual
Jumlah
unit
Ya



Jumlah SPS (Satuan PAUD Sejenis)

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | SPS adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun secara mandiri atau terintegrasi dengan berbagai layanan kesehatan, gizi, keagamaan, dan atau kesejahteraan sosial. |
| Unit Penyelenggara | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Kelompok Indikator | Aspek Pendidikan |
| Interpretasi | Jumlah SPS yang cukup banyak membantu meningkatkan aksesibilitas pendidikan awal bagi anak-anak di berbagai wilayah. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Perhitungan Manual |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | unit |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Jumlah PAUD Terakreditasi A

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | PAUD Terakreditasi A adalah Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang telah melalui proses akreditasi dan memperoleh akreditasi dengan peringkat A. |
| Unit Penyelenggara | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Kelompok Indikator | Aspek Pendidikan |
| Interpretasi | Jumlah PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) Terakreditasi A mencerminkan tingkat keberhasilan lembaga PAUD dalam memenuhi standar kualitas pendidikan yang ditetapkan oleh lembaga akreditasi. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|---|
| Metode/Rumus Penghitungan | $J1 + J2 + J3 + J4 + J5 + J6$ <p>Keterangan:</p> <p>J1 = Jumlah TK Negeri Terakreditasi A</p> <p>J2 = TK Swasta Terakreditasi A</p> <p>J3 = Jumlah KB Terakreditasi A</p> <p>J4 = Jumlah TPA Terakreditasi A</p> <p>J5 = Jumlah SPS (Satuan PAUD Sejenis) Terakreditasi A</p> <p>J6 = Jumlah RA/BA/TA Terakreditasi A</p> |
| Ukuran Satuan | Jumlah unit |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | ya |



Jumlah TK Negeri Terakreditasi A

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

TK Negeri Terakreditasi A adalah Lembaga pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) yang dikelola oleh pemerintah dan telah memperoleh akreditasi dengan peringkat A.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Aspek Pendidikan

Jumlah TK Negeri terakreditasi A yang tinggi merupakan indikator positif dalam penyediaan layanan pendidikan awal yang berkualitas tinggi bagi anak-anak usia dini di wilayah tersebut. Hal ini mencerminkan komitmen dari pihak terkait, termasuk pemerintah dan lembaga pendidikan, untuk meningkatkan kualitas pendidikan di tingkat Taman Kanak-Kanak.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan
Periodesasi

Penyelenggaraan PAUD di
Kabupaten Purbalingga
Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan
Ukuran
Satuan
Apakah Indikator Dapat Diakses
Umum

Perhitungan Manual
Jumlah
unit
Ya



Jumlah TK Swasta Terakreditasi A

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | TK Swasta Terakreditasi A adalah Lembaga pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) yang dikelola secara swasta dan telah memperoleh akreditasi dengan peringkat A. |
| Unit Penyelenggara | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Kelompok Indikator | Aspek Pendidikan |
| Interpretasi | Jumlah TK Negeri terakreditasi A yang tinggi merupakan indikator positif dalam penyediaan layanan pendidikan awal yang berkualitas tinggi bagi anak-anak usia dini di wilayah tersebut. Hal ini mencerminkan komitmen dari pihak terkait, termasuk pemerintah dan lembaga pendidikan, untuk meningkatkan kualitas pendidikan di tingkat Taman Kanak-Kanak. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Perhitungan Manual |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | unit |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Jumlah KB Terakreditasi A

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

KB Terakreditasi A adalah Kelompok bermain yang telah memperoleh akreditasi dengan peringkat A.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Aspek Pendidikan

Jumlah TK Swasta terakreditasi A yang tinggi merupakan indikator positif dalam penyediaan layanan pendidikan awal yang berkualitas tinggi bagi anak-anak usia dini di sektor swasta. Hal ini mencerminkan komitmen dari pihak terkait, termasuk lembaga pendidikan swasta, untuk meningkatkan kualitas pendidikan di tingkat Taman Kanak-Kanak.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Periododesasi

Penyelenggaraan PAUD di
Kabupaten Purbalingga
Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan
Ukuran
Satuan
Apakah Indikator Dapat Diakses
Umum

Perhitungan Manual
Jumlah
unit
Ya



Jumlah TPA Terakreditasi A

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

TPA Terakreditasi A adalah TPA yang telah memperoleh akreditasi dengan peringkat A.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Aspek Pendidikan

Jumlah TPA Terakreditasi A yang tinggi merupakan indikator positif dalam penyediaan layanan perawatan dan pendidikan awal yang berkualitas tinggi bagi anak-anak usia dini di tempat penitipan anak. Hal ini mencerminkan komitmen dari lembaga TPA dan pihak terkait, termasuk pemerintah dan lembaga pendidikan, untuk meningkatkan kualitas layanan yang disediakan.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Penyelenggaraan PAUD di
Kabupaten Purbalingga
Tahunan

Periodesasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

unit

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah SPS (Satuan PAUD Sejenis) Terakreditasi A

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | SPS (Satuan PAUD Sejenis) Terakreditasi A adalah Lembaga pendidikan sejenis PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) yang telah memperoleh akreditasi dengan peringkat A. |
| Unit Penyelenggara | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Kelompok Indikator | Aspek Pendidikan |
| Interpretasi | Jumlah SPS Terakreditasi A yang tinggi merupakan indikator positif dalam penyediaan layanan pendidikan awal yang berkualitas tinggi bagi anak-anak usia dini di lembaga pendidikan sejenis dengan PAUD formal. Hal ini mencerminkan komitmen dari lembaga SPS dan pihak terkait, termasuk pemerintah dan lembaga pendidikan, untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan awal yang disediakan oleh SPS. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Purbalingga |
| Periododesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Perhitungan Manual |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | unit |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Persentase PAUD Terakreditasi A

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Persentase PAUD Terakreditasi A adalah Perbandingan Jumlah PAUD terakreditasi A dengan Jumlah sekolah PAUD

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Aspek Pendidikan
Semakin tinggi persentase tersebut, semakin banyak lembaga PAUD yang memiliki kualitas pendidikan yang baik dan memenuhi standar yang ditetapkan.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Penyelenggaraan PAUD di
Kabupaten Purbalingga
Tahunan

Periodesasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{J1}{J2} \times 100\%$$

Keterangan:

J1 = Jumlah PAUD Terakreditasi A

J2 = Jumlah Sekolah PAUD

Persentase

%

Ukuran

Satuan

Apakah Indikator Dapat Diakses
Umum

Ya



Jumlah Guru/ Tenaga Pendidik PAUD

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Guru/ Tenaga Pendidik PAUD adalah Pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada sekolah PAUD.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Aspek Pendidikan
Jumlah Guru/Tenaga Pendidik PAUD yang memadai berpotensi meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Lebih banyak guru dapat memberikan perhatian dan bimbingan yang lebih baik kepada setiap anak, mendukung perkembangan mereka secara keseluruhan.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan
Periododesasi

Penyelenggaraan PAUD di
Kabupaten Purbalingga
Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$J1 + J2 + J3 + J4 + J5 + J6$$

Keterangan:
J1 = Jumlah Guru/ Tenaga Pendidik TK Negeri
J2 = Jumlah Guru/ Tenaga Pendidik TK Swasta



J3 = Jumlah Guru/ Tenaga Pendidik
KB

J4 = Jumlah Guru/ Tenaga Pendidik
TPA

J5 = Jumlah Guru/ Tenaga Pendidik
SPS

J6 = Jumlah Guru/ Tenaga Pendidik
RA/BA/TA

Ukuran
Satuan
Jumlah
orang

Apakah Indikator Dapat Diakses
Umum
Ya



Jumlah Guru/ Tenaga Pendidik TK Negeri

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Guru/ Tenaga Pendidik TK Negeri adalah Pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada TK Negeri. |
| Unit Penyelenggara | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Kelompok Indikator | Aspek Pendidikan |
| Interpretasi | Jumlah Guru/Tenaga Pendidik TK Negeri yang memadai berpotensi meningkatkan kualitas pembelajaran. Lebih banyak guru dapat memberikan perhatian dan bimbingan yang lebih baik kepada setiap anak, mendukung perkembangan kognitif, sosial, dan emosional mereka. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Perhitungan Manual |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | orang |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Jumlah Guru/ Tenaga Pendidik TK Swasta

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Guru/ Tenaga Pendidik TK Swasta adalah Pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada TK Swasta.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Aspek Pendidikan
Jumlah Guru/Tenaga Pendidik TK Swasta yang memadai berpotensi meningkatkan kualitas pembelajaran. Lebih banyak guru dapat memberikan perhatian dan bimbingan yang lebih baik kepada setiap anak, mendukung perkembangan kognitif, sosial, dan emosional mereka.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Penyelenggaraan PAUD di
Kabupaten Purbalingga
Tahunan

Periodesasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Guru/ Tenaga Pendidik KB

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Guru/ Tenaga Pendidik KB adalah Pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada KB.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Aspek Pendidikan
Jumlah Guru/Tenaga Pendidik KB yang memadai berpotensi meningkatkan kualitas pengajaran dan pendidikan di KB. Guru-guru yang cukup dapat memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih baik dan mendukung perkembangan kognitif, sosial, dan emosional anak-anak.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Penyelenggaraan PAUD di
Kabupaten Purbalingga
Tahunan

Periodesasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Guru/ Tenaga Pendidik TPA

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Guru/ Tenaga Pendidik TPA adalah Pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada TPA.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Aspek Pendidikan
Jumlah Guru/Tenaga Pendidik TPA yang memadai berpotensi meningkatkan kualitas perawatan dan pengasuhan anak-anak di TPA. Guru-guru yang cukup dapat memberikan perhatian dan dukungan yang lebih baik dalam memenuhi kebutuhan fisik, sosial, dan emosional anak-anak.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan
Periodesasi

Penyelenggaraan PAUD di
Kabupaten Purbalingga
Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan
Ukuran
Satuan
Apakah Indikator Dapat Diakses
Umum

Perhitungan Manual
Jumlah
orang
Ya



Jumlah Guru/ Tenaga Pendidik SPS (Satuan PAUD Sejenis)

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Guru/ Tenaga Pendidik SPS (Satuan PAUD Sejenis) adalah Pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada SPS. |
| Unit Penyelenggara | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Kelompok Indikator | Aspek Pendidikan |
| Interpretasi | Jumlah Guru/Tenaga Pendidik SPS yang memadai berpotensi meningkatkan kualitas pengajaran dan pengasuhan anak-anak usia dini di lembaga atau satuan PAUD. Guru-guru yang cukup dapat memberikan perhatian dan dukungan yang lebih baik dalam memenuhi kebutuhan fisik, sosial, kognitif, dan emosional anak-anak. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Perhitungan Manual |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | orang |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Jumlah Guru/ Tenaga Pendidik PAUD berkualitas S1/D4

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Guru/ Tenaga Pendidik PAUD berkualitas S1/D4 adalah Pendidik atau tenaga pengajar di tingkat pendidikan anak usia dini (PAUD) yang memiliki gelar sarjana (S1) atau diploma empat (D4), |
| Unit Penyelenggara | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Kelompok Indikator | Aspek Pendidikan |
| Interpretasi | Dengan adanya lebih banyak guru berkualitas S1/D4, diharapkan kualitas pengajaran di lembaga PAUD akan meningkat. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Purbalingga |
| Periododesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|---|
| Metode/Rumus Penghitungan | Jumlahan Guru/Tenaga Pendidik PAUD berkualitas S1/D4 TK Negeri, TK Swasta, KB, TPA, SPS (Satuan PAUD Sejenis), RA/BA/TA |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | orang |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Jumlah Guru/ Tenaga Pendidik TK Swasta berkualitas S1/D4

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Guru/ Tenaga Pendidik TK Swasta berkualitas S1/D4 adalah Pendidik atau tenaga pengajar di tingkat TK Swasta yang memiliki gelar sarjana (S1) atau diploma empat (D4)

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Aspek Pendidikan

Dengan adanya lebih banyak guru berkualitas S1/D4, diharapkan kualitas pengajaran di lembaga TK Swasta akan meningkat.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Penyelenggaraan PAUD di
Kabupaten Purbalingga
Tahunan

Periodesasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Guru/ Tenaga Pendidik TK Negeri berkualifikasi S1/D4

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Guru/ Tenaga Pendidik TK Negeri berkualifikasi S1/D4 adalah Pendidik atau tenaga pengajar di tingkat TK Negeri yang memiliki gelar sarjana (S1) atau diploma empat (D4).

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Aspek Pendidikan

Dengan adanya lebih banyak guru berkualifikasi S1/D4, diharapkan kualitas pengajaran di lembaga TK Negeri akan meningkat.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Penyelenggaraan PAUD di
Kabupaten Purbalingga
Tahunan

Periodesasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan
Ukuran

Perhitungan Manual
Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses
Umum

Ya



Jumlah Guru/ Tenaga Pendidik KB berkualifikasi S1/D4

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|--|--|
| Konsep dan Definisi | Guru/ Tenaga Pendidik KB berkualifikasi S1/D4 adalah Pendidik atau tenaga pengajar di tingkat KB yang memiliki gelar sarjana (S1) atau diploma empat (D4) |
| Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aspek Pendidikan Dengan adanya lebih banyak guru berkualifikasi S1/D4, diharapkan kualitas pengajaran di lembaga KB akan meningkat. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Perhitungan Manual |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | orang |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Jumlah Guru/ Tenaga Pendidik TPA berkualifikasi S1/D4

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Guru/ Tenaga Pendidik TPA berkualifikasi S1/D4 adalah Pendidik atau tenaga pengajar di tingkat TPA yang memiliki gelar sarjana (S1) atau diploma empat (D4).

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Aspek Pendidikan
Dengan adanya lebih banyak guru berkualifikasi S1/D4, diharapkan kualitas pengajaran di lembaga TPA akan meningkat.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Penyelenggaraan PAUD di
Kabupaten Purbalingga
Tahunan

Periodesasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan
Ukuran

Perhitungan Manual
Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses
Umum

Ya



Jumlah Guru/ Tenaga Pendidik SPS berkualifikasi S1/D4

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Guru/ Tenaga Pendidik SPS berkualifikasi S1/D4 adalah Pendidik atau tenaga pengajar di tingkat SPS yang memiliki gelar sarjana (S1) atau diploma empat (D4).

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Aspek Pendidikan
Dengan adanya lebih banyak guru berkualifikasi S1/D4, diharapkan kualitas pengajaran di lembaga SPS akan meningkat.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Periodesasi

Penyelenggaraan PAUD di
Kabupaten Purbalingga
Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan
Ukuran
Satuan
Apakah Indikator Dapat Diakses
Umum

Perhitungan Manual
Jumlah
orang
Ya



Persentase Guru/ Tenaga Pendidik PAUD berkualitas S1/D4

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Persentase Guru/ Tenaga Pendidik PAUD berkualitas S1/D4 adalah Perbandingan antara Guru/Tenaga Pendidik PAUD berkualitas S1/D4 dengan Jumlah Guru/Tenaga Pendidik PAUD berkualitas S1/D4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aspek Pendidikan

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Persentase yang tinggi dari Guru/Tenaga Pendidik PAUD berkualitas S1/D4 menunjukkan bahwa sebagian besar guru memiliki pendidikan formal yang tinggi dan mendalam tentang pendidikan anak usia dini. Ini berarti potensi adanya pemahaman yang lebih baik tentang metode pengajaran yang efektif dan perkembangan anak usia dini.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Penyelenggaraan PAUD di
Kabupaten Purbalingga
Tahunan

Periodesasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{J1}{J2} \times 100\%$$

Keterangan:

J1 = Jumlah Guru/Tenaga Pendidik PAUD berkualitas S1/D4

J2 = Jumlah Guru/Tenaga Pendidik PAUD

Persentase

%

Ukuran

Satuan

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



APK SD/MI/Paket A

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

APK SD/MI/Paket A adalah Rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang bersekolah di tingkat pendidikan SD/MI/Paket A terhadap jumlah penduduk usia 7-12 tahun.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Aspek Pendidikan

APK SD/MI/Paket A yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Jika nilai APK SD/MI/Paket A mendekati 100 persen menunjukkan bahwa ada banyak anak bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI/Paket A yang belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Angka Partisipasi Kasar (APK)
Pendidikan Dasar di Kabupaten
Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{J1}{J2} \times 100\%$$

Keterangan:

J1 = jumlah siswa SD/MI/Paket A



| | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| | J2 = jumlah penduduk usia 7-12 tahun |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | % |
| Apakah Indikator Dapat Diakses | Ya |
| Umum | |



APK SMP/MTs/Paket B

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|--|---|
| Konsep dan Definisi | APK SMP/MTs/Paket B adalah Rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang bersekolah di tingkat pendidikan SMP/MTs/Paket B terhadap jumlah penduduk usia 13-15 tahun. |
| Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aspek Pendidikan APK SMP/MTs/Paket B yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Jika nilai APK SMP/MTs/Paket B mendekati 100 persen menunjukkan bahwa ada banyak anak bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs/Paket B yang belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Dasar di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | $\frac{J1}{J2} \times 100\%$ |
|---------------------------|------------------------------|

Keterangan:



| | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| | J1 = jumlah siswa SMP/MTs/Paket B |
| | J2 = jumlah penduduk usia 13-15 tahun |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | % |
| Apakah Indikator Dapat Diakses | Ya |
| Umum | |



Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B adalah Angka partisipasi murni sekolah menengah atas adalah perbandingan antara murid sekolah menengah atas (SMP), Madrasah Sanawiyah (MTs), dan paket B setara SMP, usia 13-15 tahun, dengan penduduk usia 13-15 tahun, dinyatakan dalam persentase. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aspek Pendidikan

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

APM SMP/MTs/Paket B menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Jika APM SMP/MTs/Paket B mendekati 100%, berarti terdapat banyak anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu. APM berguna untuk mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Dasar di Kabupaten Purbalingga

Periododesasi

Tahunan



■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan $\frac{J1}{J2} \times 100\%$

Keterangan:

J1 = Jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang sedang bersekolah di tingkat SMP/MTs/Paket B

J2 = jumlah penduduk usia 13-15 tahun

Ukuran Persentase

Satuan %

Apakah Indikator Dapat Diakses Ya

Umum



Persentase Guru/ Tenaga Pendidik SMP/MTs Berkualifikasi S1/D4

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Persentase Guru/ Tenaga Pendidik SMP/MTs Berkualifikasi S1/D4 adalah Perbandingan jumlah Guru/ Tenaga Pendidik SMP/MTs Berkualifikasi S1/D4 dengan jumlah Guru/Tenaga Pendidik SMP/MTs. |
| Unit Penyelenggara | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Kelompok Indikator | Aspek Pendidikan |
| Interpretasi | Dengan adanya persentase yang tinggi dari guru berkualifikasi S1/D4, maka dapat diharapkan peningkatan kualitas pengajaran di SMP/MTs karena mereka memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang materi pelajaran dan metode pengajaran yang lebih baik. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Penyelenggaraan Pendidikan Dasar di Kabupaten Purbalingga |
| Periodisasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|---|
| Metode/Rumus Penghitungan | $\frac{J1}{J2} \times 100\%$ |
| | Keterangan: J1 = Jumlah Guru/ Tenaga Pendidik SMP/MTs Berkualifikasi S1/D4 J2 = Jumlah Guru/Tenaga Pendidik SMP/MTs |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | % |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Rasio Guru Terhadap Siswa SD/MI

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Rasio Guru Terhadap Siswa SD/MI adalah Perbandingan jumlah siswa SD/MI dengan jumlah guru SD/MI. Rasio Guru Terhadap Siswa SD/MI mengukur jumlah siswa SD/MI yang dibimbing dan diajarkan per 1 guru.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Aspek Pendidikan

Rasio guru terhadap siswa yang lebih rendah (guru lebih banyak dibandingkan jumlah siswa) cenderung memberikan kesempatan bagi interaksi yang lebih pribadi antara guru dan siswa. Hal ini dapat meningkatkan perhatian dan dukungan individual bagi setiap siswa, memungkinkan guru untuk memberikan bimbingan dan pengajaran yang lebih fokus dan sesuai dengan kebutuhan siswa.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Penyelenggaraan Pendidikan Dasar
di Kabupaten Purbalingga
Tahunan

Periodesasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{J_1}{J_2}$$

Keterangan:

J1 = Jumlah siswa SD/MI



Ukuran

Satuan

Apakah Indikator Dapat Diakses

Umum

$J2$ = jumlah guru SD/M

Rasio

orang

Ya



Rasio Guru Terhadap Siswa SMP/MTs

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Rasio Guru Terhadap Siswa SMP/MTs adalah Jumlah siswa yang dibimbing dan diajar per 1 orang guru pada tingkat SMP/MTs. |
| Unit Penyelenggara | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Kelompok Indikator | Aspek Pendidikan |
| Interpretasi | Rasio guru terhadap siswa yang lebih rendah (guru lebih banyak dibandingkan jumlah siswa) cenderung memberikan kesempatan bagi interaksi yang lebih pribadi antara guru dan siswa. Hal ini dapat meningkatkan perhatian dan dukungan individual bagi setiap siswa, memungkinkan guru untuk memberikan bimbingan dan pengajaran yang lebih fokus dan sesuai dengan kebutuhan siswa. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Penyelenggaraan Pendidikan Dasar di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--|
| Metode/Rumus Penghitungan | $\frac{J1}{J2}$ |
| | Keterangan: J1 = Jumlah siswa SMP/MTS J2 = jumlah guru SMP/MTS |
| Ukuran Satuan | Rasio orang |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Ruang Kelas SD Kondisi Baik

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Ruang Kelas adalah Ruang kelas adalah suatu ruangan dalam bangunan sekolah, yang berfungsi sebagai tempat untuk kegiatan tatap muka dalam proses kegiatan belajar mengajar (KBM). Mebeler dalam ruangan ini terdiri dari meja siswa, kursi siswa, meja guru, lemari kelas, papan tulis, serta aksesoris ruangan lainnya yang sesuai. Ukuran yang umum adalah 9m x 8m. Ruang kelas memiliki syarat kelayakan dan standar tertentu, misalnya ukuran, pencahayaan alami, sirkulasi udara, dan persyaratan lainnya yang telah dibakukan oleh pihak berwenang terkait.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Aspek Pendidikan

Ruang kelas dalam kondisi baik menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih baik. Siswa akan lebih nyaman dan lebih fokus dalam belajar di ruang kelas yang kondisinya aman, bersih, dan nyaman. Hal ini berpotensi meningkatkan partisipasi dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran.



■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Kondisi Ruang Kelas SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Perhitungan Manual |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | unit |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Ruang Kelas SD Kondisi Rusak Ringan

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Ruang Kelas SD Kondisi Rusak Ringan adalah Ruang kelas SD dengan bangunan yang tingkat kerusakannya kurang dari 30%

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Aspek Pendidikan

Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak ringan dapat memberikan indikasi mengenai kondisi infrastruktur pendidikan. Jika jumlahnya rendah, artinya sebagian kecil ruang kelas mengalami kerusakan yang relatif minor, seperti retakan kecil pada dinding atau lantai, cat yang terkelupas, atau masalah kecil lainnya. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar ruang kelas masih dalam kondisi baik dan dapat digunakan dengan nyaman oleh siswa dan guru.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Ruang Kelas SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Purbalingga Tahunan

Periodesasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

unit

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Ruang Kelas SD Kondisi Rusak Sedang

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Ruang Kelas SD Kondisi Rusak Sedang adalah Ruang kelas SD dengan bangunan yang tingkat kerusakannya lebih besar dari 30% sampai dengan 45%. |
| Unit Penyelenggara | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Kelompok Indikator | Aspek Pendidikan |
| Interpretasi | Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak sedang mencerminkan skala atau jumlah ruang kelas yang membutuhkan perbaikan dan pemeliharaan yang lebih luas dibandingkan dengan kerusakan ringan. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Kondisi Ruang Kelas SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Perhitungan Manual |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | unit |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Ruang Kelas SD Kondisi Rusak Berat

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Ruang Kelas SD Kondisi Rusak Berat adalah Ruang kelas SD dengan bangunan yang tingkat kerusakannya lebih besar dari 45% sampai dengan 65%. |
| Unit Penyelenggara | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Kelompok Indikator | Aspek Pendidikan |
| Interpretasi | Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak berat mencerminkan skala atau jumlah ruang kelas yang membutuhkan perbaikan yang luas dan komprehensif. Ruang kelas dalam kondisi rusak berat umumnya mengalami kerusakan struktural yang signifikan, retakan besar pada dinding, lantai yang hampir roboh, atap yang rusak parah, atau masalah serius lainnya yang mengganggu penggunaan ruang kelas secara normal. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Kondisi Ruang Kelas SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Purbalingga |
| Periodisasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Perhitungan Manual |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | unit |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Ruang Kelas SD Kondisi Rusak Total

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Ruang Kelas SD Kondisi Rusak Total adalah Ruang kelas SD yang sudah tidak bisa digunakan kegiatan belajar mengajar dikarenakan rusak.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Aspek Pendidikan

Tingkat perawatan dan pemeliharaan yang rendah: Jika banyak ruang kelas dalam kondisi rusak total, hal ini dapat menunjukkan bahwa tingkat perawatan dan pemeliharaan sekolah tidak memadai. Kurangnya anggaran, sumber daya, atau kesadaran tentang pentingnya perawatan dapat menyebabkan penurunan kondisi ruang kelas.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Ruang Kelas SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

unit

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Ruang Kelas SMP Kondisi Baik

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Ruang Kelas SMP Kondisi Baik adalah Ruang kelas SMP dengan bangunan yang tidak ada kerusakan.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Aspek Pendidikan

Ruang kelas dalam kondisi baik menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih baik. Siswa akan lebih nyaman dan lebih fokus dalam belajar di ruang kelas yang kondisinya aman, bersih, dan nyaman. Hal ini berpotensi meningkatkan partisipasi dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Ruang Kelas SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Purbalingga Tahunan

Periodisasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

unit

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Ruang Kelas SMP Kondisi Rusak Ringan

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Ruang Kelas SMP Kondisi Rusak Ringan adalah Ruang kelas SMP dengan bangunan yang tingkat kerusakannya kurang dari 30%.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Aspek Pendidikan

Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak ringan dapat memberikan indikasi mengenai kondisi infrastruktur pendidikan. Jika jumlahnya rendah, artinya sebagian kecil ruang kelas mengalami kerusakan yang relatif minor, seperti retakan kecil pada dinding atau lantai, cat yang terkelupas, atau masalah kecil lainnya. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar ruang kelas masih dalam kondisi baik dan dapat digunakan dengan nyaman oleh siswa dan guru.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Ruang Kelas SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Purbalingga Tahunan

Periodisasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

unit

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Ruang Kelas SMP Kondisi Rusak Sedang

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Ruang Kelas SMP Kondisi Rusak Sedang adalah Ruang kelas SMP dengan bangunan yang tingkat kerusakannya lebih besar dari 30% sampai dengan 45%. |
| Unit Penyelenggara | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Kelompok Indikator | Aspek Pendidikan |
| Interpretasi | Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak sedang mencerminkan skala atau jumlah ruang kelas yang membutuhkan perbaikan dan pemeliharaan yang lebih luas dibandingkan dengan kerusakan ringan. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Kondisi Ruang Kelas SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Perhitungan Manual |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | unit |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Ruang Kelas SMP Kondisi Rusak Berat

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Ruang Kelas SMP Kondisi Rusak Berat adalah Ruang kelas SMP dengan bangunan yang tingkat kerusakannya lebih besar dari 45% sampai dengan 65%. |
| Unit Penyelenggara | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Kelompok Indikator | Aspek Pendidikan |
| Interpretasi | Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak berat mencerminkan skala atau jumlah ruang kelas yang membutuhkan perbaikan yang luas dan komprehensif. Ruang kelas dalam kondisi rusak berat umumnya mengalami kerusakan struktural yang signifikan, retakan besar pada dinding, lantai yang hampir roboh, atap yang rusak parah, atau masalah serius lainnya yang mengganggu penggunaan ruang kelas secara normal. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Kondisi Ruang Kelas SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Purbalingga |
| Periodisasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Perhitungan Manual |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | unit |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Ruang Kelas SMP Kondisi Rusak Total

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Ruang Kelas SMP Kondisi Rusak Total adalah Ruang Kelas SMP Kondisi Rusak Total.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Aspek Pendidikan

Tingkat perawatan dan pemeliharaan yang rendah: Jika banyak ruang kelas dalam kondisi rusak total, hal ini dapat menunjukkan bahwa tingkat perawatan dan pemeliharaan sekolah tidak memadai. Kurangnya anggaran, sumber daya, atau kesadaran tentang pentingnya perawatan dapat menyebabkan penurunan kondisi ruang kelas.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Ruang Kelas SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Purbalingga Tahunan

Periodisasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

unit

Apakah Indikator Dapat Diakses
Umum

Ya



Angka kelulusan SD/MI

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|--|---|
| Konsep dan Definisi | Angka kelulusan SD/MI adalah Jumlah penduduk yang menamatkan pendidikan SD/MI sesuai kelompok usia referensi pada jenjang pendidikan tersebut. |
| Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aspek Pendidikan Jika Presentase angka kelulusan SD/MI semakin tinggi, hal ini mungkin menunjukkan peningkatan kualitas pendidikan di sekolah-sekolah tersebut. Guru dan tenaga pendidik mungkin telah mengimplementasikan strategi pengajaran yang lebih efektif, kurikulum yang relevan, dan upaya peningkatan mutu pendidikan secara keseluruhan. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Angka Kelulusan, Angka Melanjutkan, Angka Putus Sekolah dan Angka Mengulang SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Purbalingga |
| Periododesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|---------------------------|--|
| Metode/Rumus Penghitungan | $\frac{J1}{J2} \times 100\%$ Keterangan: J1 = Jumlah Siswa Lulus |
|---------------------------|--|



Ukuran

Satuan

Apakah Indikator Dapat Diakses

Umum

J2 = Jumlah Seluruh Siswa

Persentase

persen

Ya



Angka kelulusan SMP/MTs

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Angka kelulusan SMP/MTs adalah Jumlah penduduk yang menamatkan pendidikan SMP/MTs sesuai kelompok usia referensi pada jenjang pendidikan tersebut. |
| Unit Penyelenggara | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Kelompok Indikator | Aspek Pendidikan |
| Interpretasi | Jika Presentase angka kelulusan SMP/MTs semakin tinggi, hal ini mungkin menunjukkan peningkatan kualitas pendidikan di sekolah-sekolah tersebut. Guru dan tenaga pendidik mungkin telah mengimplementasikan strategi pengajaran yang lebih efektif, kurikulum yang relevan, dan upaya peningkatan mutu pendidikan secara keseluruhan. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Angka Kelulusan, Angka Melanjutkan, Angka Putus Sekolah dan Angka Mengulang SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Purbalingga Tahunan |
| Periodesasi | |

■ METODOLOGI

| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | $\frac{J1}{J2} \times 100\%$ |
| Ukuran | Keterangan: |
| Satuan | J1 = Jumlah Siswa Lulus |
| Apakah Indikator Dapat Diakses | J2 = Jumlah Seluruh Siswa |
| Umum | Persentase |
| | persen |
| | Ya |



Angka anak putus sekolah SD/MI

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Angka anak putus sekolah SD/MI adalah Jumlah anak yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan jenjang pendidikan SD/MI. |
| Unit Penyelenggara | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Kelompok Indikator | Aspek Pendidikan |
| Interpretasi | Tingginya angka anak putus sekolah bisa menunjukkan bahwa masih ada tantangan dalam memberikan akses pendidikan yang merata dan inklusif bagi anak-anak di tingkat pendidikan dasar. Faktor-faktor seperti kemiskinan, jarak tempuh sekolah yang jauh, dan ketidakmampuan untuk memenuhi biaya pendidikan dapat menjadi kendala bagi anak-anak untuk tetap bersekolah. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Angka Kelulusan, Angka Melanjutkan, Angka Putus Sekolah dan Angka Mengulang SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Purbalingga |
| Periododesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | $\frac{J1}{J2} \times 100\%$ |
|---------------------------|------------------------------|

Keterangan:

J1 = Jumlah anak yang putus sekolah



Ukuran

Satuan

Apakah Indikator Dapat Diakses

Umum

J2 = Jumlah anak di usia sekolah

Persentase

persen

Ya



Angka anak putus sekolah SMP/MTs

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Angka anak putus sekolah SMP/MTs adalah Jumlah anak yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan jenjang pendidikan SMP/MTs. |
| Unit Penyelenggara | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Kelompok Indikator | Aspek Pendidikan |
| Interpretasi | Tingginya tingkat putus sekolah juga bisa mencerminkan rendahnya kualitas pendidikan yang ditawarkan di sekolah-sekolah. Kurangnya sumber daya, kurikulum yang tidak relevan, metode pengajaran yang tidak efektif, dan lingkungan belajar yang tidak kondusif dapat menyebabkan anak-anak kehilangan minat dan motivasi untuk melanjutkan pendidikan mereka. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Angka Kelulusan, Angka Melanjutkan, Angka Putus Sekolah dan Angka Mengulang SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | $\frac{J1}{J2} \times 100\%$ |
|---------------------------|------------------------------|

Keterangan:

J1 = Jumlah anak yang putus sekolah



Ukuran

Satuan

Apakah Indikator Dapat Diakses

Umum

J2 = Jumlah anak di usia sekolah

Persentase

persen

Ya



Angka anak mengulang SD/MI

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Angka anak mengulang SD/MI adalah Jumlah siswa yang harus mengulang satu atau lebih tahun ajaran di tingkat pendidikan dasar, yaitu Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI). Angka ini mengukur seberapa banyak siswa yang tidak dapat lulus ke jenjang pendidikan berikutnya sesuai dengan tingkat kelas mereka.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Aspek Pendidikan

Tingginya angka anak mengulang bisa menunjukkan bahwa ada masalah dalam pemahaman dan pencapaian akademis siswa terhadap materi pelajaran di tingkat SD/MI. Beberapa siswa mungkin mengalami kesulitan dalam belajar dan memahami pelajaran, yang menyebabkan mereka harus mengulang kelas untuk memahami lebih baik.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Angka Kelulusan, Angka Melanjutkan, Angka Putus Sekolah dan Angka Mengulang SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Purbalingga

Periodisasi

Tahunan



■ **METODOLOGI**

Metode/Rumus Penghitungan $\frac{J1}{J2} \times 100\%$

Keterangan:

J1 = Jumlah anak yang mengulang

J2 = Jumlah anak di usia sekolah

Ukuran

Persentase

Satuan

persen

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Angka anak mengulang SMP/MTs

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Angka anak mengulang SMP/MTs adalah Angka anak mengulang SMP/MTs adalah persentase atau rasio siswa yang mengulang kelas di tingkat pendidikan menengah pertama, yang biasa disebut SMP (Sekolah Menengah Pertama) atau MTs (Madrasah Tsanawiyah). Angka ini menggambarkan jumlah siswa yang tidak berhasil memenuhi syarat untuk naik ke kelas berikutnya pada tahun ajaran tertentu dan perlu mengulang kelas yang sama.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Aspek Pendidikan

Tingginya angka anak mengulang bisa menunjukkan bahwa terdapat tantangan dalam pemahaman dan pencapaian akademis siswa terhadap materi pelajaran di tingkat SMP/MTs. Beberapa siswa mungkin mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran, yang menyebabkan mereka harus mengulang kelas untuk memahami lebih baik.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Angka Kelulusan, Angka Melanjutkan, Angka Putus Sekolah dan Angka Mengulang SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Purbalingga Tahunan

Periododesasi



■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan $\frac{J1}{J2} \times 100\%$

Keterangan:

J1 = Jumlah anak yang mengulang

J2 = Jumlah anak di usia sekolah

Ukuran

Persentase

Satuan

persen

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM)

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat untuk masyarakat yang bergerak dalam bidang pendidikan non formal. Kegiatan Belajar mengajar masuk dalam pengawasan dan bimbingan oleh dinas pendidikan.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Aspek Pendidikan

Semakin banyak jumlah PKBM, semakin banyak kesempatan belajar yang tersedia bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang tidak memiliki akses atau kesempatan untuk mengikuti pendidikan formal.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Penyelenggaraan
Kesetaraan di
Purbalingga
Tahunan

Pendidikan
Kabupaten

Periodesasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

unit

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah PKBM terakreditasi

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|--|--|
| Konsep dan Definisi | PKBM terakreditasi adalah Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) yang telah melewati proses akreditasi oleh otoritas pendidikan terkait. |
| Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aspek Pendidikan Semakin banyak PKBM yang telah berhasil melewati proses akreditasi, semakin banyak lembaga pendidikan nonformal yang diakui memiliki standar dan kualitas yang memadai sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh otoritas pendidikan. |

■ DATA

| | | |
|-----------------------|---|----------------------|
| Data yang Dikumpulkan | Penyelenggaraan Kesetaraan di Purbalingga | Pendidikan Kabupaten |
| Periodesasi | Tahunan | |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Perhitungan Manual |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | unit |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Persentase PKBM terakreditasi

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Persentase PKBM terakreditasi adalah Perbandingan antara jumlah PKBM terakreditasi dengan jumlah total PKBM.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Aspek Pendidikan

Persentase PKBM terakreditasi mengindikasikan sejauh mana lembaga-lembaga pendidikan nonformal di wilayah tersebut memiliki kualitas dan standar yang sesuai dengan kriteria akreditasi. Semakin tinggi persentase PKBM terakreditasi, semakin banyak lembaga pendidikan nonformal yang diakui memiliki kualitas yang memadai.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Penyelenggaraan
Kesetaraan di
Purbalingga
Tahunan

Pendidikan
Kabupaten

Periodesasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Persentase

Satuan

%

Apakah Indikator Dapat Diakses
Umum

Ya



Jumlah tenaga pengajar PKBM

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Tenaga pengajar PKBM adalah Individu yang menjadi pengajar atau instruktur dalam Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM).

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Aspek Pendidikan
Dengan memiliki cukup banyak tenaga pengajar, PKBM dapat memberikan kesempatan belajar bagi lebih banyak orang di masyarakat. Hal ini membantu meningkatkan akses pendidikan nonformal bagi mereka yang tidak memiliki akses ke pendidikan formal.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Penyelenggaraan
Kesetaraan di
Purbalingga
Tahunan

Pendidikan
Kabupaten

Periodisasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan
Ukuran
Satuan
Apakah Indikator Dapat Diakses
Umum

Perhitungan Manual
Jumlah
orang
Ya



Jumlah murid PKBM Paket A

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Murid PKBM Paket A adalah Peserta didik yang mengikuti program pendidikan nonformal tingkat Paket A di Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM). Program Paket A adalah salah satu program pendidikan yang disediakan untuk mereka yang belum menyelesaikan pendidikan dasar, yaitu Sekolah Dasar (SD).

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Aspek Pendidikan

Semakin banyak murid yang mendaftar di PKBM Paket A, semakin besar kesempatan mereka untuk menyelesaikan pendidikan dasar.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Penyelenggaraan
Kesetaraan di
Purbalingga
Tahunan

Pendidikan
Kabupaten

Periodesasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah murid PKBM Paket B

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Murid PKBM Paket B adalah Peserta didik yang mengikuti program pendidikan nonformal tingkat Paket B di Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM). Program Paket B adalah salah satu program pendidikan yang ditujukan untuk mereka yang telah menyelesaikan pendidikan dasar, yaitu Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Aspek Pendidikan

Semakin banyak murid yang mendaftar di PKBM Paket B, semakin besar kesempatan mereka untuk menyelesaikan pendidikan menengah.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Penyelenggaraan
Kesetaraan di
Purbalingga
Tahunan

Pendidikan
Kabupaten

Periodesasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah murid PKBM Paket C

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Murid PKBM Paket C adalah Peserta didik yang mengikuti program pendidikan nonformal tingkat Paket C di Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM). Program Paket C adalah salah satu program pendidikan yang ditujukan untuk mereka yang telah menyelesaikan pendidikan menengah, yaitu Sekolah Menengah Pertama (SMP), namun belum menyelesaikan pendidikan atas, yaitu Sekolah Menengah Atas (SMA).

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Aspek Pendidikan
Semakin banyak murid yang mendaftar di PKBM Paket C, semakin besar kesempatan mereka untuk menyelesaikan pendidikan atas.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Penyelenggaraan
Kesetaraan di
Purbalingga
Tahunan

Pendidikan
Kabupaten

Periodesasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) adalah Satuan pendidikan di luar sekolah atau pendidikan nonformal yang bertujuan untuk membantu masyarakat agar dapat lebih mengembangkan diri dan profesi hingga mengasah keterampilan.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Aspek Pendidikan
Jumlah LKP yang tinggi dapat menunjukkan ketersediaan akses yang lebih baik terhadap pendidikan dan pelatihan di suatu daerah. Ini dapat memberikan kesempatan lebih besar bagi individu untuk mengembangkan keterampilan atau mendapatkan pengetahuan tambahan, terlepas dari latar belakang pendidikan atau pekerjaan mereka sebelumnya.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Penyelenggaraan
Kesetaraan di
Purbalingga
Tahunan Pendidikan
Kabupaten

Periodesasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan
Ukuran

Perhitungan Manual
Jumlah
unit

Satuan

Ya

Apakah Indikator Dapat Diakses
Umum



Jumlah tenaga pengajar LKP

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Tenaga pengajar LKP adalah Individu yang bertanggung jawab untuk memberikan pengajaran, pembimbingan, dan pelatihan kepada peserta kursus atau program pelatihan di LKP tersebut.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Aspek Pendidikan
Jumlah tenaga pengajar LKP yang mencukupi dapat menunjukkan adanya ketersediaan layanan pendidikan dan pelatihan di daerah tersebut. Semakin banyak tenaga pengajar yang tersedia, semakin besar kemungkinan adanya berbagai program pelatihan atau kursus yang dapat diakses oleh masyarakat setempat.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Penyelenggaraan

Pendidikan

Kesetaraan di

Kabupaten

Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah murid LKP

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Murid LKP adalah Individu yang mendaftar dan mengikuti program pendidikan atau pelatihan di LKP.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Aspek Pendidikan

Jumlah murid LKP mencerminkan tingkat permintaan dan minat masyarakat terhadap program pendidikan atau pelatihan yang ditawarkan oleh LKP.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Penyelenggaraan
Kesetaraan di
Purbalingga
Tahunan

Pendidikan
Kabupaten

Periodesasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan
Ukuran

Perhitungan Manual
Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses
Umum

Ya



Jumlah Sanggar Kesenian

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Sarana Seni dan Budaya adalah Tempat atau sarana yang digunakan oleh suatu kelompok, komunitas atau sekumpulan orang untuk berkegiatan seni.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Aspek Kebudayaan
Semakin banyak sanggar yang berdiri dengan pengampu berkompeten, akan memfasilitasi kompetensi generasi muda untuk berkembang dan berkarakter.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Sarana dan Prasarana Seni dan Budaya di Kabupaten Purbalingga Tahunan

Periodisasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

sanggar

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Panggung Kesenian

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Panggung Kesenian adalah Panggung dengan event yang memfasilitasi hasil kreasi seni dari pekerja seni kepada penikmat seni serta melestarikan kesenian tersebut. |
| Unit Penyelenggara | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Kelompok Indikator | Aspek Kebudayaan |
| Interpretasi | Jumlah panggung dan frekuensi event kesenian tradisional serta modern akan memberi wacana yang lengkap kepada generasi milenial dengan karakter nasional yang integrated. Peningkatan jumlah panggung kesenian menunjukkan pertumbuhan dan perkembangan industri seni dan budaya dalam suatu wilayah. Hal ini dapat menunjukkan beberapa hal positif antara lain Tingginya minat dan apresiasi terhadap seni, Keragaman seni dan budaya, tingginya kreativitas dan inovasi. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Sarana dan Prasarana Seni dan Budaya di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Perhitungan Manual |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | unit |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Jumlah Museum

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Museum adalah Lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Aspek Kebudayaan
Semakin banyak jumlah museum dalam suatu daerah, semakin banyak pula kesempatan bagi masyarakat dan pengunjung untuk mengakses dan mempelajari berbagai aspek kehidupan manusia, baik dari segi seni, sejarah, budaya, maupun ilmu pengetahuan. Kemudahan akses museum oleh masyarakat akan sangat membantu eksistensi museum

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Sarana dan Prasarana Seni dan Budaya di Kabupaten Purbalingga Tahunan

Periodesasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

unit

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Pusat Kebudayaan/Taman Budaya

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Pusat Kebudayaan/Taman Budaya adalah Wadah atau sarana yang mengembangkan/mempromosikan kebudayaan tertentu.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Aspek Kebudayaan
Kebudayaan lokal akan dikenal dan dimiliki semua kalangan jika diendorses dengan event dan promosi budaya.
Peningkatan jumlah Pusat Kebudayaan atau Taman Budaya menunjukkan komitmen dan dorongan dari suatu wilayah untuk melestarikan dan mempromosikan budaya dan seni dalam masyarakat

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Sarana dan Prasarana Seni dan Budaya di Kabupaten Purbalingga Tahunan

Periodisasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

unit

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum

Ya



Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya adalah Event yang diselenggarakan dalam Festival Seni dan Budaya.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Aspek Kebudayaan
Frekuensi event yang cukup mampu memfasilitasi kreasi antara pegiat seni dengan penikmat seni serta mengeksistensikan budaya seni.
Peningkatan jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya menunjukkan dorongan yang kuat untuk mempromosikan, merayakan, dan menghargai seni dan budaya dalam masyarakat.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Sarana dan Prasarana Seni dan Budaya di Kabupaten Purbalingga Tahunan

Periododesasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

event

Apakah Indikator Dapat Diakses
Umum

Ya



Jumlah Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang sudah ditetapkan

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) adalah Berbagai praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, keterampilan – serta instrumen, obyek, artefak dan ruang-ruang budaya terkait dengannya- bahwa masyarakat, kelompok dan, dalam beberapa kasus, perorangan merupakan bagian dari warisan budaya tersebut (UNESCO Convention For The Safeguarding Of The Intangible Cultural Heritage 2003).

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Aspek Kebudayaan
Banyaknya WBTB yang terdapat dari daerah yang mendapatkan pengakuan/ sertifikat semakin memperkuat kebudayaan (tak benda) yang akan menggairahkan hidup dan kehidupan bermartabat. Peningkatan jumlah Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang sudah ditetapkan menunjukkan komitmen dari suatu negara atau wilayah untuk melestarikan dan menjaga keanekaragaman budaya serta warisan tradisional yang tidak berwujud.



■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Sarana dan Prasarana Seni dan Budaya di Kabupaten Purbalingga Tahunan

Periodesasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

unit

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Pamong Budaya (nilai budaya, kesejarahan, kesenian, permuseuman, cagar budaya, perfilman)

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Pamong Budaya adalah Jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melaksanakan tugas di bidang pemajuan kebudayaan dan pelestarian cagar budaya. |
| Unit Penyelenggara | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Kelompok Indikator | Aspek Kebudayaan |
| Interpretasi | Pamong Budaya Fungsional dengan kompetensi dan kuantitas yang memadai akan menunjang optimalnya keberhasilan pelaksanaan pemajuan kebudayaan dan pelestarian cagar budaya sesuai tupoksinya. |
| | Peningkatan jumlah Pamong Budaya (pelestari nilai budaya, kesejarahan, kesenian, permuseuman, cagar budaya, perfilman) menunjukkan komitmen yang lebih kuat dari suatu negara atau wilayah untuk melestarikan dan menghargai aspek-aspek budaya dan sejarah yang beragam. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Sarana dan Prasarana Seni dan Budaya di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |



■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Perhitungan Manual |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | orang |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Jumlah SDM Kesenian

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

SDM (Sumber Daya Manusia) Kesenian adalah Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan stratifikasai yang mumpuni di bidang kesenian.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Aspek Kebudayaan

SDM kesenian yang mumpuni merupakan modal utama untuk melestarikan dan mengkreasi seni dengan dasar seni tradisional semakin membanggakan generasi muda.

Jumlah SDM Kesenian yang lebih besar menandakan adanya peningkatan minat dan partisipasi dalam dunia seni dan kesenian. Ini dapat mendorong pertumbuhan industri seni yang beragam, termasuk bidang teater, tari, musik, seni rupa, perfilman, dan lainnya.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Sarana dan Prasarana Seni dan Budaya di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan
Ukuran
Satuan
Apakah Indikator Dapat Diakses
Umum

Perhitungan Manual
Jumlah
orang
Ya



Jumlah Obyek Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) yang dilestarikan/dikembangkan

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) adalah Dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam pemajuan kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya. Yang termasuk dalam Objek PPKD adalah Manuskrip, Tradisi Lisan, Adat Istiadat.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Aspek Kebudayaan

Semakin banyak PPKD yang direvitalisasi, maka semakin menghidupkan kecintaan generasi muda pada kebudayaan masa lampau

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Sarana dan Prasarana Seni dan Budaya di Kabupaten Purbalingga Tahunan

Periodesasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

buah

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum

Ya



Persentase Obyek Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) yang Dilestarikan atau Dikembangkan

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|--|--|
| Konsep dan Definisi | Persentase Obyek Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) yang Dilestarikan atau Dikembangkan adalah Perbandingan jumlah PPKD yang dilestarikan/dikembangkan dengan jumlah total PPKD. |
| Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aspek Kebudayaan Semakin tinggi presentase, maka semakin banyak generasi yang akan memahami dan mengintegrasikan kebudayaan dalam hidup dan penghidupan mereka. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Sarana dan Prasarana Seni dan Budaya di Kabupaten Purbalingga Tahunan |
| Periodesasi | |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|---|
| Metode/Rumus Penghitungan | $\frac{J1}{J2} \times 100\%$ |
| | <p>Keterangan:</p> <p>J1 = Jumlah Obyek Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) yang dilestarikan/dikembangkan</p> <p>J2 = Jumlah Total Obyek Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD)</p> |
| Ukuran Satuan | Persentase % |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Jumlah Pegiat Seni Rupa

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jumlah Pegiat Seni Rupa adalah Jumlah kelompok yang mendalami seni dan budaya dalam hal seni rupa yang ada di Kabupaten Purbalingga.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Aspek Kebudayaan
Semakin banyak pegiat seni rupa, semakin banyak peluang untuk pertumbuhan dan pengembangan kualitas seni rupa.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Pegiat Seni dan Budaya di
Kabupaten Purbalingga
Tahunan

Periodesasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

Kelompok

Apakah Indikator Dapat Diakses
Umum

Ya



Jumlah Pegiat Seni Tari/Gerak

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jumlah Pegiat Seni Tari/Gerak adalah Jumlah kelompok yang mendalami seni dan budaya dalam hal seni tari yang ada di Kabupaten Purbalingga

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Aspek Kebudayaan

Banyaknya pegiat seni sebanding dengan karya seni tari rupa dan kekayaan dari pegiat seni.

Dengan semakin banyak pegiat seni tari/gerak, dapat terjadi pertumbuhan dalam produksi dan penampilan seni tari dan gerak. Ini berarti lebih banyak pertunjukan tari dan gerak yang dapat dinikmati oleh masyarakat, meningkatkan apresiasi dan kesadaran akan seni ini.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Pegiat Seni dan Budaya di
Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

Kelompok

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Pegiat Pagelaran / PameranSeni Budaya

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Pegiat Pagelaran / PameranSeni Budaya adalah Kegiatan untuk memperkenalkan atau menunjukan hasil karya seni musik, tari, teater/ drama dan lainnya kepada masyarakat luas. Yang masuk dalam Seni Pagelaran/Pameran Seni Budaya diantaranya

- 1. Pagelaran Seni Budaya
- 2. Pameran Seni Budaya

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Aspek Kebudayaan

Frekuensi event yang cukup mampu memfasilitasi kreasi antara pegiat seni dengan penikmat seni serta mengeksistensikan budaya seni dengan adanya pagelaran/pameran seni .

Dengan semakin banyak Pegiat Pagelaran/Pameran Seni Budaya, masyarakat memiliki lebih banyak kesempatan untuk berpartisipasi dalam acara-acara seni budaya dan mengalami berbagai bentuk seni dan budaya. Ini dapat meningkatkan apresiasi dan pemahaman tentang seni budaya di kalangan masyarakat.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Pegiat Seni dan Budaya di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan



■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Perhitungan Manual |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Kelompok |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Jumlah Cagar Budaya

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Cagar Budaya adalah Benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Aspek Kebudayaan

Semakin banyak temuan cagar budaya yang diekspos ke masyarakat, semakin besar kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal, menghargai, dan bangga akan kebudayaan setempat

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Cagar Budaya di Kabupaten Purbalingga

Periodisasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

Unit

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum

Ya



Jumlah bangunan Cagar Budaya

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Bangunan Cagar Budaya adalah Susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/ atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding dan beratap.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Aspek Kebudayaan
Semakin banyak ditemukan struktur bangunan yang unik dari lingkungan setempat, akan memperkuat kebanggaan akan bangsa sendiri.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Cagar Budaya di Kabupaten
Purbalingga

Periodisasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

Unit

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Struktur Cagar Budaya

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Struktur Cagar Budaya adalah Susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Aspek Kebudayaan
Banyaknya struktur cagar budaya yang dilindungi akan memperkuat jati diri masyarakat setempat. Dengan semakin banyak struktur cagar budaya, artefak bersejarah, bangunan, situs arkeologi, dan tempat bersejarah lainnya dapat dipelihara dan dijaga agar tetap terjaga dan dapat diakses oleh masyarakat dan generasi mendatang.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Cagar Budaya di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

Unit

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Situs Cagar Budaya

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Situs Cagar Budaya adalah Lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung benda cagar budaya.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Aspek Kebudayaan

Banyaknya situs cagar budaya mengejawantahkan peradaban kehidupan masa lalu.

Dengan semakin banyak situs cagar budaya, artefak bersejarah, situs arkeologi, bangunan bersejarah, dan tempat bersejarah lainnya dapat dipelihara dan dijaga agar tetap terjaga dan dapat diakses oleh masyarakat dan generasi mendatang.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Cagar Budaya di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

Unit

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Penetapan Cagar Budaya

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Penetapan Cagar Budaya adalah Inventarisasi cagar budaya dan ditetapkan dengan SK sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Aspek Kebudayaan

Banyaknya penetapan cagar budaya dari pemerintah merupakan bukti kepedulian akan peradaban masa lampau.

Dengan semakin banyak penetapan cagar budaya, artefak bersejarah, bangunan bersejarah, situs arkeologi, dan tempat bersejarah lainnya mendapatkan perlindungan hukum dan perhatian lebih untuk tetap terjaga dan dijaga. Ini membantu melindungi warisan budaya dari kerusakan, perusakan, atau kepunahan yang dapat mengancam nilai sejarah dan budaya dari suatu daerah.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Cagar Budaya di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

Unit

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum

Ya



Jumlah Pelestarian Cagar Budaya

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Pelestarian Cagar Budaya adalah Usaha/ kegiatan dalam rangka melestarikan cagar budaya supaya tidak punah dari peradaban.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Aspek Kebudayaan
Banyaknya pelestarian cagar budaya dari pemerintah bukti kepedulian akan peradaban masa lampau.
Peningkatan jumlah pelestarian cagar budaya menunjukkan adanya upaya yang lebih besar dalam melestarikan dan menjaga warisan budaya dan sejarah suatu wilayah atau negara.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Cagar Budaya di Kabupaten Purbalingga Tahunan

Periodisasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

Unit

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum

Ya



Jumlah Pendaatan Cagar budaya

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Pendataan Cagar budaya adalah Kegiatan penelitian, pencatatan dan pengarsipan dilakukan untuk menginventarisir cagar budaya

Unit Penyelenggara

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kelompok Indikator

Aspek Kebudayaan

Interpretasi

Keakuratan pendataan cagar budaya merupakan bentuk keseriusan pemerintah akan cagar budaya.

Data yang terkumpul melalui pendataan cagar budaya dapat digunakan sebagai sumber pengetahuan yang berharga bagi masyarakat. Informasi tentang sejarah, budaya, dan peradaban dapat disampaikan melalui pendidikan, pameran, dan program edukasi lainnya.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Cagar Budaya di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

Unit

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah SDM Arkeolog

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Arkeolog adalah Ilmu yang mempelajari kebudayaan manusia masa lalu melalui kajian sistematis atas data bendawi yang ditinggalkan sebelum dikenal tulisan (prasejarah), maupun sesudah dikenal tulisan (sejarah), serta mempelajari budaya masa kini yang dikenal dengan riset budaya bendawi modern (modern material culture).

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Aspek Kebudayaan

Tersedianya arkeolog yang memadai sangat membantu pengungkapan kebudayaan masa lampau.

Dengan semakin banyak arkeolog, penelitian dan penggalian di situs-situs arkeologi dapat meningkat.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Cagar Budaya di Kabupaten
Purbalingga

Periodisasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

Unit

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Juru Pelihara Cagar Budaya

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Juru Pelihara Cagar Budaya adalah Salah satu tenaga kerja bidang cagar budaya yang mempunyai tugas memelihara, menjaga keamanan dan keselamatan cagar budaya agar tidak hilang, hancur, rusak atau musnah.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Aspek Kebudayaan
Terpenuhinya tenaga /juru pelihara yang memadai dengan keterampilannya akan mampu melayani dan membantu lestarnya cagar budaya.
Dengan semakin banyak juru pelihara cagar budaya, situs-situs bersejarah dan artefak dapat diperhatikan dengan lebih baik dan dirawat agar tetap terjaga.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Cagar Budaya di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

Unit

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan adalah Perbandingan antara cagar budaya yang dilestarikan dengan cagar budaya yang ada. |
| Unit Penyelenggara | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Kelompok Indikator | Aspek Kebudayaan |
| Interpretasi | Besarnya persentase cagar budaya yang dilestarikan menengarai kepedulian pemerintah akan cagar budaya. Semakin tinggi persentase, semakin besar perhatian dan upaya yang dilakukan untuk mempertahankan cagar budaya. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Data yang Dikumpulkan | Cagar Budaya di Kabupaten Purbalingga |
| Periodisasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--|
| Metode/Rumus Penghitungan | $\frac{J1}{J2} \times 100\%$ |
| | Keterangan: J1 = Cagar budaya yang dilestarikan J2 = Cagar budaya yang ada |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | % |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Jumlah Museum Milik Pemerintah Daerah

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Museum Milik Pemerintah Daerah adalah Lembaga milik pemerintah daerah yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Aspek Kebudayaan
Jumlah museum milik pemerintah daerah mencerminkan peran pemerintah dalam melestarikan dan menjaga warisan budaya di wilayah tersebut.
Peningkatan jumlah museum milik pemerintah daerah menunjukkan komitmen yang lebih kuat dari pemerintah daerah dalam melestarikan, mempromosikan, dan menghargai warisan budaya dan sejarah suatu wilayah

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Permuseuman di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

Unit

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum

Ya



Jumlah Museum Milik Swasta

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Museum Milik Swasta adalah Lembaga milik swasta atau perseorangan yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat. |
| Unit Penyelenggara | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Kelompok Indikator | Aspek Kebudayaan |
| Interpretasi | Jumlah museum milik swasta yang cukup banyak dapat memperluas aksesibilitas terhadap kegiatan budaya dan seni. Dengan adanya museum yang dikelola oleh pihak swasta, masyarakat memiliki lebih banyak pilihan dan kesempatan untuk mengunjungi museum-museum ini, menggali pengetahuan, dan menghargai kekayaan budaya yang tersedia. Peningkatan jumlah museum milik swasta menunjukkan adanya minat dan partisipasi dari sektor swasta dalam melestarikan dan mempromosikan warisan budaya dan sejarah |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Data yang Dikumpulkan | Permuseuman di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |



■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Perhitungan Manual |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Unit |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Jumlah Pengunjung Museum

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Pengunjung Museum adalah Perorangan dan/ organisasi yang memanfaatkan layanan museum

Unit Penyelenggara

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kelompok Indikator

Aspek Kebudayaan

Interpretasi

Jika jumlah pengunjung museum meningkat, maka dapat mencerminkan minat yang tinggi dari masyarakat terhadap koleksi, pameran, atau program yang ditawarkan oleh museum. Jumlah yang signifikan dari pengunjung menunjukkan popularitas museum dan daya tarik yang dimilikinya dalam menarik perhatian masyarakat.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Permuseuman di Kabupaten Purbalingga

Periododesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

Orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



METADATA INDIKATOR STATISTIK SEKTORAL

DINAS KESEHATAN



Angka Kematian Ibu

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

AKI (Angka Kematian Ibu) adalah Banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Dinas Kesehatan
Aspek Kesehatan
Semakin rendah AKI, semakin baik sistem pelayanan kesehatan maternal dalam mencegah dan mengatasi kondisi yang dapat menyebabkan kematian ibu selama kehamilan, persalinan, dan pasca persalinan.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Angka Kematian Ibu (AKI) per
100.000 Kelahiran Hidup di
Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{J1}{J2} \times 100.000$$



Keterangan:

J1 = Jumlah kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan dan masa nifas atau hasil estimasi pada waktu tertentu

J2 = Jumlah kelahiran hidup pada periode waktu yang sama

Proporsi

per 100.000 kelahiran hidup

Ya

Ukuran

Satuan

Apakah Indikator Dapat Diakses

Umum



Jumlah Kasus Kematian Ibu

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Jumlah kasus kematian ibu adalah Jumlah kematian ibu dalam periode 1 (satu) tahun di Kabupaten Purbalingga |
| Unit Penyelenggara | Dinas Kesehatan |
| Kelompok Indikator | Aspek Kesehatan |
| Interpretasi | Jumlah kematian ibu yang sedikit menunjukkan meningkatnya pelayanan kesehatan ibu |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--|
| Metode/Rumus Penghitungan | Jumlah kematian ibu di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | kasus |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Angka Kematian Bayi

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | AKB (Angka Kematian Bayi) adalah Jumlah kematian bayi berusia dibawah 1 tahun per 1.000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu. |
| Unit Penyelenggara | Dinas Kesehatan |
| Kelompok Indikator | Aspek Kesehatan |
| Interpretasi | Semakin rendah AKB, semakin baik sistem pelayanan kesehatan bayi berusia dibawah 1 tahun dalam mencegah dan mengatasi kondisi yang dapat menyebabkan kematian bayi. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--|
| Metode/Rumus Penghitungan | $\frac{J1}{J2} \times 1000$ |
| | Keterangan: |
| | J1 = Jumlah kematian bayi berusia < 1 tahun pada satu tahun tertentu |
| | J2 = Jumlah kelahiran hidup pada periode waktu yang sama |
| Ukuran | Proporsi |
| Satuan | per 1.000 kelahiran hidup |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Jumlah Kasus Kematian Bayi

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Jumlah kasus kematian bayi adalah Jumlah kematian bayi dalam periode 1 (satu) tahun di Kabupaten Purbalingga |
| Unit Penyelenggara | Dinas Kesehatan |
| Kelompok Indikator | Aspek Kesehatan |
| Interpretasi | Jumlah kematian bayi usia dibawah 1 tahun yang sedikit menunjukan meningkatnya pelayanan kesehatan bayi |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|---|
| Metode/Rumus Penghitungan | Jumlah kematian bayi usia 0-11 bulan yang meninggal di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | kasus |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Angka Kematian Balita

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | AKABA (Angka Kematian Balita) adalah Jumlah kematian anak berusia 0-59 bulan per 1.000 kelahiran hidup pada periode tahun tertentu. |
| Unit Penyelenggara | Dinas Kesehatan |
| Kelompok Indikator | Aspek Kesehatan |
| Interpretasi | Semakin rendah AKABA, semakin baik pelayanan kesehatan yang diberikan kepada balita (anak usia 0-59 bulan). Penurunan AKABA mencerminkan adanya upaya yang efektif dalam pencegahan dan penanganan penyakit pada balita, serta akses yang memadai terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Angka Kematian Balita (AKABA) per 1000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|---|
| Metode/Rumus Penghitungan | $\frac{J1}{J2} \times 1000$ <p>Keterangan: J1 = Jumlah kematian anak berusia 0-59 bulan pada periode tahun tertentu J2 = Jumlah anak berusia 0-4 tahun pada pertengahan tahun yang sama</p> |
| Ukuran | Proporsi |
| Satuan | per 1.000 kelahiran hidup |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Jumlah Kasus Kematian Balita

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Jumlah kasus kematian balita adalah Jumlah kematian balita dalam periode 1 (satu) tahun di Kabupaten Purbalingga |
| Unit Penyelenggara | Dinas Kesehatan |
| Kelompok Indikator | Aspek Kesehatan |
| Interpretasi | Jumlah kematian balita yang sedikit menunjukkan meningkatnya pelayanan kesehatan balita |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Angka Kematian Balita (AKABA) per 1000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|---|
| Metode/Rumus Penghitungan | Jumlah balita usia 0- 59 bulan (bayi+anak balita) yang meninggal di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | kasus |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Angka Kematian Neonatal

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | AKN (Angka Kematian Neonatal) adalah Jumlah kematian bayi usia 0-28 hari per 1.000 kelahiran hidup pada periode tahun tertentu. |
| Unit Penyelenggara | Dinas Kesehatan |
| Kelompok Indikator | Aspek Kesehatan |
| Interpretasi | Semakin rendah AKN, semakin baik tingkat kesehatan neonatal dan kualitas perawatan yang diberikan. Penurunan AKN mencerminkan adanya upaya yang efektif dalam mencegah kematian bayi pada periode neonatal, termasuk penerapan praktik medis yang baik, perawatan yang terkoordinasi, deteksi dini komplikasi neonatal, dan intervensi tepat waktu. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|--------------------------------|---|
| Metode/Rumus Penghitungan | $\frac{J1}{J2} \times 1000$ |
| Ukuran | Keterangan: |
| Satuan | J1 = Jumlah Kematian Bayi di bawah usia 28 hari pada periode tertentu |
| Apakah Indikator Dapat Diakses | J2 = Jumlah Kelahiran hidup pada periode waktu yang sama |
| Umum | Proporsi per 1.000 kelahiran hidup |
| | Ya |



Jumlah Kasus Kematian Neonatal

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Jumlah kasus kematian neonatal adalah Jumlah kematian bayi usia 0-28 hari dalam periode 1 (satu) tahun di Kabupaten Purbalingga |
| Unit Penyelenggara | Dinas Kesehatan |
| Kelompok Indikator | Aspek Kesehatan |
| Interpretasi | Semakin turun jumlah kematian neonatal menunjukkan meningkatnya pelayanan kesehatan bayi baru lahir |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--|
| Metode/Rumus Penghitungan | Jumlah bayi usia 0-28 hari yang meninggal di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | kasus |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Indeks Keluarga Sehat

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Indeks Keluarga Sehat adalah Suatu alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat kesehatan keluarga berdasarkan 12 indikator PIS PK (Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga). PIS PK merupakan suatu pendekatan pelayanan kesehatan yang menggali faktor resiko terjadinya penyakit dalam suatu keluarga dan menilai status kesehatan keluarga |
| Unit Penyelenggara | Dinas Kesehatan |
| Kelompok Indikator | Aspek Kesehatan |
| Interpretasi | Nilai IKS ini merupakan akumulasi dari nilai 12 indikator PIS PK dan dikategorikan ke dalam 3 kelompok, yakni Keluarga Sehat bila nilai IKS $> 0,8$, Keluarga Pra Sehat bila nilai IKS $0,5 - 0,8$ dan Keluarga Tidak Sehat bila nilai IKS $< 0,5$. Nilai IKS dapat diketahui berjenjang mulai dari tingkat keluarga, tingkat wilayah yang paling kecil (RT) hingga tingkat nasional |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Indeks Keluarga Sehat di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |



■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Nilai IKS ini merupakan akumulasi dari nilai 12 indikator PIS PK dan dikategorikan ke dalam 3 kelompok, yakni

1. Keluarga Sehat bila nilai IKS $> 0,8$,
2. Keluarga Pra Sehat bila nilai IKS $0,5 - 0,8$ dan
3. Keluarga Tidak Sehat bila nilai IKS $< 0,5$.

Nilai IKS dapat diketahui berjenjang mulai dari tingkat keluarga, tingkat wilayah yang paling kecil (RT) hingga tingkat nasional

Ukuran

Indeks

Satuan

Tanpa satuan

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Angka Kesakitan Penduduk (Morbiditas)

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Angka Kesakitan Penduduk (Morbiditas) adalah Persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan. Indikator ini dapat dimanfaatkan untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat secara umum yang dilihat dari adanya keluhan yang mengindikasikan terkena suatu penyakit tertentu |
| Unit Penyelenggara | Dinas Kesehatan |
| Kelompok Indikator | Aspek Kesehatan |
| Interpretasi | Semakin banyak penduduk yang mengalami keluhan kesehatan berarti semakin rendah derajat kesehatan dari masyarakat bersangkutan |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Angka Kesakitan dan Penduduk dengan Keluhan Kesehatan di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | $\frac{JPK}{JP} \times 100\%$ |
|---------------------------|-------------------------------|

Keterangan:

JPK = Jumlah penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan terganggunya aktivitas

JP = jumlah penduduk

Persentase

%

Ukuran

Satuan

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Angka Kesakitan Penduduk Laki-Laki

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Angka Kesakitan Penduduk Laki-Laki adalah Persentase penduduk laki-laki yang mempunyai keluhan kesehatan |
| Unit Penyelenggara | Dinas Kesehatan |
| Kelompok Indikator | Aspek Kesehatan |
| Interpretasi | Semakin banyak penduduk laki-laki yang mengalami keluhan kesehatan berarti semakin rendah derajat kesehatan dari masyarakat bersangkutan |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Angka Kesakitan dan Penduduk dengan Keluhan Kesehatan di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{JKL}{JP} \times 100\%$$

Keterangan:

JKL = Jumlah penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan terganggunya aktivitas penduduk laki-Laki

JP = jumlah penduduk

Persentase

%

Ukuran

Satuan

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Angka Kesakitan Penduduk Perempuan

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Angka Kesakitan Penduduk Perempuan adalah persentase penduduk perempuan yang mempunyai keluhan kesehatan |
| Unit Penyelenggara | Dinas Kesehatan |
| Kelompok Indikator | Aspek Kesehatan |
| Interpretasi | Semakin banyak penduduk perempuan yang mengalami keluhan kesehatan berarti semakin rendah derajat kesehatan dari masyarakat bersangkutan |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Angka Kesakitan dan Penduduk dengan Keluhan Kesehatan di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{JKP}{JP} \times 100\%$$

Keterangan:

JKP = Jumlah penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan terganggunya aktivitas penduduk perempuan

JP = jumlah penduduk

Persentase

%

Ukuran

Satuan

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Persentase Pelayanan Ibu Hamil Mendapat Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Persentase pelayanan ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan ibu hamil adalah Perbandingan Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di Kab. Purbalingga dalam kurun waktu satu tahun dengan Jumlah sasaran ibu hamil di Kab. Purbalingga dalam kurun waktu yang sama |
| Unit Penyelenggara | Dinas Kesehatan |
| Kelompok Indikator | Aspek Kesehatan |
| Interpretasi | Semakin tinggi persentase ini, semakin baik akses ibu hamil terhadap pelayanan kesehatan yang diperlukan selama masa kehamilan. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Cakupan Pelayanan Bidang Kesehatan (SPM) di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|---------------------------|---------------------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | $\frac{JIH}{JSIH} \times 100\%$ |
|---------------------------|---------------------------------|

Keterangan:

JIH = Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di Kab. Purbalingga dalam kurun waktu satu tahun
JSIH = Jumlah sasaran ibu hamil di



| | |
|--------------------------------|--|
| | Kab. Purbalingga dalam kurun waktu yang sama |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | % |
| Apakah Indikator Dapat Diakses | Ya |
| Umum | |



Persentase Pelayanan Ibu Bersalin Mendapat Pelayanan Persalinan

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Persentase pelayanan ibu bersalin mendapat pelayanan persalinan adalah Perbandingan Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu satu tahun dengan Jumlah sasaran ibu bersalin di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu satu tahun yang sama

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Dinas Kesehatan
Aspek Kesehatan
Semakin tinggi persentase ini, semakin baik akses ibu bersalin terhadap pelayanan persalinan yang tepat dan berkualitas.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Cakupan Pelayanan Bidang Kesehatan (SPM) di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{JIB}{JSIB} \times 100\%$$

Keterangan:

JIB = Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan



kesehatan di Kabupaten Purbalingga
dalam kurun waktu satu tahun
JSIB = Jumlah sasaran ibu bersalin di
Kabupaten Purbalingga dalam kurun
waktu satu tahun

Ukuran

Persentase

Satuan

%

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Persentase Pelayanan Bayi Baru Lahir Mendapat Pelayanan Bayi Baru Lahir

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Persentase pelayanan bayi baru lahir mendapat pelayanan bayi baru lahir adalah Perbandingan Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurun waktu satu tahun dengan Jumlah sasaran bayi baru lahir di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu satu tahun yang sama |
| Unit Penyelenggara | Dinas Kesehatan |
| Kelompok Indikator | Aspek Kesehatan |
| Interpretasi | Semakin tinggi persentase ini, semakin baik akses terhadap pelayanan bayi baru lahir yang tepat. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Cakupan Pelayanan Bidang Kesehatan (SPM) di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{J1}{J2} \times 100\%$$

Keterangan:

J1 = Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurun waktu satu tahun



| | |
|--------------------------------|---|
| | J2 = Jumlah sasaran bayi baru lahir di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu satu tahun yang sama |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | % |
| Apakah Indikator Dapat Diakses | Ya |
| Umum | |



Persentase Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar adalah Perbandingan antara Jumlah Balita usia 12-23 bulan yang mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai Standar, Jumlah Balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, Balita usia 36-59 bulan mendapatkan pelayanan sesuai standar dengan Jumlah Balita usia 12-59 bulan di wilayah Kab. Purbalingga pada kurun waktu satu tahun yang sama

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Dinas Kesehatan

Aspek Kesehatan

Persentase ini mencerminkan sejauh mana pelayanan kesehatan yang diberikan kepada balita memenuhi standar yang telah ditetapkan. Semakin tinggi persentase ini, semakin baik kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada balita.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Cakupan Pelayanan Bidang Kesehatan (SPM) di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan



■ **METODOLOGI**

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{J1+J2+J3}{J4} \times 100\%$$

Keterangan:

J1= Jumlah Balita usia 12-23 bulan yang mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai Standar

J2= Jumlah Balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

J3= Balita usia 36-59 bulan mendapatkan pelayanan sesuai standar

J4= Jumlah Balita usia 12-59

Ukuran

Persentase

Satuan

%

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar adalah Perbandingan Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah Kab. Purbalingga dalam kurun waktu satu tahun ajaran dengan Jumlah semua anak usia pendidikan dasar yang ada di wilayah tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran yang sama

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Dinas Kesehatan

Aspek Kesehatan

Persentase ini mencerminkan sejauh mana anak usia pendidikan dasar memiliki akses yang memadai terhadap pelayanan kesehatan yang sesuai standar. Semakin tinggi persentase ini, semakin baik akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada anak usia pendidikan dasar.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Cakupan Pelayanan Bidang Kesehatan (SPM) di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan



■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{J1}{J2} \times 100\%$$

Keterangan:

J1 = Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah Kab. Purbalingga dalam kurun waktu satu tahun ajaran

J2 = Jumlah semua anak usia pendidikan dasar yang ada di wilayah tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran yang sama

Ukuran

Persentase

Satuan

%

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Persentase Orang Usia 15-59 Tahun Yang Mendapat Skrining Kesehatan Sesuai Standar

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Persentase orang usia 15-59 tahun yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar adalah Perbandingan Jumlah orang usia 15–59 tahun di Kab. Purbalingga yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dengan Jumlah orang usia 15–59 tahun dalam kurun waktu satu tahun yang sama

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Dinas Kesehatan
Aspek Kesehatan

Persentase yang tinggi menunjukkan bahwa sistem kesehatan mampu memberikan layanan skrining kesehatan yang memadai dan sesuai standar kepada populasi usia 15-59 tahun. Hal ini mengindikasikan adanya upaya yang baik dalam menerapkan program pencegahan penyakit dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Cakupan Pelayanan Bidang Kesehatan (SPM) di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan



■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{J1}{J2} \times 100\%$$

Keterangan:

J1= Jumlah orang usia 15–59 tahun di
Kab. Purbalingga yang mendapat
pelayanan skrining kesehatan sesuai
standar dalam kurun waktu satu tahun
J2 = Jumlah orang usia 15–59 tahun
dalam kurun waktu satu tahun yang
sama

Ukuran

Persentase

Satuan

%

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun Keatas Yang Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Persentase warga negara usia 60 tahun keatas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar adalah Perbandingan Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali yang ada di Kab. Purbalingga dalam kurun waktu satu tahun dengan Jumlah semua warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang ada di wilayah tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Dinas Kesehatan
Aspek Kesehatan

Persentase yang tinggi dapat menunjukkan bahwa sistem kesehatan mampu memberikan layanan skrining kesehatan yang memadai dan sesuai standar pada populasi lanjut usia. Ini mencerminkan upaya dalam menerapkan program pencegahan, memantau penyakit kronis, dan mempromosikan kesehatan yang baik di antara populasi tersebut.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Cakupan Pelayanan Bidang Kesehatan (SPM) di Kabupaten Purbalingga

Periododesasi

Tahunan



■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{J1}{J2} \times 100\%$$

Keterangan:

J1= Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali yang ada di Kab. Purbalingga dalam kurun waktu satu tahun

J2= Jumlah semua warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang ada di wilayah tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama

Ukuran

Persentase

Satuan

%

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Persentase Penderita Hipertensi Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Persentase penderita Hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar adalah Perbandingan Jumlah penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun di Kab. Purbalingga yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dengan Jumlah estimasi penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun yang berada di wilayah tersebut berdasarkan angka prevalensi kabupaten dalam kurun waktu satu tahun yang sama

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Dinas Kesehatan
Aspek Kesehatan
Persentase yang tinggi menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan mampu memberikan pemantauan dan pengelolaan kondisi hipertensi yang sesuai standar kepada penderita hipertensi.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Cakupan Pelayanan Bidang Kesehatan (SPM) di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan



■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{J1}{J2} \times 100\%$$

Keterangan:

J1 = Jumlah penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun di Kab. Purbalingga yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun

J2 = Jumlah estimasi penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun yang berada di wilayah tersebut berdasarkan angka prevalensi kabupaten dalam kurun waktu satu tahun yang sama.

Ukuran

Persentase

Satuan

%

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Persentase Penderita Diabetes Melitus Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar adalah Perbandingan Jumlah penderita diabetes mellitus usia ≥ 15 tahun di Kab. Purbalingga yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dengan Jumlah estimasi penderita diabetes mellitus usia ≥ 15 tahun yang berada di wilayah tersebut berdasarkan angka prevalensi kabupaten dalam kurun waktu satu tahun yang sama |
| Unit Penyelenggara | Dinas Kesehatan |
| Kelompok Indikator | Aspek Kesehatan |
| Interpretasi | Persentase yang tinggi menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan mampu memberikan pemantauan dan pengelolaan kondisi diabetes yang sesuai standar kepada penderita diabetes. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Cakupan Pelayanan Bidang Kesehatan (SPM) di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |



■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{J1}{J2} \times 100\%$$

Keterangan:

J1 = Jumlah penderita diabetes mellitus usia ≥ 15 tahun di Kab. Purbalingga yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun

J2 = Jumlah estimasi penderita diabetes mellitus usia ≥ 15 tahun yang berada di wilayah tersebut

Ukuran

Persentase

Satuan

%

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standard

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Persentase Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar adalah Perbandingan Jumlah ODGJ berat di Kab. Purbalingga yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dengan Jumlah ODGJ berat berdasarkan proyeksi di wilayah tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama

Unit Penyelenggara

Dinas Kesehatan

Kelompok Indikator

Aspek Kesehatan

Interpretasi

Persentase yang tinggi menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan jiwa yang sesuai standar mencakup pengobatan dan terapi yang tepat untuk ODGJ berat

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Cakupan Pelayanan Bidang Kesehatan (SPM) di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{J1}{J2} \times 100\%$$

Keterangan:

J1 = Jumlah ODGJ berat di Kab. Purbalingga yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun



| | |
|-------------------------------------|--|
| | J2 = Jumlah ODGJ berat berdasarkan proyeksi di wilayah tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | % |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Persentase Orang Terduga TBC yang Mendapat Pelayanan TBC Sesuai Standar

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Persentase orang terduga TBC yang mendapat pelayanan TBC sesuai standar adalah Perbandingan Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun dengan Jumlah orang yang terduga TBC dalam kurun waktu satu tahun yang sama

Unit Penyelenggara

Dinas Kesehatan

Kelompok Indikator

Kesehatan

Interpretasi

Persentase yang tinggi menunjukkan bahwa pelayanan pengobatan TBC yang sesuai standar telah diberikan kepada orang terduga TBC.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Cakupan Pelayanan Bidang Kesehatan (SPM) di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{J1}{J2} \times 100\%$$

Keterangan:

J1 = Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun

J2 = Jumlah orang yang terduga TBC dalam kurun waktu satu tahun yang sama



Ukuran

Satuan

Apakah Indikator Dapat Diakses

Umum

Persentase

%

Ya



Persentase Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV Sesuai Standard

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar adalah Perbandingan Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dengan Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV dalam kurun waktu satu tahun yang sama |
| Unit Penyelenggara | Dinas Kesehatan |
| Kelompok Indikator | Aspek Kesehatan |
| Interpretasi | Persentase yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat upaya yang baik dalam melakukan deteksi dini HIV pada individu yang berisiko terinfeksi. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Cakupan Pelayanan Bidang Kesehatan (SPM) di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{J1}{J2} \times 100\%$$

Keterangan:

J1 = Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun



| | |
|-------------------------------------|---|
| | J2 = Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV dalam kurun waktu satu tahun yang sama |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | % |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K-1

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Kunjungan ibu hamil K-1 adalah Kunjungan ibu hamil yang pertama kali pada masa kehamilan usia 1-12 minggu. Tujuan kunjungan ibu hamil K-1 adalah untuk memulai pemantauan kesehatan ibu hamil dan memastikan bahwa kehamilan berjalan dengan baik. |
| Unit Penyelenggara | Dinas Kesehatan |
| Kelompok Indikator | Aspek Kesehatan |
| Interpretasi | Persentase yang tinggi menunjukkan akses yang baik terhadap pelayanan kesehatan bagi ibu hamil pada trimester pertama kehamilan. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi di Kabupaten Purbalingga Tahunan |
| Periodesasi | |

■ METODOLOGI

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | $\frac{J1}{J2} \times 100\%$ |
|---------------------------|------------------------------|

Keterangan:

J1= Jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal K1 di suatu wilayah dalam satu tahun tertentu

J2 = jumlah seluruh ibu hamil pada wilayah dan tahun yang sama

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | % |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K-4

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Kunjungan ibu hamil K-4 adalah Kunjungan antenatal yang dilakukan paling sedikit 4 kali selama masa kehamilan dengan distribusi kontak sebagai berikut: Minimal 1 kali pada trimester I (K1), usia kehamilan 1-12 minggu. Minimal 1 kali pada trimester II (K2), usia kehamilan 13-24 minggu. Minimal 2 kali pada trimester III, (K3-K4), usia kehamilan > 24 minggu. |
| Unit Penyelenggara | Dinas Kesehatan |
| Kelompok Indikator | Aspek Kesehatan |
| Interpretasi | Persentase yang tinggi menunjukkan bahwa ibu hamil menerima perawatan yang teratur dan terkoordinasi selama kehamilan |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi di Kabupaten Purbalingga Tahunan |
|-----------------------|---|

Periodisasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{J1}{J2} \times 100\%$$

| | |
|-------------------------------------|--|
| | Keterangan: J1 = Jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal K4 di suatu wilayah dalam satu tahun tertentu J2 = Jumlah seluruh ibu hamil pada wilayah dan tahun yang sama |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | % |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Cakupan Persalinan Oleh Bidan Atau Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Cakupan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan adalah Cakupan ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu |
| Unit Penyelenggara | Dinas Kesehatan |
| Kelompok Indikator | Aspek Kesehatan |
| Interpretasi | Persentase yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar wanita memiliki akses yang memadai terhadap pelayanan kesehatan maternal dan dapat memperoleh perawatan yang kompeten dan aman selama persalinan. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi di Kabupaten Purbalingga Tahunan |
| Periodesasi | |

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{J1}{J2} \times 100\%$$

Keterangan:

J1 = Jumlah ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu

J2 = Jumlah ibu bersalin di wilayah dan dalam kurun waktu yang sama



Ukuran

Satuan

Apakah Indikator Dapat Diakses

Umum

Persentase

%

Ya



Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Cakupan pelayanan kesehatan ibu nifas adalah Cakupan Pelayanan masa pemulihan pasca persalinan hingga seluruh organ reproduksi wanita pulih kembali sebelum kehamilan berikutnya. |
| Unit Penyelenggara | Dinas Kesehatan |
| Kelompok Indikator | Aspek Kesehatan |
| Interpretasi | Cakupan yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar ibu setelah melahirkan mendapatkan pemantauan kesehatan yang memadai |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi di Kabupaten Purbalingga Tahunan |
| Periodesasi | |

■ METODOLOGI

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | $\frac{J1}{J2} \times 100\%$ |
|---------------------------|------------------------------|

Keterangan:

J1 = Jumlah ibu nifas yang telah memperoleh pelayanan nifas sesuai standar F1/KF Lengkap di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu

J2 = Jumlah seluruh ibu nifas di wilayah dan dalam kurun waktu yang sama

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | % |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Cakupan Pelayanan Ibu Nifas Mendapat Vitamin A

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Cakupan pelayanan ibu nifas mendapat Vitamin A adalah Ibu yang baru melahirkan atau nifas yang mendapatkan kapsul vitamin A 200.000 SI sehingga bayinya akan memperoleh vitamin A melalui ASI di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. |
| Unit Penyelenggara | Dinas Kesehatan |
| Kelompok Indikator | Aspek Kesehatan |
| Interpretasi | Cakupan yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar ibu nifas mendapatkan suplementasi Vitamin A untuk memenuhi kebutuhan nutrisi mereka. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi di Kabupaten Purbalingga Tahunan |
| Periodesasi | |

■ METODOLOGI

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | $\frac{J1}{J2} \times 100\%$ |
|---------------------------|------------------------------|

Keterangan:

J1 = Jumlah ibu nifas mendapatkan vitamin A di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu

J2 = Jumlah seluruh ibu nifas di wilayah dan dalam kurun waktu yang sama

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | % |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Cakupan Penanganan Komplikasi Kebidanan

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Komplikasi kebidanan adalah Ibu hamil, bersalin dan nifas dengan komplikasi yang mendapatkan pelayanan sesuai standar pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan (Puskesmas, Rumah Bersalin, RSIA/RSB, RSU, RSU PONEK) |
| Unit Penyelenggara | Dinas Kesehatan |
| Kelompok Indikator | Aspek Kesehatan |
| Interpretasi | Cakupan yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar kasus komplikasi kebidanan berhasil terdeteksi dan mendapatkan penanganan yang tepat. Hal ini mencerminkan akses yang baik terhadap fasilitas kesehatan, ketersediaan tenaga medis yang terlatih, serta jaringan rujukan yang baik. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi di Kabupaten Purbalingga Tahunan |
| Periodesasi | |

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{J1}{J2} \times 100\%$$

Keterangan:

J1 = Jumlah ibu hamil dengan komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan definitif di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu

J2 = perkiraan jumlah ibu hamil dengan komplikasi kebidanan di



| | |
|-------------------------------------|---|
| | wilayah kerja dan kurun waktu yang sama |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | % |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Cakupan Komplikasi Neonatal

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Komplikasi neonatal adalah Neonatal dengan penyakit dan kelainan yang dapat menyebabkan kesakitan, kecacatan, dan kematian. Neonatus dengan komplikasi seperti asfiksia, ikterus, hipotermia, tetanus neonatorum, infeksi/sepsis, trauma lahir, BBLR (berat badan lahir rendah < 2500 gr), sindrom gangguan pernafasan, kelainan kongenital |
| Unit Penyelenggara | Dinas Kesehatan |
| Kelompok Indikator | Aspek Kesehatan |
| Interpretasi | Cakupan yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar bayi yang mengalami komplikasi neonatal berhasil terdeteksi secara dini dan mendapatkan penanganan medis yang tepat |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{J1}{J2} \times 100\%$$

Keterangan:
J1 = Jumlah komplikasi pada neonatus pada wilayah dan kurun waktu tertentu



J2 = 15% dari jumlah bayi lahir hidup
pada wilayah dan kurun waktu yang
sama

Ukuran

Persentase

Satuan

%

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Cakupan Kunjungan Neonatal (KN1)

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Cakupan kunjungan neonatal (KN1) adalah Cakupan neonatus yang mendapatkan pelayanan sesuai standar pada usia 6 jam - 48 jam setelah lahir di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu |
| Unit Penyelenggara | Dinas Kesehatan |
| Kelompok Indikator | Kesehatan |
| Interpretasi | Cakupan yang tinggi menunjukkan adanya upaya untuk memberikan perawatan kesehatan yang memadai kepada neonatus. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{J1}{J2} \times 100\%$$

Keterangan:
J1 = Jumlah neonatus yang mendapat pelayanan sesuai standar pada 6 - 48 jam setelah lahir di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu
J2 = Jumlah seluruh sasaran lahir hidup di suatu wilayah kerja dalam 1 tahun

Ukuran
Satuan
Apakah Indikator Dapat Diakses
Umum

Persentase
%
Ya



Cakupan Kunjungan Neonatal Tiga Kali (KN LENGKAP)

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Kunjungan Neonatal Lengkap adalah Pelayanan kunjungan neonatal lengkap, minimal 3 kali yaitu 1 kali pada usia 6 - 48 jam, 1 kali pada 3 - 7 hari, dan 1 kali pada 8 - 28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan neonatal esensial dengan menggunakan pendekatan MTBM (Manajemen Terpadu Bayi Muda) di satu wilayah kerja |
| Unit Penyelenggara | Dinas Kesehatan |
| Kelompok Indikator | Aspek Kesehatan |
| Interpretasi | Cakupan yang tinggi menunjukkan adanya upaya untuk memberikan perawatan yang berkelanjutan kepada neonatus. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi di Kabupaten Purbalingga Tahunan |
| Periodisasi | |

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{J1}{J2} \times 100\%$$

Keterangan:

J1 = Jumlah bayi yang memperoleh pelayanan kunjungan neonatal sesuai dengan standar, minimal 3 kali yaitu pada usia 6-48 jam, 1 kali pada 3-7 hari, dan 1 kali pada 8-28 hari di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu

J2 = Jumlah seluruh bayi lahir

Ukuran

Persentase

Satuan

%

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum

Ya



Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Pelayanan kesehatan bayi adalah Pelayanan kesehatan neonatal dasar yang meliputi tindakan resusitasi, pencegahan hipotermia, pemberian ASI dini dan eksklusif, pencegahan infeksi berupa perawatan mata, tali pusat, kulit dan pemberian imunisasi, pemberian vitamin K, manajemen terpadu balita muda (MTBM) dan konseling untuk ibunya tentang perawatan neonatus di rumah dengan menggunakan buku KIA

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Dinas Kesehatan
Aspek Kesehatan
Cakupan pelayanan kesehatan bayi mencerminkan adanya pengawasan dan pemantauan kesehatan bayi secara rutin.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi di Kabupaten Purbalingga Tahunan

Periodesasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{J1}{J2} \times 100\%$$

Keterangan:

J1 = Jumlah bayi (umur 29 hari-11 bulan) yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar minimal 4 kali yaitu satu kali pada umur 29 hari-2 bulan, 1 kali umur 3-5 bulan, 1 kali



umur 6 bulan,dan 1 kali umur 9-11 bulan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu

J2 = Jumlah seluruh bayi di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama

Ukuran

Persentase

Satuan

%

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Cakupan Pelayanan Imunisasi Bayi (Universal Child Immunization/ UCI)

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Pelayanan imunisasi bayi adalah Suatu keadaan tercapainya pemberian imunisasi dasar secara lengkap pada semua bayi. |
| Unit Penyelenggara | Dinas Kesehatan |
| Kelompok Indikator | Aspek Kesehatan |
| Interpretasi | Cakupan yang tinggi menunjukkan adanya upaya yang kuat untuk memberikan perlindungan terhadap penyakit melalui imunisasi |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|---|
| Metode/Rumus Penghitungan | $\frac{J1}{J2} \times 100\%$ |
| | Keterangan: J1 = Jumlah bayi yang mendapat imunisasi dasar lengkap di satu wilayah tertentu selama satu periode J2 = Jumlah surviving infant pada wilayah dan periode yang sama |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | % |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Cakupan Bayi Mendapatkan Inisiasi Menyusui Dini (IMD)

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Inisiasi Menyusui Dini (IMD) adalah Proses menyusui yang dimulai segera setelah lahir dengan cara kontak kulit ke kulit antara bayi dengan ibunya dan berlangsung minimal 1 (satu) jam |
| Unit Penyelenggara | Dinas Kesehatan |
| Kelompok Indikator | Aspek Kesehatan |
| Interpretasi | Semakin tinggi cakupan IMD maka akan meningkatkan capaian asi eksklusif dan dapat menurunkan kasus kematian bayi |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | $\frac{J1}{J2} \times 100\%$ |
|---------------------------|------------------------------|

| | |
|-------------------------------------|---|
| | Keterangan: |
| | J1 = Jumlah bayi baru lahir hidup yang mendapat IMD |
| | J2 = Jumlah seluruh bayi baru lahir hidup |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | % |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Cakupan Bayi Mendapatkan ASI Eksklusif

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Bayi mendapatkan ASI Eksklusif adalah Bayi yang sampai usia 6 bulan yang hanya diberi ASI saja tanpa makanan atau cairan lain kecuali obat, vitamin dan mineral sejak lahir. |
| Unit Penyelenggara | Dinas Kesehatan |
| Kelompok Indikator | Aspek Kesehatan |
| Interpretasi | Persentase cakupan bayi mendapatkan ASI eksklusif sampai usia 6 bulan. Semakin tinggi cakupan bayi mendapat ASI eksklusif dapat membantu menurunkan angka kesakitan dan kematian bayi khususnya neonatal. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | $\frac{J1}{J2} \times 100\%$ |
|---------------------------|------------------------------|

Keterangan:

J1 = Jumlah bayi usia 6 bulan mendapat ASI eksklusif

J2 = Jumlah bayi usia 6 bulan

Ukuran Persentase

Satuan %

Apakah Indikator Dapat Diakses Ya

Umum



Trend BBLR

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Trend BBLR (Berat Badan Lahir Rendah) adalah Kecenderungan bayi yang lahir dengan berat badan kurang dari 2,5 kg. |
| Unit Penyelenggara | Dinas Kesehatan |
| Kelompok Indikator | Aspek Kesehatan |
| Interpretasi | Trend BBLR sering digunakan sebagai indikator kesehatan ibu dan bayi serta mencerminkan tingkat keberhasilan upaya pencegahan dan penanggulangan BBLR dalam suatu populasi atau wilayah. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Trend BBLR dan Prevalensi Balita Gizi Buruk di Kabupaten Purbalingga |
| Periododesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{J1}{J2} \times 100\%$$

Keterangan:

J1 = Jumlah bayi lahir dengan berat badan kurang dari 2.5 kg

J2 = Jumlah seluruh kelahiran hidup

Ukuran

Persentase

Satuan

%

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Bayi dengan BBLR

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Jumlah bayi dengan BBLR adalah Banyaknya bayi lahir dengan berat badan kurang dari 2.5 kg. |
| Unit Penyelenggara | Dinas Kesehatan |
| Kelompok Indikator | Aspek Kesehatan |
| Interpretasi | Jumlah bayi dengan BBLR dapat memberikan gambaran tentang tingkat prevalensi BBLR dalam suatu populasi pada periode waktu tertentu. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Trend BBLR dan Prevalensi Balita Gizi Buruk di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|---|
| Metode/Rumus Penghitungan | Jumlah bayi lahir dengan berat badan kurang dari 2,5 kg |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | bayi |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Jumlah Balita

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Jumlah balita adalah Jumlah anak yang berusia 0-59 bulan dalam kurun waktu tertentu |
| Unit Penyelenggara | Dinas Kesehatan |
| Kelompok Indikator | Aspek Kesehatan |
| Interpretasi | Jumlah balita dapat mencerminkan tingkat kelahiran dan pertumbuhan populasi di suatu daerah. Jika jumlah balita meningkat, hal ini dapat menunjukkan adanya peningkatan kelahiran atau migrasi penduduk ke daerah tersebut. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Trend BBLR dan Prevalensi Balita Gizi Buruk di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--|
| Metode/Rumus Penghitungan | Jumlah balita usia 0-59 bulan dalam kurun waktu tertentu |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | balita |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Jumlah Balita Gizi Buruk

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Balita gizi buruk adalah Anak usia 0-59 bulan dengan keadaan kurang zat gizi tingkat berat yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi dan protein dalam waktu cukup lama yang ditandai dengan Z Score berdasarkan BB/PB atau BB/TB (Berat Badan menurut Panjang Badan atau Tinggi Badan) kurang dari sama dengan -3SD (Standar Deviasi) baku WHO.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Dinas Kesehatan
Aspek Kesehatan
Jumlah balita gizi buruk yang tinggi mengindikasikan bahwa banyak balita mengalami kekurangan nutrisi yang memadai untuk tumbuh dan berkembang secara sehat secara singkat dan kronis (jangka panjang)

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Trend BBLR dan Prevalensi Balita Gizi Buruk di Kabupaten Purbalingga Tahunan

Periodesasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah balita gizi buruk ($\leq -3SD$ berdasarkan BB/TB atau BB/PB) usia 0-59 bulan dalam kurun waktu tertentu

Ukuran

Jumlah

Satuan

balita

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Prevalensi Balita Gizi Buruk

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Prevalensi balita gizi buruk adalah Perbandingan antara jumlah balita gizi buruk dengan jumlah total balita Dinas Kesehatan |
| Unit Penyelenggara | Aspek Kesehatan |
| Kelompok Indikator | Prevalensi balita gizi buruk merupakan indikator penting dalam pemantauan status gizi dan kesehatan anak-anak. Angka prevalensi yang tinggi menunjukkan adanya masalah serius dalam asupan gizi dan perawatan kesehatan pada populasi balita tersebut. |
| Interpretasi | |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Trend BBLR dan Prevalensi Balita Gizi Buruk di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | $\frac{J1}{J2} \times 100\%$ |
|---------------------------|------------------------------|

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| | Keterangan: |
| | J1 = Jumlah balita gizi buruk |
| | J2 = Jumlah total balita |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | % |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Jumlah Balita Gizi Kurang

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Balita gizi kurang adalah Anak usia 0-59 bulan dengan keadaan kurang zat gizi tingkat ringan yang disebabkan oleh rendahnya asupan energi dan protein dalam waktu cukup lama yang ditandai dengan Z Score berdasarkan BB/PB atau BB/TB (Berat Badan menurut Panjang Badan atau Tinggi Badan) berada pada <-2 SD sampai dengan >-3 SD baku WHO. |
| Unit Penyelenggara | Dinas Kesehatan |
| Kelompok Indikator | Aspek Kesehatan |
| Interpretasi | Jumlah balita gizi kurang yang banyak mengindikasikan bahwa banyak balita yang mengalami kekurangan nutrisi pada waktu tertentu |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Trend BBLR dan Prevalensi Balita Gizi Buruk di Kabupaten Purbalingga |
| Periododesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|---|
| Metode/Rumus Penghitungan | Manual (Jumlah balita gizi kurang). Batas gizi kurang pada balita yaitu antara <-2.0 SD sampai dengan -3.0 SD baku WHO. berdasarkan BB/TB atau BB/PB |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | balita |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Persentase Balita Gizi Kurang

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Persentase balita gizi kurang adalah Perbandingan antara jumlah balita gizi kurang dengan jumlah total balita |
| Unit Penyelenggara | Dinas Kesehatan |
| Kelompok Indikator | Aspek Kesehatan |
| Interpretasi | Prevalensi balita gizi kurang yang tinggi menunjukkan asupan nutrisi yang kurang |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Trend BBLR dan Prevalensi Balita Gizi Buruk di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | $\frac{J1}{J2} \times 100\%$ |
|---------------------------|------------------------------|

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| | Keterangan: |
| | J1 = Jumlah balita gizi kurang |
| | J2 = Jumlah total balita |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | balita |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Prevalensi Stunting

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Stunting adalah Kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005.

Klasifikasi berdasarkan indikator TB/U adalah sebagai berikut standar dari WHO dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1995/MENKES/SK/XII/2010:

1. Sangat pendek : Z Score $< -3,0$
2. Pendek : Zscore $\geq -3,0$ s/d Zscore $< -2,0$.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Dinas Kesehatan

Aspek Kesehatan

Prevalensi stunting merupakan indikator penting dalam pemantauan status gizi dan kesehatan anak-anak yang disebabkan kekurangan asupan gizi jangka panjang. Angka prevalensi yang tinggi menunjukkan adanya masalah serius dalam asupan gizi dan perawatan kesehatan pada populasi balita tersebut dalam jangka yang panjang.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Prevalensi Stunting di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan



■ **METODOLOGI**

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{J1}{J2} \times 100\%$$

Keterangan:

J1 = Jumlah balita pendek dan sangat pendek

J2 = Jumlah balita yang diukur pada waktu tertentu

Ukuran

Persentase

Satuan

%

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Angka Penemuan Kasus Baru TB

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Kasus TB (Tuberkulosis) adalah Kasus TB didefinisikan sebagai pasien yang telah dibuktikan secara bakteriologis (mikroskopis, kultur atau molekuler) atau didiagnosis menderita TB. |
| Unit Penyelenggara | Dinas Kesehatan |
| Kelompok Indikator | Aspek Kesehatan |
| Interpretasi | Jika angka penemuan kasus baru TB tinggi, maka dapat mengindikasikan tingkat penyebaran penyakit yang luas di populasi tersebut. Hal ini dapat menunjukkan bahwa TB masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang signifikan dan perlu adanya tindakan pengendalian dan pencegahan yang lebih intensif. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Kondisi Penyakit Menular (Morbiditas) di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|---|
| Metode/Rumus Penghitungan | $\frac{J1}{J2} \times 100\%$ |
| | Keterangan: |
| | J1 = Penemuan kasus baru TB |
| | J2 = Perkiraan Jumlah penderita baru TB |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | % |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Case Notification Rate (CNR/Angka Penemuan Kasus TB ternotifikasi) TB

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Case Notification Rate (CNR/Angka penemuan kasus TB ternotifikasi) TB adalah Angka yang menunjukkan jumlah pasien TB yang ditemukan dan tercatat di antara 100.000 penduduk pada satu periode di suatu wilayah tertentu |
| Unit Penyelenggara | Dinas Kesehatan |
| Kelompok Indikator | Aspek Kesehatan |
| Interpretasi | Jika angka penemuan kasus TB ternotifikasi tinggi, maka menunjukkan tingginya angka kejadian TB dalam populasi tersebut. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Kondisi Penyakit Menular (Morbiditas) di Kabupaten Purbalingga |
| Periododesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--|
| Metode/Rumus Penghitungan | $\frac{J1}{J2} \times 100\%$ |
| | Keterangan: J1 = Jumlah semua kasus tuberkulosis yang ditemukan dan diobati J2 = Perkiraan jumlah semua kasus tuberkulosis |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | % |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Jumlah Kasus HIV/AIDS

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

HIV/AIDS adalah HIV/AIDS didefinisikan sebagai penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi virus Human Immunodeficiency Virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Dinas Kesehatan
Aspek Kesehatan
Jumlah kasus HIV/AIDS dapat memberikan gambaran tentang sejauh mana penyebaran virus HIV terjadi di suatu populasi atau wilayah. Jika jumlah kasus HIV/AIDS meningkat, ini bisa menandakan adanya peningkatan risiko dan penyebaran infeksi HIV dalam masyarakat.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Penyakit Menular
(Morbiditas) di Kabupaten
Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan
Ukuran
Satuan
Apakah Indikator Dapat Diakses
Umum

Pendataan Jumlah kasus HIV/AIDS
Jumlah
kasus
Ya



Jumlah Kasus HIV

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Jumlah kasus HIV (Human Immunodeficiency Virus) adalah Banyaknya kasus yang diakibatkan oleh sejenis virus yang menginfeksi sel darah putih yang menyebabkan turunnya kekebalan tubuh manusia |
| Unit Penyelenggara | Dinas Kesehatan |
| Kelompok Indikator | Aspek Kesehatan |
| Interpretasi | Jumlah kasus HIV menunjukkan jumlah individu yang telah didiagnosis menderita infeksi HIV dalam suatu populasi atau daerah pada periode waktu tertentu. Angka ini memberikan gambaran tentang prevalensi dan penyebaran HIV di suatu wilayah. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Kondisi Penyakit Menular (Morbiditas) di Kabupaten Purbalingga |
| Periododesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Pendataan Jumlah Kasus HIV |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | kasus |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Jumlah Kasus AIDS

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Jumlah kasus AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome) adalah Banyaknya kasus dari sekumpulan gejala yang timbul karena turunya kekebalan tubuh yang disebabkan infeksi oleh HIV. |
| Unit Penyelenggara | Dinas Kesehatan |
| Kelompok Indikator | Kesehatan |
| Interpretasi | Jumlah kasus AIDS mencerminkan tingkat keparahan dan dampak HIV pada individu yang terinfeksi. AIDS merupakan tahap akhir infeksi HIV di mana sistem kekebalan tubuh telah terganggu secara signifikan. Jika jumlah kasus AIDS tinggi, ini dapat mengindikasikan bahwa infeksi HIV telah mencapai tahap yang lebih lanjut dan mengancam kesehatan individu yang terinfeksi. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Kondisi Penyakit Menular (Morbiditas) di Kabupaten Purbalingga |
| Periodisasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Pendataan Jumlah kasus AIDS |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | kasus |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Jumlah Kasus Pneumonia Balita

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Jumlah kasus pneumonia balita adalah Banyaknya kasus balita yang mengalami batuk dan atau kesukaran bernapas dan hasil perhitungan napas, usia 0- <2 bulan ≥ 60 kali/menit, usia 2- <12 bulan ≥ 50 kali/menit, usia 12-59 bulan ≥ 40 kali/menit |
| Unit Penyelenggara | Dinas Kesehatan |
| Kelompok Indikator | Aspek Kesehatan |
| Interpretasi | Jumlah kasus pneumonia balita menunjukkan jumlah balita yang telah didiagnosis menderita infeksi pneumonia dalam suatu populasi atau daerah pada periode waktu tertentu. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Kondisi Penyakit Menular (Morbiditas) di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--|
| Metode/Rumus Penghitungan | Pendataan Jumlah kasus pneumonia balita. |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | kasus |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Persentase Kasus Pneumonia Balita

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Persentase kasus pneumonia balita adalah Jumlah penderita pneumonia balita yang ditangani dalam kurun waktu tertentu per jumlah perkiraan penderita pneumonia balita di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Dinas Kesehatan
Aspek Kesehatan
Semakin tinggi persentase penderita pneumonia balita yang ditangani semakin rendah risiko kematian balita akibat pneumonia pada balita

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Penyakit Menular
(Morbiditas) di Kabupaten
Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{J1}{J2} \times 100\%$$

Keterangan:

J1 = Jumlah penderita pneumonia balita yang ditangani dalam kurun waktu tertentu

J2 = jumlah perkiraan penderita pneumonia balita di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu



Ukuran

Satuan

Apakah Indikator Dapat Diakses

Umum

Persentase

kasus

Ya



Jumlah Kasus Baru Kusta

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Kasus kusta adalah Kasus kusta didefinisikan sebagai penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi Mycobacterium leprae |
| Unit Penyelenggara | Dinas Kesehatan |
| Kelompok Indikator | Aspek Kesehatan |
| Interpretasi | Jumlah kasus baru kusta mencerminkan tingkat penyebaran penyakit kusta di suatu populasi. Semakin tinggi jumlah kasus baru, semakin luas penyebaran penyakit kusta dalam populasi tersebut. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Kondisi Penyakit Menular (Morbiditas) di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|---|
| Metode/Rumus Penghitungan | Jumlah kasus kusta yang ditemukan dalam suatu wilayah |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | kasus |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Acute Flaccid Paralysis (AFP)

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | AFP adalah Kelumpuhan yang sifatnya Flaccid (layuh) pada anak usia kurang dari 15 tahun, proses terjadi kelumpuhan secara akut (<14 hari), serta bukan disebabkan oleh ruda paksa |
| Unit Penyelenggara | Dinas Kesehatan |
| Kelompok Indikator | Aspek Kesehatan |
| Interpretasi | Surveilans AFP adekuat yang didukung dengan hasil pemeriksaan laboratorium tidak ditemukan virus Polio pada spesimen tinja penderita dalam rangka mendukung program Eradikasi Polio di Indonesia |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Kondisi Penyakit Menular (Morbiditas) di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--|
| Metode/Rumus Penghitungan | $NPAFP = \frac{J1}{J2} \times 100.000$ <p>NPAFP = Non Polio AFP Rate (NPAFP Rate)</p> <p>Keterangan:</p> <p>J1 = Jumlah kasus Non Polio AFP</p> <p>J2 = Jumlah penduduk usia < 15 tahun di satu wilayah pada kurun waktu satu tahun</p> |
| Ukuran | Rate |
| Satuan | per 100.000 penduduk < 15 tahun |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Jumlah Kasus AFP

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Jumlah kasus AFP adalah Banyaknya kasus yang diakibatkan oleh kelompok yang terjadi secara mendadak atau akut (<14 hari) pada anak usia < 15 tahun, serta bukan disebabkan oleh ruda paksa |
| Unit Penyelenggara | Dinas Kesehatan |
| Kelompok Indikator | Aspek Kesehatan |
| Interpretasi | Jumlah kasus AFP yang ditemukan mencerminkan adanya surveilans AFP yang adekuat di suatu wilayah dalam rangka mendukung program Eradikasi Polio di Indonesia |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Kondisi Penyakit Menular (Morbiditas) di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|---|
| Metode/Rumus Penghitungan | Jumlah kasus AFP yang ditemukan dalam satu wilayah dalam kurun waktu satu tahun |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | kasus |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Incidence Rate (IR) DBD

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Incidence Rate (IR) DBD (Demam Berdarah Dengue) adalah Frekuensi penyakit atau kasus baru yang berjangkit DBD dalam masyarakat di suatu tempat atau wilayah atau negara pada waktu tertentu (umumnya 1 tahun) dibandingkan dengan jumlah penduduk yang mungkin terkena penyakit DBD tersebut |
| Unit Penyelenggara | Dinas Kesehatan |
| Kelompok Indikator | Aspek Kesehatan |
| Interpretasi | IR DBD mencerminkan tingkat penyebaran penyakit DBD dalam populasi. Semakin tinggi IR DBD, semakin luas penyebaran penyakit DBD dalam populasi tersebut. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Kondisi Penyakit Menular (Morbiditas) di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--|
| Metode/Rumus Penghitungan | $\frac{J1}{J2} \times 100.000$ |
| Ukuran | Keterangan: |
| Satuan | J1 = Jumlah penderita DBD |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | J2 = Jumlah penduduk pada tempat dan waktu yang sama |
| | Proporsi per 100.000 penduduk |
| | Ya |



Case Fatality Rate (CFR) DBD

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Case Fatality Rate (CFR) DBD adalah Persentase orang yang meninggal karena penyakit DBD terhadap orang yang mengalami penyakit tersebut

Unit Penyelenggara

Dinas Kesehatan
Aspek Kesehatan

Kelompok Indikator

Interpretasi

CFR DBD mencerminkan tingkat keparahan penyakit DBD dalam populasi yang terinfeksi. Semakin tinggi CFR DBD, semakin tinggi risiko kematian bagi individu yang terdiagnosis dengan DBD.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Penyakit Menular (Morbiditas) di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{J1}{J2} \times 100\%$$

Keterangan:

J1 = Jumlah penderita DBD yang meninggal dunia

J2 = Jumlah penderita DBD pada tahun yang sama

Ukuran

Persentase

Satuan

%

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Kasus DBD

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Kasus DBD adalah Kasus DBD didefinisikan sebagai penyakit yang disebabkan oleh virus Dengue dan ditularkan oleh vektor nyamuk Aedes aegypti |
| Unit Penyelenggara | Dinas Kesehatan |
| Kelompok Indikator | Aspek Kesehatan |
| Interpretasi | Jumlah kasus DBD menunjukkan jumlah individu yang terinfeksi penyakit DBD (Dengue Hemorrhagic Fever) dalam suatu populasi pada periode waktu tertentu. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Kondisi Penyakit Menular (Morbiditas) di Kabupaten Purbalingga |
| Periododesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|---|
| Metode/Rumus Penghitungan | Jumlah kasus penderita DBD dalam 100.000 penduduk |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | kasus |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Annual Parasite Incidence (API) Malaria

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Annual Parasite Incidence (API) Malaria adalah Angka kesakitan per 1.000 penduduk berisiko malaria dalam satu tahun |
| Unit Penyelenggara | Dinas Kesehatan |
| Kelompok Indikator | Aspek Kesehatan |
| Interpretasi | Semakin tinggi nilai API maka semakin tinggi risiko penularan malaria |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Kondisi Penyakit Menular (Morbiditas) di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | $\frac{J1}{J2} \times 1000$ |
|---------------------------|-----------------------------|

| | |
|-------------------------------------|--|
| | Keterangan: |
| | J1 = Jumlah penderita positif malaria |
| | J2 = Jumlah penduduk berisiko pada wilayah dan kurun waktu yang sama |
| Ukuran | Proporsi |
| Satuan | per 1.000 penduduk |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Case Fatality Rate (CFR)/ Tingkat Kematian COVID-19

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Case Fatality Rate (CFR)/ tingkat kematian Covid-19 adalah Persentase orang yang meninggal karena penyakit Covid-19 terhadap orang yang mengalami penyakit tersebut |
| Unit Penyelenggara | Dinas Kesehatan |
| Kelompok Indikator | Aspek Kesehatan |
| Interpretasi | CFR Covid-19 mencerminkan tingkat keparahan penyakit Covid-19 dalam populasi yang terinfeksi. Semakin tinggi CFR Covid-19, semakin tinggi risiko kematian bagi individu yang terdiagnosis dengan Covid-19. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Kondisi Penyakit Menular (Morbiditas) di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|---|
| Metode/Rumus Penghitungan | $\frac{J1}{J2} \times 100\%$ |
| | Keterangan: J1 = Jumlah penderita Covid-19 yang meninggal dunia J2 = Jumlah penderita Covid-19 pada tahun yang sama |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | % |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Case Recovery Rate (CRR)/ Tingkat Kematian COVID-19

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Case Recovery Rate (CRR)/ tingkat kematian Covid-19 adalah Persentase orang yang berhasil sembuh dari penyakit Covid-19 terhadap orang yang mengalami penyakit tersebut

Unit Penyelenggara

Dinas Kesehatan

Kelompok Indikator

Aspek Kesehatan

Interpretasi

CRR Covid-19 mencerminkan tingkat kesembuhan individu yang terinfeksi Covid-19 dalam populasi. Semakin tinggi CRR Covid-19, semakin tinggi tingkat kesembuhan dari infeksi Covid-19 dalam populasi tersebut.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Penyakit Menular (Morbiditas) di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{J1}{J2} \times 100\%$$

Keterangan:

J1 = Jumlah pasien COVID-19 yang sembuh

J2 = Jumlah total pasien yang dikonfirmasi covid-19

Ukuran

Persentase

Satuan

%

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Kasus Diabetes Melitus

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Diabetes Melitus adalah Suatu penyakit atau gangguan metabolisme kronis dengan multi etiologi yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah disertai dengan gangguan metabolisme karbohidrat, lipid, dan protein sebagai akibat insufisiensi fungsi insulin.

Unit Penyelenggara

Dinas Kesehatan

Kelompok Indikator

Aspek Kesehatan

Interpretasi

Jumlah kasus Diabetes Mellitus menunjukkan jumlah individu yang didiagnosis dengan kondisi medis Diabetes Mellitus dalam suatu populasi pada suatu periode waktu tertentu.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Penyakit Tidak Menular Di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah penderita DM ditemukan dalam suatu wilayah

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Penderita Hipertensi

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Hipertensi adalah Peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari 140 mmHg dan tekanan darah diastolik lebih dari 90 mmHg pada dua kali pengukuran dengan selang waktu lima menit dalam keadaan cukup istirahat/tenang

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Dinas Kesehatan
Aspek Kesehatan

Jumlah penderita hipertensi menunjukkan jumlah individu yang didiagnosis dengan kondisi medis hipertensi, yaitu tekanan darah tinggi, dalam suatu populasi pada suatu periode waktu tertentu.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Penyakit Tidak Menular Di
Kabupaten Purbalingga
Tahunan

Periodesasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah penderita hipertensi
ditemukan dalam suatu wilayah

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Kasus Kanker

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Kasus kanker adalah Penyakit yang ditandai dengan adanya sel yang abnormal yang bisa berkembang tanpa terkendali dan memiliki kemampuan untuk menyerang dan berpindah antar sel dan jaringan tubuh. |
| Unit Penyelenggara | Dinas Kesehatan |
| Kelompok Indikator | Aspek Kesehatan |
| Interpretasi | Jumlah kasus kanker menunjukkan angka atau jumlah individu yang didiagnosis dengan kanker dalam suatu populasi atau wilayah tertentu pada periode waktu tertentu. Jumlah kasus kanker dapat digunakan sebagai indikator untuk memahami tingkat kejadian kanker dalam populasi dan memantau tren kanker dari waktu ke waktu. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Kondisi Penyakit Tidak Menular Di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--|
| Metode/Rumus Penghitungan | Jumlah penderita kanker yang ditemukan dalam suatu wilayah |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | orang |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Jumlah Penderita ODGJ

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) adalah Orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia. |
| Unit Penyelenggara | Dinas Kesehatan |
| Kelompok Indikator | Aspek Kesehatan |
| Interpretasi | Jumlah penderita ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) menunjukkan angka atau jumlah individu yang menderita gangguan jiwa dalam suatu populasi atau wilayah tertentu pada periode waktu tertentu. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Kondisi Penyakit Tidak Menular Di Kabupaten Purbalingga |
| Periododesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|---|
| Metode/Rumus Penghitungan | Jumlah penderita ODGJ ditemukan dalam suatu wilayah |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | orang |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Jumlah Sarana Air Minum

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Sarana air minum adalah Bangunan dan atau peralatan fasilitas air bersih, meliputi bak penampungan, bak penyalur, bak penyaring, pipa saluran air, Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) |
| Unit Penyelenggara | Dinas Kesehatan |
| Kelompok Indikator | Aspek Kesehatan |
| Interpretasi | Jumlah sarana air minum mencerminkan tingkat akses masyarakat terhadap air minum yang memadai. Semakin banyak sarana air minum yang tersedia, semakin besar peluang bagi penduduk untuk mendapatkan akses yang mudah dan aman terhadap air minum yang berkualitas. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Jumlah Sarana Air Minum dan Akses terhadap Fasilitas Sanitasi yang Layak (Jamban Sehat) di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|---|
| Metode/Rumus Penghitungan | Jumlah sarana air minum yang ada di wilayah dan waktu yang sama |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | buah |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Jumlah Jamban Komunal

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jamban komunal adalah Suatu bentuk bangunan jamban yang digunakan untuk membuang dan mengumpulkan kotoran manusia dalam satu tempat (septic tank) bersama.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Dinas Kesehatan
Aspek Kesehatan
Semakin banyak jumlah jamban komunal, maka semakin tinggi peluang masyarakat untuk mengakses sarana sanitasi yang layak.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah Sarana Air Minum dan Akses terhadap Fasilitas Sanitasi yang Layak (Jamban Sehat) di Kabupaten Purbalingga
Tahunan

Periodesasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah jamban komunal yang ada di wilayah dan waktu yang sama

Ukuran

Jumlah

Satuan

buah

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum

Ya



Jumlah Keluarga Pengguna Jamban Komunal

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Jumlah keluarga pengguna jamban komunal adalah Banyaknya keluarga yang menggunakan jamban komunal |
| Unit Penyelenggara | Dinas Kesehatan |
| Kelompok Indikator | Aspek Kesehatan |
| Interpretasi | Jumlah keluarga pengguna jamban komunal menunjukkan jumlah KK di wilayah tertentu yang dapat menggunakan jamban komunal di kurun waktu yang sama |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Jumlah Sarana Air Minum dan Akses terhadap Fasilitas Sanitasi yang Layak (Jamban Sehat) di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--|
| Metode/Rumus Penghitungan | Jumlah KK di wilayah dan kurun waktu yang sama yang menggunakan jamban komunal |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | KK |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Jumlah Jamban Sehat Semi Permanen (JJSP)

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Jamban Sehat Semi Permanen (JJSP) adalah Sarana jamban dalam bentuk lubang jamban tertutup (plengsengan, cubluk, atau leher angsa yang berakhir dengan sumur resapan saja) harus memiliki jarak lebih dari 10 m dan tidak mencemari sumber air dan tanah. (cubluk) |
| Unit Penyelenggara | Dinas Kesehatan |
| Kelompok Indikator | Aspek Kesehatan |
| Interpretasi | Jumlah Jamban Sehat Semi Permanen (JJSP) menunjukkan jumlah Jamban Sehat Semi Permanen (JJSP) yang ada di wilayah tertentu dalam waktu yang sama. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Jumlah Sarana Air Minum dan Akses terhadap Fasilitas Sanitasi yang Layak (Jamban Sehat) di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--|
| Metode/Rumus Penghitungan | Jumlah Jamban Sehat Semi Permanen (JJSP) yang ada di wilayah dan waktu yang sama |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | buah |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Jumlah Keluarga Pengguna Jamban Sehat Semi Permanen (JJSP)

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Jumlah keluarga pengguna Jamban Sehat Semi Permanen (JJSP) adalah Banyaknya keluarga yang menggunakan JJSP |
| Unit Penyelenggara | Dinas Kesehatan |
| Kelompok Indikator | Aspek Kesehatan |
| Interpretasi | Jumlah keluarga pengguna Jamban Sehat Semi Permanen (JJSP) menunjukkan jumlah KK di wilayah tertentu yang menggunakan Jamban Sehat Semi Permanen (JJSP) dalam kurun waktu yang sama. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Jumlah Sarana Air Minum dan Akses terhadap Fasilitas Sanitasi yang Layak (Jamban Sehat) di Kabupaten Purbalingga |
| Periododesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|---|
| Metode/Rumus Penghitungan | Jumlah KK di wilayah dan kurun waktu yang sama yang menggunakan Jamban Sehat Semi Permanen (JJSP) |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | KK |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Jumlah Jamban Sehat Permanen (JSP)

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jamban Sehat Permanen (JSP) adalah Sarana jamban leher angsa yang dipakai secara individu dengan pembuangan akhir septic tank, baik individu maupun septic tank bersama (komunal) ditambah sumur resapan atau menyambung ke Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL)

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Dinas Kesehatan
Aspek Kesehatan
Jumlah Jamban Sehat Permanen (JSP) menunjukkan jumlah Jamban Sehat Permanen (JSP) di wilayah tertentu dalam waktu yang sama.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah Sarana Air Minum dan Akses terhadap Fasilitas Sanitasi yang Layak (Jamban Sehat) di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah Jamban Sehat Semi Permanen (JJSP) yang ada di wilayah dan waktu yang sama

Ukuran

Jumlah

Satuan

buah

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Keluarga Pengguna Jamban Sehat Permanen (JSP)

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Jumlah keluarga pengguna Jamban Sehat Permanen (JSP) adalah Banyaknya keluarga yang menggunakan Jamban Sehat Permanen (JSP) |
| Unit Penyelenggara | Dinas Kesehatan |
| Kelompok Indikator | Aspek Kesehatan |
| Interpretasi | Jumlah keluarga pengguna Jamban Sehat Permanen (JSP) menunjukkan jumlah KK di wilayah tertentu yang menggunakan Jamban Sehat Permanen (JSP) dalam kurun waktu yang sama. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Jumlah Desa yang melaksanakan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat), Desa Stop BABS (Buang Air Besar Sembarangan) /ODF (Open Defecation Free) dan Desa Sehat Mandiri di Kabupaten Purbalingga Tahunan |
| Periodesasi | |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--|
| Metode/Rumus Penghitungan | Pendataan Jumlah keluarga pengguna Jamban Sehat Permanen (JSP) |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | KK |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Jumlah Desa Yang Melaksanakan STBM

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | <p>STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) adalah Pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemucuan. Terdapat 5 pilar STBM yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Stop Buang Air Besar Sembarangan/ Stop BABS 2. Cuci Tangan Pakai Sabun/ CTPS 3. Pengelolaan Air Minum Rumah Tangga/ PAM-RT 4. Pengelolaan Sampah Rumah Tangga 5. Pengelolaan Air Limbah Rumah Tangga |
| Unit Penyelenggara | Dinas Kesehatan |
| Kelompok Indikator | Kesehatan |
| Interpretasi | Semakin banyak desa yang melaksanakan STBM, semakin luas dampak yang dapat dicapai dalam meningkatkan akses dan praktik sanitasi yang baik, serta memperbaiki kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Jumlah Desa yang melaksanakan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat), Desa Stop BABS (Buang Air Besar Sembarangan) /ODF (Open Defecation Free) dan Desa Sehat Mandiri di Kabupaten Purbalingga |
| Periodisasi | Tahunan |



■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--|
| Metode/Rumus Penghitungan | Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM yang ada di wilayah dan waktu yang sama |
| Ukuran Satuan | Jumlah desa |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Persentase Desa Yang Melaksanakan STBM

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Persentase desa yang melaksanakan STBM adalah Perbandingan antara jumlah desa yang melaksanakan STBM dengan Jumlah total desa/kelurahan |
| Unit Penyelenggara | Dinas Kesehatan |
| Kelompok Indikator | Aspek Kesehatan |
| Interpretasi | Persentase desa yang melaksanakan STBM dapat memberikan indikasi tentang progres dan tingkat keberhasilan program sanitasi di suatu daerah. Semakin tinggi persentase desa yang melaksanakan STBM, semakin besar upaya yang dilakukan untuk meningkatkan sanitasi di tingkat desa. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Jumlah Desa yang melaksanakan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat), Desa Stop BABS (Buang Air Besar Sembarangan) /ODF (Open Defecation Free) dan Desa Sehat Mandiri di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | $\frac{J1}{J2} \times 100\%$ |
|---------------------------|------------------------------|

| | |
|-------------------------------------|---|
| | Keterangan: |
| | J1 = Jumlah desa yang melaksanakan STBM |
| | J2 = Jumlah total desa/kelurahan |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | % |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Jumlah Desa STOP BABS/ODF

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Stop BABS (Buang Air Besar Sembarangan) / ODF (Open Defecation Free) adalah Kondisi ketika setiap individu dalam suatu komunitas tidak lagi melakukan perilaku buang air besar sembarangan yang berpotensi menyebarkan penyakit. |
| Unit Penyelenggara | Dinas Kesehatan |
| Kelompok Indikator | Aspek Kesehatan |
| Interpretasi | Jumlah desa stop BABS/ODF menunjukkan jumlah desa yang masyarakatnya tidak lagi melakukan perilaku buang air besar sembarangan yang berpotensi menyebarkan penyakit. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Jumlah Desa yang melaksanakan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat), Desa Stop BABS (Buang Air Besar Sembarangan) /ODF (Open Defecation Free) dan Desa Sehat Mandiri di Kabupaten Purbalingga |
| Periododesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--|
| Metode/Rumus Penghitungan | Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Stop BABS di wilayah dan waktu yang sama |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | desa |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Persentase Desa Stop BABS/ODF

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Persentase desa stop BABS/ODF adalah Perbandingan antara jumlah desa stop BABS/ODF dengan Jumlah total desa/kelurahan |
| Unit Penyelenggara | Dinas Kesehatan |
| Kelompok Indikator | Aspek Kesehatan |
| Interpretasi | Semakin tinggi persentase desa stop BABS/ODF maka semakin tinggi akses masyarakat terhadap sanitasi |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Jumlah Desa yang melaksanakan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat), Desa Stop BABS (Buang Air Besar Sembarangan) /ODF (Open Defecation Free) dan Desa Sehat Mandiri di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|---|
| Metode/Rumus Penghitungan | $\frac{J1}{J2} \times 100\%$ |
| | Keterangan: J1 = Jumlah desa stop BABS/ODF J2 = Jumlah total desa/kelurahan |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | % |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Jumlah Desa Sehat Mandiri

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Desa sehat mandiri adalah Desa yang secara mandiri mampu memberikan pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas kepada masyarakatnya, serta antisipatif dan responsif terhadap kejadian-kejadian yang dapat menimbulkan dampak pada gangguan kesehatan masyarakat. |
| Unit Penyelenggara | Dinas Kesehatan |
| Kelompok Indikator | Aspek Kesehatan |
| Interpretasi | Jumlah Desa Siaga aktif menunjukkan bahwa jumlah desa yang mampu memberikan pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas kepada masyarakat |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Jumlah Desa yang melaksanakan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat), Desa Stop BABS (Buang Air Besar Sembarangan) /ODF (Open Defecation Free) dan Desa Sehat Mandiri di Kabupaten Purbalingga Tahunan |
| Periodesasi | |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--|
| Metode/Rumus Penghitungan | Jumlah desa sehat mandiri yang ada dalam suatu wilayah dan waktu yang sama |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | desa |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Persentase Desa Sehat Mandiri

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Persentase desa sehat mandiri adalah Perbandingan antara jumlah desa sehat mandiri dengan Jumlah total desa/kelurahan

Unit Penyelenggara

Dinas Kesehatan

Kelompok Indikator

Aspek Kesehatan

Interpretasi

Semakin tinggi persentase desa sehat mandiri maka menunjukkan bahwa semakin tinggi kemampuan desa untuk mengatasi permasalahan kesehatan secara mandiri

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{J1}{J2} \times 100\%$$

Keterangan:

J1 = Jumlah desa sehat mandiri

J2 = Jumlah total desa/kelurahan

Ukuran

Persentase

Satuan

%

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Puskesmas

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Puskesmas adalah Fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Dinas Kesehatan

Aspek Kesehatan

Jumlah puskesmas menunjukkan seberapa banyak fasilitas kesehatan tingkat pertama yang tersedia dalam suatu wilayah. Semakin banyak puskesmas yang tersedia, maka semakin luas cakupan pelayanan kesehatan yang dapat diberikan kepada masyarakat.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah Fasilitas Kesehatan di
Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Pendataan Jumlah Puskesmas

Ukuran

Jumlah

Satuan

unit

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Puskesmas Rawat Inap

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Puskesmas rawat inap adalah Puskesmas yang diberi tambahan sumber daya sesuai pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan untuk menyelenggarakan rawat inap pada pelayanan persalinan normal dan pelayanan rawat inap pelayanan kesehatan lainnya.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Dinas Kesehatan

Aspek Kesehatan

Jumlah puskesmas rawat inap dapat mencerminkan upaya untuk memperkuat dan memperluas layanan perawatan medis di tingkat primer. Puskesmas yang dilengkapi dengan fasilitas rawat inap dapat membantu mengurangi beban rumah sakit yang mungkin terlalu padat dengan pasien, serta meningkatkan aksesibilitas dan ketersediaan perawatan medis bagi masyarakat di wilayah yang terjangkau oleh puskesmas tersebut.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah Fasilitas Kesehatan di
Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan



■ METODOLOGI

| | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Pendataan Jumlah Puskesmas Rawat |
| Ukuran | Inap |
| Satuan | Jumlah |
| Apakah Indikator Dapat Diakses | unit |
| Umum | Ya |



Jumlah Puskesmas Non Rawat Inap

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Puskesmas Non Rawat Inap adalah Puskesmas yang tidak menyelenggarakan pelayanan rawat inap, kecuali pertolongan persalinan normal. |
| Unit Penyelenggara | Dinas Kesehatan |
| Kelompok Indikator | Aspek Kesehatan |
| Interpretasi | Jumlah puskesmas non rawat inap dapat mencerminkan tingkat ketersediaan layanan kesehatan dasar di suatu wilayah. Semakin banyak puskesmas non rawat inap yang tersedia, maka semakin luas cakupan pelayanan kesehatan yang dapat diberikan kepada masyarakat di tingkat primer. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--|
| Metode/Rumus Penghitungan | Pendataan Jumlah Puskesmas Non Rawat Inap. |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | unit |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Jumlah Puskesmas Mampu Bersalin

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Puskesmas Mampu Bersalin adalah Puskesmas yang dilengkapi dengan fasilitas dan pelayanan kesehatan yang mampu menyediakan perawatan prenatal (sebelum melahirkan), perawatan natal (selama melahirkan), dan perawatan postnatal (setelah melahirkan). |
| Unit Penyelenggara | Dinas Kesehatan |
| Kelompok Indikator | Aspek Kesehatan |
| Interpretasi | Jumlah puskesmas mampu bersalin dapat mencerminkan tingkat ketersediaan fasilitas kesehatan yang mampu memberikan perawatan khusus terkait persalinan. Semakin banyak puskesmas mampu bersalin yang tersedia, semakin luas cakupan pelayanan kesehatan yang dapat diberikan kepada ibu hamil dan calon ibu di tingkat primer. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--|
| Metode/Rumus Penghitungan | Pendataan Jumlah Puskesmas Mampu Bersalin. |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | unit |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Jumlah Puskesmas Poned

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Puskesmas Poned (Pelayanan Obstetri Neonatal Essential/ Emergency Dasar) adalah Puskesmas rawat inap yang memiliki kemampuan serta fasilitas Poned siap 24 jam untuk memberikan pelayanan terhadap ibu hamil, bersalin dan nifas serta kegawatdaruratan bayi baru lahir dengan komplikasi baik yang datang sendiri atau atas rujukan kader di masyarakat, Bidan di Desa, Puskesmas dan melakukan rujukan ke RS/RS PONEK pada kasus yang tidak mampu ditangani. |
| Unit Penyelenggara | Dinas Kesehatan |
| Kelompok Indikator | Aspek Kesehatan |
| Interpretasi | Semakin banyak jumlah Puskesmas Poned semakin tercover layanan kesehatan dasar ibu dan anak |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Pendataan Jumlah Puskesmas Poned |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | unit |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Jumlah Puskesmas Terakreditasi

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Puskesmas Terakreditasi adalah Puskesmas yang memiliki pengakuan yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri, setelah memenuhi standar akreditasi. |
| Unit Penyelenggara | Dinas Kesehatan |
| Kelompok Indikator | Aspek Kesehatan |
| Interpretasi | Semakin tinggi grade akreditasi puskesmas semakin tinggi mutu pelayanan puskesmas |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Purbalingga |
| Periodisasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--|
| Metode/Rumus Penghitungan | Pendataan Jumlah Puskesmas Terakreditasi |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | unit |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Jumlah Puskesmas Pembantu

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Puskesmas Pembantu adalah Jaringan pelayanan puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan secara permanen di suatu lokasi dalam wilayah kerja puskesmas |
| Unit Penyelenggara | Dinas Kesehatan |
| Kelompok Indikator | Aspek Kesehatan |
| Interpretasi | Adanya puskesmas pembantu di wilayah puskesmas memudahkan masyarakat mengakses fasilitas kesehatan |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Pendataan Jumlah Puskesmas Pembantu |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | unit |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Jumlah RS (Total)

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Rumah Sakit (Total) adalah Institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. |
| Unit Penyelenggara | Dinas Kesehatan |
| Kelompok Indikator | Aspek Kesehatan |
| Interpretasi | Semakin banyak rumah sakit masyarakat semakin banyak pilihan untuk pelayanan kesehatan rujukan |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Purbalingga |
| Periodisasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--|
| Metode/Rumus Penghitungan | Jumlah Rumah sakit baik pemerintah maupun swasta dalam suatu wilayah |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | unit |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Jumlah RS Umum Daerah

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | RS Umum Daerah adalah Institusi pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit. |
| Unit Penyelenggara | Dinas Kesehatan |
| Kelompok Indikator | Aspek Kesehatan |
| Interpretasi | Beda kelas RSUD menjamin jenjang rujukan yang lebih terprogram |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--|
| Metode/Rumus Penghitungan | Jumlah Rumah sakit Umum Daerah dalam suatu wilayah |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | unit |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Jumlah RS Swasta Tipe C

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

RS Swasta Tipe C adalah Rumah sakit milik swasta yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit empat spesialis dasar dan empat penunjang medik spesialis.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Dinas Kesehatan

Aspek Kesehatan

Semakin banyak rumah sakit swasta, masyarakat mempunyai banyak pilihan pelayanan kesehatan rujukan selain Rumah sakit umum daerah / pemerintah

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah Fasilitas Kesehatan di
Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah Rumah Sakit Swasta Tipe C
dalam suatu wilayah

Ukuran

Jumlah

Satuan

unit

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah RS Swasta Tipe D

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

RS Swasta Tipe D adalah Rumah sakit milik swasta yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit dua spesialis dasar.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Dinas Kesehatan
Aspek Kesehatan
Dengan adanya rumah sakit swasta tipe D bisa memfasilitasi pelaku usaha dibidang rumah sakit untuk melayani pelayanan kesehatan rujukan bertahap sesuai kemampuan

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah Fasilitas Kesehatan di
Kabupaten Purbalingga
Tahunan

Periodesasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah Rumah Sakit Swasta Tipe D dalam suatu wilayah

Ukuran

Jumlah

Satuan

unit

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah RS Ponek

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Rumah Sakit Ponek (Pelayanan Obstetri Neonatal Essential/Emergency Komprehensif) adalah Rumah sakit rujukan yang memberikan pelayanan 24 jam untuk kegawatdaruratan ibu dan bayi. |
| Unit Penyelenggara | Dinas Kesehatan |
| Kelompok Indikator | Aspek Kesehatan |
| Interpretasi | Dengan adanya rumah sakit Ponek bisa sebagai tempat rujukan kegawatdaruratan ibu dan anak sehingga mengurangi angka kematian ibu dan anak |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|---|
| Metode/Rumus Penghitungan | Jumlah Rumah sakit rujukan yang memberikan pelayanan 24 jam untuk kegawatdaruratan ibu dan bayi dalam suatu wilayah |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | unit |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Jumlah RS Terakreditasi

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

RS Terakreditasi adalah Rumah sakit yang memiliki pengakuan yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri, setelah memenuhi standar akreditasi.

Unit Penyelenggara

Dinas Kesehatan

Kelompok Indikator

Aspek Kesehatan

Interpretasi

Semakin tinggi grade akreditasi rumah sakit semakin tinggi mutu pelayanan suatu rumah sakit

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah Rumah sakit yang sudah terakreditasi dalam suatu wilayah

Ukuran

Jumlah

Satuan

unit

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Posyandu KB-Kesehatan

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Posyandu KB-Kesehatan adalah Posyandu dengan sasaran KB-Kesehatan : Pasangan Usia Subur (PUS), Ibu hamil dan balita serta masyarakat umum. Kegiatannya meliputi : pelayanan Keluarga Berencana (KB), pelayanan kesehatan ibu dan anak (KIA), imunisasi gizi dan pencegahan diare serta kegiatan lain sebagai upaya pengembangan posyandu.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Dinas Kesehatan
Aspek Kesehatan

Dalam kegiatan posyandu tersebut dilaksanakan pelayanan KB bagi sasaran posyandu (PUS). Jumlah Posyandu KB-Kesehatan yang memadai dapat membantu dalam upaya pengendalian pertumbuhan penduduk, penurunan angka kematian ibu dan bayi, serta peningkatan kesehatan ibu dan anak secara keseluruhan.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah Fasilitas Kesehatan di
Kabupaten Purbalingga
Tahunan

Periodesasi



■ METODOLOGI

| | |
|--------------------------------|---|
| Metode/Rumus Penghitungan | Jumlah seluruh posyandu KB Kesehatan yang ada di wilayah dan pada kurun waktu yang sama |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | unit |
| Apakah Indikator Dapat Diakses | Ya |
| Umum | |



Jumlah Posyandu Mandiri

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Posyandu Mandiri adalah Posyandu yang sudah dapat melaksanakan kegiatan lebih dari 8 kali per tahun, dengan rata-rata jumlah kader sebanyak lima orang atau lebih, cakupan kelima kegiatan utamanya lebih dari 50%, mampu menyelenggarakan program tambahan, serta telah memperoleh sumber pembiayaan dari dana sehat yang dikelola oleh masyarakat yang pesertanya lebih dari 50% KK yang bertempat tinggal di wilayah kerja posyandu.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Dinas Kesehatan
Aspek Kesehatan
Jumlah posyandu mandiri yang ada dapat memberikan gambaran tentang sejauh mana masyarakat telah berhasil dalam membangun dan memelihara posyandu sebagai lembaga pelayanan kesehatan mandiri di tingkat komunitas. Jumlah posyandu mandiri yang lebih banyak menunjukkan tingkat partisipasi yang tinggi dari masyarakat dalam upaya untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta memperkuat sistem kesehatan di wilayah tersebut.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah Fasilitas Kesehatan di
Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan





■ METODOLOGI

| | |
|--------------------------------|--|
| Metode/Rumus Penghitungan | Jumlah seluruh posyandu Mandiri yang ada di wilayah dan pada kurun waktu yang sama |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | unit |
| Apakah Indikator Dapat Diakses | Ya |
| Umum | |



Jumlah Posyandu Purnama

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Posyandu Purnama adalah Posyandu yang sudah dapat melaksanakan kegiatan lebih dari 8 kali per tahun, dengan rata-rata jumlah kader sebanyak lima orang atau lebih, cakupan kelima kegiatan utamanya lebih dari 50%, mampu menyelenggarakan program tambahan, serta telah memperoleh sumber pembiayaan dari dana sehat yang dikelola oleh masyarakat yang pesertanya masih terbatas yakni kurang dari 50% KK di wilayah kerja posyandu.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Dinas Kesehatan
Aspek Kesehatan
Dengan adanya Posyandu Purnama, meskipun dengan peserta yang terbatas, diharapkan dapat tercapai peningkatan akses masyarakat terhadap informasi, konseling, dan pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kehamilan, pertumbuhan anak, imunisasi, dan nutrisi. Ini juga dapat menjadi langkah awal untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Posyandu dan secara bertahap meningkatkan jumlah peserta di masa mendatang.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah Fasilitas Kesehatan di
Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan



■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--|
| Metode/Rumus Penghitungan | Jumlah seluruh posyandu Purnama yang ada di wilayah dan pada kurun waktu yang sama |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | unit |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Jumlah Posyandu Madya

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Posyandu Madya adalah Posyandu yang sudah dapat melaksanakan kegiatan lebih dari 8 kali per tahun, dengan rata-rata jumlah kader sebanyak lima orang atau lebih, tetapi cakupan kelima kegiatan utamanya masih rendah, yaitu kurang dari 50%. |
| Unit Penyelenggara | Dinas Kesehatan |
| Kelompok Indikator | Aspek Kesehatan |
| Interpretasi | Semakin sedikit posyandu madya menunjukkan kondisi posyandu di Kabupaten Purbalingga sudah banyak di atas strata madya. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--|
| Metode/Rumus Penghitungan | Jumlah seluruh posyandu Madya yang ada di wilayah dan pada kurun waktu yang sama |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | unit |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Jumlah Posyandu Pratama

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Posyandu Pratama adalah Posyandu yang belum mantap, yang ditandai oleh kegiatan bulanan posyandu belum terlaksana secara rutin serta jumlah kader sangat terbatas yakni kurang dari lima orang. |
| Unit Penyelenggara | Dinas Kesehatan |
| Kelompok Indikator | Aspek Kesehatan |
| Interpretasi | Semakin sedikit posyandu pratama menunjukkan kondisi posyandu di Kabupaten Purbalingga sudah banyak di atas strata pratama. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Purbalingga |
| Periodisasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--|
| Metode/Rumus Penghitungan | Jumlah seluruh posyandu Pratama yang ada di wilayah dan pada kurun waktu yang sama |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | unit |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Jumlah Poliklinik Kesehatan Desa (PKD)

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Poliklinik Kesehatan Desa (PKD) adalah Suatu Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dibentuk oleh, untuk dan bersama masyarakat setempat atas dasar musyawarah desa/kelurahan yang didukung oleh tenaga kesehatan profesional untuk melakukan upaya kesehatan promotif, preventif dan kuratif, sesuai dengan kewenangannya di bawah pembinaan teknis puskesmas. |
| Unit Penyelenggara | Dinas Kesehatan |
| Kelompok Indikator | Aspek Kesehatan |
| Interpretasi | Semakin banyak PKD maka semakin memudahkan dan mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|---|
| Metode/Rumus Penghitungan | Jumlah seluruh Poliklinik Kesehatan Desa (PKD) yang ada di wilayah dan pada kurun waktu yang sama |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | unit |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Jumlah Pos Pembinaan Terpadu (POSBINDU) PTM

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM adalah Suatu Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) dalam pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) melalui kegiatan skrining kesehatan/deteksi dini faktor risiko PTM, intervensi/modifikasi faktor risiko PTM serta monitoring dan tindak lanjut faktor risiko PTM secara rutin dan berkesinambungan.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Dinas Kesehatan
Aspek Kesehatan
Jumlah posbindu menunjukkan seberapa banyak UKBM yang tersedia dalam suatu wilayah. Semakin banyak posbindu yang tersedia, maka semakin luas cakupan deteksi dini yang dapat diberikan kepada masyarakat.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah Fasilitas Kesehatan di
Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah Pos Pembinaan terpadu
(Posbindu) PTM

Ukuran

Jumlah

Satuan

unit

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Puskesmas

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Puskesmas adalah Fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya. |
| Unit Penyelenggara | Dinas Kesehatan |
| Kelompok Indikator | Aspek Kesehatan |
| Interpretasi | Jumlah puskesmas menunjukkan seberapa banyak fasilitas kesehatan tingkat pertama yang tersedia dalam suatu wilayah. Semakin banyak puskesmas yang tersedia, maka semakin luas cakupan pelayanan kesehatan yang dapat diberikan kepada masyarakat. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Rasio Puskesmas Terhadap Jumlah Penduduk di Kabupaten Purbalingga Tahunan |
| Periodesasi | |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|---|
| Metode/Rumus Penghitungan | Jumlah Puskesmas baik rawat jalan maupun rawat inap dalam suatu wilayah |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | unit |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Rasio Puskesmas Terhadap Jumlah Penduduk

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Rasio Puskesmas terhadap Jumlah Penduduk adalah Perbandingan antara jumlah puskesmas dengan jumlah penduduk |
| Unit Penyelenggara | Dinas Kesehatan |
| Kelompok Indikator | Aspek Kesehatan |
| Interpretasi | Semakin rendah rasio puskesmas terhadap jumlah penduduk, maka semakin baik. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat cukup banyak puskesmas yang tersedia untuk melayani kebutuhan kesehatan penduduk di daerah tersebut. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Rasio Puskesmas Terhadap Jumlah Penduduk di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | $\frac{J1}{J2} \times 100.000$ |
| | Keterangan: |
| | J1 = Jumlah puskesmas |
| | J2 = Jumlah penduduk |
| Ukuran | Rasio |
| Satuan | per 100.000 penduduk |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Jumlah Total Kunjungan Puskesmas

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Jumlah total kunjungan puskesmas adalah Jumlah kunjungan rawat jalan dan rawat inap di suatu puskesmas pada jangka waktu tertentu. |
| Unit Penyelenggara | Dinas Kesehatan |
| Kelompok Indikator | Aspek Kesehatan |
| Interpretasi | Jumlah total kunjungan puskesmas menunjukkan seberapa banyak penduduk yang mencari pelayanan kesehatan di puskesmas dalam periode waktu tertentu. Data ini memberikan gambaran mengenai tingkat penggunaan dan permintaan layanan kesehatan di suatu daerah. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Jumlah Kunjungan Puskesmas di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|---|
| Metode/Rumus Penghitungan | Jumlah kunjungan pasien baru rawat jalan maupun rawat inap di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama milik pemerintah dan swasta dalam satu tahun tertentu |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | kunjungan |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Jumlah Kunjungan Rawat Jalan Puskesmas

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jumlah kunjungan rawat jalan puskesmas adalah Jumlah orang yang berkunjung ke fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama milik pemerintah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan perorangan yang meliputi observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik tanpa tinggal di ruang rawat inap dalam satu tahun tertentu. Kunjungan rawat jalan puskesmas termasuk kunjungan ke jaringan puskesmas, dalam gedung maupun luar gedung (puskesmas keliling, puskesmas pembantu, bidan desa, pemeriksaan anak sekolah, dsb).
Dinas Kesehatan

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Aspek Kesehatan

Jumlah kunjungan rawat jalan puskesmas menunjukkan seberapa banyak pasien yang memanfaatkan pelayanan rawat jalan di puskesmas dalam suatu periode waktu tertentu. Data ini memberikan informasi tentang tingkat penggunaan dan permintaan layanan kesehatan di tingkat primer.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah Kunjungan Puskesmas di
Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan



■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|---|
| Metode/Rumus Penghitungan | Jumlah kunjungan pasien baru rawat jalan di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama milik pemerintah dan swasta dalam satu tahun tertentu |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | kunjungan |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Jumlah Kunjungan Rawat Inap Puskesmas

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Jumlah kunjungan rawat inap puskesmas adalah Jumlah orang yang berkunjung ke fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama milik pemerintah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan perorangan yang meliputi observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik, dan tinggal di ruang rawat inap dalam satu tahun tertentu. |
| Unit Penyelenggara | Dinas Kesehatan |
| Kelompok Indikator | Aspek Kesehatan |
| Interpretasi | Jumlah kunjungan rawat inap puskesmas menunjukkan seberapa banyak pasien yang membutuhkan perawatan rawat inap di puskesmas dalam suatu periode waktu tertentu. Data ini memberikan informasi tentang tingkat penggunaan dan permintaan layanan rawat inap di tingkat primer. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Jumlah Kunjungan Puskesmas di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--|
| Metode/Rumus Penghitungan | Jumlah kunjungan pasien baru rawat inap di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama milik pemerintah dan swasta dalam satu tahun tertentu |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | kunjungan |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Jumlah Total Kunjungan Rumah Sakit

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Jumlah total kunjungan rumah sakit adalah Jumlah total kunjungan rumah sakit termasuk RS Swasta |
| Unit Penyelenggara | Dinas Kesehatan |
| Kelompok Indikator | Aspek Kesehatan |
| Interpretasi | Jumlah total kunjungan rumah sakit menunjukkan seberapa banyak penduduk yang mencari pelayanan kesehatan di rumah sakit dalam periode waktu tertentu. Data ini memberikan gambaran mengenai tingkat penggunaan dan permintaan layanan kesehatan di suatu daerah. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Jumlah Kunjungan Puskesmas di Kabupaten Purbalingga |
| Periododesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--|
| Metode/Rumus Penghitungan | Jumlah kunjungan baik rawat jalan maupun rawat inap di rumah sakit milik pemerintah dan swasta dalam satu tahun tertentu |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | kunjungan |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Jumlah Kunjungan Rawat Jalan Rumah Sakit

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Jumlah kunjungan rawat jalan rumah sakit adalah Jumlah orang yang berkunjung ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjut milik pemerintah dan swasta untuk mendapatkan pelayanan kesehatan perorangan yang meliputi observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik tanpa tinggal di ruang rawat inap dalam satu tahun tertentu. |
| Unit Penyelenggara | Dinas Kesehatan |
| Kelompok Indikator | Aspek Kesehatan |
| Interpretasi | Jumlah kunjungan rawat jalan rumah sakit menunjukkan seberapa banyak pasien yang memanfaatkan pelayanan rawat jalan di rumah sakit dalam suatu periode waktu tertentu. Data ini memberikan gambaran tentang tingkat penggunaan pelayanan rawat jalan di rumah sakit. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Jumlah Kunjungan Puskesmas di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--|
| Metode/Rumus Penghitungan | Jumlah kunjungan rawat jalan di rumah sakit milik pemerintah maupun swasta dalam satu tahun tertentu |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | kunjungan |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Jumlah Kunjungan Rawat Inap Rumah Sakit

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Jumlah kunjungan rawat inap rumah sakit adalah Jumlah orang yang berkunjung ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjut milik pemerintah dan swasta untuk mendapatkan pelayanan kesehatan perorangan yang meliputi observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik, dan tinggal di ruang rawat inap dalam satu tahun tertentu. |
| Unit Penyelenggara | Dinas Kesehatan |
| Kelompok Indikator | Aspek Kesehatan |
| Interpretasi | Jumlah kunjungan rawat inap rumah sakit menunjukkan seberapa banyak pasien yang membutuhkan perawatan rawat inap di rumah sakit dalam suatu periode waktu tertentu. Data ini memberikan gambaran tentang tingkat penggunaan dan permintaan layanan rawat inap di rumah sakit. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Jumlah Kunjungan Puskesmas di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|---|
| Metode/Rumus Penghitungan | Jumlah kunjungan rawat inap di rumah sakit milik pemerintah maupun swasta dalam satu tahun tertentu |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | kunjungan |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Net Death Rate (NDR)/ Angka Kematian >= 48 Jam Setelah Dirawat

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Net Death Rate (NDR)/ Angka kematian >= 48 jam setelah dirawat adalah Angka kematian pasien dalam waktu 48 jam atau lebih setelah dirawat untuk tiap-tiap 1.000 pasien keluar |
| Unit Penyelenggara | Dinas Kesehatan |
| Kelompok Indikator | Aspek Kesehatan |
| Interpretasi | Nilai Net Death Rate sebesar 12,5 artinya angka kematian pasien dalam waktu 48 jam atau lebih setelah dirawat yakni 12 - 13 orang untuk tiap-tiap 1.000 pasien keluar. Penurunan NDR dapat mengindikasikan adanya peningkatan dalam manajemen pasien, perawatan yang lebih baik, atau penggunaan intervensi medis yang efektif. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Kinerja Sarana Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Purbalingga |
| Periodisasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|---|
| Metode/Rumus Penghitungan | $\frac{J1}{J2} \times 1000$ |
| | Keterangan: J1 = Jumlah pasien meninggal >= 48 jam setelah dirawat J2 = Jumlah pasien keluar (hidup + mati) |
| Ukuran | Proporsi |
| Satuan | per 1.000 pasien keluar |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Gross Death Rate (GDR)/ Angka Kematian Umum

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Gross Death Rate (GDR)/ Angka kematian umum adalah Angka kematian umum untuk setiap 1.000 pasien keluar |
| Unit Penyelenggara | Dinas Kesehatan |
| Kelompok Indikator | Aspek Kesehatan |
| Interpretasi | Nilai Gross Death Rate sebesar 34,5 artinya angka kematian pasien yakni 34 - 35 orang per 1.000 pasien keluar. Penurunan GDR dapat menandakan adanya perbaikan dalam kondisi kesehatan dan kualitas pelayanan kesehatan dalam populasi tersebut. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Kinerja Sarana Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|---|
| Metode/Rumus Penghitungan | $\frac{J1}{J2} \times 1000$ |
| | <p>Keterangan:</p> <p>J1 = Jumlah pasien meninggal seluruhnya</p> <p>J2 = Jumlah pasien keluar (hidup + mati)</p> |
| Ukuran | Proporsi |
| Satuan | per 1.000 pasien keluar |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Bed Occupation Rate (BOR)/ Persentase Pemakaian Tempat Tidur

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Bed Occupation Rate (BOR)/ Persentase pemakaian tempat tidur adalah Persentase pemakaian tempat tidur (khusus untuk RS) pada satu satuan waktu tertentu |
| Unit Penyelenggara | Dinas Kesehatan |
| Kelompok Indikator | Aspek Kesehatan |
| Interpretasi | BOR memberikan gambaran tentang sejauh mana kapasitas tempat tidur di Rumah Sakit digunakan. Nilai Bed Occupancy Rate sebesar 69% artinya pemakaian tempat tidur dalam satu tahun sebesar 69% |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Kinerja Sarana Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|---|
| Metode/Rumus Penghitungan | $\frac{J1}{J2} \times 100\%$ <p>Keterangan: J1 = Jumlah hari perawatan J2 = (Jumlah tempat tidur * Jumlah hari dalam setahun)</p> |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | % |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Length Of Stay (LOS)/ Angka Rata-Rata Lamanya Pasien Dirawat

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Length Of Stay (LOS)/ Angka rata-rata lamanya pasien dirawat adalah Rata-rata lama rawat (dalam satuan hari) seorang pasien |
| Unit Penyelenggara | Dinas Kesehatan |
| Kelompok Indikator | Aspek Kesehatan |
| Interpretasi | Nilai Average Length of Stay sebesar 3 artinya lama rawat seorang pasien rata-rata 3 hari |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Kinerja Sarana Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|---|
| Metode/Rumus Penghitungan | Jumlah lama dirawat dibagi dengan Jumlah pasien keluar (hidup + mati) |
| Ukuran | Rata-rata |
| Satuan | hari |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Turn Over Interval (TOI)/ Angka Rata-Rata Tempat Tidur Tidak Terisi

IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Turn Over Interval (TOI)/ Angka rata-rata tempat tidur tidak terisi adalah Rata-rata hari tempat tidur tidak ditempati dari saat terisi ke saat terisi berikutnya. |
| Unit Penyelenggara | Dinas Kesehatan |
| Kelompok Indikator | Aspek Kesehatan |
| Interpretasi | Nilai Turn Over Interval sebesar 1,4 artinya tempat tidur tidak ditempati dari saat terisi ke saat terisi berikutnya rata-rata 1 -2 hari |

DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Kinerja Sarana Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--|
| Metode/Rumus Penghitungan | $\frac{J1-J2}{J3}$ |
| | <p>Keterangan:</p> <p>J1 = (Jumlah tempat tidur * Jumlah hari dalam setahun)</p> <p>J2 = Jumlah hari perawatan</p> <p>J3 = Jumlah pasien keluar (hidup + mati)</p> |
| Ukuran | Rata-rata |
| Satuan | hari |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Bed Turn Over (BTO)/ Tingkat Penggunaan Tempat Tidur

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Bed Turn Over (BTO)/ Tingkat penggunaan tempat tidur adalah Frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode, berapa kali tempat tidur dipakai dalam satu satuan waktu (biasanya dalam periode 1 tahun). Indikator ini memberikan tingkat efisiensi pada pemakaian tempat tidur.

Unit Penyelenggara

Dinas Kesehatan

Kelompok Indikator

Aspek Kesehatan

Interpretasi

Nilai Bed Turn Over sebesar 81,8 artinya pemakaian tempat tidur sebanyak 81 - 82 kali dalam satu tahun

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kinerja Sarana Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{J1}{J2}$$

Keterangan:

J1 = Jumlah pasien keluar (hidup + mati)

J2 = Jumlah tempat tidur

Ukuran

Frekuensi

Satuan

kali

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Tempat Tidur Rumah Sakit

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Jumlah tempat tidur rumah sakit adalah Jumlah tempat tidur di ruang rawat inap dan tempat tidur di ruang pasca persalinan |
| Unit Penyelenggara | Dinas Kesehatan |
| Kelompok Indikator | Aspek Kesehatan |
| Interpretasi | Jumlah tempat tidur rumah sakit dapat mencerminkan ketersediaan perawatan medis di suatu daerah. Jika jumlah tempat tidur terbatas, pasien mungkin menghadapi kesulitan untuk mendapatkan perawatan yang tepat dan dapat mempengaruhi aksesibilitas dan waktu tunggu untuk pelayanan kesehatan. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Kinerja Sarana Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Pendataan RS Daerah dan RS Swasta |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | unit |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Jumlah Dokter Umum

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Dokter Umum adalah Tenaga kesehatan profesional yang berlatar belakang pendidikan kedokteran dan memberikan pelayanan kesehatan, misal membuat diagnosis medis dan penanganannya |
| Unit Penyelenggara | Dinas Kesehatan |
| Kelompok Indikator | Aspek Kesehatan |
| Interpretasi | Jumlah dokter umum mencerminkan ketersediaan pelayanan kesehatan primer di suatu wilayah. Jika jumlah dokter umum cukup, maka masyarakat akan memiliki akses yang lebih baik untuk mendapatkan perawatan kesehatan dasar dan mendasar. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Data yang Dikumpulkan | Rasio Dokter di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|---|
| Metode/Rumus Penghitungan | Jumlah dokter umum yang memberikan pelayanan kesehatan di puskesmas, rumah sakit dan sarana pelayanan kesehatan lain di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | orang |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Rasio Dokter Umum

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Rasio Dokter Umum adalah Perbandingan antara tenaga dokter umum dengan jumlah warga penduduk per 100.000 |
| Unit Penyelenggara | Dinas Kesehatan |
| Kelompok Indikator | Aspek Kesehatan |
| Interpretasi | Jika rasio dokter umum tinggi, artinya ada lebih banyak dokter umum yang tersedia untuk melayani masyarakat, sehingga meningkatkan aksesibilitas perawatan dan potensial untuk mendiagnosis dan mengobati kondisi kesehatan umum. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Data yang Dikumpulkan | Rasio Dokter di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | $\frac{J1}{J2} \times 100.000$ |
|---------------------------|--------------------------------|

Keterangan:

J1 = Jumlah dokter umum yang memberikan pelayanan kesehatan di sarana pelayanan kesehatan di suatu wilayah

J2 = Jumlah penduduk di wilayah dan tahun yang sama

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Ukuran | Rasio |
| Satuan | per 100.000 penduduk |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Jumlah Dokter Spesialis

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Jumlah Dokter Spesialis adalah Jumlah dokter spesialis yang memberikan pelayanan kesehatan di puskesmas ,rumah sakit dan sarana pelayanan kesehatan lain di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu |
| Unit Penyelenggara | Dinas Kesehatan |
| Kelompok Indikator | Aspek Kesehatan |
| Interpretasi | Jumlah dokter spesialis mencerminkan ketersediaan tenaga medis yang memiliki keahlian khusus dalam bidang-bidang tertentu seperti bedah, kardiologi, onkologi, dan sebagainya. Jika jumlah dokter spesialis cukup, maka masyarakat akan memiliki akses yang lebih baik untuk mendapatkan perawatan yang lebih spesifik dan terfokus sesuai dengan kebutuhan kesehatan mereka. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Data yang Dikumpulkan | Rasio Dokter di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|---|
| Metode/Rumus Penghitungan | Jumlah dokter spesialis yang memberikan pelayanan kesehatan di puskesmas,rumah sakit dan sarana pelayanan kesehatan lain di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | orang |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Rasio Dokter Spesialis

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Rasio Dokter Spesialis adalah Perbandingan antara tenaga dokter spesialis dengan jumlah warga penduduk per 100.000 |
| Unit Penyelenggara | Dinas Kesehatan |
| Kelompok Indikator | Aspek Kesehatan |
| Interpretasi | Jika rasio dokter spesialis tinggi, artinya ada lebih banyak dokter spesialis yang tersedia untuk melayani masyarakat, sehingga meningkatkan aksesibilitas perawatan spesialis. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Data yang Dikumpulkan | Rasio Dokter di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|---|
| Metode/Rumus Penghitungan | $\frac{J1}{J2} \times 100.000$ |
| | Keterangan: J1 = Jumlah dokter spesialis yang memberikan pelayanan kesehatan di sarana pelayanan kesehatan di suatu wilayah J2 = Jumlah penduduk di wilayah dan tahun yang sama |
| Ukuran | Rasio |
| Satuan | per 100.000 penduduk |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Jumlah Dokter Gigi

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Jumlah Dokter Gigi adalah Jumlah dokter gigi yang memberikan pelayanan kesehatan di puskesmas, rumah sakit dan sarana pelayanan kesehatan lain di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu |
| Unit Penyelenggara | Dinas Kesehatan |
| Kelompok Indikator | Aspek Kesehatan |
| Interpretasi | Jumlah dokter gigi mencerminkan tingkat ketersediaan tenaga medis dalam bidang kedokteran gigi. Data ini memberikan gambaran tentang potensi pelayanan kesehatan gigi yang dapat diberikan kepada populasi. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Data yang Dikumpulkan | Rasio Dokter di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|---|
| Metode/Rumus Penghitungan | Jumlah dokter gigi dan dokter gigi spesialis yang memberikan pelayanan kesehatan di puskesmas, rumah sakit dan sarana pelayanan kesehatan lain di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | orang |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Rasio Dokter Gigi

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Rasio Dokter Gigi adalah Perbandingan antara tenaga dokter gigi dengan jumlah warga penduduk per 100.000 |
| Unit Penyelenggara | Dinas Kesehatan |
| Kelompok Indikator | Aspek Kesehatan |
| Interpretasi | Jika rasio dokter gigi tinggi, artinya ada lebih banyak dokter gigi yang tersedia untuk melayani masyarakat, sehingga meningkatkan aksesibilitas perawatan gigi. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Data yang Dikumpulkan | Rasio Dokter di Kabupaten Purbalingga |
| Periodisasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{J1}{J2} \times 100.000$$

Keterangan:

J1 = Jumlah dokter gigi yang memberikan pelayanan kesehatan di sarana pelayanan kesehatan di suatu wilayah

J2 = Jumlah penduduk di wilayah dan tahun yang sama

Rasio per 100.000 penduduk

Ukuran

Satuan

Apakah Indikator Dapat Diakses

Umum

Ya



Jumlah Perawat

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Perawat adalah Seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi keperawatan, baik di dalam maupun luar negeri yang diakui pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
| Unit Penyelenggara | Dinas Kesehatan |
| Kelompok Indikator | Aspek Kesehatan |
| Interpretasi | Jumlah perawat mencerminkan ketersediaan tenaga medis dalam bidang perawatan kesehatan. Data ini memberikan gambaran tentang potensi pelayanan perawat yang dapat diberikan kepada populasi. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Rasio Tenaga Paramedis di Kabupaten Purbalingga |
| Periodisasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|---|
| Metode/Rumus Penghitungan | Jumlah perawat yang memberikan pelayanan kesehatan di puskesmas, rumah sakit dan sarana pelayanan kesehatan lain di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | orang |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Rasio Perawat

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Rasio Perawat adalah Jumlah perawat yang memberikan pelayanan kesehatan di sarana pelayanan kesehatan di suatu wilayah per 100.000 penduduk |
| Unit Penyelenggara | Dinas Kesehatan |
| Kelompok Indikator | Aspek Kesehatan |
| Interpretasi | Semakin tinggi rasio perawat, semakin besar kemungkinan bagi masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap perawatan kesehatan yang diperlukan. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Rasio Tenaga Paramedis di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--|
| Metode/Rumus Penghitungan | $\frac{J1}{J2} \times 100.000$ |
| | Keterangan: J1 = Jumlah perawat yang memberikan pelayanan kesehatan di sarana pelayanan kesehatan di suatu wilayah J2 = Jumlah penduduk di wilayah dan tahun yang sama |
| Ukuran | Rasio |
| Satuan | per 100.000 penduduk |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Jumlah Bidan

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Bidan adalah Seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang telah teregistrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Dinas Kesehatan

Aspek Kesehatan

Jumlah bidan mencerminkan ketersediaan tenaga medis dalam bidang kebidanan. Data ini memberikan gambaran tentang potensi pelayanan bidan yang dapat diberikan kepada populasi.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Rasio Tenaga Paramedis di
Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah bidan yang memberikan pelayanan kesehatan di puskesmas, rumah sakit dan sarana pelayanan kesehatan lain di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Rasio Bidan

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Rasio Bidan adalah Jumlah bidan yang memberikan pelayanan kesehatan di sarana pelayanan kesehatan di suatu wilayah per 100.000 penduduk

Unit Penyelenggara

Dinas Kesehatan

Kelompok Indikator

Aspek Kesehatan

Interpretasi

Semakin tinggi rasio bidan, semakin besar kemungkinan bagi masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap perawatan kesehatan ibu dan bayi yang diperlukan.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Rasio Tenaga Paramedis di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{J1}{J2} \times 100.000$$

Keterangan:

J1 = Jumlah bidan yang memberikan pelayanan kesehatan di sarana

pelayanan kesehatan di suatu wilayah

J2 = Jumlah penduduk di wilayah dan

tahun yang sama

Ukuran

Rasio

Satuan

per 100.000 penduduk

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Tenaga Farmasi

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Jumlah Tenaga Farmasi adalah Banyaknya tenaga kesehatan yang telah memenuhi kualifikasi bidang kefarmasian yang terdiri dari apoteker dan tenaga teknis kefarmasian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
| Unit Penyelenggara | Dinas Kesehatan |
| Kelompok Indikator | Aspek Kesehatan |
| Interpretasi | Jumlah tenaga farmasi mencerminkan ketersediaan tenaga farmasi dalam memberikan pelayanan farmasi kepada masyarakat. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Rasio Tenaga Paramedis di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--|
| Metode/Rumus Penghitungan | Jumlah tenaga farmasi yang memberikan pelayanan kesehatan di puskesmas, rumah sakit dan sarana pelayanan kesehatan lain di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | orang |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Rasio Tenaga Farmasi

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Rasio Tenaga Farmasi adalah Jumlah tenaga farmasi yang memberikan pelayanan kesehatan di sarana pelayanan kesehatan di suatu wilayah per 100.000 penduduk |
| Unit Penyelenggara | Dinas Kesehatan |
| Kelompok Indikator | Aspek Kesehatan |
| Interpretasi | Semakin tinggi rasio tenaga farmasi, semakin besar kemungkinan bagi masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap pelayanan farmasi yang diperlukan, seperti konseling obat, pengelolaan stok obat, dan informasi tentang penggunaan obat. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Rasio Tenaga Paramedis di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|---|
| Metode/Rumus Penghitungan | $\frac{J1}{J2} \times 100.000$ |
| | Keterangan: J1 = Jumlah tenaga farmasi di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu J2 = Jumlah penduduk di wilayah dan tahun yang sama |
| Ukuran | Rasio |
| Satuan | per 100.000 penduduk |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Jumlah Tenaga Gizi

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Tenaga Gizi adalah Setiap orang yang telah lulus pendidikan di bidang gizi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan |
| Unit Penyelenggara | Dinas Kesehatan |
| Kelompok Indikator | Aspek Kesehatan |
| Interpretasi | Jumlah tenaga gizi mencerminkan ketersediaan tenaga medis dalam bidang gizi yang bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan gizi kepada masyarakat. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Rasio Tenaga Paramedis di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--|
| Metode/Rumus Penghitungan | Jumlah tenaga farmasi yang memberikan pelayanan kesehatan di puskesmas, rumah sakit dan sarana pelayanan kesehatan lain di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | orang |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Rasio Tenaga Gizi

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Rasio Tenaga Gizi adalah Jumlah tenaga gizi yang memberikan pelayanan kesehatan di sarana pelayanan kesehatan di suatu wilayah per 100.000 penduduk |
| Unit Penyelenggara | Dinas Kesehatan |
| Kelompok Indikator | Aspek Kesehatan |
| Interpretasi | Semakin tinggi rasio tenaga gizi, semakin besar kemungkinan bagi masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap pelayanan gizi yang diperlukan, seperti penilaian gizi, konseling gizi, atau penyusunan program diet yang sesuai. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Rasio Tenaga Paramedis di Kabupaten Purbalingga |
| Periododesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--|
| Metode/Rumus Penghitungan | $\frac{J1}{J2} \times 100.000$ |
| | Keterangan: J1 = Jumlah tenaga gizi yang memberikan pelayanan kesehatan di sarana pelayanan kesehatan di suatu wilayah J2 = Jumlah penduduk di wilayah dan tahun yang sama |
| Ukuran | Rasio |
| Satuan | per 100.000 penduduk |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Penerima Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Penerima Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah Penerima program jaminan kesehatan dari pemerintah berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran jaminan kesehatan atau iuran jaminan kesehatannya dibayar oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah |
| Unit Penyelenggara | Dinas Kesehatan |
| Kelompok Indikator | Aspek Kesehatan |
| Interpretasi | Jika ada banyak penduduk yang menjadi penerima JKN, maka ada kecenderungan bahwa akses ke pelayanan kesehatan menjadi lebih merata. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Jumlah Jaminan Pemeliharaan Kesehatan di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |



■ METODOLOGI

| | |
|--------------------------------|---|
| Metode/Rumus Penghitungan | Jumlah penduduk yang menjadi peserta JKN di satu wilayah pada kurun waktu |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | jiwa |
| Apakah Indikator Dapat Diakses | Ya |
| Umum | |



Persentase Penerima Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Persentase penerima Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah Persentase jumlah penduduk yang tercakup oleh program Jaminan Kesehatan Nasional |
| Unit Penyelenggara | Dinas Kesehatan |
| Kelompok Indikator | Aspek Kesehatan |
| Interpretasi | Persentase yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar populasi daerah tersebut telah dijamin akses ke pelayanan kesehatan yang terjangkau. Ini mencerminkan upaya pemerintah dalam mencapai kesetaraan dalam akses kesehatan bagi seluruh warga negara. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Jumlah Jaminan Pemeliharaan Kesehatan di Kabupaten Purbalingga Tahunan |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|---|
| Metode/Rumus Penghitungan | $\frac{J1}{J2} \times 100\%$ |
| | Keterangan: J1 = Jumlah penduduk penerima JKN J2 = Jumlah penduduk pada wilayah dan waktu yang sama |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | % |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Penerima Jaminan Kesehatan Di Luar JKN

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Penerima Jaminan Kesehatan di luar JKN adalah Penerima jaminan kesehatan swasta (asuransi swasta) atau penduduk yang belum mempunyai jaminan kesehatan |
| Unit Penyelenggara | Dinas Kesehatan |
| Kelompok Indikator | Kesehatan |
| Interpretasi | Jumlah penerima jaminan kesehatan di luar Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencerminkan upaya untuk memperluas cakupan jaminan kesehatan dan variasi dalam kualitas layanan kesehatan yang dapat diakses oleh populasi |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Jumlah Jaminan Pemeliharaan Kesehatan di Kabupaten Purbalingga |
| Periodisasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--|
| Metode/Rumus Penghitungan | Jumlah penduduk - Jumlah penduduk penerima JKN |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | jiwa |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Persentase Penerima Jaminan Kesehatan Di Luar JKN

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Persentase penerima Jaminan Kesehatan di luar JKN adalah Persentase jumlah penduduk yang menerima jaminan kesehatan di luar JKN (menggunakan asuransi swasta atau belum mempunyai jaminan)

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Dinas Kesehatan

Aspek Kesehatan

Persentase ini memberikan gambaran tentang sejauh mana populasi tercakup dalam program jaminan kesehatan lainnya yang ada di daerah tersebut.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah Jaminan Pemeliharaan Kesehatan di Kabupaten Purbalingga Tahunan

Periodesasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

100% - persentase peserta JKN

Ukuran

Persentase

Satuan

%

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Kepesertaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Prabayar (PBI APBN)

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Kepesertaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Prabayar (PBI APBN) adalah Peserta JKN yang iurannya dibiayai oleh pemerintah melalui APBN |
| Unit Penyelenggara | Dinas Kesehatan |
| Kelompok Indikator | Kesehatan |
| Interpretasi | Jumlah kepesertaan jaminan pemeliharaan kesehatan prabayar (PBI APBN) menunjukkan upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Jumlah Jaminan Pemeliharaan Kesehatan di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--|
| Metode/Rumus Penghitungan | Jumlah penduduk yang menjadi peserta JKN PBI APBN di satu wilayah pada kurun waktu |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | jiwa |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Kepesertaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Prabayar (PBI APBD)

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Kepesertaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Prabayar (PBI APBD) adalah Peserta JKN yang iurannya dibiayai oleh pemerintah daerah melalui APBD |
| Unit Penyelenggara | Dinas Kesehatan |
| Kelompok Indikator | Kesehatan |
| Interpretasi | Jumlah kepesertaan jaminan pemeliharaan kesehatan prabayar (PBI APBD) menunjukkan upaya pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Jumlah Jaminan Pemeliharaan Kesehatan di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--|
| Metode/Rumus Penghitungan | Jumlah penduduk yang menjadi peserta JKN PBI APBD di satu wilayah pada kurun waktu |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | jiwa |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Kepesertaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Prabayar (Pekerja Penerima Upah)

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Kepesertaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Prabayar (Pekerja Penerima Upah) adalah Peserta JKN yang terdiri dari PNS, TNI/ POLRI, Pejabat Negara, dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang iurannya dibiayai oleh pemberi kerja dan peserta yang bersangkutan. |
| Unit Penyelenggara | Dinas Kesehatan |
| Kelompok Indikator | Aspek Kesehatan |
| Interpretasi | Jumlah kepesertaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Prabayar (Pekerja Penerima Upah) menunjukkan upaya untuk memberikan perlindungan kesehatan kepada pekerja |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Jumlah Jaminan Pemeliharaan Kesehatan di Kabupaten Purbalingga |
| Periododesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|---|
| Metode/Rumus Penghitungan | Jumlah penduduk yang menjadi peserta JKN PPU di satu wilayah pada kurun waktu |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | jiwa |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Kepesertaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Prabayar (Pekerja Bukan Penerima Upah)

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Kepesertaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Prabayar (Pekerja Bukan Penerima Upah) adalah Peserta JKN yang bekerja mandiri dan iurannya dibiayai oleh peserta yang bersangkutan.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Dinas Kesehatan
Kesehatan

Jumlah kepesertaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Prabayar (Pekerja Bukan Penerima Upah) menunjukkan upaya untuk memberikan perlindungan kesehatan kepada pekerja

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah Jaminan Pemeliharaan Kesehatan di Kabupaten Purbalingga Tahunan

Periodesasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah penduduk yang menjadi peserta JKN PBPU di satu wilayah pada kurun waktu

Ukuran

Jumlah

Satuan

jiwa

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Kepesertaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Prabayar (Bukan Pekerja)

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Kepesertaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Prabayar (Bukan Pekerja) adalah Peserta JKN yang terdiri dari investor, pemberi pajak, penerima pensiun, veteran, perintis kemerdekaan dan bukan pekerja lainnya yang iurannya dibiayai oleh peserta yang bersangkutan. |
| Unit Penyelenggara | Dinas Kesehatan |
| Kelompok Indikator | Aspek Kesehatan |
| Interpretasi | Jumlah kepesertaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Prabayar (Bukan Pekerja) menunjukkan upaya untuk memberikan perlindungan kesehatan kepada bukan pekerja |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Jumlah Jaminan Pemeliharaan Kesehatan di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|---|
| Metode/Rumus Penghitungan | Jumlah penduduk yang menjadi peserta JKN Bukan Pekerja di satu wilayah pada kurun waktu |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | jiwa |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Jumlah Kelahiran

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jumlah Kelahiran adalah Banyaknya bayi lahir baik dalam kondisi hidup atau mati dalam waktu tertentu

Unit Penyelenggara

Dinas Kesehatan

Kelompok Indikator

Aspek Kesehatan

Interpretasi

Jumlah kelahiran yang tinggi dapat mengindikasikan adanya pertumbuhan populasi yang cepat.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah Jaminan Pemeliharaan Kesehatan di Kabupaten Purbalingga

Periodisasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Bayi Hidup + Bayi Mati tiap puskesmas

Ukuran

Jumlah

Satuan

jiwa

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



METADATA INDIKATOR STATISTIK SEKTORAL

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT



Panjang jalan kabupaten

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Panjang jalan kabupaten adalah Panjang jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer, yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

DPUPR

Aspek Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Interpretasi

Panjang jalan kabupaten memberikan gambaran tentang potensi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah. Dengan adanya jaringan jalan yang lebih luas, wilayah tersebut memiliki akses yang lebih baik ke pasar, layanan publik, pusat bisnis, dan tempat-tempat penting lainnya. Hal ini dapat mempengaruhi potensi investasi, perdagangan, pariwisata, dan pengembangan infrastruktur lebih lanjut di kabupaten tersebut.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Jalan di Kabupaten Purbalingga

Periododesasi

Tahunan



■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--|
| Metode/Rumus Penghitungan | Berdasarkan SK Bupati Purbalingga No. 621/329 Tahun 2016 tentang Status Ruas-Ruas Jalan sebagai Jalan Kabupaten di Wilayah Kabupaten Purbalingga |
| Ukuran | Panjang |
| Satuan | km |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Panjang jalan kondisi baik

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jalan kondisi baik adalah Jalan yang memiliki kerataan permukaan yang memadai bagi kendaraan untuk dapat dilalui oleh kendaraan dengan cepat, aman dan nyaman, dengan dimana angka Roughness Indeks IRI, di bawah 4 untuk kondisi baik.

Unit Penyelenggara

DPUPR

Kelompok Indikator

Aspek Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Interpretasi

Panjang jalan dengan kondisi baik menggambarkan adanya infrastruktur transportasi yang terpelihara dengan baik dan dapat memberikan akses yang nyaman, aman, dan efisien bagi pengguna jalan

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Jalan di Kabupaten Purbalingga

Periodisasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Pendataan

Ukuran

Panjang

Satuan

km

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Persentase panjang jalan kondisi baik

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Persentase panjang jalan kondisi baik adalah Perbandingan antara panjang jalan kondisi baik dengan panjang jalan kabupaten |
| Unit Penyelenggara | DPUPR |
| Kelompok Indikator | Aspek Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Interpretasi | Jika persentase panjang jalan kondisi baik tinggi, ini menunjukkan bahwa sebagian besar jalan dalam wilayah atau jaringan tersebut dalam kondisi yang baik. Kondisi baik dapat mencakup aspek-aspek seperti permukaan jalan yang rata, bebas dari kerusakan serius, sinyal lalu lintas yang berfungsi dengan baik, marka jalan yang jelas, dan infrastruktur pendukung lainnya dalam keadaan optimal |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Kondisi Jalan di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|---|
| Metode/Rumus Penghitungan | $\frac{\text{Panjang jalan kondisi baik}}{\text{Panjang Jalan Kabupaten}} \times 100\%$ |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | % |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Panjang jalan kondisi sedang

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jalan kondisi sedang adalah Jalan yang memiliki kerataan permukaan yang memadai bagi kendaraan untuk dapat dilalui oleh kendaraan dengan cepat, aman dan nyaman, dengan dimana angka Roughness Indeks IRI, di bawah 8 untuk kondisi sedang.

Unit Penyelenggara

DPUPR

Kelompok Indikator

Aspek Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Interpretasi

Jika panjang jalan kondisi sedang relatif tinggi, ini menunjukkan bahwa sebagian besar jalan dalam wilayah atau sistem tersebut mengalami kondisi yang tergolong sedang. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti usia jalan yang lebih tua, kurangnya pemeliharaan yang tepat waktu, beban lalu lintas yang tinggi, atau faktor lingkungan lainnya

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Jalan di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Pendataan

Ukuran

Panjang

Satuan

km

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Persentase panjang jalan kondisi sedang

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Persentase panjang jalan kondisi sedang adalah Perbandingan antara panjang jalan kondisi sedang dengan panjang jalan kabupaten |
| Unit Penyelenggara | DPUPR |
| Kelompok Indikator | Aspek Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Interpretasi | Jika persentase panjang jalan kondisi sedang tinggi, ini menunjukkan bahwa sebagian besar jalan memiliki kondisi yang tergolong sedang. Kondisi sedang dapat mengindikasikan jalan yang memiliki kerusakan atau keausan pada beberapa bagian, namun masih dapat digunakan dengan tingkat kenyamanan dan keamanan yang memadai |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Kondisi Jalan di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|---|
| Metode/Rumus Penghitungan | $\frac{\text{Panjang jalan kondisi sedang}}{\text{Panjang Jalan Kabupaten}} \times 100\%$ |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | % |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Panjang jalan kondisi rusak

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jalan kondisi rusak adalah Jalan dengan permukaan perkerasan sudah mulai bergelombang, mulai ada kerusakan permukaan dan penambalan (kurang dari 20% dari luas jalan yang ditinjau).

Unit Penyelenggara

DPUPR

Kelompok Indikator

Aspek Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Interpretasi

Jika panjang jalan kondisi rusak relatif tinggi, ini menunjukkan bahwa sebagian besar jalan dalam wilayah atau sistem tersebut mengalami kerusakan yang signifikan. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya perawatan yang tepat, usia jalan yang tua, beban lalu lintas yang berlebihan, atau kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Jalan di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Pendataan

Ukuran

Panjang

Satuan

km

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Persentase panjang jalan kondisi rusak

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Persentase panjang jalan kondisi rusak adalah Perbandingan antara panjang jalan kondisi rusak dengan panjang jalan kabupaten |
| Unit Penyelenggara | DPUPR |
| Kelompok Indikator | Aspek Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Interpretasi | Tingginya persentase ini dapat mengindikasikan kurangnya perawatan yang memadai, usia jalan yang tua, kurangnya alokasi anggaran yang memadai, atau faktor lain yang menyebabkan jalan tidak dapat dipertahankan dalam kondisi yang baik. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Kondisi Jalan di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--|
| Metode/Rumus Penghitungan | $\frac{\text{Panjang jalan kondisi Rusak}}{\text{Panjang Jalan Kabupaten}} \times 100\%$ |
| Ukuran Satuan | Persentase % |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Panjang jalan kondisi rusak berat

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Jalan kondisi rusak berat adalah Jalan dengan permukaan perkerasan sudah banyak kerusakan seperti bergelombang, retak-retak buaya dan terkelupas yang cukup besar (20-60% dari luas jalan yang ditinjau) disertai dengan kerusakan lapis pondasi dengan kerusakan lapis pondasi seperti amblas, sungkur dan sebagainya |
| Unit Penyelenggara | DPUPR |
| Kelompok Indikator | Aspek Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Interpretasi | Jika panjang jalan kondisi rusak berat relatif tinggi, ini menunjukkan bahwa sebagian besar jalan dalam wilayah atau sistem tersebut mengalami kerusakan yang parah. Kondisi rusak berat dapat meliputi kerusakan struktural, lubang besar, keretakan yang luas, atau kelainan lainnya yang signifikan. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Kondisi Jalan di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Pendataan |
| Ukuran | Panjang |
| Satuan | km |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Persentase panjang jalan kondisi rusak berat

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Persentase panjang jalan kondisi rusak berat adalah Perbandingan antara panjang jalan kondisi rusak berat dengan panjang jalan kabupaten |
| Unit Penyelenggara | DPUPR |
| Kelompok Indikator | Aspek Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Interpretasi | Jika persentase panjang jalan kondisi rusak berat tinggi, ini menunjukkan bahwa sebagian besar jalan dalam wilayah atau sistem tersebut mengalami kerusakan yang parah dan memerlukan perbaikan mendesak |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Kondisi Jalan di Kabupaten Purbalingga |
| Periodisasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--|
| Metode/Rumus | $\frac{\text{Panjang jalan kondisi Berat}}{\text{Panjang Jalan Kabupaten}} \times 100\%$ |
| Penghitungan | |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | % |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Indeks Jalan Mantap (Persentase panjang jalan kondisi baik dan sedang)

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Indeks Jalan Mantap (Persentase panjang jalan kondisi baik dan sedang) adalah Perbandingan antara panjang jalan kondisi baik dan sedang dengan panjang jalan kabupaten |
| Unit Penyelenggara | DPUPR |
| Kelompok Indikator | Aspek Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Interpretasi | Jika sebuah daerah memiliki indeks jalan mantap yang tinggi, itu menunjukkan bahwa jalan-jalan di daerah tersebut umumnya dalam kondisi baik dan memadai. Permukaan jalan yang halus, bebas lubang, dan minim retakan dapat meningkatkan kenyamanan dan keamanan bagi pengguna jalan. Struktur jalan yang kokoh dan terawat juga penting agar jalan dapat bertahan dalam jangka panjang dan dapat menampung lalu lintas yang berat. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Kondisi Jalan di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |



■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--|
| Metode/Rumus | $\frac{\text{Panjang jalan kondisi baik dan sedang}}{\text{Panjang Jalan Kabupaten}} \times 100\%$ |
| Penghitungan | |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | % |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Jumlah jembatan

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jembatan adalah Suatu struktur bangunan yang berfungsi untuk menghubungkan dua bagian jalan yang terputus oleh adanya rintangan-rintangan seperti lembah yang dalam, alur sungai, saluran irigasi dan pembuangan, jalan kereta api, waduk, dan lain-lain

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

DPUPR
Aspek Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Interpretasi

Jumlah jembatan dapat memberikan gambaran tentang infrastruktur jalan dan transportasi suatu wilayah. Jumlah jembatan yang ada dapat mencerminkan tingkat konektivitas dan aksesibilitas dalam suatu daerah.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Jembatan di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Pendataan

Ukuran

Jumlah

Satuan

buah

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum

Ya



Jumlah jembatan dalam kondisi baik

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|--|---|
| Konsep dan Definisi | Jumlah jembatan dalam kondisi baik adalah Banyaknya jembatan (unit) pada jalan kabupaten yang merupakan prasarana penghubung antar dua jalan yang terpisah dan diinformasikan kondisi fisik yang baik |
| Unit Penyelenggara Kelompok Indikator | DPUPR Aspek Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Interpretasi | Jika jumlah jembatan dalam kondisi baik relatif tinggi, ini menunjukkan bahwa sebagian besar jembatan dalam wilayah atau sistem jalan tersebut memenuhi standar kualitas dan memadai untuk digunakan |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Kondisi Jembatan di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Pendataan |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | buah |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Persentase jembatan dalam kondisi baik

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Persentase jembatan dalam kondisi baik adalah Perbandingan jumlah jembatan kondisi baik dibagi dengan jumlah total jembatan kabupaten |
| Unit Penyelenggara | DPUPR |
| Kelompok Indikator | Aspek Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Interpretasi | Jika persentase jembatan dalam kondisi baik tinggi, ini menunjukkan bahwa sebagian besar jembatan dalam wilayah atau sistem jalan tersebut memenuhi standar kualitas yang diharapkan |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Kondisi Jembatan di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|---|
| Metode/Rumus | $\frac{\text{Jumlah Jembatan kondisi baik}}{\text{Jumlah Jembatan Kabupaten}} \times 100\%$ |
| Penghitungan | |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | % |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Panjang Jalan Aspal (Asphalt Congreed (AC), Asphalt Treated Base (ATB), Hot Rolled Sheet (HRS))

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Aspal (Asphalt Congreed (AC), Asphalt Treated Base (ATB), Hot Rolled Sheet (HRS)) adalah Material perekat berwarna hitam atau coklat tua dengan unsur utama bitumen yang diperoleh dari residu hasil pengilangan minyak bumi berfungsi sebagai pengikat agregat dalam pembuatan jalan. Aspal dipilih untuk konstruksi jalan karena mempunyai sifat pekat (consistency), tahan terhadap pelapukan yang disebabkan oleh cuaca, derajat pengerasan dan ketahanan terhadap air

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

DPUPR
Aspek Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Interpretasi

Jika panjang jalan aspal (Asphalt Congreed (AC), Asphalt Treated Base (ATB), Hot Rolled Sheet (HRS)) relatif tinggi, ini menunjukkan bahwa sebagian besar jalan dalam wilayah atau sistem jalan tersebut telah dilapisi dengan permukaan aspal. Penggunaan aspal pada jalan dapat memberikan kehalusan permukaan, peningkatan daya tahan, dan kenyamanan bagi pengguna jalan



■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jenis Perkerasan Jalan di Kabupaten
Purbalingga

Periododesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Pendataan

Ukuran

Panjang

Satuan

km

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Panjang Jalan Perkerasan Rigid/Beton

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Rigid/Beton adalah Perkerasan yang menggunakan semen (portland cement) sebagai bahan pengikat. Plat beton dengan atau tanpa tulangan diletakkan diatas tanah dasar dengan atau tanpa lapis pondasi bawah. Beban lalu lintas sebagian besar dipikul oleh pelat beton

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

DPUPR
Aspek Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Interpretasi

Jika panjang jalan perkerasan rigid atau beton relatif tinggi, ini menunjukkan bahwa sebagian besar jalan dalam wilayah atau sistem jalan tersebut menggunakan perkerasan beton

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jenis Perkerasan Jalan di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Pendataan

Ukuran

Panjang

Satuan

km

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum

Ya



Panjang Jalan Lapis Penetrasi/ Lataisir/ Makadam

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Penetrasi/Lataisir/Makadam adalah Lapis perkerasan yang terdiri dari agregat pokok, agregat pengunci dan agregat penutup (khusus untuk lapis permukaan) yang bergradasi seragam yang dihampar secara terpisah dan diberi ikatan awal dengan aspal cair/aspal emulsi dan diikat oleh Asbuton B 50/30 |
| Unit Penyelenggara Kelompok Indikator | DPUPR Aspek Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Interpretasi | Jika panjang jalan lapis penetrasi, lataisir, atau makadam relatif tinggi, ini menunjukkan bahwa sebagian besar jalan dalam wilayah atau sistem jalan tersebut menggunakan jenis lapisan permukaan tersebut |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Jenis Perkerasan Jalan di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Pendataan |
| Ukuran | Panjang |
| Satuan | km |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Panjang Jalan Telford/ Kerikil/ Urpil

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Telford/Kerikil/Urpil adalah Penumpukan material tanah dengan dilapisi dengan batu-batuan ukuran kecil. Penggunaan metode ini cocok digunakan pada jalur dengan volume kendaraan yang rendah. Penggunaan Kalsium klorida biasa digunakan terutama pada volume lalu lintas yang tinggi. Hal seperti ini dapat bertahan selama 1 sampai 2 tahun |
| Unit Penyelenggara Kelompok Indikator | DPUPR Aspek Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Interpretasi | Jika panjang jalan telford, kerikil, atau urpil relatif tinggi, ini menunjukkan bahwa sebagian besar jalan dalam wilayah atau sistem jalan tersebut menggunakan jenis lapisan permukaan tersebut. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Jenis Perkerasan Jalan di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Pendataan |
| Ukuran | Panjang |
| Satuan | km |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Panjang Jalan Tanah/ Belum Tembus

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Tanah/Belum tembus adalah Semua endapan yang lepas dan lunak, baik yang diangkut maupun tidak diangkut dari tempat asalnya, yang terjadi secara alamiah di atas lapisan batuan yang padat. |
| Unit Penyelenggara | DPUPR |
| Kelompok Indikator | Aspek Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Interpretasi | Jika panjang jalan tanah atau belum tembus relatif tinggi, ini menunjukkan bahwa sebagian besar jalan dalam wilayah atau sistem jalan tersebut masih berada dalam kondisi tanah alami |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Jenis Perkerasan Jalan di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Pendataan |
| Ukuran | Panjang |
| Satuan | km |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Panjang Drainase Sistem Terbuka

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Drainase Sistem Terbuka adalah Drainase yang memiliki bagian atas terbuka ini berfungsi untuk mengalirkan air yang tidak mengandung limbah berbahaya seperti air hujan. Drainase saluran terbuka sangat cocok jika diterapkan pada daerah yang memiliki luasan cukup

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

DPUPR
Aspek Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Interpretasi

Jika panjang drainase sistem terbuka relatif tinggi, ini menunjukkan bahwa wilayah atau sistem drainase tersebut memiliki jaringan saluran air yang cukup luas

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Drainase Perkotaan di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Pendataan

Ukuran

Panjang

Satuan

meter

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Panjang Drainase Sistem Terbuka Kondisi Baik

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Panjang Drainase Sistem Terbuka Kondisi Baik adalah Total jarak atau panjang fisik saluran drainase yang berfungsi dengan baik dan tidak mengalami masalah signifikan |
| Unit Penyelenggara | DPUPR |
| Kelompok Indikator | Aspek Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Interpretasi | Jika panjang drainase sistem terbuka dalam kondisi baik, ini menunjukkan bahwa saluran tersebut tidak rusak, tersumbat, atau terhambat dengan material berbahaya yang dapat mengganggu aliran air. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Kondisi Drainase Perkotaan di Kabupaten Purbalingga |
| Periodisasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Pendataan |
| Ukuran | Panjang |
| Satuan | meter |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Panjang Drainase Sistem Terbuka Kondisi Sedang

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Panjang Drainase Sistem Terbuka Kondisi Sedang adalah Total jarak atau panjang fisik saluran drainase yang mengalami beberapa masalah atau kerusakan, tetapi masih dapat berfungsi dengan sebagian besar kapasitasnya |
| Unit Penyelenggara | DPUPR |
| Kelompok Indikator | Aspek Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Interpretasi | Semakin panjang drainase sistem terbuka kondisi sedang maka perlu area yang memerlukan perbaikan atau pemeliharaan untuk mengoptimalkan aliran air dan mencegah masalah yang lebih serius. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Kondisi Drainase Perkotaan di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Pendataan |
| Ukuran | Panjang |
| Satuan | meter |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Panjang Drainase Sistem Terbuka Kondisi Buruk

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Panjang Drainase Sistem Terbuka Kondisi Buruk adalah Total jarak atau panjang fisik saluran drainase yang mengalami masalah, kerusakan, atau hambatan yang signifikan yang mempengaruhi kinerja sistem drainase tersebut |
| Unit Penyelenggara | DPUPR |
| Kelompok Indikator | Aspek Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Interpretasi | Panjang drainase dalam kondisi buruk dapat menjadi faktor risiko potensial terhadap banjir, erosi, atau kerusakan properti lainnya. Evaluasi risiko yang tepat dapat membantu dalam mengambil langkah-langkah pencegahan yang sesuai. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Kondisi Drainase Perkotaan di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Pendataan |
| Ukuran | Panjang |
| Satuan | meter |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Panjang Drainase Sistem Tertutup

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Drainase Sistem Tertutup adalah Drainase yang memiliki bagian atas tertutup yang umumnya dibangun untuk mengalirkan air limbah yang dapat mengganggu kesehatan/lingkungan. Drainase ini kerap ditemukan di wilayah perkotaan/permukiman. |
| Unit Penyelenggara | DPUPR |
| Kelompok Indikator | Aspek Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Interpretasi | Jika panjang drainase sistem tertutup relatif rendah, ini mungkin menunjukkan bahwa wilayah atau sistem drainase tersebut masih mengandalkan drainase terbuka atau belum sepenuhnya memiliki infrastruktur drainase tertutup yang memadai. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Kondisi Drainase Perkotaan di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Pendataan |
| Ukuran | Panjang |
| Satuan | meter |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Panjang Drainase Sistem Tertutup Kondisi Baik

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Panjang Drainase Sistem Tertutup Kondisi Baik adalah Ukuran yang digunakan untuk mengukur total panjang saluran drainase atau pipa yang digunakan dalam sistem drainase tertutup. Sistem drainase tertutup adalah suatu sistem yang dirancang untuk mengumpulkan dan mengalirkan air hujan dari permukaan tanah atau area terbuka lainnya ke saluran drainase yang tersembunyi di bawah tanah. |
| Unit Penyelenggara | DPUPR |
| Kelompok Indikator | Aspek Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Interpretasi | Dengan memiliki panjang drainase sistem tertutup dalam kondisi baik, air permukaan dapat dikelola dengan efektif, mencegah genangan air berlebih, dan melindungi daerah dari dampak negatif seperti banjir atau kerusakan akibat aliran air yang buruk. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Kondisi Drainase Perkotaan di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Pendataan |
| Ukuran | Panjang |
| Satuan | meter |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Panjang Drainase Sistem Tertutup Kondisi Sedang

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Panjang Drainase Sistem Tertutup Kondisi Sedang adalah Jarak total saluran drainase yang masih berfungsi dengan baik, tetapi mungkin mengalami beberapa masalah atau kekurangan dalam operasionalnya. |
| Unit Penyelenggara | DPUPR |
| Kelompok Indikator | Aspek Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Interpretasi | Panjang drainase sistem tertutup dalam kondisi sedang menunjukkan perlunya perhatian dan tindakan untuk menjaga dan memperbaiki sistem tersebut. Dengan pemeliharaan yang tepat, sistem drainase dapat ditingkatkan dan dibawa kembali ke kondisi baik, memastikan aliran air yang lebih lancar dan mengurangi risiko genangan air dan masalah terkait lainnya. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Kondisi Drainase Perkotaan di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Pendataan |
| Ukuran | Panjang |
| Satuan | meter |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Panjang Drainase Sistem Tertutup Kondisi Buruk

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Panjang Drainase Sistem Tertutup Kondisi Buruk adalah Jarak total saluran drainase yang mengalami masalah serius atau rusak secara signifikan. Dalam kondisi buruk, sistem drainase tertutup tidak berfungsi dengan baik atau bahkan tidak beroperasi sama sekali. |
| Unit Penyelenggara | DPUPR |
| Kelompok Indikator | Aspek Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Interpretasi | Panjang drainase sistem tertutup dalam kondisi buruk menunjukkan adanya masalah serius yang mempengaruhi kemampuan sistem untuk mengalirkan air permukaan dengan baik. Tindakan yang diperlukan, seperti perbaikan dan pemeliharaan yang ekstensif, harus dilakukan untuk memperbaiki sistem dan mencegah dampak negatif yang lebih lanjut pada lingkungan sekitarnya. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Kondisi Drainase Perkotaan di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Pendataan |
| Ukuran | Panjang |
| Satuan | meter |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Panjang Jaringan Irigasi Non Teknis

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Jaringan Irigasi Non Teknis adalah Jaringan irigasi yang memperoleh pengairan jaringan irigasinya masih sederhana dan saluran pemberi terpisah dari saluran pembuang agar penyediaan dan pembagian irigasi dapat sepenuhnya diatur dengan mudah. |
| Unit Penyelenggara | DPUPR |
| Kelompok Indikator | Aspek Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Interpretasi | Peningkatan panjang jaringan irigasi non teknis dapat disebabkan oleh keterbatasan akses terhadap teknologi canggih atau infrastruktur irigasi yang lebih kompleks. Faktor-faktor seperti keterbatasan dana, keterpencilan wilayah, atau kurangnya sumber daya teknis dapat mendorong penggunaan solusi irigasi sederhana yang dapat diakses dan dikelola oleh masyarakat lokal. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Jaringan Irigasi/Pengairan di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Pendataan |
| Ukuran | Panjang |
| Satuan | meter |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Panjang Saluran Irigasi Non Teknis Kondisi Baik

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Panjang Saluran Irigasi Non Teknis Kondisi Baik adalah Jarak total saluran irigasi yang tidak menggunakan teknologi modern atau konstruksi yang rumit, tetapi tetap berfungsi dengan baik untuk mengalirkan air irigasi dengan efektif. |
| Unit Penyelenggara | DPUPR |
| Kelompok Indikator | Aspek Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Interpretasi | Jika terdapat peningkatan panjang saluran irigasi non teknis dalam kondisi baik, hal ini bisa menunjukkan peningkatan dalam upaya perbaikan dan pemeliharaan saluran irigasi non teknis. Mungkin ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat setempat untuk memperbaiki saluran irigasi yang rusak, membersihkan saluran dari endapan atau penyumbatan, dan menjaga agar saluran tetap dalam kondisi yang baik. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Jaringan Irigasi/Pengairan di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |



■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Pendataan |
| Ukuran | Panjang |
| Satuan | meter |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Panjang Saluran Irigasi Non Teknis Kondisi Sedang

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Panjang Saluran Irigasi Non Teknis Kondisi Sedang adalah Jarak total saluran irigasi yang masih berfungsi, tetapi mengalami beberapa masalah atau kekurangan dalam operasionalnya. Dalam kondisi sedang, saluran irigasi non-teknis mungkin menghadapi beberapa kendala atau kelemahan yang mempengaruhi efisiensi dan pengiriman air irigasi.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

DPUPR
Aspek Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang

Interpretasi

Peningkatan panjang saluran irigasi non teknis dalam kondisi sedang menandakan bahwa lebih banyak saluran irigasi telah diperbaiki atau dibangun baru.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jaringan Irigasi/Pengairan di
Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Pendataan

Ukuran

Panjang

Satuan

meter

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Panjang Saluran Irigasi Non Teknis Kondisi Rusak Ringan

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Panjang Saluran Irigasi Non Teknis Kondisi Rusak Ringan adalah Jarak total saluran irigasi yang mengalami kerusakan minor atau masalah kecil yang mempengaruhi kinerja saluran, tetapi masih memungkinkan untuk mengalirkan air irigasi secara terbatas

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

DPUPR
Aspek Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Interpretasi

Jika panjang saluran irigasi yang rusak ringan terus meningkat, ini dapat menunjukkan penurunan umum dalam kualitas infrastruktur irigasi. Ini mungkin disebabkan oleh faktor seperti penuaan infrastruktur, kurangnya investasi dalam perawatan, atau perubahan iklim yang menyebabkan kerusakan lebih sering terjadi. Penurunan kualitas infrastruktur dapat menghambat efisiensi dan produktivitas sistem irigasi secara keseluruhan.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jaringan Irigasi/Pengairan di Kabupaten Purbalingga

Periododesasi

Tahunan



■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Pendataan |
| Ukuran | Panjang |
| Satuan | meter |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Panjang Saluran Irigasi Non Teknis Kondisi Rusak Berat

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Panjang Saluran Irigasi Non Teknis Kondisi Rusak Berat adalah Jarak total saluran irigasi yang mengalami kerusakan serius atau masalah yang signifikan yang secara drastis mempengaruhi kinerja saluran dan mencegah atau sangat membatasi aliran air irigasi.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

DPUPR
Aspek Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Interpretasi

Peningkatan panjang saluran irigasi yang rusak berat bisa menunjukkan bahwa ada penurunan dalam investasi dan perawatan infrastruktur irigasi. Kurangnya alokasi dana dan sumber daya untuk memperbaiki dan memelihara saluran irigasi dapat mengakibatkan peningkatan jumlah saluran yang mengalami kerusakan berat.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jaringan Irigasi/Pengairan di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Pendataan

Ukuran

Panjang

Satuan

meter

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum

Ya



Panjang Jaringan Irigasi Teknis

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Jaringan Irigasi Teknis adalah Irigasi dimana pengairannya bisa diatur dan diukur. Sistem pengairan ini dilengkapi dengan pintu untuk mengatur keluar masuk air |
| Unit Penyelenggara | DPUPR |
| Kelompok Indikator | Aspek Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Interpretasi | Jika panjang jaringan irigasi teknis meningkat, ini bisa mencerminkan adanya investasi dan perhatian yang lebih besar terhadap infrastruktur irigasi |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Jaringan Irigasi/Pengairan di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Pendataan |
| Ukuran | Panjang |
| Satuan | meter |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Panjang Saluran Irigasi Primer

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Saluran Irigasi Primer adalah Bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/ primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapanya. |
| Unit Penyelenggara | DPUPR |
| Kelompok Indikator | Aspek Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Interpretasi | Peningkatan panjang saluran irigasi primer dapat menunjukkan adanya perluasan wilayah yang diirigasi. Ini bisa mengindikasikan upaya untuk memperluas jangkauan irigasi ke area baru yang sebelumnya tidak teraliri air. Perluasan ini dapat didorong oleh pertumbuhan pertanian, pengembangan lahan, atau kebutuhan air yang meningkat di daerah tersebut |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Jaringan Irigasi/Pengairan di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Pendataan |
| Ukuran | Panjang |
| Satuan | meter |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Panjang Saluran Irigasi Primer Kondisi Baik

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Panjang Saluran Irigasi Primer Kondisi Baik adalah Jarak total saluran utama yang digunakan untuk mengalirkan air irigasi dari sumber air utama ke area pertanian yang membutuhkan irigasi dan berada dalam kondisi fisik yang optimal dan berfungsi dengan baik. |
| Unit Penyelenggara | DPUPR |
| Kelompok Indikator | Aspek Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Interpretasi | Jika panjang saluran irigasi primer dalam kondisi baik meningkat, hal ini bisa menunjukkan adanya peningkatan investasi dan upaya dalam pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur irigasi. Mungkin telah dilakukan alokasi dana dan sumber daya yang lebih besar untuk memperbaiki dan memelihara saluran irigasi primer agar tetap dalam kondisi baik. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Jaringan Irigasi/Pengairan di Kabupaten Purbalingga |
| Periodisasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Pendataan |
| Ukuran | Panjang |
| Satuan | meter |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Panjang Saluran Irigasi Primer Kondisi Sedang

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Panjang Saluran Irigasi Primer Kondisi Sedang adalah Jarak total saluran utama yang mengalami beberapa masalah atau kendala yang mempengaruhi kinerja saluran, namun masih memungkinkan untuk mengalirkan air irigasi dengan tingkat efisiensi yang dapat diterima. |
| Unit Penyelenggara | DPUPR |
| Kelompok Indikator | Aspek Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Interpretasi | Peningkatan panjang saluran irigasi primer yang sedang dalam kondisi baik dapat menunjukkan adanya investasi yang lebih besar dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur irigasi. Pemerintah atau pihak terkait mungkin telah mengalokasikan sumber daya dan dana yang cukup untuk memperluas atau memperbaiki saluran irigasi primer yang ada. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Jaringan Irigasi/Pengairan di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Pendataan |
| Ukuran | Panjang |
| Satuan | meter |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Panjang Saluran Irigasi Primer Kondisi Rusak Ringan

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Panjang Saluran Irigasi Primer Kondisi Rusak Ringan adalah Jarak total saluran utama yang mengalami kerusakan minor atau masalah kecil yang mempengaruhi kinerja saluran, tetapi masih memungkinkan untuk mengalirkan air irigasi secara efektif. |
| Unit Penyelenggara | DPUPR |
| Kelompok Indikator | Aspek Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Interpretasi | Peningkatan panjang saluran irigasi primer yang kondisinya ringan juga dapat menunjukkan adanya fokus yang lebih besar pada pencegahan kerusakan lebih lanjut. Dengan mengidentifikasi kerusakan ringan pada saluran irigasi, tindakan pencegahan seperti perbaikan rutin dan perawatan yang ditingkatkan dapat dilakukan untuk mencegah kerusakan yang lebih serius di masa depan. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Jaringan Irigasi/Pengairan di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Pendataan |
| Ukuran | Panjang |
| Satuan | meter |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Panjang Saluran Irigasi Primer Kondisi Rusak Berat

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Panjang Saluran Irigasi Primer Kondisi Rusak Berat adalah Jarak total saluran irigasi utama yang mengalami kerusakan serius atau masalah signifikan yang menghambat atau bahkan menghalangi aliran air irigasi secara efektif.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

DPUPR
Aspek Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Interpretasi

Peningkatan panjang saluran irigasi primer yang kondisinya rusak berat merupakan indikasi dari masalah perawatan dan pemeliharaan yang kurang, dampak bencana alam, ketidakseimbangan investasi infrastruktur, atau meningkatnya kebutuhan perbaikan.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jaringan Irigasi/Pengairan di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Pendataan

Ukuran

Panjang

Satuan

meter

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Panjang Saluran Irigasi Sekunder

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|--|---|
| Konsep dan Definisi | Saluran Irigasi Sekunder adalah Jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnnya DPUPR |
| Unit Penyelenggara Kelompok Indikator | Aspek Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Interpretasi | Peningkatan panjang saluran irigasi sekunder dapat menunjukkan adanya perluasan cakupan irigasi. Saluran irigasi sekunder biasanya bertanggung jawab untuk mendistribusikan air irigasi dari saluran primer ke lahan pertanian yang lebih kecil |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Jaringan Irigasi/Pengairan di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Pendataan |
| Ukuran | Panjang |
| Satuan | meter |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Saluran Irigasi Sekunder Kondisi Baik

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Saluran Irigasi Sekunder Kondisi Baik adalah Saluran irigasi yang berfungsi dengan baik dan mampu mengalirkan air irigasi secara efisien ke lahan pertanian yang membutuhkan. |
| Unit Penyelenggara | DPUPR |
| Kelompok Indikator | Aspek Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Interpretasi | Peningkatan panjang saluran irigasi sekunder dengan kondisi baik mencerminkan peningkatan efisiensi penggunaan air, peningkatan produktivitas pertanian, keberlanjutan sistem irigasi, dan investasi dalam perawatan dan pemeliharaan |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Jaringan Irigasi/Pengairan di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Pendataan |
| Ukuran | Panjang |
| Satuan | meter |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Saluran Irigasi Sekunder Kondisi Sedang

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Saluran Irigasi Sekunder Kondisi Sedang adalah Saluran irigasi sekunder yang masih dapat memberikan air irigasi dengan tingkat efektivitas yang dapat diterima, meskipun dengan beberapa kendala atau kelemahan yang mempengaruhi pengiriman air dan efisiensi sistem.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

DPUPR

Aspek Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Interpretasi

Peningkatan panjang saluran irigasi sekunder dengan kondisi sedang dapat menunjukkan adanya upaya yang lebih baik dalam perawatan dan pemeliharaan saluran tersebut. Mungkin telah dilakukan langkah-langkah untuk memperbaiki kerusakan minor, memperbaiki keretakan atau kebocoran, dan memastikan saluran berfungsi dengan baik. Ini mencerminkan kesadaran akan pentingnya menjaga kondisi saluran irigasi agar tetap layak dan efisien

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jaringan Irigasi/Pengairan di
Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan



■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Pendataan |
| Ukuran | Panjang |
| Satuan | meter |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Saluran Irigasi Sekunder Kondisi Rusak Ringan

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Saluran Irigasi Sekunder Kondisi Rusak Ringan adalah Saluran irigasi yang mengalami kerusakan atau masalah minor yang mempengaruhi kinerja saluran, tetapi masih memungkinkan aliran air irigasi dengan tingkat efisiensi yang dapat diterima. |
| Unit Penyelenggara | DPUPR |
| Kelompok Indikator | Aspek Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Interpretasi | Peningkatan panjang saluran irigasi sekunder dengan kondisi ringan yang meningkat dapat menunjukkan upaya untuk memperbaiki dan memelihara infrastruktur irigasi. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Jaringan Irigasi/Pengairan di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Pendataan |
| Ukuran | Panjang |
| Satuan | meter |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Saluran Irigasi Sekunder Kondisi Rusak Berat

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Saluran Irigasi Sekunder Kondisi Rusak Berat adalah Saluran irigasi yang memiliki kerusakan serius atau masalah yang signifikan yang mempengaruhi kinerjanya secara menyeluruh dan menghambat atau bahkan menghalangi aliran air irigasi dengan efektif. |
| Unit Penyelenggara | DPUPR |
| Kelompok Indikator | Aspek Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Interpretasi | Peningkatan panjang saluran irigasi sekunder dengan kondisi rusak berat mencerminkan masalah perawatan dan pemeliharaan yang kurang, usia pakai saluran irigasi, ketidakseimbangan alokasi dana, atau peningkatan kesadaran akan kondisi saluran irigasi |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Jaringan Irigasi/Pengairan di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Pendataan |
| Ukuran | Panjang |
| Satuan | meter |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Jumlah Bangunan Irigasi

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Bangunan Irigasi adalah Bangunan yang berfungsi untuk membagi air irigasi dari satu saluran kedalam dua atau lebih saluran. Contohnya pada saluran dari bendung dibawa oleh saluran primer, kemudian terdapat bangunan bagi yang membagi saluran tersebut menjadi saluran sekunder kanan dan saluran sekunder kiri. Kondisi bangunan Irigasi hanya membagi saluran kedalam satu saluran sekunder, sedangkan saluran pada lengan yang lain tetap merupakan sebagai saluran primer

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

DPUPR
Aspek Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Interpretasi

Peningkatan jumlah bangunan irigasi mencerminkan upaya untuk meningkatkan akses, efisiensi, dan ketersediaan air irigasi. Hal ini dapat berdampak positif pada produktivitas pertanian, keberlanjutan penggunaan air, dan kemandirian petani.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jaringan Irigasi/Pengairan di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan



■ **METODOLOGI**

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Pendataan |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | unit |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Jumlah Bendung

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Bendung adalah Bangunan yang dibangun melintang sungai sehingga dapat membelokkan air menuju jaringan irigasi. Adanya bendung akan membentuk genangan pada hulu bangunan, selain itu bendung juga dapat berfungsi sebagai penghalang banjir DPUPR

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Aspek Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Interpretasi

Peningkatan jumlah bendung dapat menunjukkan adanya upaya yang lebih baik dalam pengelolaan sumber daya air. Bendung berfungsi untuk mengatur aliran air sungai, mengendalikan banjir, menyimpan air untuk penggunaan irigasi atau kebutuhan domestik, dan memastikan ketersediaan air yang lebih stabil. Dengan peningkatan jumlah bendung, pengelolaan sumber daya air dapat menjadi lebih efisien dan terarah.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jaringan Irigasi/Pengairan di Kabupaten Purbalingga

Periododesasi

Tahunan



■ **METODOLOGI**

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Pendataan |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | unit |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Luas Sawah Beririgasi Teknis

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Luas Sawah Beririgasi Teknis adalah Luas sawah yang memiliki saluran masuk dan keluar terpisah agar penyediaan dan pembagian air irigasi dapat sepenuhnya diatur dengan mudah |
| Unit Penyelenggara | DPUPR |
| Kelompok Indikator | Aspek Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Interpretasi | Jika luas sawah beririgasi teknis meningkat, ini bisa menunjukkan adanya peningkatan dalam efisiensi penggunaan air. Irigasi teknis umumnya lebih efisien dalam mengalokasikan dan mengirimkan air ke sawah dengan cara yang optimal. Hal ini dapat mengurangi kebocoran atau pemborosan air, sehingga petani dapat menggunakan sumber daya air dengan lebih efektif dan meminimalkan kebutuhan air tambahan. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Jaringan Irigasi/Pengairan di Kabupaten Purbalingga |
| Periododesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Pendataan |
| Ukuran | Luas |
| Satuan | ha |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Luas Sawah Beririgasi Non Teknis

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Luas Sawah Beririgasi Non Teknis adalah Luas sawah yang memperoleh pengairan jaringan irigasinya masih sederhana dan saluran pemberi terpisah dari saluran pembuang agar penyediaan dan pembagian irigasi dapat sepenuhnya diatur dengan mudah. |
| Unit Penyelenggara | DPUPR |
| Kelompok Indikator | Aspek Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Interpretasi | Jumlah luas sawah beririgasi non teknis yang meningkat dapat mencerminkan peningkatan jumlah petani dengan sumber daya terbatas yang mengandalkan metode irigasi yang sederhana. Hal ini bisa terjadi di daerah pedesaan di mana petani mungkin memiliki keterbatasan akses terhadap teknologi modern atau infrastruktur irigasi yang lebih canggih. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Jaringan Irigasi/Pengairan di Kabupaten Purbalingga |
| Periododesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Pendataan |
| Ukuran | Luas |
| Satuan | ha |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Luas Daerah Irigasi

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Luas Daerah Irigasi adalah Luas daerah irigasi yang bangunan pengambilan dan bangunan bagi/sadap dilengkapi dengan alat pengatur pembagian air dan alat ukur, sehingga air air irigasi yang dialirkan dapat diatur dan diukur |
| Unit Penyelenggara | DPUPR |
| Kelompok Indikator | Aspek Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Interpretasi | Peningkatan luas daerah irigasi juga dapat menunjukkan adanya pengembangan infrastruktur irigasi yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga terkait. Ini bisa termasuk pembangunan atau perluasan saluran irigasi, pembuatan waduk atau bendungan, atau peningkatan sumber daya air untuk memperluas cakupan daerah yang dapat di irigasi |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Jaringan Irigasi/Pengairan di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Pendataan |
| Ukuran | Luas |
| Satuan | ha |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Luas Daerah Irigasi yang Terlayani Jaringan Irigasi

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Luas Daerah Irigasi yang Terlayani Jaringan Irigasi adalah Luas lahan sawah fungsional yang merupakan bagian dari luas potensial yang telah dilayani dengan jaringan jaringan irigasi tersier sehingga jaringan irigasi yang sudah ada berfungsi untuk mengairi lahan sawah yang masuk dalam wilayah pelayanan

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

DPUPR
Aspek Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Interpretasi

Jika luas daerah irigasi yang terlayani jaringan irigasi meningkat maka mengindikasikan peningkatan dalam upaya pengembangan dan perluasan jaringan irigasi untuk mencakup lebih banyak lahan pertanian atau kebutuhan air yang lebih besar.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jaringan Irigasi/Pengairan di Kabupaten Purbalingga Tahunan

Periodesasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Pendataan

Ukuran

Luas

Satuan

ha

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum

Ya



Cakupan Daerah Irigasi yang Terlayani Jaringan Irigasi

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Cakupan Daerah Irigasi yang Terlayani Jaringan Irigasi adalah Perbandingan luas daerah irigasi yang terlayani jaringan irigasi dengan luas daerah irigasi |
| Unit Penyelenggara | DPUPR |
| Kelompok Indikator | Aspek Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Interpretasi | Peningkatan persentase cakupan daerah irigasi yang terlayani oleh jaringan irigasi menunjukkan adanya peningkatan akses petani terhadap air irigasi. Ini bisa disebabkan oleh perluasan atau pengembangan jaringan irigasi, peningkatan investasi dalam infrastruktur irigasi, atau upaya perbaikan dan rehabilitasi saluran irigasi yang ada |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Jaringan Irigasi/Pengairan di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|---------------------------|---------------------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | $\frac{LDIT}{LDI} \times 100\%$ |
|---------------------------|---------------------------------|

Keterangan:

LDIT = Luas Daerah Irigasi yang terlayani jaringan irigasi

LDI = Luas Daerah Irigasi

Persentase

Ukuran

Satuan

%

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Persentase Luas Oncoran Air Irigasi

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Persentase Luas Oncoran Air Irigasi adalah Perbandingan cakupan air dengan luas area irigasi kewenangan Kabupaten |
| Unit Penyelenggara | DPUPR |
| Kelompok Indikator | Aspek Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Interpretasi | Peningkatan persentase luas oncoran air irigasi bisa menunjukkan adanya peningkatan dalam pembangunan atau perbaikan infrastruktur irigasi. Ini bisa termasuk perluasan jaringan saluran irigasi, peningkatan kapasitas waduk atau bendungan, atau peningkatan sumber daya air yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan irigasi. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Jaringan Irigasi/Pengairan di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--|
| Metode/Rumus | $\frac{\text{Cakupan Air}}{\text{Luas Area Irigasi Kabupaten}} \times 100\%$ |
| Penghitungan | |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | % |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Jumlah Sertifikasi Hasil Uji (SHU)

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Sertifikasi Hasil Uji (SHU) adalah Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi untuk memastikan bahwa tenaga kerja di industri konstruksi memiliki kompetensi dan pengetahuan yang memadai untuk menjalankan tugas-tugas mereka dengan baik dan aman. |
| Unit Penyelenggara | DPUPR |
| Kelompok Indikator | Aspek Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Interpretasi | Jumlah SHU yang tinggi dapat menunjukkan adanya tingkat kesadaran yang tinggi di kalangan tenaga kerja konstruksi akan pentingnya sertifikasi dan kemauan mereka untuk mengikuti pelatihan yang sesuai |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Pengelolaan Jasa Konstruksi di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Pendataan |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | peserta |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi di Kelurahan dan Desa

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Tenaga Kerja Konstruksi di Kelurahan dan Desa adalah Tenaga terampil konstruksi yang memiliki keterampilan dan keahlian di bidang konstruksi dan bekerja di tingkat desa atau kelurahan |
| Unit Penyelenggara | DPUPR |
| Kelompok Indikator | Aspek Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Interpretasi | Jumlah tenaga kerja konstruksi yang tinggi di daerah dapat mengindikasikan adanya potensi pengembangan dan pertumbuhan di wilayah tersebut. Ini bisa berarti bahwa ada kebutuhan untuk membangun lebih banyak rumah, gedung, atau infrastruktur lainnya untuk mengakomodasi pertumbuhan populasi atau meningkatkan fasilitas publik. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Pengelolaan Jasa Konstruksi di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | 1 desa/kel = 1 orang |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | desa/kel |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Pelaku Jasa Konstruksi

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Pelaku Jasa Konstruksi adalah Jumlah badan usaha terdata yang bergerak dalam industri konstruksi dan menyediakan berbagai jenis layanan terkait pembangunan, perbaikan, atau pengembangan proyek konstruksi

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

DPUPR
Aspek Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Interpretasi

Jika jumlah pelaku jasa konstruksi meningkat, hal ini dapat menunjukkan adanya pertumbuhan atau ekspansi industri konstruksi di suatu wilayah atau negara

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Pengelolaan Jasa Konstruksi di Kabupaten Purbalingga

Periodisasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Pendataan

Ukuran

Jumlah

Satuan

badan usaha

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Jasa Konstruksi yang Terbina

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Jasa Konstruksi yang Terbina adalah Asosiasi jasa konstruksi yang terdata. Asosiasi jasa konstruksi adalah organisasi berbadan hukum yang mewadahi perkumpulan badan usaha dan atau individu profesional yang bergerak di dunia jasa konstruksi. |
| Unit Penyelenggara | DPUPR |
| Kelompok Indikator | Aspek Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Interpretasi | Peningkatan jumlah jasa konstruksi yang terbina dapat menunjukkan adanya peningkatan kapasitas industri konstruksi. Ini berarti bahwa lebih banyak perusahaan atau penyedia jasa konstruksi telah memenuhi persyaratan dan standar yang diperlukan untuk beroperasi secara legal dan profesional |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Pengelolaan Jasa Konstruksi di Kabupaten Purbalingga |
| Periodisasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Pendataan |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | asosiasi |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Persentase Jasa Konstruksi yang Terbina

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Persentase Jasa Konstruksi yang Terbina adalah Perbandingan jumlah pelaku jasa konstruksi yang terbina dengan kebutuhan |
| Unit Penyelenggara | DPUPR |
| Kelompok Indikator | Aspek Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Interpretasi | Jika persentase jasa konstruksi yang terbina meningkat, hal ini dapat mengindikasikan adanya peningkatan kualitas pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia jasa konstruksi. Pelatihan, sertifikasi, atau pembinaan yang diperlukan untuk mendapatkan status "terbina" dapat membantu memperbaiki keterampilan, keahlian, dan profesionalisme para pekerja konstruksi |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Pengelolaan Jasa Konstruksi di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|---------------------------|--|
| Metode/Rumus Penghitungan | $\frac{\text{Jumlah Pelaku Jasa Konstruksi yang terbina}}{\text{Jumlah Kebutuhan}} \times 100\%$ |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | % |
| Apakah Indikator | Ya |
| Dapat Diakses Umum | |



Jumlah bangunan gedung memiliki sertifikat laik fungsi

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Sertifikat laik fungsi adalah Sertifikat yang diberikan oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat untuk menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung sebelum bangunan gedung tersebut dimanfaatkan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

DPUPR
Aspek Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Interpretasi

Peningkatan jumlah bangunan dengan sertifikat laik fungsi menunjukkan adanya peningkatan dalam pemenuhan standar dan kualitas bangunan

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Bangunan Gedung di Kabupaten Purbalingga

Periododesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Pendataan

Ukuran

Jumlah

Satuan

unit

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah bangunan gedung tidak memiliki sertifikat laik fungsi

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Sertifikat laik fungsi adalah Sertifikat yang diberikan oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat untuk menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung sebelum bangunan gedung tersebut dimanfaatkan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

DPUPR
Aspek Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Interpretasi

Jika jumlah bangunan gedung tanpa sertifikat laik fungsi meningkat, hal ini dapat menunjukkan adanya masalah struktural atau teknis dalam bangunan tersebut. Sertifikat laik fungsi biasanya mencakup penilaian struktur bangunan, sistem utilitas, kesesuaian fungsi, dan kepatuhan terhadap standar keamanan. Jika bangunan tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikat tersebut, ini bisa mengindikasikan kekurangan dalam desain, konstruksi, atau pemeliharaan bangunan.



■ DATA

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Data yang Dikumpulkan | Kondisi Bangunan Gedung di |
| Periodesasi | Kabupaten Purbalingga Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Pendataan |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | unit |
| Apakah Indikator Dapat Diakses | Ya |
| Umum | |



Jumlah bangunan pemerintah dalam kondisi baik

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Bangunan pemerintah dalam kondisi baik adalah Bangunan gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik daerah dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana APBN, dan/atau APBD, atau perolehan lainnya yang sah yang kondisinya baik (bangunan OPD, Kecamatan, Kelurahan) |
| Unit Penyelenggara | DPUPR |
| Kelompok Indikator | Aspek Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Interpretasi | Jika jumlah bangunan pemerintah dalam kondisi baik meningkat, ini bisa mengindikasikan adanya peningkatan dalam upaya perawatan dan pemeliharaan bangunan oleh pemerintah. Ini bisa mencakup perbaikan rutin, pembaruan infrastruktur, dan penggantian komponen yang rusak. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Kondisi Bangunan Gedung di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Pendataan |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | unit |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Jumlah bangunan pemerintah keseluruhan

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Bangunan pemerintah adalah Bangunan gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik daerah dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana APBN, dan/atau APBD, atau perolehan lainnya yang sah |
| Unit Penyelenggara | DPUPR |
| Kelompok Indikator | Aspek Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Interpretasi | Peningkatan jumlah bangunan pemerintah keseluruhan juga bisa mencerminkan adanya upaya untuk meningkatkan infrastruktur publik. Pemerintah dapat membangun gedung-gedung pemerintahan baru, pusat layanan publik, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan sejenisnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Kondisi Bangunan Gedung di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Pendataan |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | unit |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Cakupan bangunan pemerintah dalam kondisi baik

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Cakupan bangunan pemerintah dalam kondisi baik adalah Perbandingan jumlah bangunan pemerintah dalam kondisi baik dengan jumlah bangunan pemerintah keseluruhan |
| Unit Penyelenggara | DPUPR |
| Kelompok Indikator | Aspek Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Interpretasi | Peningkatan cakupan bangunan pemerintah dalam kondisi baik menunjukkan adanya perhatian dan investasi yang lebih besar dalam memastikan infrastruktur pemerintah yang memadai. Hal ini penting untuk meningkatkan pelayanan publik, kualitas hidup masyarakat, serta membangun kepercayaan dan hubungan yang positif antara pemerintah dan masyarakat. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Kondisi Bangunan Gedung di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | $\frac{JBB}{JB} \times 100\%$ |
|---------------------------|-------------------------------|

Keterangan:

JBB = Jumlah Bangunan Pemerintah Dalam Kondisi Baik

JB = Jumlah Bangunan Pemerintah



Ukuran

Satuan

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum

Keseluruhan

Persentase

%

Ya



Jumlah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jumlah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah Jumlah dokumen perencanaan yang telah disusun oleh pemerintah daerah untuk mengatur tata ruang wilayah di suatu wilayah atau daerah tertentu. RTRW merupakan instrumen penting dalam perencanaan pembangunan yang bertujuan untuk mengatur pemanfaatan lahan dan ruang secara terencana, berkelanjutan, serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam dan lingkungan DPUPR

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Aspek Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Interpretasi

Jumlah RTRW mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah telah melakukan perencanaan tata ruang wilayahnya. Semakin banyak RTRW yang telah disusun, semakin komprehensif dan terperinci perencanaan tata ruang wilayah yang dilakukan.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan



■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Perhitungan manual |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | dokumen |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Jumlah Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Jumlah Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) adalah Banyaknya rencana rinci untuk rencana tata ruang wilayah Kabupaten. RDTR merupakan instrumen perencanaan yang lebih rinci dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). |
| Unit Penyelenggara | DPUPR |
| Kelompok Indikator | Aspek Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Interpretasi | Jumlah RDTR yang ada mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah telah melakukan perencanaan tata ruang secara detail di berbagai wilayah. Semakin banyak RDTR yang telah disusun, semakin mendalam dan terperinci perencanaan tata ruang di setiap kawasan. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Kondisi Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Perhitungan manual |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | dokumen |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Jumlah Permohonan Kesesuaian Tata Ruang

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Jumlah Permohonan Kesesuaian Tata Ruang adalah Jumlah permohonan kesesuaian lokasi lahan/ruang yang diajukan oleh masyarakat/ instansi kepada instansi yang menangani penataan ruang kabupaten |
| Unit Penyelenggara | DPUPR |
| Kelompok Indikator | Aspek Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Interpretasi | Peningkatan jumlah permohonan kesesuaian tata ruang dapat menunjukkan adanya peningkatan kesadaran dan pemahaman dari pemohon terkait pentingnya memastikan kesesuaian rencana penggunaan lahan mereka dengan rencana tata ruang yang berlaku. Hal ini dapat mencerminkan upaya dari pemohon untuk mematuhi peraturan dan prosedur yang berlaku. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Kondisi Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Purbalingga |
| Periododesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Perhitungan manual |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | dokumen |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Jumlah Rekomendasi TKPRD

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jumlah Rekomendasi TKPRD (Tim Koordinasi Pengendalian Ruang Daerah) adalah Jumlah rekomendasi kesesuaian tata ruang yang dikeluarkan oleh Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah sesuai dengan perbup nomor 650/404 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah, Sekretariat Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah, dan Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang Serta Kelompok Kerja Pemanfaatan Ruang Dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kabupaten Purbalingga

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

DPUPR
Aspek Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Interpretasi

Adanya peningkatan dalam jumlah permohonan yang diajukan kepada TKPRD untuk mendapatkan rekomendasi terkait pengendalian tata ruang di suatu wilayah dapat mengindikasikan peningkatan aktivitas perencanaan dan pengendalian tata ruang yang memerlukan pertimbangan dan rekomendasi dari TKPRD.



■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Perencanaan Tata Ruang
dan Pemanfaatan Ruang di
Kabupaten Purbalingga
Tahunan

Periodesasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

dokumen

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Rekomendasi TKPRD Sesuai

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jumlah Rekomendasi TKPRD Sesuai adalah Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan oleh Tim Koordinasi Pengendalian Ruang Daerah (TKPRD) yang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. TKPRD biasanya terdiri dari berbagai pihak terkait, seperti pemerintah daerah, lembaga terkait, ahli tata ruang, dan masyarakat terkait. Mereka bertanggung jawab untuk memantau penggunaan ruang aktual dan memastikan kesesuaian dengan rencana tata ruang yang ada.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

DPUPR
Aspek Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Interpretasi

Peningkatan jumlah rekomendasi TKPRD yang sesuai menunjukkan adanya peningkatan dalam kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan tata ruang yang telah ditetapkan. Hal ini menandakan bahwa penggunaan lahan aktual telah mematuhi persyaratan, batasan, dan pedoman yang terkait dengan tata ruang. Peningkatan ini dapat mengindikasikan adanya kesadaran yang lebih besar dan kepatuhan yang lebih baik terhadap regulasi tata ruang.



■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Perencanaan Tata Ruang
dan Pemanfaatan Ruang di
Kabupaten Purbalingga
Tahunan

Periodesasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

dokumen

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Rekomendasi TKPRD Tidak Sesuai

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jumlah Rekomendasi TKPRD Tidak Sesuai adalah Jumlah rekomendasi yang diberikan oleh Tim Koordinasi Pengendalian Ruang Daerah yang tidak sesuai dengan peraturan atau persyaratan yang berlaku dalam pengendalian tata ruang di suatu daerah. TKPRD merupakan tim yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan rekomendasi terkait pengendalian tata ruang, penataan ruang, serta pemanfaatan lahan dalam suatu wilayah

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

DPUPR
Aspek Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Interpretasi

Peningkatan jumlah rekomendasi TKPRD yang tidak sesuai dapat mengindikasikan adanya ketidakpatuhan terhadap regulasi tata ruang yang telah ditetapkan. Rekomendasi TKPRD diberikan ketika penggunaan ruang aktual tidak sejalan dengan rencana tata ruang yang telah disusun. Peningkatan jumlah rekomendasi semacam itu menunjukkan bahwa ada lebih banyak kasus pelanggaran atau ketidaksesuaian yang terdeteksi dalam penggunaan ruang.



■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Perencanaan Tata Ruang
dan Pemanfaatan Ruang di
Kabupaten Purbalingga
Tahunan

Periodesasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

dokumen

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Informasi Tata Ruang (ITR)

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Jumlah Informasi Tata Ruang (ITR) adalah Jumlah informasi kesesuaian tata ruang berdasarkan rencana pola ruang yang tertuang dalam dokumen tata ruang |
| Unit Penyelenggara | DPUPR |
| Kelompok Indikator | Aspek Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Interpretasi | Jumlah ITR mencerminkan sejauh mana data dan informasi terkait tata ruang wilayah telah dikumpulkan dan tersedia. Semakin banyak informasi yang telah dihimpun, semakin lengkap dan komprehensif pengetahuan tentang tata ruang dan wilayah. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Kondisi Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Purbalingga |
| Periodisasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Pendataan |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | dokumen |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Jumlah Informasi Tata Ruang (ITR) Sesuai

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Jumlah Informasi Tata Ruang (ITR) Sesuai adalah Jumlah informasi yang ada dalam tata ruang yang dihasilkan sesuai dengan peraturan, regulasi, atau ketentuan yang berlaku dalam perencanaan tata ruang |
| Unit Penyelenggara | DPUPR |
| Kelompok Indikator | Aspek Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Interpretasi | Jika ITR sesuai, ini menunjukkan bahwa terdapat jumlah informasi tata ruang yang cukup dan memadai tentang wilayah atau area geografis yang relevan. Informasi ini mencakup data spasial yang diperlukan untuk memahami dan menganalisis elemen-elemen tata ruang seperti pemetaan tanah, penggunaan lahan, infrastruktur, dan aspek-aspek lain yang terkait |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Kondisi Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Pendataan |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | dokumen |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Jumlah Informasi Tata Ruang (ITR) Tidak Sesuai

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Jumlah Informasi Tata Ruang (ITR) Tidak Sesuai adalah Jumlah informasi yang tersedia dalam konteks tata ruang yang tidak sesuai dengan yang diharapkan atau dibutuhkan |
| Unit Penyelenggara | DPUPR |
| Kelompok Indikator | Aspek Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Interpretasi | Jumlah ITR yang tidak sesuai dapat menunjukkan bahwa terdapat kekurangan informasi yang relevan atau penting dalam konteks tata ruang. Informasi yang diperlukan mungkin tidak lengkap atau tidak mencakup semua aspek yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan atau perencanaan yang efektif dalam pengaturan tata ruang. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Kondisi Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Purbalingga |
| Periododesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Pendataan |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | dokumen |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Jumlah Informasi Tata Ruang (ITR) ITR WIUP

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Jumlah Informasi Tata Ruang (ITR) ITR WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan) adalah Banyaknya informasi dan data yang tersedia terkait tata ruang wilayah di suatu lokasi yang telah diizinkan untuk kegiatan pertambangan. |
| Unit Penyelenggara | DPUPR |
| Kelompok Indikator | Aspek Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Interpretasi | Peningkatan jumlah ITR WIUP menunjukkan adanya peningkatan dalam pengawasan dan pemantauan aktivitas pertambangan di wilayah yang memiliki Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Kondisi Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Pendataan |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | dokumen |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Ketaatan pelaksanaan penataan ruang

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Ketaatan pelaksanaan penataan ruang adalah Perbandingan realisasi pemanfaatan ruang dengan rencana peruntukan (pola ruang) |
| Unit Penyelenggara | DPUPR |
| Kelompok Indikator | Aspek Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Interpretasi | Jika ketaatan pelaksanaan penataan ruang tinggi, ini menunjukkan bahwa para pelaku, baik pemerintah maupun pihak swasta, secara umum mematuhi peraturan dan keputusan penataan ruang yang ada. Mereka mematuhi batasan penggunaan lahan, rencana tata ruang, dan regulasi lainnya yang ditetapkan untuk memastikan pembangunan yang teratur, berkelanjutan, dan sesuai dengan tujuan pembangunan yang ditetapkan. Ketaatan yang tinggi dapat menghasilkan keberlanjutan lingkungan, penggunaan lahan yang optimal, dan mencegah konflik kepentingan yang merugikan. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Kondisi Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |



■ **METODOLOGI**

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{RPR}{RP} \times 100\%$$

Keterangan:

RPR = Realisasi pemanfaatan ruang
(jumlah permohonan kesesuaian
pemanfaatan ruang)

RP = Rencana peruntukan (jumlah
total permohonan kesesuaian
pemanfaatan ruang)

Ukuran

Persentase

Satuan

%

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Persentase pertimbangan teknis pemanfaatan ruang sesuai peruntukan

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Persentase pertimbangan teknis pemanfaatan ruang sesuai peruntukan adalah Perbandingan jumlah informasi tata ruang yang diterbitkan dengan jumlah informasi yang dimohonkan |
| Unit Penyelenggara | DPUPR |
| Kelompok Indikator | Aspek Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Interpretasi | Jika persentase pertimbangan teknis pemanfaatan ruang sesuai peruntukan tinggi, ini menunjukkan bahwa sebagian besar ruang atau lahan digunakan sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Kondisi Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | $\frac{JIRTR}{JIM} \times 100\%$ |
|---------------------------|----------------------------------|

Keterangan:

JIRTR = Jumlah informasi tata ruang yang diterbitkan

JIM = Jumlah informasi yang



| | |
|--------------------------------|------------|
| Ukuran | dimohonkan |
| Satuan | Persentase |
| Apakah Indikator Dapat Diakses | % |
| Umum | Ya |



Persentase peningkatan bangunan pemerintah dalam kondisi baik

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Persentase peningkatan bangunan pemerintah dalam kondisi baik adalah Peningkatan persentase cakupan bangunan pemerintah dalam kondisi baik dari tahun ke tahun |
| Unit Penyelenggara | DPUPR |
| Kelompok Indikator | Aspek Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Interpretasi | Jika persentase peningkatan tersebut positif, artinya jumlah bangunan pemerintah yang berada dalam kondisi baik mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah telah berhasil melakukan upaya perbaikan dan pemeliharaan bangunan sehingga kondisi bangunan menjadi lebih baik dari sebelumnya. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Indeks Daya Saing Infrastruktur di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|---|
| Metode/Rumus Penghitungan | Cakupan bangunan pemerintah dalam kondisi baik tahun n - Cakupan bangunan pemerintah dalam kondisi baik tahun $(n-1)$ |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | % |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Indeks Jalan Mantap (Persentase panjang jalan kondisi baik dan sedang)

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Indeks Jalan Mantap (Persentase panjang jalan kondisi baik dan sedang) adalah Perbandingan antara panjang jalan kondisi baik dan sedang dengan panjang jalan kabupaten dengan perhitungan satuan Internasional Roughness Indeks (IRI) |
| Unit Penyelenggara | DPUPR |
| Kelompok Indikator | Aspek Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Interpretasi | Jika sebuah daerah memiliki indeks jalan mantap yang tinggi, itu menunjukkan bahwa jalan-jalan di daerah tersebut umumnya dalam kondisi baik dan memadai. Permukaan jalan yang halus, bebas lubang, dan minim retakan dapat meningkatkan kenyamanan dan keamanan bagi pengguna jalan. Struktur jalan yang kokoh dan terawat juga penting agar jalan dapat bertahan dalam jangka panjang dan dapat menampung lalu lintas yang berat. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Indeks Daya Saing Infrastruktur di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |



■ **METODOLOGI**

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{JBS}{JK} \times 100\%$$

Keterangan:

JBS = Panjang Jalan Kondisi Baik dan Sedang

JK = Panjang Jalan Kabupaten

Ukuran

Persentase

Satuan

%

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah adalah Indikator yang memperlihatkan kemandapan infrastruktur dasar daerah yang terdiri atas kualitas jalan, akses air minum, penyehatan lingkungan permukiman dan pemilikan rumah (Rata-rata perhitungan antara indeks jalan mantap dengan rasio konektivitas angkutan jalan) |
| Unit Penyelenggara | DPUPR |
| Kelompok Indikator | Aspek Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Interpretasi | Indeks yang tinggi mengindikasikan daerah tersebut memiliki jaringan transportasi yang baik, termasuk jalan-jalan yang baik dan sistem transportasi publik yang efisien |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Indeks Daya Saing Infrastruktur di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | $\frac{IJM + RK}{2}$ |
|---------------------------|----------------------|

Keterangan :

IJM = Indeks Jalan Mantap

RK = Rasio Konektivitas

Indeks

Tanpa satuan

Ukuran

Satuan

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum

BAGIAN
#1

METADATA INDIKATOR STATISTIK SEKTORAL

KABUPATEN PURBALINGGA

Buku Metadata Indikator Statistik Sektorial berisi sekumpulan atribut informasi dari seluruh data yang ada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Purbalingga.

Buku ini dibagi menjadi 3 bagian. Pada bagian pertama, terdiri dari metadata indikator dari Sekretariat DPRD, Inspektorat, Bappelitbangda, Bakeuda, BKPSDM, Badan Kesbangpol, BPBD, Dindikbud, Dinkes dan DPUPR.

Buku ini diharapkan dapat memberikan gambaran atau dokumentasi dasar terbentuknya suatu indikator dalam upaya memberikan pemahaman dan penggunaan secara tepat dari suatu indikator.



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PURBALINGGA**

Jl. Letkol Isdiman No. 17A,
Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga,
Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah 53313